



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

**RANCANGAN
AKHIR**

RKPD

**KABUPATEN PASURUAN
2022**





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 39



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB I

PENDAHULUAN



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 39 Tahun 2021
TANGGAL : 07 Juli 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Suatu daerah memerlukan konsistensi perencanaan dan penganggaran demi menciptakan pembangunan yang sesuai dengan harapan bersama. Conyer dan Hill dalam Nursini [2010:1] mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang kontinyu (berkesinambungan) dan terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Perencanaan pembangunan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat bisa melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing suatu wilayah atau daerah. Perencanaan pembangunan daerah sendiri didefinisikan Nursini (2010: 4) sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui suatu proses yang sistematis dan bertahap untuk menuju pencapaian visi bersama daerah dalam kurun waktu tertentu. Proses penyusunan perencanaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Pemerintah Daerah setempat untuk disusun setiap tahunnya. RKPD pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Pembangunan, dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD juga bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wilayah terkait. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah



maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen perencanaan yang sangat praktis dan operasional karena isinya lebih banyak diarahkan pada perumusan program dan kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya untuk masing-masing program dan kegiatan. Selain itu, RKPD juga memuat perkiraan kebutuhan dana untuk masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu, wajar kiranya apabila undang-undang menetapkan bahwa RKPD merupakan dasar utama dalam menyusun RAPBD untuk tahun bersangkutan.

Proses penyusunan RKPD tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Artinya, Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan sesuai tahun perencanaan dalam RPJMD dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara



penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan pada tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 digunakan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, program strategis nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 secara implisit tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yang diarahkan pada Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan wilayah. Adapun arah kebijakan yang tertuang merujuk pada rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu yang bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dalam pembangunan.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahanan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 25) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 28) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 - 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 - 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
 - 34) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 2);
 - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
 - 37) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; dan
 - 38) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten



Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan nasional tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

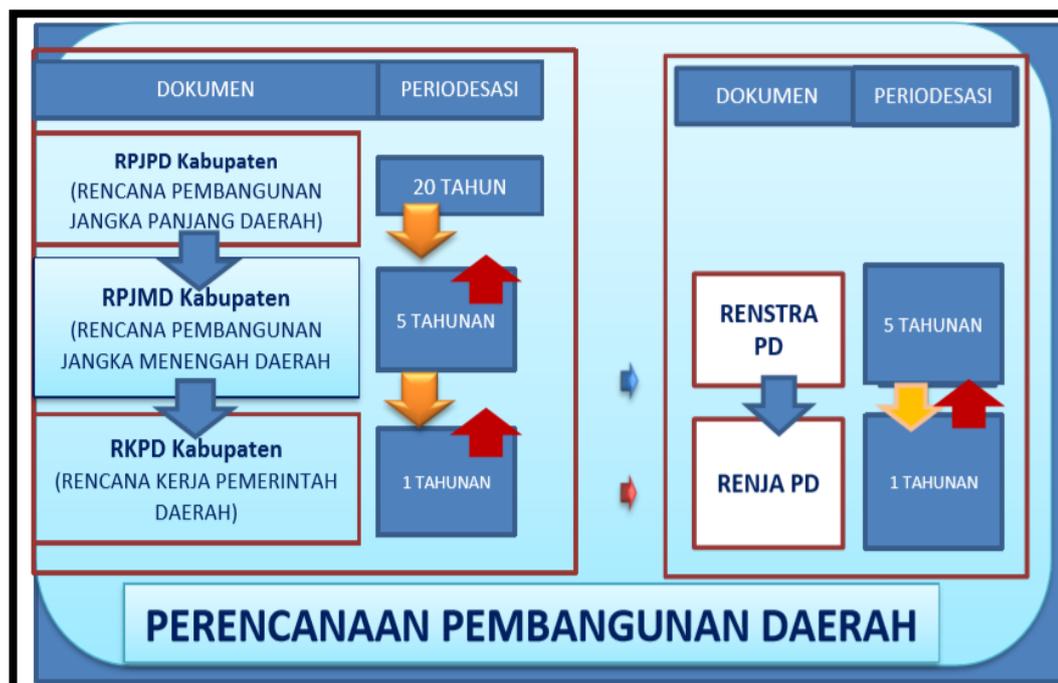
Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. Artinya, RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2022 harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Mengingat, RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja



dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan 2022 juga harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Adapun RKPD kemudian harus bersinergi dengan Renja PD.

RKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tingkat Provinsi terdapat sistem perencanaan yang terdiri dari RPJPD yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen RPJMD Provinsi. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.

RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah disajikan secara terperinci pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Kemendagri, 2018

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pasuruan didukung dengan pemetaan terhadap program dan kegiatan daerah serta juga memperhatikan pembangunan nasional, dan provinsi. Selain itu, maksud penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun



2022 dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- c) Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasuruan;
- d) Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dijadikan pedoman untuk:

- a) Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022;
- b) Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022;
- c) Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2022;
- d) Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional agar target capaian RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, khususnya arah kebijakan pada tahun keempat dapat tercapai;
- e) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penanggaran tahunan pembangunan daerah; dan
- f) Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.



1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, RKP/program strategis nasional, dan RPKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan RPKD Kabupaten Pasuruan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian Ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi

RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten.



Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2022, serta rekapitulasi belanja di setiap Perangkat Daerah.

5.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu.

2.1.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7,30'-8,30' Lintang Selatan dan 112° 30'-113 ° 30' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah 148.610 Ha. Jumlah kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 24 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 365 desa/kelurahan.

Batas administrasi Kabupaten Pasuruan, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang



Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Tabel 2.+-. Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Bangil	4318,87	2,91%
2	Beji	3914,37	2,63%
3	Gempol	6049,72	4,07%
4	Gondang Wetan	2698,73	1,82%
5	Grati	4672,14	3,14%
6	Kejayan	7995,15	5,38%
7	Kraton	5623,31	3,78%
8	Lekok	4767,23	3,21%
9	Lumbang	12275,99	8,26%
10	Nguling	4532,84	3,05%
11	Pandaan	4358,05	2,93%
12	Pasrepan	8341,78	5,61%
13	Pohjentrek	1256,42	0,85%
14	Prigen	13156,24	8,85%
15	Purwodadi	9099,62	6,12%
16	Purwosari	7460,18	5,02%
17	Puspo	7189,01	4,84%
18	Rejoso	3526,88	2,37%
19	Rembang	5718,74	3,85%
20	Sukorejo	5810,90	3,91%
21	Tosari	8160,27	5,49%
22	Tutur	9031,30	6,08%
23	Winongan	4291,60	2,89%
24	Wonorejo	4362,73	2,94%
Jumlah		148612,07	100%

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan 2009-2029



2.1.1.2. Topografi

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0 – 3.313 mdpl yang dirinci per wilayah administrasi kecamatan. Dataran rendah terdapat di bagian utara, tepatnya di Pesisir Selat Madura, dengan ketinggian 0 - 290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, sebagian memiliki kelerengan yang terjal atau curam, sehingga memiliki potensi bencana longsor.

Tabel 2.1. Ketinggian Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Kecamatan	Luas Administrasi (Ha)	Ketinggian (mdpl)
Bangil	4318.9	0-112
Beji	3914.4	0-290
Gempol	6049.7	0-1326
Gondang Wetan	2698.7	0-112
Grati	4672.2	0-290
Kejayan	7995.1	0-290
Kraton	5623.3	0-112
Lekok	4767.2	0-112
Lumbang	12276.0	0-3313
Nguling	4532.9	0-290
Pandaan	4358.1	0-510
Pasrepan	8341.8	0-1326
Pohjantrek	1256.4	0-112
Prigen	13156.3	112-3313
Purwodadi	9099.6	112-3313
Purwosari	7460.2	112-761



Gambar 2.1 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan 2009 - 2029

Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari tiga belas (13) satuan batuan yaitu Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuarter atas penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api arjuno welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuarter tengah ringgit (Qvr), Satuan gunung api kuarter tengger tua (Qpvtr). Secara garis besar jenis batuan yang ada di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan ke dalam :

1. Endapan Permukaan

a. Batuan Alluvium :

1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur
2. Terdiri dari endapan sungai dan endapan pantai. Endapan sungai terhampar di sepanjang daerah aliran Sungai Rejoso sedangkan endapan pantai terhampar disepanjang pantai Selat Madura, sebagian besar berupa pasir kasar-halus dan lepas, setempat banyak tercampur pecahan cangkang cangkang, moluska atau kerang-kerangan dan koral.

b. Batuan Sedimen

➤ Formasi Kabuh:

1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan
2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji.

➤ Formasi Jombang:

1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan
2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan

➤ Formasi Welang:

1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan

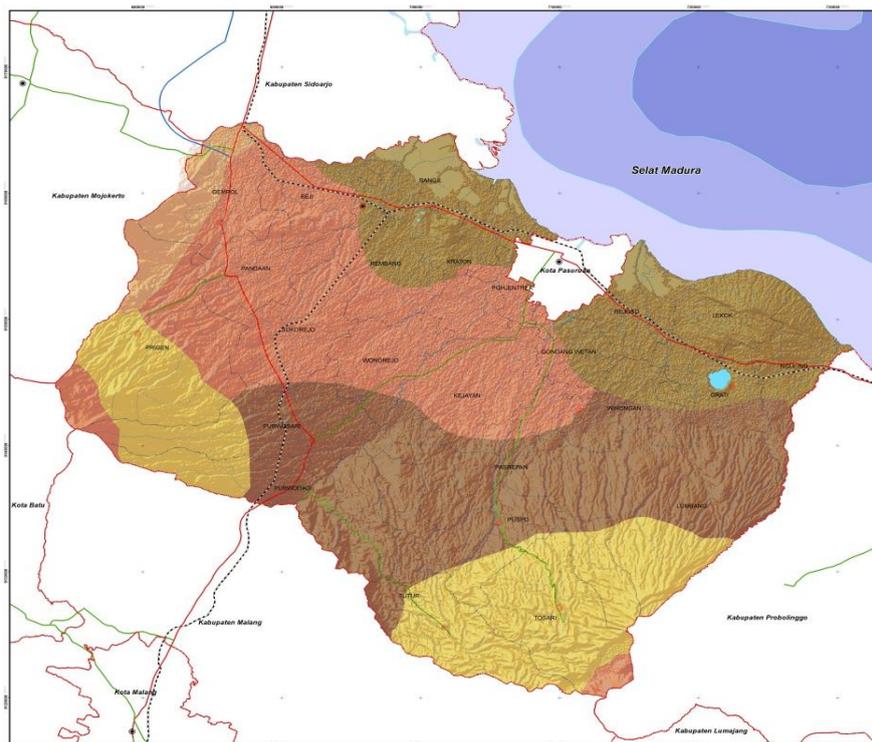


2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang

2. Batuan Gunung Api

- a. **Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis).** Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
- b. **Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit).** Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
- c. **Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang.** Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf.
- d. **Batuan Gunung Api Tengger.** Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
- e. **Tuf Rabano.** Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
- f. **Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan.** Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
- g. **Batuan Gunung Api Bromo:**
 - Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar
 - Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo. Pusat erupsinya berpindah pindah yang saling berdekatan, antara lain pada G. Bromo I (+2392 meter), G. Bromo II (+ 2339 m) dan G. Batok (+ 2440 m). G. bromo dianggap sebagai salah satu gunung api yang masih aktif
- h. **Pasir Gunung Api Tengger:**
 - Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung
 - Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo.

2.1.1.4. Jenis Tanah



Gambar 2.2 Kondisi Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan, 2009 – 2029

Keberagaman jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasuruan karena dipengaruhi oleh faktor litologi dan strukturnya, yaitu mencakup: alluvial, regosol, andosol, grumosol, mediteran dan latosol. Penjelasan jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kelompok besar yaitu :

1. Alluvial

- a. Bahan Induk : alluvial dari aneka macam asal
- b. Sifat dan Corak: warna: kelabu, tekstur: liat, keasaman: aneka, zat organik: kadar lemah, kejenuhan: sedang hingga tinggi, permeabilitas: rendah, kepekaan erosi: tinggi, tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya,
- c. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan.

2. Regosol

- a. Bahan induk: alluvial dari aneka macam asal



- b. Sifat dan Corak: warna: kelabu hingga kuning, tekstur: pasir, kadar liat <40%, keasaman: aneka, zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi,
- c. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu, sayuran

3. Andosol

- a. Bahan induk: abu dan tuf vulkan
- b. Sifat dan Corak: warna: hitam hingga kuning, tekstur: lempung hingga debu, liat menurun, keasaman: agak masam hingga netral, zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar,
- c. Pemakaian: sayuran, bunga-bunga, teh , kopi, hutan pinus.

4. Grumusol

- a. Bahan induk: merjel, liat, tuf vulkan.
- b. Sifat dan Corak: warna: kelabu hingga hitam, tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, keasaman: sedikit asam hingga alkalin, zat organik: kadar rendah, kejenuhan: basa tinggi, permeabilitas: rendah, kepekaan erosi: besar,
- c. pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati.

5. Mediteran

- a. Bahan induk: batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf vulkan basa,
- b. Sifat dan Corak: warna: kuning hingga merah, tekstur: lempung liat, keasaman: agak masam hingga netral, zat organik: rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang,
- c. Pemakaian: padi sawah, tegalan, rumput ternak.

6. Latosol

- a. Bahan induk: tuf vulkan, bahan vulkan,
- b. Sifat dan Corak: warna: merah hingga kuning, tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, keasaman: masam hingga agak masam, zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas, menurun ke bawah, Kejenuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil,



- c. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Pasuruan memiliki 7 sungai yang mengalir, yaitu Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Pasuruan dan bermuara di Selat Madura yaitu:

- Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kalianyar – Kecamatan Bangil

Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar baik berupa air permukaan maupun air tanah, danau atau waduk alami yang cukup besar dan sejumlah mata air. Untuk potensi air tanah akan digambarkan melalui kondisi hidrogeologi. Kondisi hidrologi Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, selain 7 (tujuh) sungai besar yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa sungai-sungai kecil. Dimana sungai-sungai (air permukaan) ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertaniandan perikanan, serta kebutuhan hidup lainnya. Selain potensi sungai , terdapat juga danau dan sejumlah mata air. Secara umum sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang merupakan sungai musiman sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2. Sungai di Kabupaten Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /detik)
1	Sungai Kambeng	7,22	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Sungai Kedunglarangan	13,99	31	17	4,8	0,5 -71,65
3	Sungai Masangan	5,95	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Sungai Raci	6,87	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Sungai Gerongan	6,22	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Sungai Pilang	9,82	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Sungai Welang	40,09	29	23	4,53	0,95 - 95,15
8	Sungai Gembong	8,57	17	13	2,42	0,38 - 137
9	Sungai Petung	14,34	15	12	4,88	0,75 - 73,43
10	Sungai Rejoso	15,72	25	18	4	10,40 - 227,1
11	Sungai Lawean	30,71	11	7		
12	Sungai Kramat	13,61	26	13	5,35	0,70 - 5,75
13	Sungai Pakelan	45,60	16,03	9	1,68	0,74 - 35,52
14	Sungai Rondoningo	24,16	11,6	8,5	1,47	0,30 - 3,34
15	Sungai Pancarglagas	16,06	13	11	2,54	0,42 - 12,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2015

2. Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan terletak di Kecamatan Grati, dikenal dengan nama Ranugrati yang mempunyai volume efektif sebesar 5.013 m³ dan volume maksimum sebesar 5.217 m³, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det.

3. Sumber Air

Sejumlah sumber air yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya sekitar 4.000 l/det, Sumber Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det. Beberapa sumber air yang terdapat di Kabupaten Pasuruan jumlah, serta debitnya seperti tercantum dalam tabel berikut.



Tabel 2.3. Jumlah Sumber Air dan Debit Yang Dapat Dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUMBER	DEBIT TOTAL	
			MINIMUM (I/DET)	MAKSIMUM (I/DET)
1	Prigen	59	510,00	955,01
2	Pandaan	10	305,00	401,01
3	Gempol	12	169,80	275,01
4	Beji	22	205,00	371,01
5	Bangil	3	105,00	130,01
6	Rembang	14	479,00	687,01
7	Sukorejo	13	136,00	295,01
8	Purwosari	24	358,00	684,01
9	Purwodadi	29	211,00	417,01
10	Kraton	1	15,00	30,01
11	Tutur	7	46,00	181,01
Jumlah		194	2.539,80	4.426,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan, 2015

4. Air Tanah

Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuh di daerah puncak dan tubuh Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, serta Gunung Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso. Besarnya aliran air tanah ini sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang dilaluinya, serta penyebaran akuifernya. Oleh karena itu penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana potensi air tanah ini akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya.



Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan kuantitasnya (besarnya aliran air tanah) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Besar (debit > 10 liter/detik), Sedang (debit : 210 liter/detik), dan Kecil (debit < 2 liter/detik). Sedangkan menurut kualitas air tanahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES /SK /VI I/ 2002 (Tabel 9) termasuk kategori baik.

a. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi

Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kec Wonorejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Winongan, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Grati.

b. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang

Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunungapi, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, dan Kecamatan Nguling, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Grati.

c. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah

Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunung api Arjuno-Welirang serta daerah perbukitan bergelombang yang ditutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian wilayah Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Pasrepan.



2.1.1.6. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat). Musim hujan biasanya terjadi mulai bulan November sampai dengan bulan Mei, sedang musim kemarau biasanya mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Temperatur rata-rata berkisar antara 22°C sampai dengan 32°C. Temperatur 22°C terjadi di bulan Juli dan bulan Agustus sedangkan temperatur 32°C umumnya terjadi di bulan April.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan proses panjang pembangunan yang berpengaruh terhadap kerentanan suatu wilayah. Persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pasuruan adalah untuk sawah irigasi, dengan total luasan 38.391,34 Ha, Luas lahan terbangun adalah 17.301,60 Ha (17%) dari luas total Kabupaten Pasuruan. Hutan dan semak belukar yang menjadi variabel nilai kerentanan masing masing memiliki luas 47.415 Ha dan 13.188,88 Ha. Luas hutan sangat berpengaruh pada tingkat resiko bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, karena rusaknya hutan dapat meningkat resiko bencana pada tiga jenis bencana tersebut.

Tabel 2.4. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kab. Pasuruan

NO.	URAIAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS LAHAN (m ²)	(%)
1.	Aneka Industri	14.765.996,387	0,994%
2.	Industri Kecil	344.680,139	0,023%
3.	Jasa, Permukiman	151.082.038,245	10,169%
4.	Peternakan Unggas	306.630,756	0,021%
5.	Tambak	25.195.544,215	1,696%
6.	Sawah Irigasi	389.073.550,587	26,187%



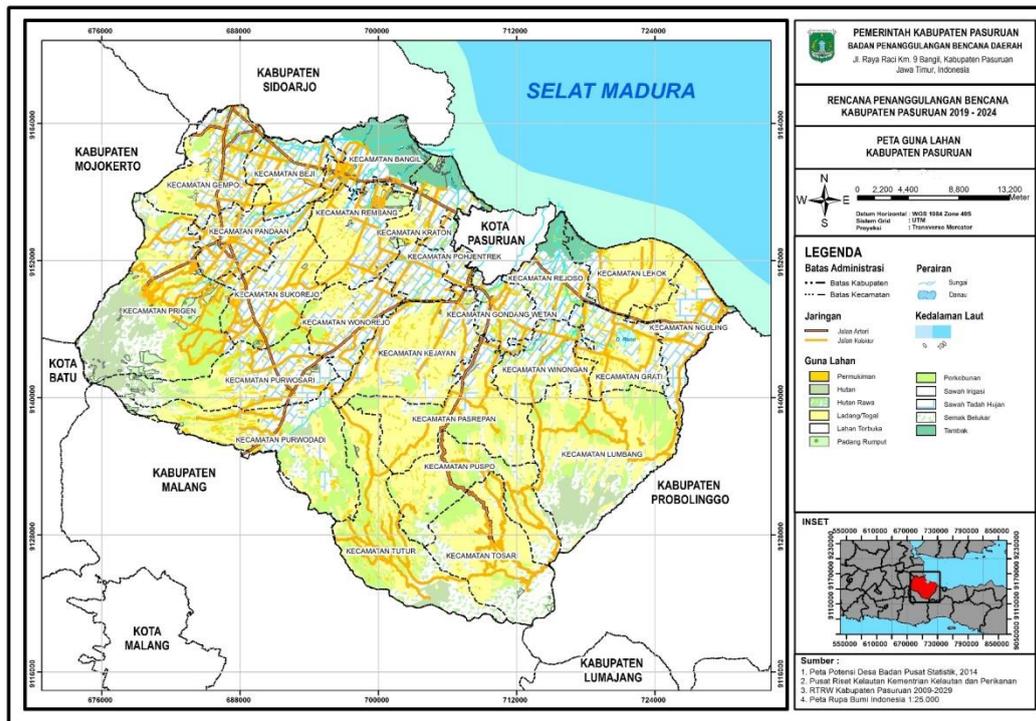
NO.	URAIAN PENGGUNAAN LAHAN	LUAS LAHAN (m ²)	(%)
7.	Sawah Tadah Hujan	22.819.534,847	1,536%
8.	Buah-Buahan	87.986,002	0,006%
9.	Kebun Campuran	48.162.199,470	3,242%
10	Perkebunan (Sudah Menghasilkan)	41.673.344,380	2,805%
11.	Tegalan/Ladang	535.637.977,722	36,051%
12.	Hutan Sejenis	176.485.297,965	11,878%
13.	Padang Rumput	10.501.461,735	0,707%
14.	Semak	40.232.080,775	2,708%
15.	Kolam Air Tawar	15.667,390	0,001%
16.	Lapangan Olahraga	3.198.786,977	0,215%
17.	Tanah Kosong Sudah Diperuntukan	483.204,616	0,033%
18.	Tanah kosong/tanah terbuka	18.181.668,571	1,224%
19.	Sungai	3.225.073,791	0,217%
20.	Danau/Situ/Telaga	1.888.426,623	0,127%
21.	Jalan Aspal	1.197.233,686	0,081%
22.	Kuburan/Pemakaman	1.201.168,810	0,081%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Hasil Digitasi dan Analisa, 2013.

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Persentase Luasan Penggunaan lahan terhadap luasan keseluruhan Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terbesar yaitu Tegalan/Ladang (sekitar 36,1%), Sawah Irigasi (sekitar 26,2%), dan Hutan (sekitar 1,9%), Jasa & Permukiman Penduduk (sekitar 10,2%),
- Luasan penggunaan lahan untuk Industri secara umum (terhadap keseluruhan luasan Wilayah Kabupaten Pasuruan) adalah relatif kecil yaitu sekitar kurang dari 1%,

- Luasan penggunaan lahan untuk Hutan (bukan penetapan kawasan) adalah sekitar 11,9%.



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasuruan

Sumber: BPN, 2017

Potensi (kasar) untuk pembangunan terhadap lahan-lahan tidak potensial (di luar budidaya pertanian dan lindung) masih relatif cukup besar ke depan (yaitu meliputi penggunaan lahan berupa padang rumput, semak, dan tanah kosong) adalah sekitar 69.398.415,697 m² atau 6939,84 Ha atau 4,7%.

2.1.1.8. Wilayah Potensi Rawan Bencana

2.1.1.8.1. Potensi Kerawanan Bencana Alam

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan. Keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam yaitu:



1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 Ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang, sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.

2. Kawasan rawan longsor/kerawanan gerakan tanah

Potensi kawasan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.

3. Kawasan rawan banjir

Potensi kawasan rawan banjir di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, karena merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air meluap, serta beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.

4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung

Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

5. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan

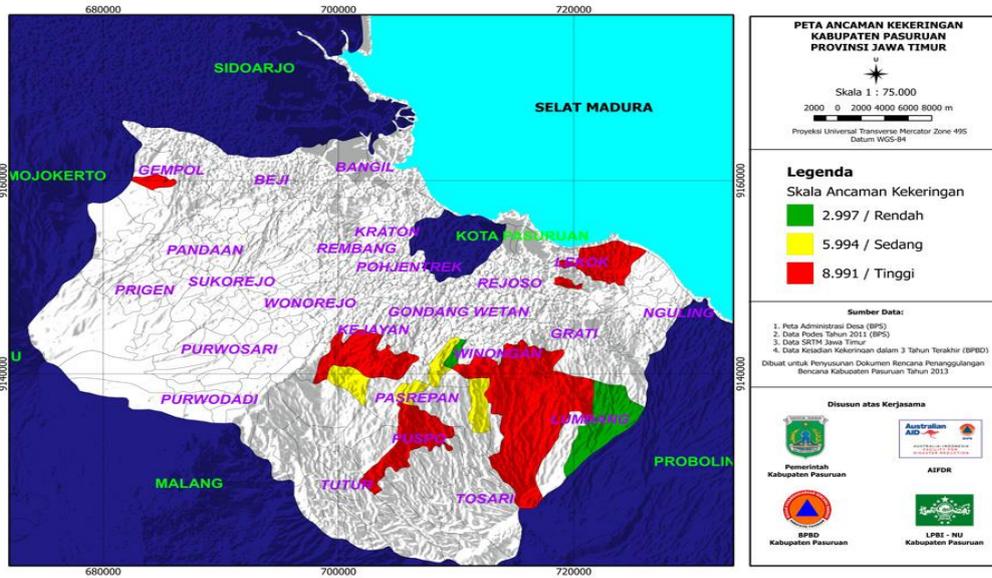


Berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan hutan dan semak belukar diantaranya beberapa yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, CA Gunung Abang, TWA Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R.Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol).

6. Kekeringan

Ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terbagi atas 3 tingkatan, yaitu :

- a. Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini : Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbang), Kecamatan Kejayan (Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo).
- b. Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, Desa Tambakrejo).
- c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang), dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).



Gambar 2.4. Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Hasil Pemetaan Ancaman, 2013

2.1.1.8.2 Potensi Kerawanan Bencana Non Alam

Selain potensi bencana alam, di Kabupaten Pasuruan juga terdapat potensi bencana non alam, yaitu kejadian kebakaran baik di area permukiman maupun area industri. Kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan antara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2016

TAHUN	LOKASI/FREKUENSI KEJADIAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pandaan (3 Kl) b. Kecamatan Sukorejo (1 Kl) c. Kecamatan Purwodadi (1 Kl) d. Kecamatan Gempol (1 Kl) e. Kecamatan Beji (4 Kl) f. Kecamatan Bangil (1 Kl) g. Kecamatan Kraton (6 Kl) h. Kecamatan Rembang (5 Kl)



	<ul style="list-style-type: none"> i. Kecamatan Kejayan (1 Kl) j. Kecamatan Pohjentrek (1 Kl)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pandaan (1 Kl) b. Kecamatan Purwosari (2 Kl) c. Kecamatan Purwodadi: 1 Kl) d. Kecamatan Wonorejo (2 Kl) e. Kecamatan Wonorejo (2 Kl) f. Kecamatan Gempol (4 Kl) g. Kecamatan Beji (> 3 Kl) h. Kecamatan Rembang (2 Kl) i. Kecamatan Kejayan (1 Kl)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2017

2.1.1.8.3. Kejadian Bencana

Rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut.

Tabel 2.6. Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan

No.	Jenis Bencana	Lokasi
1.	Erupsi Gunung Berapi	Tutur, Tosari, Puspo, Lumbang, Prigen
2.	Tanah Longsor	Tosari, Tutur, Puspo, Lumbang, Pasrepan, Purwodadi, Prigen, Gempol
3.	Banjir	Bangil, Rejoso, Grati, Winongan, Nguling, Beji, Kraton, Rembang, Gempol, Pandaan, Pohjentrek dan Gondangwetan.
4.	Kekeringan	Puspo, Lumbang, Kejayan, Winongan, Gempol, Pasrepan, Grati, Lekok.
5.	Kebakaran Hutan	Purwodadi, Puspo, Tosari.

Sumber: BPBD Kabupaten Pasuruan, 2017

2.1.1.9. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan dan menjadi salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk secara kuantitas dan kualitas menjadi perhatian utama, karena jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Surat Nomor 050/4014/Bangda Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah), bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah, RPJMD dan RKPD, diharuskan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2020 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1.605.969 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 14,43% dari jumlah penduduk tahun 2019 sejumlah 1.876.881 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 803.730 jiwa dan perempuan sebanyak 802.239 jiwa, dengan sex ratio sebesar 100.
- b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020, secara proporsional terbagi menjadi kelompok :

Tabel 2.7. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Tidak/belum tamat sekolah	164.292	10,23
2	Belum tamat SD/ sederajat	157.767	9,82
3	Tamat SD/ sederajat	634.986	39,54
4	SLTP/ sederajat	244.428	15,22
5	SLTA/ sederajat	341.286	21,25
6	D1 – S2	63.210	3,94
	Jumlah	1.605.969	100



Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat (30,81%), kemudian belum tamat SD (19,79%), dan terendah tamat pendidikan diploma/strata-1/2/3 (2,86%).

c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) berdasarkan data tahun 2020 sebagai berikut:

1) Usia muda (0-14 tahun)	:	22,62 % (363.282 jiwa)
2) Usia produktif (15-64 tahun)	:	70,99 % (1.140.135 jiwa)
3) Usia tua (65 tahun ke atas)	:	6,39% (102.552 jiwa)
Jumlah	:	1.605.969 jiwa

Berdasarkan data tersebut maka angka rasio ketergantungan sebesar 39,33 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 39 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

d. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional berdasarkan data tahun 2020 diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) Belum/Tidak Bekerja	:	22,02%	353.634
2) Pelajar/Mahasiswa	:	14,95%	240.092
3) Pensiunan	:	0,32%	5.139
4) Pegawai Negeri Sipil	:	0,64%	10.278
5) TNI/Polri	:	0,20%	3.212
6) Petani/Peternak/Nelayan	:	13,99%	224.675
7) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	:	20,78%	333.720
8) Buruh Harian Lepas	:	0,67%	10.760
9) BuruhTani/Peternakan/Nelayan	:	1,35%	21.681
10) Guru/Dosen	:	0,67%	10.760
11) Dokter/Bidan/Perawat	:	0,08%	1.285
12) Pedagang/Wiraswasta	:	10,40%	167.021
13) Lain-Lain	:	13,94%	223.872
			1.605.969

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lima tertinggi proporsi penduduk berdasarkan pekerjaan adalah :

- (1) belum/tidak bekerja sebesar 22,02%;
- (2) karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,78%;
- (3) pelajar/mahasiswa sebesar 14,95%;
- (4) petani/peternak/nelayan sebesar 13,99%; dan



(5) pedagang/wiraswasta sebesar 10,40%.

e. Komposisi penduduk menurut agama (data diolah) berdasarkan data tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|--------------------------|
| 1. Islam | : | 98,20 % (1.577.062 jiwa) |
| 2. Kristen | : | 0,52 % (8.351 jiwa) |
| 3. Katolik | : | 0,19 % (3.051 jiwa) |
| 4. Hindu | : | 1,05 % (16.863 jiwa) |
| 5. Budha | : | 0,04 % (642 jiwa) |
| 6. Konghuchu | : | 0,001 % (16 jiwa) |
| 7. Kepercayaan | : | 0,0004 % (6 jiwa) |

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebesar 98,23% dan 1,77% beragama lain.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

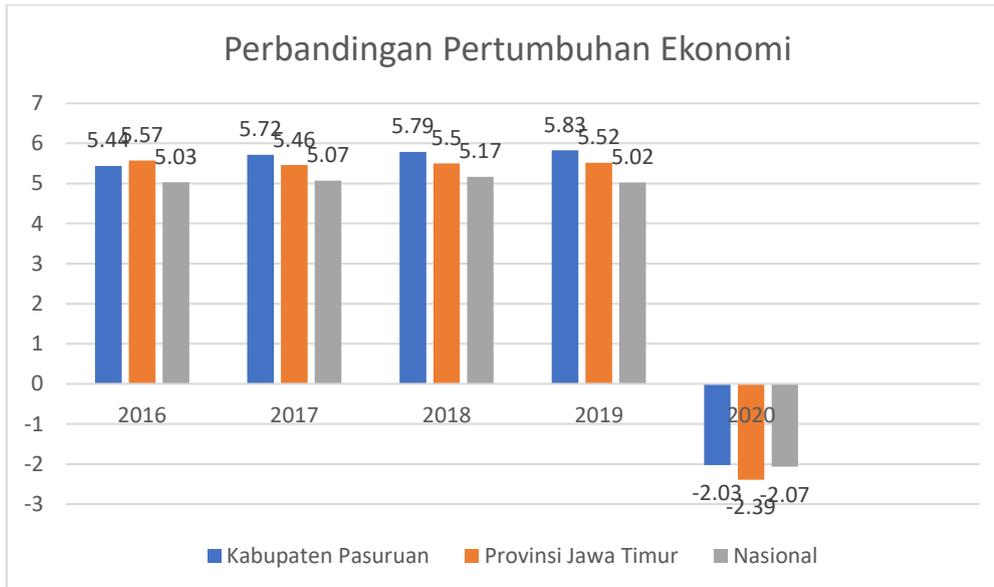
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial.

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015 – 2019), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,38%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5,83%. Sedangkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur, selama 5 (lima) tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selalu di atas Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020

Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,03 %, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,83 %. Perlambatan pertumbuhan ekonomi karena terjadinya pandemi Covid - 19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Perlambatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan masih lebih baik di bandingkan nasional sebesar -2,07 % dan Provinsi Jawa Timur sebesar - 2,39 %.

Jika dilihat dari Lapangan Usaha yang tumbuh di era pandemi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,85 %; Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,35 %; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,22 %; Real Estate 2,80 %; Jasa Pendidikan 1,75 %;



Pertanian sebesar 1,08 %; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,21 % dan lainnya mengalami perlambatan. Perlambatan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar -14,39 %; diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -12,60 %; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -9,35 %; Pertambangan dan dan Penggalian sebesar 7,43 %, Jasa Perusahaan sebesar -6,59, Konstruksi sebesar -4,95 %; Transportasi dan Perdagangan sebesar -4,58 %; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -4,12; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,36; serta Industri Pengolahan sebesar -0,32 %.

Secara berurutan 5 Lapangan Usaha dengan kontribusi tertinggi secara berurutan mulai dari yang terbesar yaitu: Industri Pengolahan sebesar 58,97 %; Konstruksi sebesar 11,94 %; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,25 %; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,78 %; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,47 %. Data kontribusi lapangan usaha selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.8. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan Periode 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.80	7.40	6,95	6,66	6,78
2	Pertambangan dan Penggalian	0.57	0.56	0,57	0,55	0,52
3	Industri Pengolahan	56.36	56.38	57,03	57,66	58,97
4	Pengadaan Listrik, Gas	1.02	0.98	0,90	0,85	0,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	13.07	13.26	12,97	12,43	11,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.46	9.62	9,76	9,87	9,25
8	Transportasi dan Pergudangan	0.64	0.65	0,66	0,67	0,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.72	3.85	3,91	4,00	3,47
10	Informasi dan Komunikasi	2.59	2.64	2,60	2,62	2,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.86	0.85	0,83	0,81	0,83
12	Real Estat	0.70	0.69	0,70	0,70	0,74
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0,11	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.15	0.12	1,16	1,19	1,21
15	Jasa Pendidikan	0.73	0.72	0,70	0,71	0,73



No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.15	0.15	0,15	0,15	0,17
17	Jasa lainnya	1.04	1.01	1,00	0,99	0,86
	Produk Domestik Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan meskipun melambat -0,32 % namun tetap merupakan kontributor terbesar dalam struktur ekonomi di Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 58,97 %.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Pasuruan mengalami kontraksi yang cukup besar. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan berhentinya sebagian besar sektor perekonomian terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri, ekonomi kreatif dan perhubungan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 terkontraksi atau minus sebesar (2,03%), pada level Jawa Timur dan Nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 juga terkontraksi berturut-turut sebesar minus (2,39%) dan minus (2,07%). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 masih berada di atas angka Jawa Timur dan Nasional.

Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,03 %, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,83 %. Perlambatan pertumbuhan ekonomi karena terjadinya pandemi Covid - 19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Perlambatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan masih lebih baik di bandingkan nasional sebesar -2,07 % dan Provinsi Jawa Timur sebesar - 2,39 %.

Tabel.2.9. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasuruan Periode 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
----	----------------	------	------	------	------	------



No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.40	1.08	-1.50	0.82	1.08
2	Pertambangan dan Penggalian	2.03	3.97	2.45	1.25	-7.43
3	Industri Pengolahan	5.83	5.71	6.63	6.47	-0.32
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.36	1.43	-3.56	0.17	-4.12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.90	6.48	4.19	5.51	4.22
6	Konstruksi	2.00	6.50	5.30	5.19	-4.95
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.07	7.21	6.07	5.98	-9.35
8	Transportasi dan Pergudangan	6.55	7.03	6.99	7.42	-4.58
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.86	9.38	7.67	6.94	-12.60
10	Informasi dan Komunikasi	8.50	8.55	6.76	7.10	9.35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.61	3.07	3.43	3.32	0.21
12	Real Estat	7.00	3.70	4.55	5.53	2.80
13	Jasa Perusahaan	6.80	4.80	6.50	5.91	-6.59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.90	2.20	4.22	3.50	-2.36
15	Jasa Pendidikan	6.01	3.95	4.10	6.54	1.75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.50	5.50	6.15	6.65	12.85
17	Jasa lainnya	6.00	4.04	4.05	5.28	-14.39
	Produk Domestik Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Jika dilihat dari Lapangan Usaha yang tumbuh di era pandemi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,85 %; Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,35 %; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,22 %; Real Estate 2,80 %; Jasa Pendidikan 1,75 %; Pertanian sebesar 1,08 %; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,21 % dan lainnya mengalami perlambatan. Perlambatan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar -14,39 %; diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -12,60 %; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -9,35 %; Pertambangan dan dan Penggalian sebesar 7,43 %, Jasa Perusahaan sebesar -6,59, Konstruksi sebesar -4,95 %; Transportasi dan Perdagangan sebesar -4,58 %; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -4,12; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -2,36; serta Industri Pengolahan sebesar -0,32 %.



Secara berurutan 5 Lapangan Usaha dengan kontribusi tertinggi secara berurutan mulai dari yang terbesar yaitu: Industri Pengolahan sebesar 58,97 %; Konstruksi sebesar 11,94 %; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,25 %; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,78 %; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,47 %.

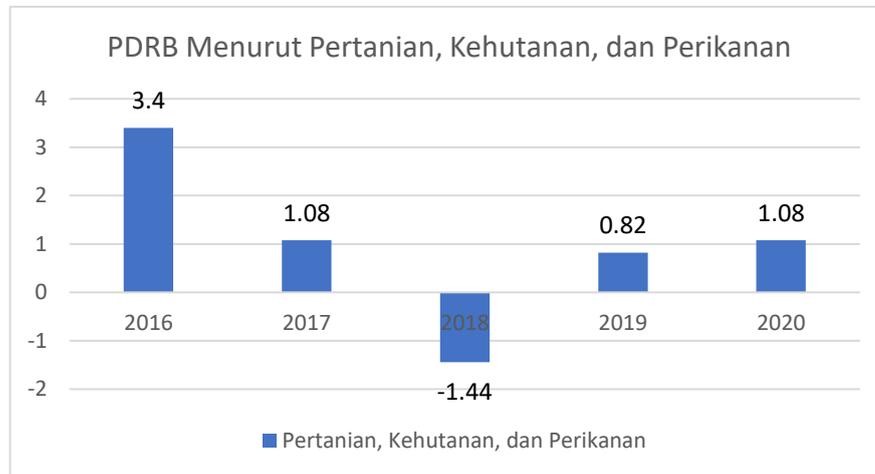
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan meskipun melambat -0,32 % namun tetap merupakan kontributor terbesar dalam struktur ekonomi di Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 58,97 %.

Jika melihat nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan tiap tahunnya selalu meningkat. Data Tahun 2020 PDRB Kabupaten Pasuruan sebesarData tahun 2019 menunjukkan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Pasuruan mencapai angka 5,83%. Peningkatan nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa nilai tambah bruto Kabupaten Pasuruan pada seluruh sektor perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang baik. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan antara lain :

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala lapangan usaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda maupun barang hidup (biologis) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau dijual kepada orang lain. Lapangan usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Data PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2016 sebesar 3.40%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan diangka 1.08%, ditahun 2018 mengalami penurunan diangka - 1.50%, begitu juga pada tahun 2019 mengalami penurunan diangka 0.82%, sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan dan menunjukkan angka 1.25% dan pada pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yang menunjukkan angka 1.08% . Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah

lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan produksi dan memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.2 PDRB Menurut Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Kondisi diatas dapat didorong pertumbuhannya kembali dengan melakukan tiga langkah. Pertama adalah revitalisasi pertanian dengan cara pembangunan infrastruktur pertanian; penguatan kelembagaan petani melalui penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan 19 - 5 akses petani ke sistem pembiayaan; dan penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Kedua adalah revitalisasi kehutanan dengan cara revitalisasi industri kehutanan; pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Ketiga adalah revitalisasi perikanan dengan cara pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

B. Pertambangan dan Penggalian

Kategori ini mencakup pada empat subkategori yaitu subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi; subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit; sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam; serta subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya.



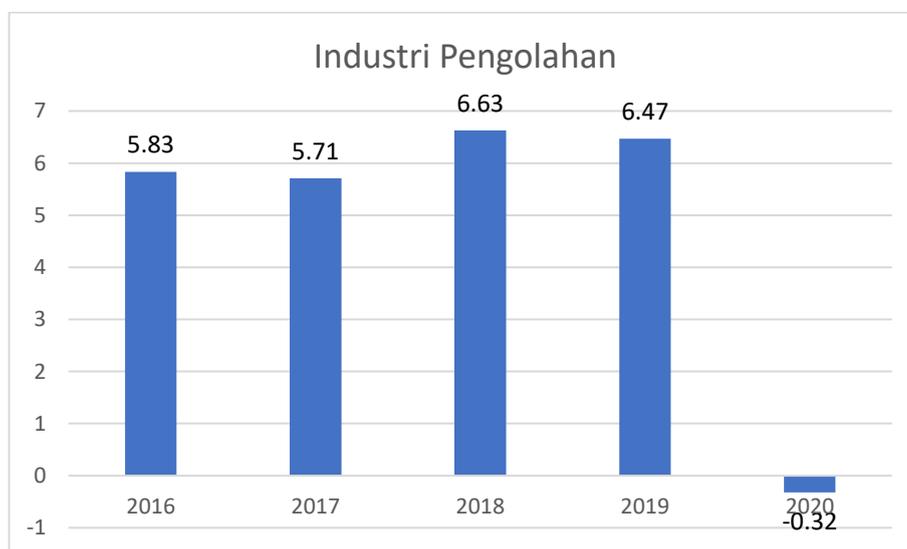
Grafik 2.3 PDRB Menurut Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Pada Kabupaten Pasuruan hanya ada subkategori yang terakhir, yaitu Pertambangan dan Penggalian. Data PDRB menurut lapangan usaha jenis pertambangan dan penggalian tahun 2017 menunjukkan angka 3,97% atau menurun menjadi 2,45% di tahun 2018. Kondisi ini semakin menurun di tahun 2019 yaitu mencapai angka 1,25%. Di tahun 2020 mengalami penurunan diangka -7.43% . Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pertambangan dan penggalian mengalami penurunan produksi sejak tahun 2018 hingga 2020.

C. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku

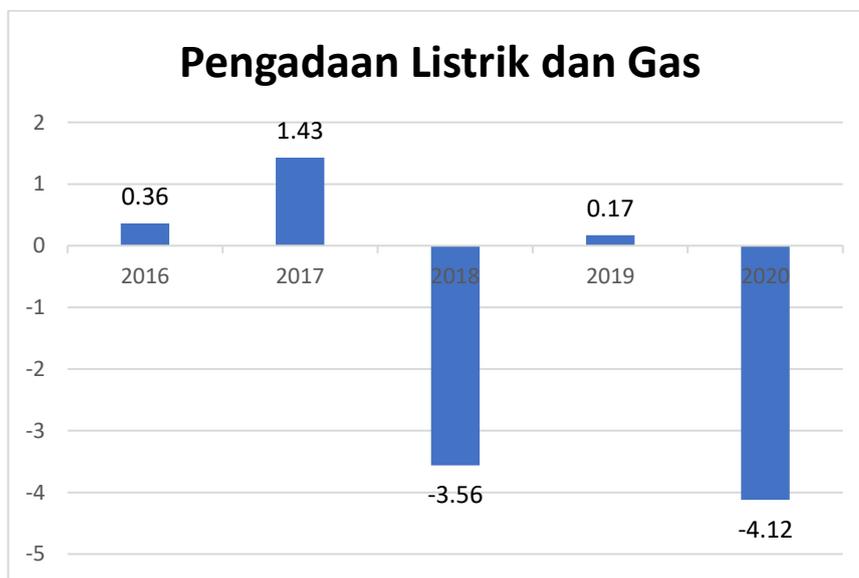
industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun 2016 menunjukkan angka 5.83% yang kemudian menurun pada tahun 2017 menunjukkan angka 5,71% yang kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 6,63%. Namun capaian PDRB Menurut Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 6,47% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2020 yang menunjukkan angka -0.32%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori industri pengolahan mengalami penurunan produksi dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha.



Grafik 2.4 PDRB Menurut Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan 2016-2020

D. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas yang mencakup pengadaan uap panas dan AC.



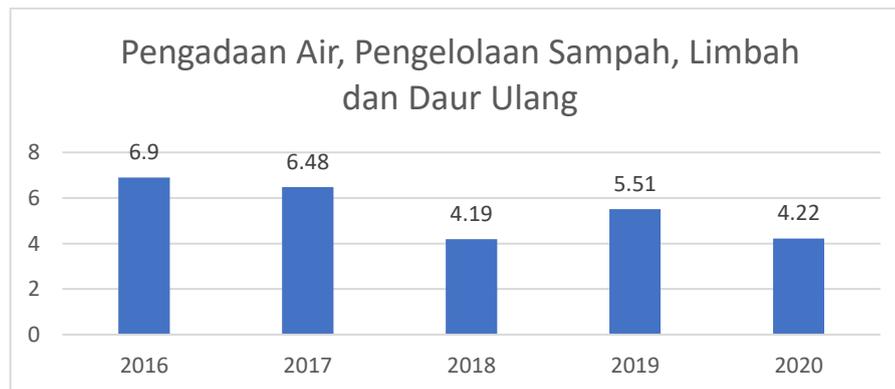
Grafik 2.5. PDRB Menurut Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Listrik dan Gas tahun tahun 2016 menunjukkan angka 0,36% yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menunjukkan angka 1,43% yang kemudian menurun menjadi -3,56%. Capaian PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Listrik dan Gas kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 0,17% dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan menunjukkan angka -4,12%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pengadaan listrik dan gas mengalami peningkatan produksi dan memiliki pengaruh baik tetapi kemudian mengalami penurunan dalam pertumbuhan

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan dikarenakan pandemi covid 19.

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.



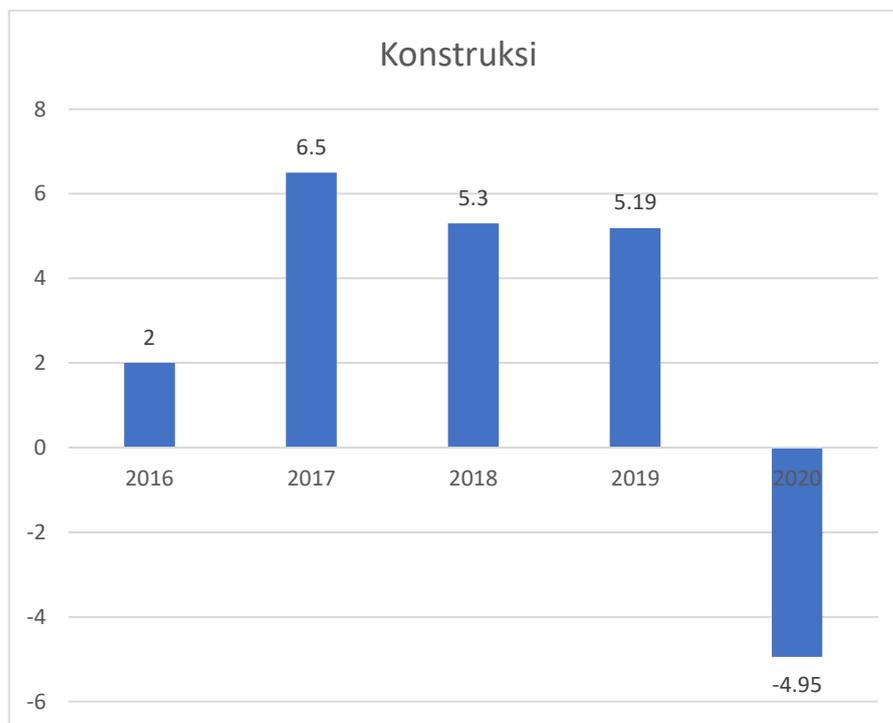
Grafik 2.6. PDRB Menurut Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Kab. Pasuruan 2016-2020

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang tahun 2016 menunjukkan angka 6.9% kemudian menurun pada tahun 2017 menunjukkan angka 6,48% yang kemudian turun menjadi 4,19% di tahun 2018. PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 5,51%, tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan menunjukkan angka 4.22%. Hal ini dikarenakan pandemi covid 19 menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

mengalami penurunan produksi dan memiliki dampak bagi pertumbuhan PRDB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

F. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. Kategori ini digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.

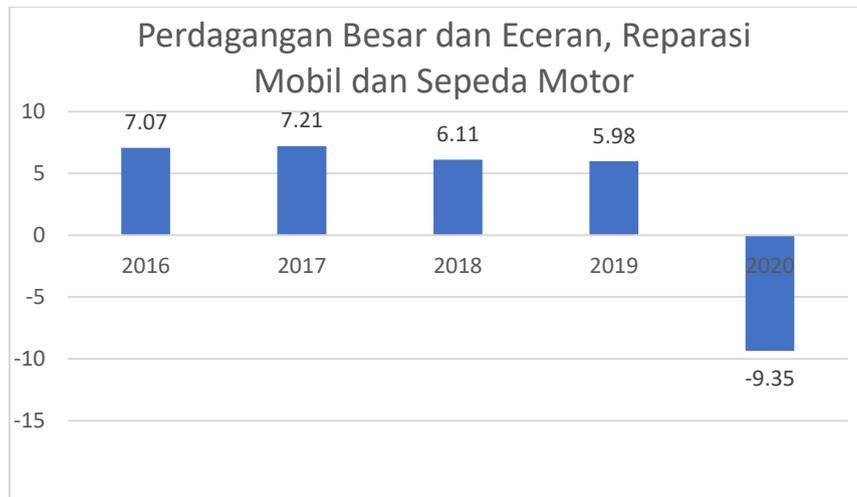


Grafik 2.7. PDRB Menurut Konstruksi Kab. Pasuruan 2016-2020

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Konstruksi tahun 2016 menunjukkan angka 2.0% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menunjukkan angka 6,5% yang kemudian turun menjadi 5,3% di tahun 2018. Angka PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Konstruksi kembali menurun menjadi 5,19% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan diangka -4.95%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha

kategori konstruksi selalu mengalami penurunan produksi mulai dari tahun 2018 dan memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan PRDB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



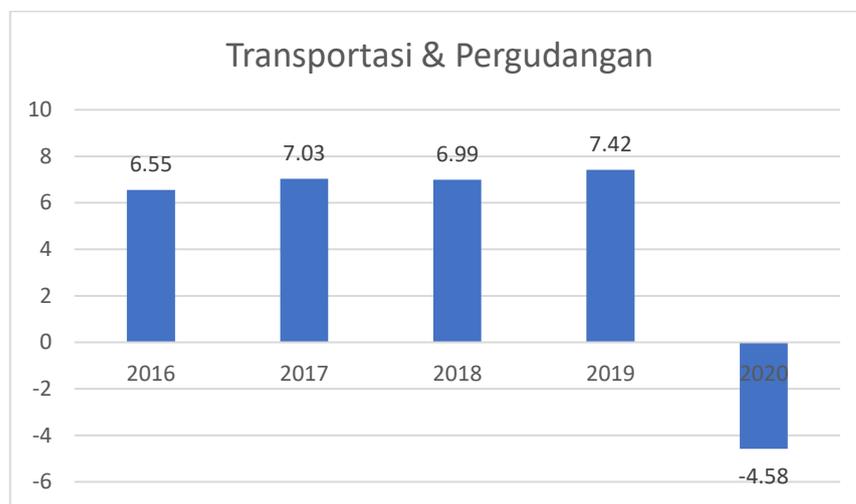
Grafik 2.8. PDRB Menurut Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kab. Pasuruan 2016-2020

Kategori ini meliputi lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut mulai dari penjualan secara grosir maupun eceran. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2019 menunjukkan angka 9,87 yang kemudian menurun menjadi 9,25 pada tahun 2020. Kondisi menurun ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif pada nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan .

H. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa,

jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.



Grafik 2.9. PDRB Menurut Transportasi dan Pergudangan Kab. Pasuruan 2016-2020

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Transportasi dan Pergudangan tahun 2016 menunjukkan angka 6.55% , mengalami peningkatan di tahun 2017 menunjukkan angka 7,03% kemudian menurun menjadi 6,99% pada tahun 2018. PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Transportasi dan Pergudangan kemudian meningkat menjadi 7,42% di tahun 2019 , tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dan menunjukkan angka -4.58%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2019 mengalami peningkatan produksi dan



memiliki dampak positif pada nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi pada tahun 2020 nilai tambah lapangan usaha kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan produksi dan memiliki dampak negatif pada nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.

I. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Penyedia Akomodasi dan Makan Minum tahun 2016 menunjukkan angka 8,86% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menunjukkan angka 9,38% kemudian menurun menjadi 7,67% di tahun 2018. Nilai PDRB Menurut Lapangan usaha Jenis Penyedia Akomodasi dan Makan Minum kembali menurun menjadi 6,94% di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan yang drastis menunjukkan angka -12,60%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif pada nilai PDRB.

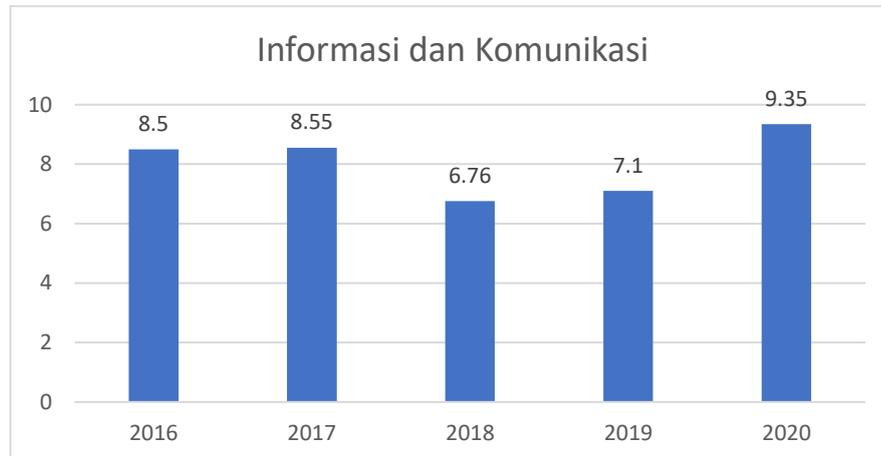


Grafik 2.10. PDRB Menurut Penyedia Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pasuruan 2016-2020

J. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk tersebut serta data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Informasi dan Komunikasi tahun 2016 menunjukkan angka 8.50% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menunjukkan angka 8,55% kemudian menurun menjadi 6,76% di tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menunjukkan angka 7.10%. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9.35%. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan produksi dan berdampak positif bagi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pasuruan.

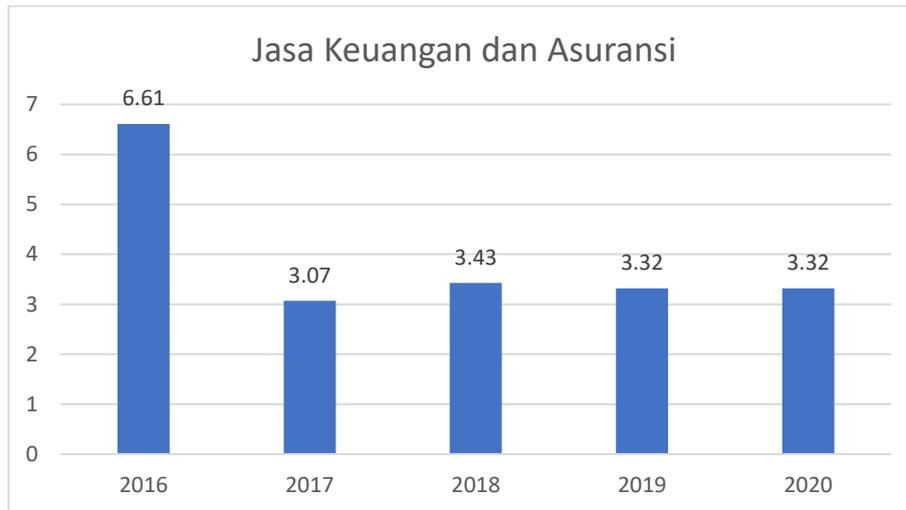


Grafik 2.11. PDRB Menurut Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pasuruan 2016-2020

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Keuangan dan Asuransi tahun pada tahun 2016 menunjukkan angka 6.61% kemudian mengalami penurunan tahun 2017 menunjukkan angka 3,07% kemudian meningkat menjadi 3,43% di tahun 2018. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami penurunan kembali menjadi 3,32% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami penurunan produksi di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan diangka 0.21% berdampak negatif bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.12. PDRB Menurut Jasa Keuangan dan Asuransi Kab. Pasuruan 2016-2020

L. Real Estate

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen maupun perantara dalam penjualan atau pembelian *real estate* serta penyediaan jasa *real estate* lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan, serta penyewaan bangunan. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis *Real Estate* pada tahun 2016 menunjukkan angka 7% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menunjukkan angka 3,7% kemudian meningkat menjadi 4,55% di tahun 2018 mengalami peningkatan lagi di tahun 2019 menunjukkan angka 5.53% kemudian menurun menjadi 2.80% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori *Real Estate* mengalami penurunan produksi dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.13 PDRB Menurut *Real Estate* Kab. Pasuruan 2016-2020

M. Jasa Perusahaan

Kategori ini merupakan gabungan dari dua kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.



Grafik 2.14. PDRB Menurut Jasa Perusahaan Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Data PRDB Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Perusahaan tahun 2016 menunjukkan angka 6.8% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 diangka 4,8% kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,5% di tahun 2018. Angka PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Perusahaan mengalami penurunan menjadi 5,91% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan diangka -6.59%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Perusahaan tahun 2020 mengalami penurunan produksi bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di bandingkan pada tahun 2019.

N. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib pada Tahun 2016 menunjukkan angka 4.90% mengalami penurunan pada tahun 2017 menunjukkan angka 2,2% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi

4,22% di tahun 2018. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan lagi menjadi 3,5% di tahun 2019 dan di tahun 2020 juga mengalami penurunan lagi diangka -2.36%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan produksi dan bernilai negatif bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.15. PDRB Menurut Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Pasuruan 2016-2020

O. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta serta mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.



Grafik 2.16. PDRB Menurut Jasa Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Pendidikan Tahun 2016 menunjukkan angka 6.01% kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2017 menunjukkan angka 3,95% yang kemudian meningkat menjadi 4,1% di tahun 2018. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Pendidikan meningkat lagi dan mencapai angka paling tinggi yaitu 6,54% pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan lagi diangka 1.75% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Pendidikan mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif bagi pertumbuhan PDRB.

P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan cakupannya dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa

Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2016 menunjukkan angka 7.5% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 5,5% yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 6,15% pada tahun 2018. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 6,55%. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 12.85%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2020 mengalami peningkatan produksi dan berdampak positif bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan mulai pada tahun 2018 hingga tahun 2020.



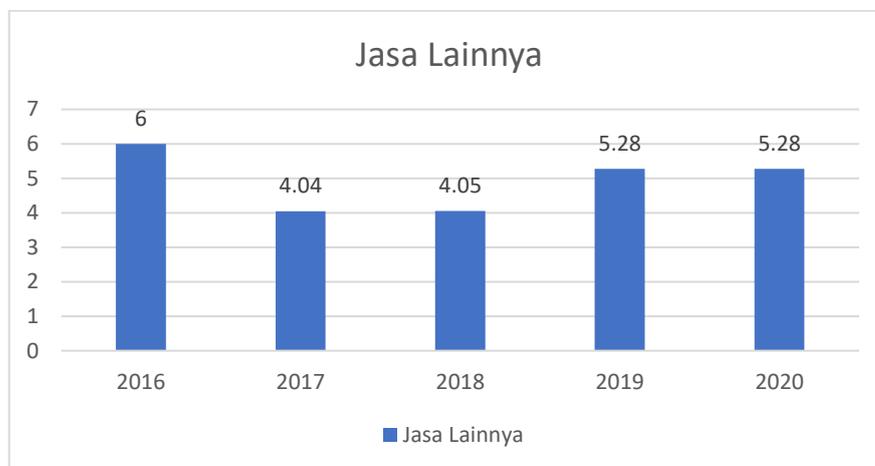
Grafik 2.17 PDRB Menurut Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Q. Jasa Lainnya

Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan

Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain. Data PDRB Menurut Lapangan Usaha jenis

Jasa Lainnya Tahun 2016 menunjukkan angka 6% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menunjukkan angka 4,04% yang kemudian meningkat 0,01% menjadi 4,05% di tahun 2018. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Jenis Jasa Lainnya kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 5,28%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi -14.38 %. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha kategori Jasa Lainnya tahun 2020 mengalami penurunan produksi dan berdampak negatif bagi pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020.



Grafik 2.18. PDRB Menurut Jasa Lainnya Kabupaten Pasuruan 2016-2020

2.1.2.1.2 Persentase Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

1. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

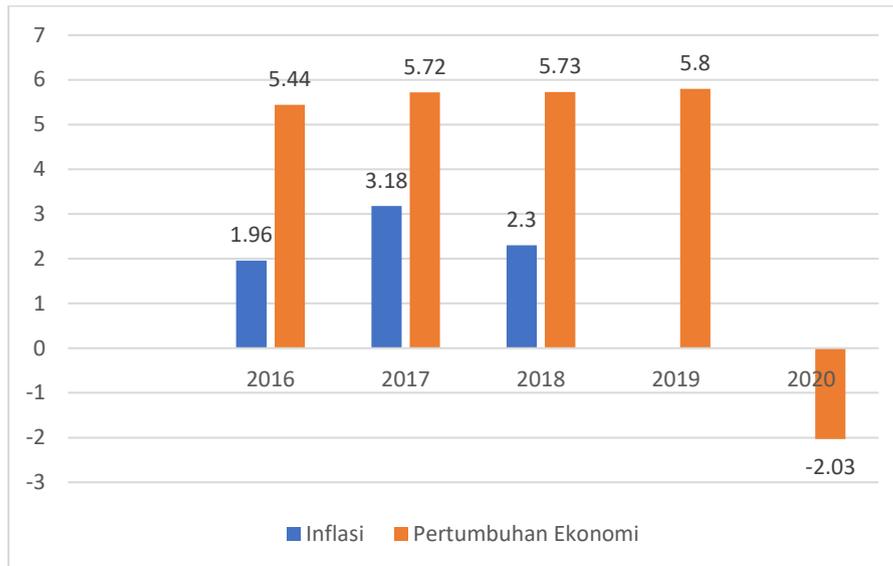
Inflasi merupakan sebuah keadaan yang menjelaskan proses naiknya harga-harga umum secara terus menerus. Inflasi yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini karena harga barang dan jasa mengalami peningkatan sehingga menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.



Angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK diukur dengan menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Data Inflasi Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2019 dapat dikendalikan di bawah 2 digit (10 persen) dan berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara makro kemampuan/daya beli masyarakat dapat terjaga.

Data inflasi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berada pada angka 3,18%. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai inflasi Jawa Timur di tahun 2017 yaitu 4,04%. Hal serupa juga terjadi di tahun 2018, dimana nilai inflasi Kabupaten Pasuruan yang berada pada angka 2,3% lebih rendah dengan nilai inflasi Provinsi Jawa Timur dengan nilai 2,86%. Inflasi Kabupaten Pasuruan yang relatif rendah akan meningkatkan daya beli Masyarakat terhadap barang dan jasa.

Selain data inflasi, pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah penting untuk diukur ketercapaiannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita.



Grafik 2.19. Persentase Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada pada 5,44% dan 5,72% di tahun 2017. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan meningkat kembali di tahun 2018 dengan angka 5.73%. Namun, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan di tahun 2019 masih tetap berada pada angka 5,83%. Mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -2.03%

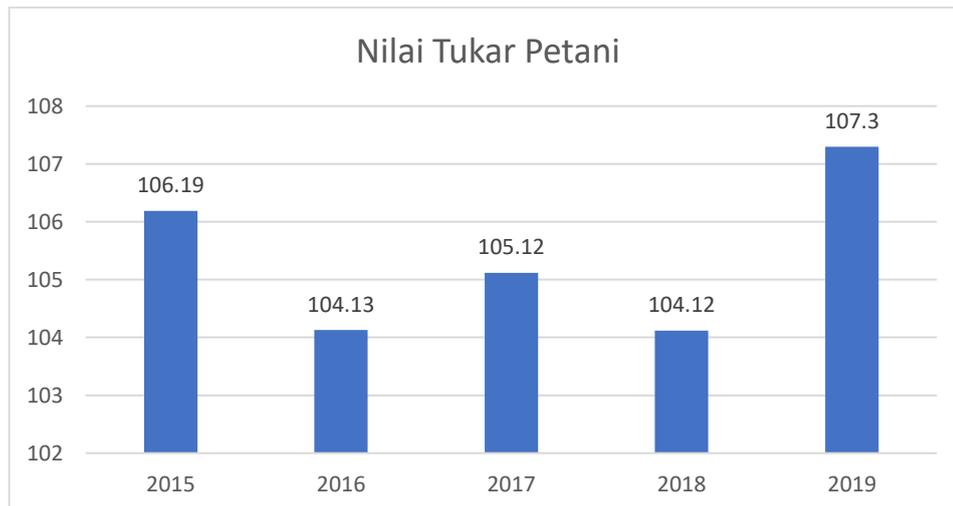
2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani dengan Indeks harga yg dibayar petani. Nilai Tukar Petani mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga, atau menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Berdasarkan hal tersebut maka upaya

spesialisasi produk dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2019 menurut data BPS menunjukkan tren penurunan, namun masih di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Oleh karena itu program peningkatan mutu komoditi pertanian perlu ditingkatkan atau dilakukan standarisasi mutu, baik pada pengananan *onfarm* (masa tanam) maupun *offfarm* (masa/pasca panen).

Nilai Tukar Petani Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 berada pada angka 106,19 yang kemudian turun menjadi 104,13 di tahun 2016.



Grafik 2.20. Nilai Tukar Petani 2015-2019

3. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan



pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan jika Koefisien Gini bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan yang sempurna atau dalam arti lain aset hanya dikuasai oleh sekelompok penduduk saja.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
2. $0.4 < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat);
3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan walaupun masih dalam standar kriteria ketimpangan rendah. Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berada pada angka 0,32% dan tetap berada pada angka yang sama di tahun 2016. Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan mulai mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 0,34%. Jika nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan dengan kriteria ketimpangan rendah, ternyata sudah berada lebih baik daripada capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Timur serta Indeks Gini Nasional. Hal ini karena Indeks Gini menggambarkan tingkatan ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya dan harus dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor penyumbang rasio gini yang paling utama adalah indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, inflasi rendah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kabupaten Pasuruan tidak menghitung koefisien gini karena Kabupaten Pasuruan menggunakan Indeks Willianson.

4. Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)

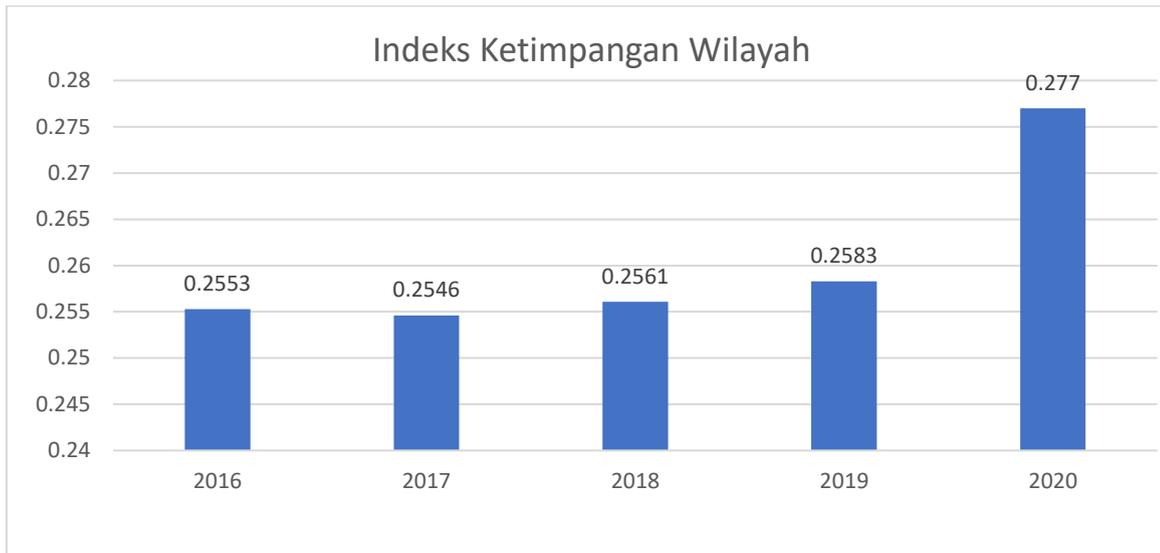
Indeks Williamson merupakan pola perhitungan yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah. Dasar perhitungannya pada Indeks Williamson adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam



kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah, dalam hal ini PDRB per kapita per kecamatan.

Indeks Williamson pada tahun 2019 sebesar 0,258 (kategori rendah) meningkat di tahun 2020 menjadi 0.277 (rendah). Peningkatan ketimpangan ini dikarenakan adanya pergeseran peningkatan beberapa sektor produktif yang awalnya mengandalkan industri, tetapi setelah adanya Covid-19 beberapa sektor justru semakin berkembang pesat. Tetapi, secara keseluruhan tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan masuk kategori rendah. Kategori rendah ini dapat diartikan bahwasannya sebaran ketimpangan pendapatan di masing-masing kecamatan Kabupaten Pasuruan tergolong merata. Pemerataan pendapatan di masing-masing kecamatan pada masa Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- ✓ Sebagian besar masyarakat sama-sama merasakan dampak adanya Covid-19 sehingga terjadipenurunan pendapatan di masing-masing kecamatan secara merata.
- ✓ Beberapa sektor produktif (pertanian, peternakan, perikanan, wisata, UMKM, industri besar, dan perdagangan) di masing-masing kecamatan mengalami pelambatan bahkan penurunan pertumbuhan secara merata.
- ✓ Perekonomian terbesar di Kabupaten Pasuruan sangat mengandalkan sektor industri yang pada masa Covid-19 terdampak sangat besar walaupun hingga saat ini masih dalam kategori unggul.
- ✓ Sebaran sektor tumbuh yang merata umumnya berada di sektor pertanian dan peternakan yang notabene berada di hampir setipa kecamatan di Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.21. Indeks Ketimpangan 2016-2020

Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan periode tahun 2016 – 2020 menunjukkan kecenderungan naik atau kondisi yang kurang baik, karena kesenjangan wilayah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, Indeks Williamson berada pada angka 0,2553% dan 0,2546% di tahun 2017. Nilai Indeks Williamson kemudian naik di tahun 2018 menjadi 0,2561% di tahun 2018 dan kembali naik menjadi 0,2583% di tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali naik menjadi 0.277% .Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan antisipasi agar kesenjangan tidak semakin lebar dan menjadi isu strategis yang harus ditemukan solusi konkritnya dengan memperhatikan kendala dan peluang yang ada.

Berbeda halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan adalah faktor teknologi dan pemasaran. Selanjutnya adalah faktor *skill* dan kemitraan, faktor sumberdaya alam, faktor aksesibilitas, faktor sosial, faktor sumberdaya manusia dan yang terakhir adalah faktor infrastruktur dasar. Kuatnya pengaruh faktor teknologi dan pemasaran pada tahun 2020 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk perdagangan *online* sehingga faktor tersebut



menjadi hal yang paling mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Pasuruan.

2.1.2.1.3 Persentase Kemiskinan Kabupaten Pasuruan

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dijadikan sebagai garis kemiskinan. Oleh karena itu penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.10. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	168,060	165,640	152,480	141,090	151.430*)
Persentase Penduduk Miskin	10.34	10.34	9,45	8,68	9,26*)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	315141	315,141	331057	335 653	355.299
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.67	1.67	1.5	1.56	01,15
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.44	0.44	0.37	0.43	0,23

Sumber : BPS Kab Pasuruan, 2020

Keterangan : *) Tahun 2020 angka semester 1



Secara kuantitas kemiskinan Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dimana pada tahun menjadi 168.060 di tahun 2016 dan 165.640 di tahun 2017. Penurunan juga terjadi di tahun 2018 dimana Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasuruan berada pada angka 152.480 jiwa, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 yang berada di angka 141.090 jiwa. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan 151.430*) .Begitupun secara kualitas, kondisi kemiskinan mengalami perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan indek kedalaman dan indek keparahan.

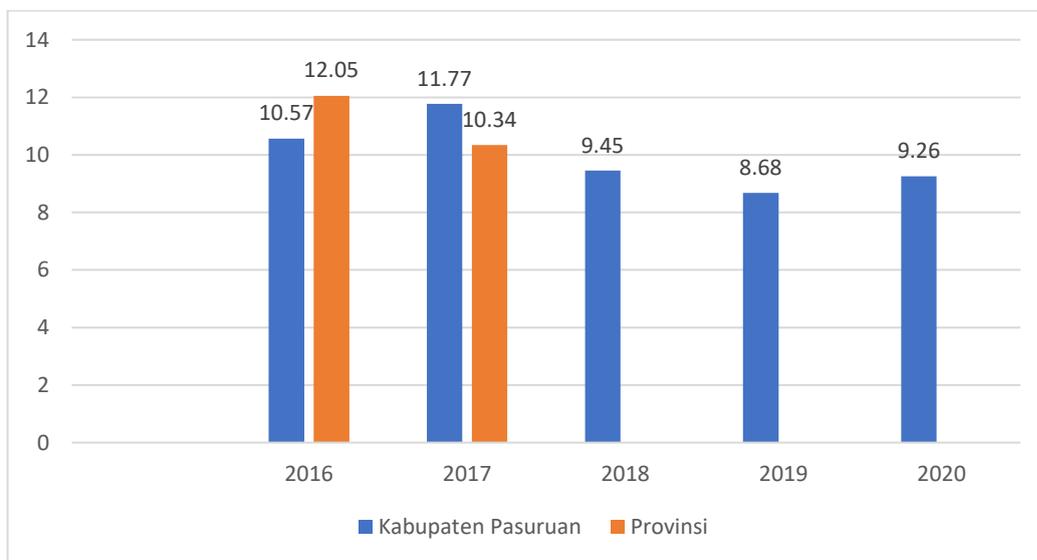
Perkembangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan juga dapat dilihat dari capain Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten pada tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan berada di angka menjadi 1,67% dan bertahan di tahun 2017. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasuruan baru turun menjadi 1,5% di tahun 2018, namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 1,56%.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten pada tahun 2019 menunjukkan angka 1,56% mengalami penurunan di tahun 2020 yang berada diangka 1,15%. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pasuruan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik

Sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan , Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016-2020 juga mengalami fluktuatif. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 menunjukkan angka 0,44% dan bertahan dengan angka yang sama di tahun 2017. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan kembali menurun menjadi 0,37% di tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 0,43% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di

Kabupaten Pasuruan tidak menentu (kadang mengalami peningkatan dan/atau penurunan) selama lima tahun terakhir.

2019 berada diangka 0,42% dan pada tahun 2020 berada diangka 0,23%. Hal ini menunjukkan Indeks Keparahan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Grafik 2.22 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan dan Provinsi Jawa Timur 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2019 cenderung meningkat. Data tahun 2016 menunjukkan jumlah angkatan kerja yang bekerja 10.014 orang serta 12.395 di tahun 2017. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di tahun 2018 juga meningkat menjadi 13.564 orang namun menurun menjadi 11.473 orang di tahun 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk



usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 menunjukkan angka 868.795 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan angka 861.085 jiwa. Sedangkan pengangguran pada tahun 2020 menunjukkan angka 54.181 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 46.653 jiwa.

Data TPT Kabupaten Pasuruan periode tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka TPT Kabupaten Pasuruan menurun di tahun 2016 menjadi 4,18% dan dibawah TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 4,21% dan TPT Nasional yaitu 5,61%. Nilai TPT Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 menjadi 4,97% dan diatas dari TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 4% namun dibawah TPT Nasional yaitu 5,5%. Peningkatan TPT Kabupaten Pasuruan juga terjadi di tahun 2018 dengan angka 6,11% dan jauh diatas TPT Provinsi Jawa Timur yaitu 3,99% dan TPT Nasional yaitu 5,28%. Namun, ditahun 2019 TPT Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan menjadi 5,42% walaupun masih diatas TPT Nasional yaitu 5,28%.

TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar 6,24% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 5,42%. Peningkatan TPT disebabkan oleh bertambahnya pengangguran pada tahun 2020 sebesar 16,14% atau sebanyak 7.528 Jiwa. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak unit usaha tutup ataupun mengurangi produksi akibat turunnya daya beli masyarakat sehingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di sisi lain, lulusan baru belum terserap ke dunia kerja dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Data perkembangan jumlah (TPT) Kabupaten Pasuruan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Perkembangan TPT Kabupaten Pasuruan dan Perbandingan TPT Kabupaten Pasuruan dengan TPT Jawa Timur dan TPT Nasional

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja	10.014	12.395	13.564	11.473	



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
TPT Kab Pasuruan	4.18	4.97	6.11	5.42	6.24
TPT Jatim	4.21	4	3.99		
TPT Nasional	5.61	5.5	5.34	5.28	

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2020

2.1.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; rata rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. IPM digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Data IPM Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan tren naik (positif) dan berada dalam kelompok kategori “sedang” (angka 60 – 70). dan pada tahun 2019 masih berada dibawah rata-rata IPM Jawa Timur dan IPM Nasional. IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berada pada angka 65,04% namun masih dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 68,95% dan IPM Nasional yaitu 69,55%. IPM Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 65,71% di tahun 2016 meskipun dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 69,74% dan IPM Nasional yaitu 70,18%. Peningkatan IPM Kabupaten Pasuruan juga terjadi di tahun 2017 menjadi 66,69% walaupun masih dibawah dari IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 70,27% dan IPM Nasional yaitu 70,81%. Di tahun 2018 IPM Kabupaten Pasuruan meningkat menjadi 67,41% meskipun masih dibawah IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 70,77% dan IPM Nasional yaitu 71,39%. Angka IPM Kabupaten Pasuruan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 68,29%. Dan Pada tahun 2020 meningkat menjadi 68.60%



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, dan (3) Standar hidup layak. Untuk Angka Harapan Hidup pada tahun 2020 menunjukkan angka 70,23 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang berada pada angka 70,17. Pada Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2020 menunjukkan angka 12,41 meningkat dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan angka 12,31. Untuk Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 menunjukkan angka 8,02 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 diangka yang sama yaitu 8,02. Sedangkan Pengeluaran Perkapita pada tahun 2020 pada tahun 2020 menunjukkan angka 10.164 menurun dibandingkan pada tahun 2019 yang berada diangka 10.268.

IPM Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 sebesar 68,60 meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 68,29 atau naik 0,31. Keseluruhan komponen pembentuk IPM meliputi Angka Harapan Hidup (tahun), Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun), dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) meningkat dibanding tahun sebelumnya terkecuali Pengeluaran Perkapita (Rp.) yang terimbas pandemi Covid-19. Data IPM Kabupaten Pasuruan dan komponennya periode 2018 - 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

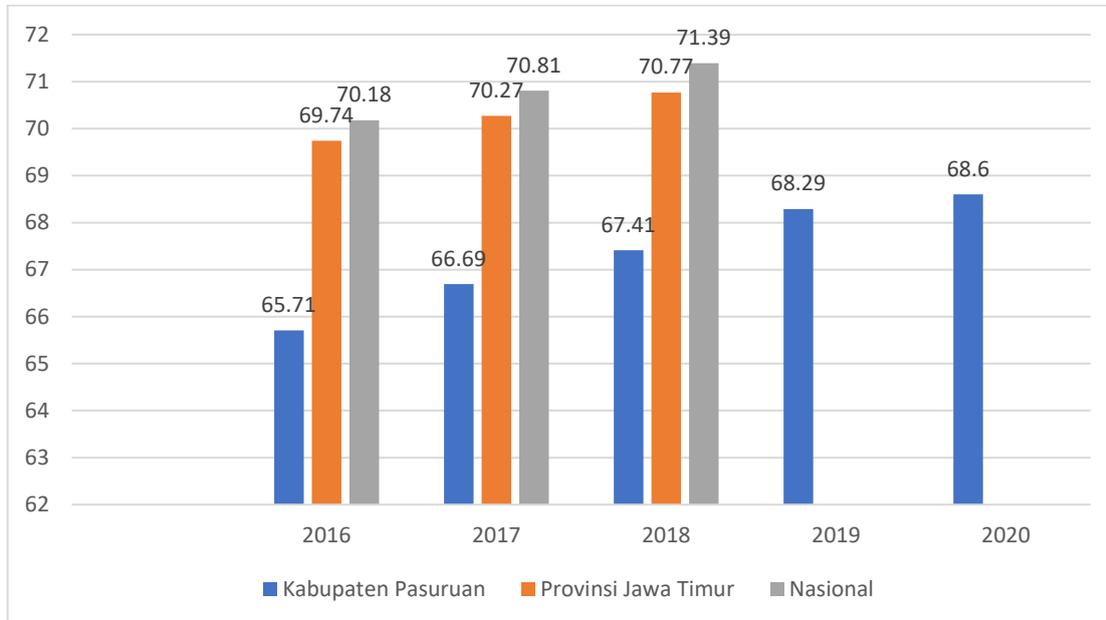
Tabel.2.12. IPM Kabupaten Pasuruan dan komponennya Periode Tahun 2018 - 2020

Uraian	2018	2019	2020
IPM	67,41	68,29	68,60
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,01	70,17	70,23
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,30	12,31	12,41
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,83	8,02	8,02
Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)	9.933	10.268	10.164

Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan

Merujuk pada tabel di atas, dari dimensi IPM yang memerlukan perhatian adalah dimensi rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan

melalui Dinas Pendidikan telah mengupayakan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan kuantitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket baik A, B maupun C.



Grafik 2.23. Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Pasuruan dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional 2016-2020

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

Tabel.2.13. APK Kabupaten Pasuruan dan komponennya Periode Tahun 2018 - 2020

Uraian	2019	2020
SD/MI	118,58	107,87
SMP/MTs	102,42	102,35

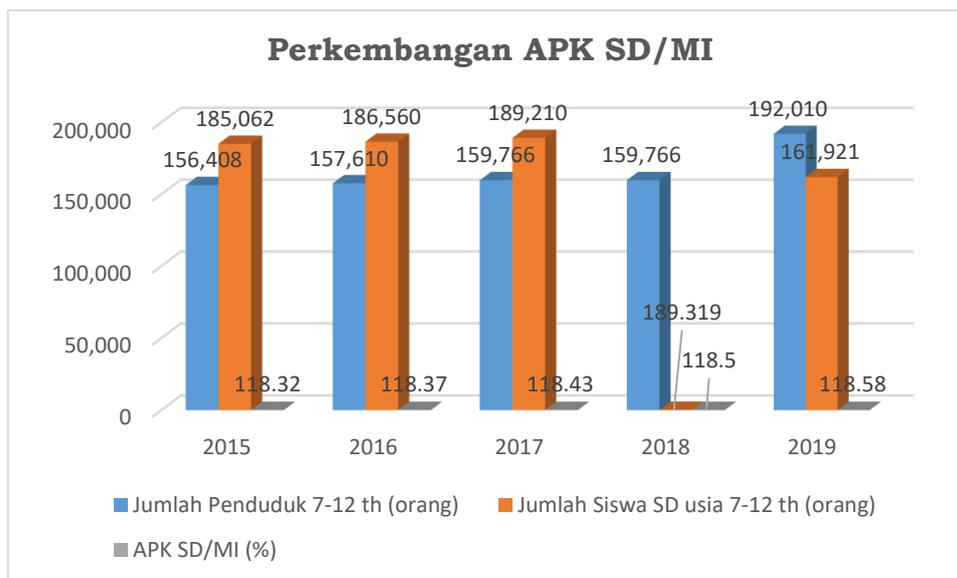
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

A. APK SD/MI

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data dasar yang digunakan:

- Penduduk usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, tingkat SMP adalah usia 13 - 15 tahun,
- Siswa usia sekolah sesuai jenjangnya, misalnya siswa usia 7-12 tahun di tingkat SD, siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP.

Dengan demikian bahwa angka partisipasi kasar tidak melihat pada batasan usia sekolah tertentu pada setiap jenjang pendidikan, namun lebih kepada jumlah siswanya di setiap jenjang pendidikannya. Berikut gambaran pencapaian APK sebagai berikut.



Grafik 2.24 Perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2020 sebesar 107,87% menurun dibandingkan tahun 2019 mencapai 118, 58%. Sementara Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 sebesar 118,50% atau sejumlah 189.319 siswa SD/MI dari 159.766 usia penduduk 7-12 tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 118,43%, terjadi

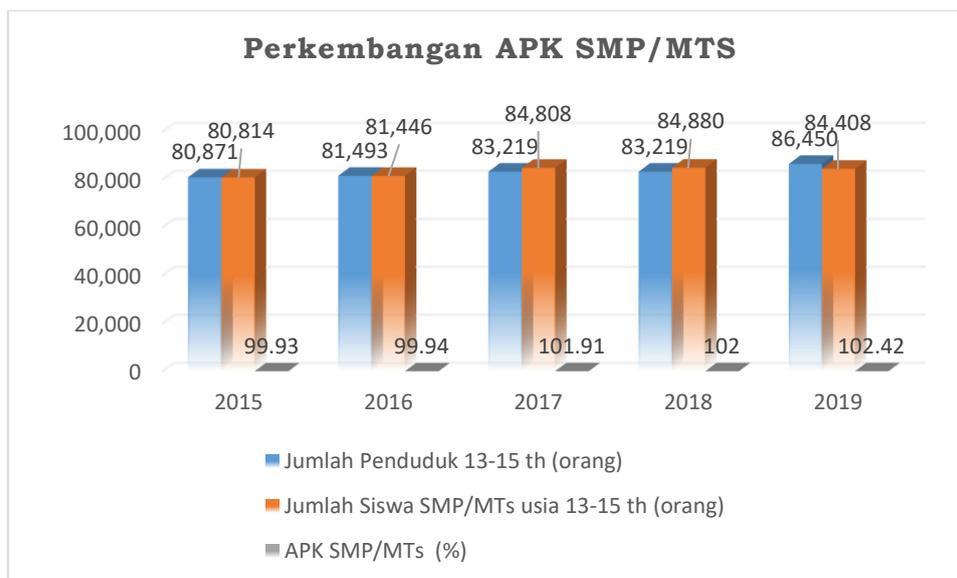


peningkatan sebesar 0,07%, capaian tahun 2017 sesuai target yang telah ditetapkan sebesar yakni sebesar 118,49%, pencapaian ini di atas nilai rata-rata APK Provinsi Jawa Timur yakni 108.43% dan di atas rata-rata nilai APK Nasional tahun 2017 yakni 105,89%. Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2017 ke 2018 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI telah terpenuhi serta diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Upaya ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya dalam memberikan kesadaran dan semangat kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Terjadi penurunan ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI telah terpenuhi serta diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Upaya ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya dalam memberikan kesadaran dan semangat kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.

B. APK SMP/MTs

Dapat diketahui dari gambar bahwa Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2019 mencapai 102,42% sedangkan pada tahun 2020 mencapai 102,35%, hal ini terjadi penurunan dimana melampaui dari capaian tahun 2018. Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2018 sebesar 102.00% atau 84.880 siswa SMP/MTs dari 83.219 usia penduduk 13-15 tahun, dibandingkan tahun 2017 sebesar 101.91%, terjadi peningkatan sebesar 0.09% dan sesuai target yang ditentukan sebesar 102.00%. Pada jenjang SMP/MTs adalah bagian dari program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan realisasi angka partisipasi kasar ini bersamaan dengan upaya peningkatan di jenjang SD/MI dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih luas. Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2017 ke

2018 ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan beserta masyarakat dalam penyediaan lembaga sekolah disisi lain dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kecakapan/ketrampilan siswa, *support* anggaran. Pencapaian ini diatas nilai rata-rata APK Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yakni 90.90%. Hal ini dilakukan sebagai usaha dalam mempersiapkan wajib belajar pendidikan 12 tahun atau pendidikan menengah.



Grafik 2.25 Perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Seperti halnya perhitungan APM, perhitungan APK apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka angka partisipasi kasar SD/MI dan SMP/MTs telah mengalami peningkatan dikarenakan upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan yang melakukan layanan pendidikan semaksimal mungkin di semua jenjang pendidikan. Kedepan indikator APK maupun APM baik SD/MI maupun SMP/MTs yang telah melampaui angka di atas 100%, tidak lagi termasuk dalam penilaian indikator kinerja pelayanan pendidikan, namun lebih mengarah pada pemerataan layanan dan pemerataan mutu layanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.



C. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

1. Penduduk usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, tingkat SMP adalah usia 13-15 tahun;
2. Siswa usia sekolah sesuai jenjangnya, misalnya siswa usia 7-12 tahun di tingkat SD, siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP.

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi murni lebih menunjukkan pada tingkat partisipasi sekolah, penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah tidak memperhitungkan pada kelompok umur tertentu, melainkan pada jumlah semua penduduk yang terdaftar pada sekolah sesuai jenjangnya.

Berikut dapat di lihat gambaran jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12; 13-15; yang bersekolah di SD/MI; SMP/MTs; terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia 7-12; 13-15; tahun pada periode yang sama. APM dapat dijelaskan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel.2.14. Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APM SMP/MTs (%)	95,74	95,78	95,80	96	82,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 2020

Tabel diatas menunjukkan realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-SD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 telah mencapai 100%, capaiannya telah mencapai angka ideal sesuai target yang telah di tetapkan sebesar sebesar 100% dan pencapaian ini diatas nilai rata-rata



APM Provinsi Jawa Timur yakni 97.14% dan diatas rata-rata nilai APM Nasional yakni 93,02%. Pencapaian realisasi angka partisipasi murni mulai dari tahun 2017 ke 2018 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan untuk usia sekolah telah terpenuhi dengan baik, dan menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan sesuai kelompok umur.

Tabel menunjukkan realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,02% dari nilai 95,78 di tahun 2017 menjadi 95,80 di tahun 2018, capaiannya melebihi target yang telah di tetapkan sebesar 95,05 (*by Roadmap* SPM Dikdas), pencapaian ini diatas nilai rata-rata APM Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yakni 78,30% dan diatas rata-rata nilai APM Nasional tahun 2017 yakni 76,99%. Keberhasilan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang merata dan mudah diakses. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap berupaya bukan hanya mewujudkan pemerataan pendidikan tetapi juga peningkatan mutu dan daya saing siswa. Upaya peningkatan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan antara lain melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di samping dana APBD Kabupaten Pasuruan, juga ditunjang dengan dana BOS.

2.1.2.2.2 Kesehatan

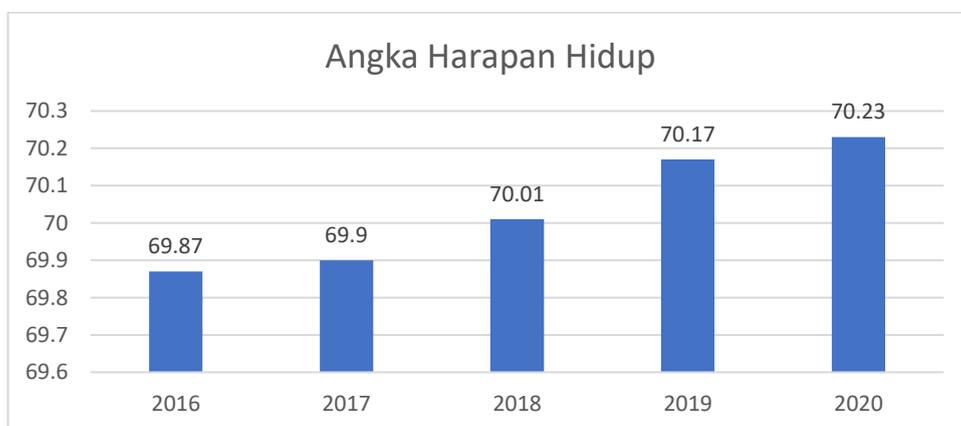
A. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH memiliki kegunaan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan mulai tahun 2016 hingga 2020. AHH Kabupaten Pasuruan di tahun 2016 berada pada angka 69,87% kemudian meningkat diangka 69,9% di tahun 2017. Nilai AHH Kabupaten Pasuruan juga meningkat di tahun 2018 yaitu sebesar 70,01% dan di tahun 2019 berada di angka 70,17%.

Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 berada di angka 70,17% sedangkan pada Tahun 2020 meningkat dan berada pada angka 70,23%. Peningkatan ini harus terus dilakukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik melalui usaha promotif, preventif maupun kuratif.

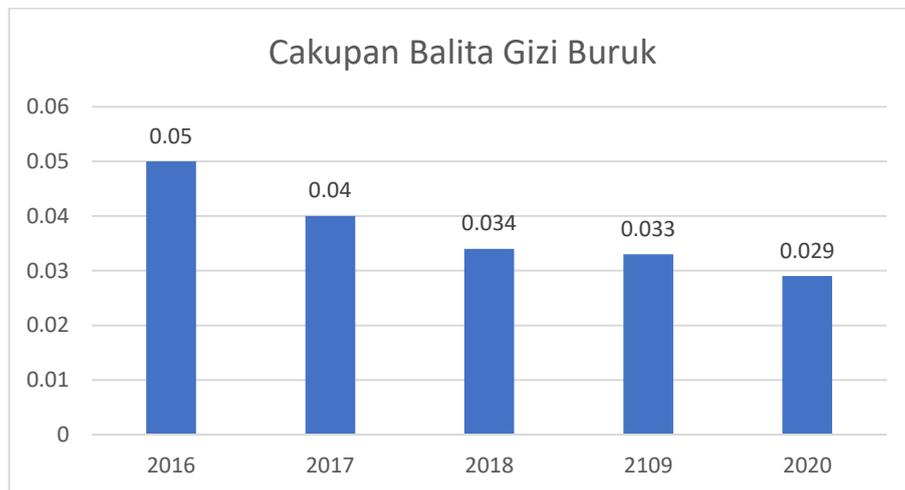


Grafik 2.26. Angka Harapan Hidup Kab. Pasuruan 2016-2020

B. Cakupan Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh

dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan, hal tersebut tetap menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, dikarenakan balita gizi buruk berkaitan erat dengan penanggulangan *stunting*. Oleh karena itu penanggulangan gizi buruk menjadi prioritas.



Grafik 2.27. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2016-2020

Nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2015-2019 selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah mampu menekan kasus balita dengan gizi buruk walaupun tetap perlu upaya lebih baik lagi agar nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan. Data tahun 2016 menunjukkan cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan berada pada angka 0,05% dan menurun diangka 0,04 di tahun 2017. Cakupan balita gizi buruk juga menurun di tahun 2018 yaitu 0,034 dan di tahun 2019 menjadi 0,033%. Nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan



mulai tahun 2019 - 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah mampu menekan kasus balita dengan gizi buruk walaupun tetap perlu upaya lebih baik lagi agar nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan. Data tahun 2019 menunjukkan cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan berada pada angka 0,033% yang kemudian menurun menjadi 0,029% di tahun 2020 Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut.

C. Presentase Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom up*. Lebih lanjut, desa siaga aktif adalah gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong. Sebuah desa dikatakan Desa Siaga Aktif adalah Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveillance* berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tabel 2.15. Persentase Desa siaga aktif tahun 2016-2020 di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Desa siaga aktif	Jumlah Desa	Persentase
2016	360	365	98.63
2017	365	365	100
2018	365	365	100



Tahun	Desa siaga aktif	Jumlah Desa	Persentase
2019	365	365	100
2020	365	365	100

Sumber: LKJiP Kabupaten Pasuruan, 2019

Data Persentase Desa Siaga Aktif Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa capaian desa siaga aktif mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 mencapai angka 98,63%. Mulai tahun 2017 hingga 2020 persentase desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan tercapainya program desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan, namun perlu untuk tetap dikembangkan dan dipertahankan.

2.1.2.2.3 Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Sosial, Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standart Teknis pada urusan sosial didukung oleh beberapa indikator pelayanan dan rehabilitasi sosial diantaranya :

Tabel .2.16 Indikator Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Indikator	2019	2020
Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sosial	1.173	268
Anak terlantar diluar panti sosial	430	13
Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial	576	17
Tuna Sosial terutama gelandangan pengemis di luar panti sosial	30	1
Korban bencana alam daerah	0	9



Kabupaten		
-----------	--	--

Berdasarkan data diatas bahwa pelayanan dan rehabilitasi social pada beberapa indicator mengalami penurunan pada tahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran yang di prioritaskan untuk penanganan pandemic covid-19 di bidang kesehatan dan jarring pengaman social khususnya keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam DTKS. Apabila nama penerima diluar DTKS tidak mendapatkan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial).

2.1.2.2.4 Tenaga Kerja

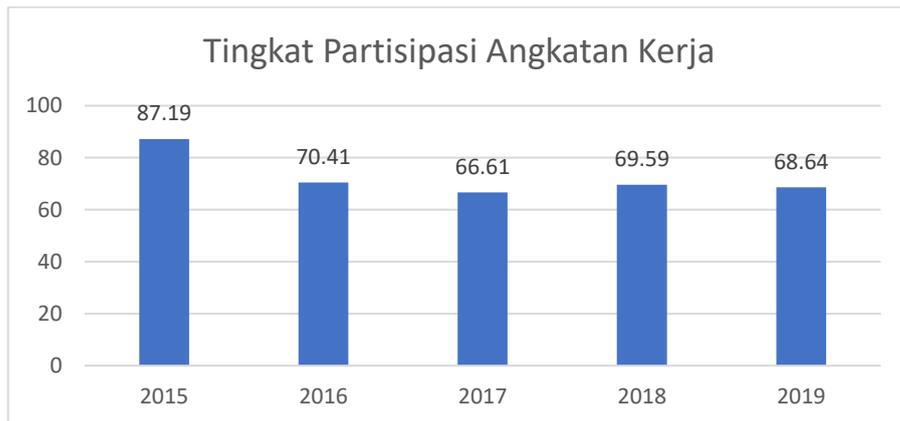
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Lebih lanjut, TPAK adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi angkatan Kerja adalah Jumlah dari mereka yang bekerja ditambah dengan yang mencari kerja terhadap semua penduduk usia kerja.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%}{\text{Penduduk Usia Kerja}}$$

Data TPAK Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Nilai TPAK Kabupaten Pasuruan tahun 2015 berada pada angka 87,19% yang kemudian menurun menjadi 70,41% di tahun 2016 dan 66,61% di tahun 2017. Nilai TPAK Kabupaten Pasuruan kembali naik di tahun 2018

menjadi 69,59% namun turun kembali di tahun 2019 menjadi 68,64%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Pasuruan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 69,59% yang sebelumnya berada pada angka 66,61% di tahun 2018.



Grafik 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan 2015-2019

B. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Tabel 2.17. Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk yang Bekerja	97.24	95.82	95.03	93,89	94,58

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2020

Data Rasio Penduduk yang Bekerja tahun 2017 sebesar 95,03% menurun sebanyak 55.403 orang menjadi 95,82% jika dibandingkan capaian tahun 2016

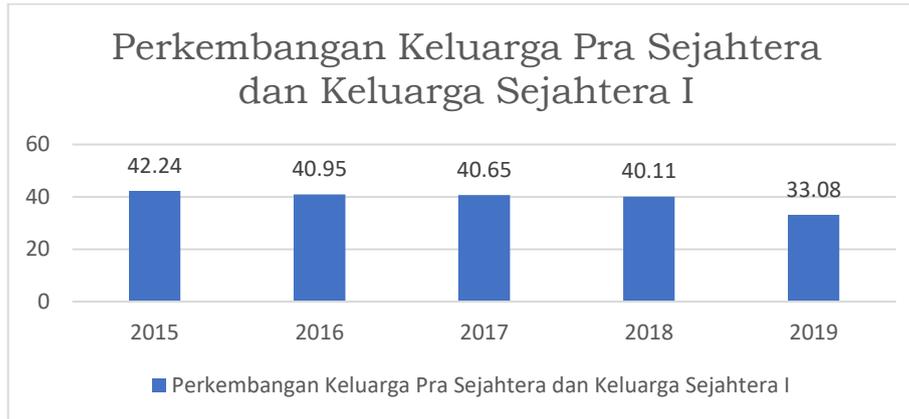


sebesar 833.966 orang. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan. Penurunan ini disebabkan masih terasanya dampak krisis ekonomi global yang ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang masih belum membaik serta investor yang masuk banyak mengambil sikap pada efisiensi dengan kebijakan yang berorientasi pada pengguna mesin produksi (padat modal/bukan padat karya).

2.1.2.2.4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Persentase Tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ini memberikan gambaran mengenai tingkatan kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, Keluarga Sejahtera -I, Keluarga Sejahtera -II, Keluarga Sejahtera -III dan Keluarga Sejahtera -III Plus. Keluarga Pra-Sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatannya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan sosial psikologis (*social psychological needs*). Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra-S dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak.



Grafik 2.29. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Tabel. 2.18. Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-1

No	Uraian / Data	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I	kk	197.750	N/A
2.	Jumlah Keluarga	kk	497.809	N/A
3.	Persentase tahapan keluarga sejahtera yang Pra-S dan KS-I	%	39,72	N/A

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan & BPS

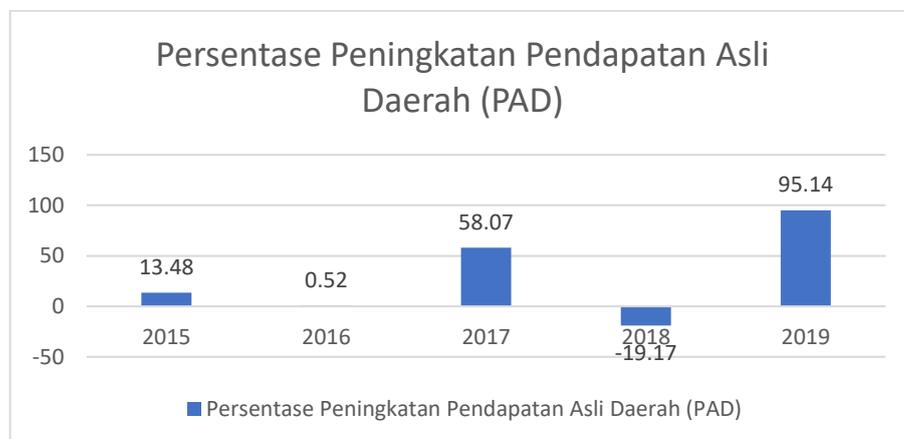
Pada tahun 2020 BKBN sudah menggunakan indikator IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) sehingga untuk capaian tahun 2020 masih menggunakan pada tahun 2019. Akan tetapi bersamaan dengan adanya pandemik maka Pendataan Keluarga akan dilaksanakan pada tahun 2021 (April sampai dengan Mei 2021)

2.1.2.2.5. Keuangan

A. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun sebesar Rp.759.945.807.967,66 meningkat dibanding tahun 2016 sebesar Rp.480.758.720.671,31 sebesar 58,07% atau Rp.279.187.087.296,35. Persentase peningkatan PAD meningkat drastis karena pada tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri memasukkan dana BOS sebesar

Rp. 122.000.000.000,00 ke pos lain-lain PAD, sebagaimana Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang pedoman APBD yang menyebutkan bahwa Dana BOS dimasukkan dalam struktur pendapatan asli daerah dalam objek pos lain-lain pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, dimana Dana BOS dimasukkan dalam rekening Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah objek hibah.



Grafik 2.30 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

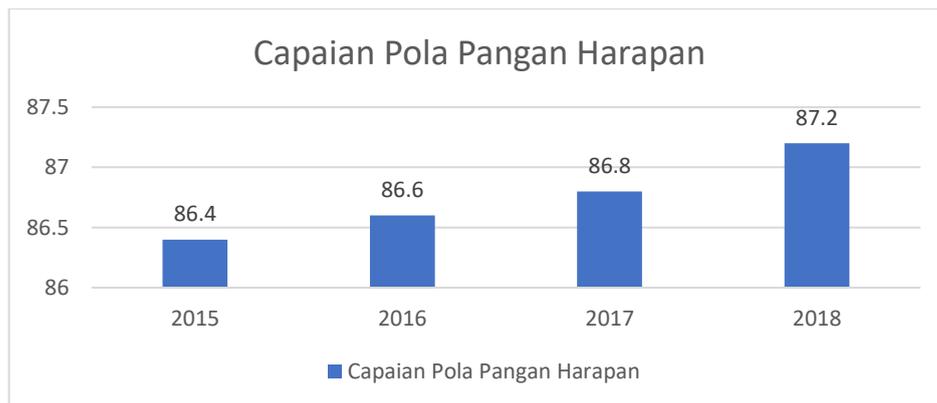
2.1.2.2.6. Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Data PPH Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa data Kebutuhan bahan pangan masyarakat pada tahun 2010 yaitu 2.000 kkal/kapita/hari. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa konsumsi beras diperoleh skor sama dengan skor maksimal PPH yaitu 25. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi beras masih mendominasi dan belum

mampu digantikan oleh bahan pangan non beras (umbi-umbian) serta pangan alternatif lainnya (sorgum) sebagai upaya diversifikasi pangan.

Sedangkan skor konsumsi minyak dan lemak sudah sesuai dengan harapan (nilai PPH). Angka skor PPH 86,8 pada tahun 2017 menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masih belum beragam dan seimbang, hal ini ditunjukkan dengan nilai konsumsi protein hewani dan konsumsi sayuran dan buah masih di bawah angka ideal, sehingga skor PPH belum dapat mencapai nilai skor 100. Meskipun demikian, angka skor PPH 86,8 sudah melampaui target tahun 2017 yaitu sebesar 86,5 meningkat jika dibanding tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) semakin meningkat, disamping itu sebagian besar lokasi survei berada di kecamatan.



Grafik 2.31. Capaian Pola Pangan Harapan

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang memiliki ketersediaan pangan terutama protein hewani dan sayuran di pekarangan cukup optimal. Faktor lain yang berpengaruh adalah dilaksanakan kegiatan pelatihan olahan pangan lokal (umbi-umbian) dan pangan alternatif lainnya (sorgum) dan penyuluhan sumber pangan alternatif sebagai substitusi beras telah mampu meningkatkan skor PPH.

Pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dirubah menjadi :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya ketersediaan pangan



Capaian Kedua indikator ada pada tabel 2.19 .Indek Ketahanan Pangan dan tabel 2.20. Rasio Ketersediaan Pangan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan sistem penilaian dalam suatu indeks ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Tabel 2.19. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Uraian	Satuan	2019	2020
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	69,38	68,78

Sumber: Dinas Peternakan & KP Kabupaten Pasuruan

Pada Tahun 2019 capaian Indeks Ketahanan Pangan mencapai 69,38 indeks , sedangkan pada Tahun 2020 capaian Indeks Ketahanan Pangan sebesar 68,78 indeks. Capaian Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan , Capaian Indeks Ketahanan Pangan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Tahun 2018-2023 sebesar 67 indeks.

B. Rasio Ketersediaan Pangan

Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk.



**Tabel 2.20. Rasio Ketersediaan Pangan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2020**

Uraian	Satuan	2019	2020
Rasio Ketersediaan Pangan	Rasio	2,53	2,58

Sumber: Dinas Peternakan & KP Kabupaten Pasuruan

Rasio Ketersediaan Pangan pada Tahun 2020 mencapai 2,58 rasio meningkat dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 2,53 rasio. Penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama didalam pelaksanaan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat.

2.1.2.3. Fokus Kebudayaan

2.1.2.3.1. Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Kelompok kesenian merupakan salah satu faktor pendukung dari meningkatnya seni budaya dan juga sebagai salah satu faktor pendukung daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2017, kesenian tradisional sebanyak 419 kelompok meliputi: (1) Seni pencak Kembangan; (2) Wayang; (3) Ludruk; (4) Musik kentong terek janger; (5) Reog; (6) Sangar seni tari; (7) Kuda kencak; (8) Bantengan; dan (9) Dll. Hal tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 387 kelompok, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 31 kelompok. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan disbanding tahu 2017 diangka 425 kelompok, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan diangka 420 tetapi pada Tahun 2020 kelompok Kesenian kembali mengalami kenaikan sebanyak 422. Peningkatan ini membuktikan bahwa pelestarian kesenian di Kabupaten Pasuruan tinggi dan kesadaran dari seniman untuk mendaftarkan keseniannya masih tinggi.



Grafik 2.32. Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dirubah menjadi :

1. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi
2. Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi

Capaian Kedua indikator ada pada tabel Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2020.

1. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Tabel .2.21. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Uraian	Satuan	2019	2020
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi	jenis	15	16
Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi	kelompok	420	422

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

Budaya adalah segala hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya meliputi produk teknologi dan kebendaan lainnya, rasa meliputi jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial, sedangkan cipta meliputi kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi pada Tahun 2020 mencapai angka 16, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 yang berada pada angka 15.



Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi meliputi : benda 1 jenis, Bangunan 10 jenis, Struktur 1 jenis, Situs 2 jenis, Kawasan Situs 1 jenis.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Wajib Dasar, Pelayanan Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintah. Adapun Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan Layanan Urusan Pemerintah Wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Sementara Layanan Urusan Pemerintah Tidak Wajib meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Kemudian selanjutnya yaitu Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. Berikutnya, yaitu Fungsi Penunjang Pemerintah adalah perencanaan pembangunan. Berikut penjelasan serta data terkait.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Pada urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.1.3.1.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar



Pelayanan Urusan Wajib Dasar merupakan segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berbagai indikator ditampilkan untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan Pelayanan Urusan Wajib Dasar pada Kabupaten Pasuruan.

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan di Kabupaten Pasuruan. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan yang sesuai dengan standart pelayanan minimal urusan pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

1 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data dasar yang digunakan:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Penduduk usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, tingkat SMP adalah usia 13 - 15 tahun,
- c. Siswa usia sekolah sesuai jenjangnya, misalnya siswa usia 7-12 tahun di tingkat SD, siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP.

Dengan demikian bahwa angka partisipasi kasar tidak melihat pada batasan usia sekolah tertentu pada setiap jenjang pendidikan, namun lebih kepada jumlah siswanya di setiap jenjang pendidikannya. Berikut gambaran pencapaian APK sebagai berikut.

Capaian Angka Partisipasi Kasar pada pendidikan anak Usia Dini (PAUD), SD/MI dan SMP/MTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel.2.22. APK Paud, SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2020**

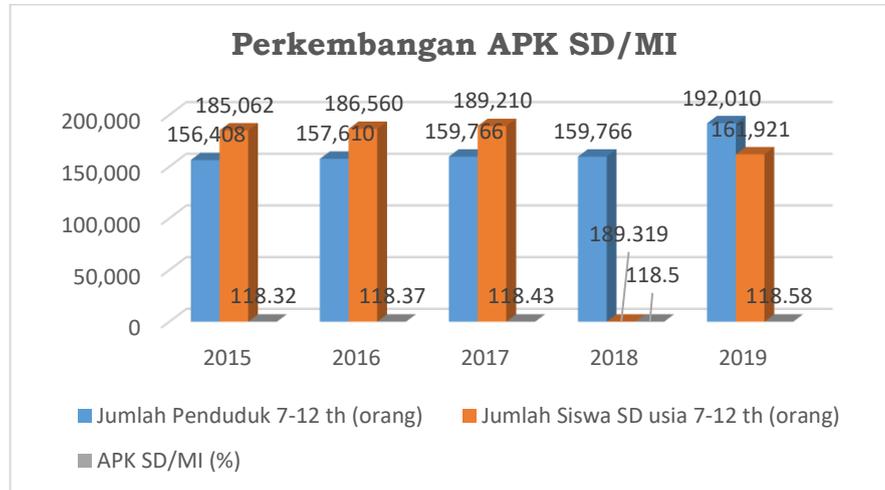
Indikator	2018	2019	2020
APK PAUD	92,40	92,43	92,45
APK SD/MI	118,5	118,58	118,58
APK SMP/MTs	102	102,42	102,42

Berdasarkan tabel di atas, angka partisipasi kasar baik dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs sudah mencapai target, tetapi yang membutuhkan perhatian adalah angka partisipasi kasar pada Pendidikan Anak Usia Dini.

Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2018 sampai 2020 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI dan SMP/MTs telah terpenuhi, sedangkan ketersediaan pelayanan pendidikan jenjang PAUD perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan meningkatkan kesadaran masyarakat, terkait pentingnya pendidikan anak usia dini bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya.

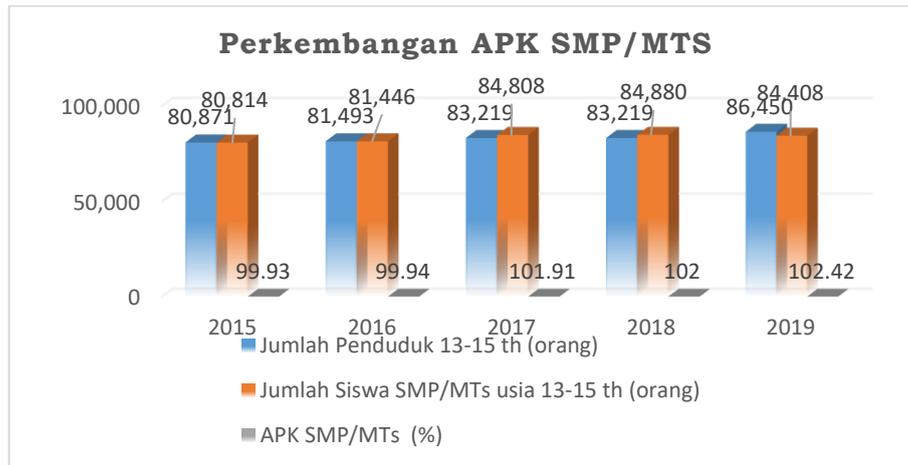
Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2019 mencapai 118, 58%. Sementara Capaian angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2018 sebesar 118,50% atau sejumlah 189.319 siswa SD/MI dari 159.766 usia penduduk 7-12 tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 118,43%, terjadi peningkatan sebesar 0,07%, capaian tahun 2017 sesuai target yang telah ditetapkan sebesar yakni sebesar 118,49%, pencapaian ini di atas nilai rata-rata APK Provinsi Jawa Timur yakni 108.43% dan di atas rata-rata nilai APK Nasional tahun 2017 yakni 105,89%. Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2017 ke 2018 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI telah terpenuhi serta diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Upaya ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya

dalam memberikan kesadaran dan semangat kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.



Grafik 2.33. Perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Dapat diketahui dari gambar bahwa Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2019 mencapai 102,42% dimana melampaui dari capaian tahun 2018. Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2018 sebesar 102.00% atau 84.880 siswa SMP/MTs dari 83.219 usia penduduk 13-15 tahun, dibandingkan tahun 2017 sebesar 101.91%, terjadi peningkatan sebesar 0.09% dan sesuai target yang ditentukan sebesar 102.00%. Pada jenjang SMP/MTs adalah bagian dari program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan realisasi angka partisipasi kasar ini bersamaan dengan upaya peningkatan di jenjang SD/MI dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih luas. Peningkatan realisasi angka partisipasi kasar dari tahun 2017 ke 2018 ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan beserta masyarakat dalam penyediaan lembaga sekolah disisi lain dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kecakapan/ketrampilan siswa, *support* anggaran. Pencapaian ini diatas nilai rata-rata APK Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yakni 90.90%. Hal ini dilakukan sebagai usaha dalam mempersiapkan wajib belajar pendidikan 12 tahun atau pendidikan menengah.



Grafik 2.34. Perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Seperti halnya perhitungan APM, perhitungan APK apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya maka angka partisipasi kasar SD/MI dan SMP/MTs telah mengalami peningkatan dikarenakan upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan yang melakukan layanan pendidikan semaksimal mungkin di semua jenjang pendidikan. Kedepan indikator APK maupun APM baik SD/MI maupun SMP/MTs yang telah melampaui angka di atas 100%, tidak lagi termasuk dalam penilaian indikator kinerja pelayanan pendidikan, namun lebih mengarah pada pemerataan layanan dan pemerataan mutu layanan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.

2 Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- Penduduk usia sekolah SD adalah 7-12 tahun, tingkat SMP adalah usia 13-15 tahun;
- Siswa usia sekolah sesuai jenjangnya, misalnya siswa usia 7-12 tahun di tingkat SD, siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP.



Secara rinci dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi murni lebih menunjukkan pada tingkat partisipasi sekolah, penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah tidak memperhitungkan pada kelompok umur tertentu, melainkan pada jumlah semua penduduk yang terdaftar pada sekolah sesuai jenjangnya. Berikut dapat di lihat gambaran jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12; 13-15; yang bersekolah di SD/MI; SMP/MTs; terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia 7-12; 13-15; tahun pada periode yang sama. APM dapat dijelaskan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.23. Perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI (%)	99,99	100,00	100,00	100,00	100
APM SMP/MTs	95,74	95,78	95,80	96	96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka partisipasi murni baik dari SD/MI, SMP/MTs sudah mencapai target, tetapi yang membutuhkan perhatian adalah angka partisipasi murni pada pendidikan jenjang SMP/MTs. Peningkatan realisasi angka partisipasi murni dari tahun 2018 sampai 2020 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan di jenjang SD/MI telah terpenuhi, sedangkan ketersediaan pelayanan pendidikan jenjang SMP/MTs perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan,



bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya.

Tabel diatas menunjukkan realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-SD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 telah mencapai 100%, capaiannya telah mencapai angka ideal sesuai target yang telah di tetapkan sebesar sebesar 100% dan pencapaian ini diatas nilai rata-rata APM Provinsi Jawa Timur yakni 97.14% dan diatas rata-rata nilai APM Nasional yakni 93,02%. Pencapaian realisasi angka partisipasi murni mulai dari tahun 2017 ke 2018 ini menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan pendidikan untuk usia sekolah telah terpenuhi dengan baik, dan menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan sesuai kelompok umur. Upaya ini adalah usaha Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya dalam memberikan kesadaran dan semangat kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Tabel menunjukkan realisasi Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,02% dari nilai 95,78 di tahun 2017 menjadi 95,80 di tahun 2018, capaiannya melebihi target yang telah di tetapkan sebesar 95,05 (*by Roadmap* SPM Dikdas), pencapaian ini diatas nilai rata-rata APM Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yakni 78,30% dan diatas rata-rata nilai APM Nasional tahun 2017 yakni 76,99%. Keberhasilan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang merata dan mudah diakses. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap berupaya bukan hanya mewujudkan pemerataan pendidikan tetapi juga peningkatan mutu dan daya saing siswa. Upaya peningkatan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten pasuruan antara lain melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di samping dana APBD Kabupaten Pasuruan, juga ditunjang dengan dana BOS.



3 Angka Putus Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah. Angka putus sekolah dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pendidikan SDM di daerah tertentu. Angka putus sekolah di definisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, seperti jenjang pendidikan SD maupun SMP.

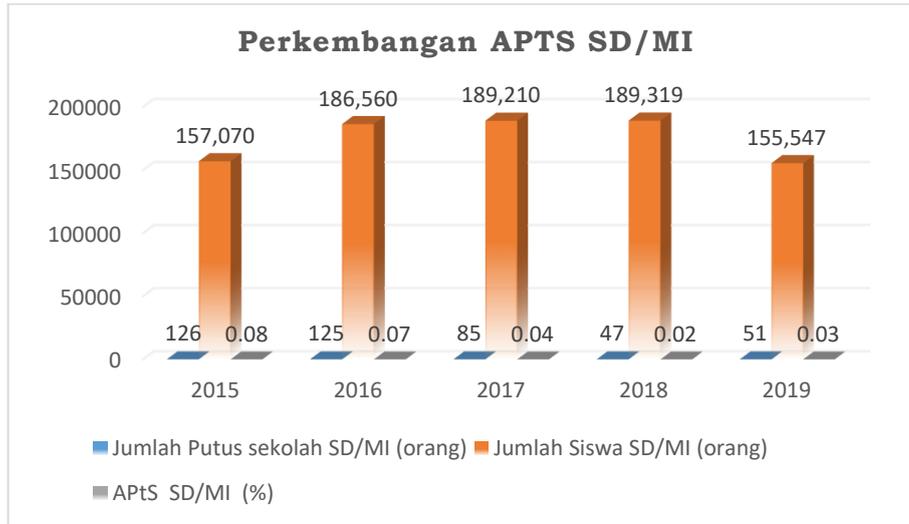
Berikut adalah capaian dalam 3 tahun terakhir.

Tabel.2.24. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
APtS (SD/MI)	0,02	0,02	0,02
APtS (SMP/MTs)	0,02	0,02	0,02

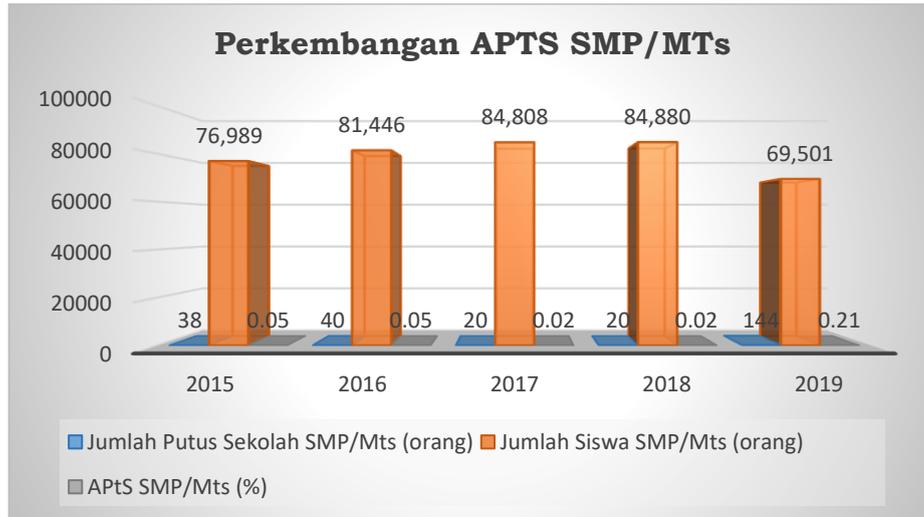
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase angka putus sekolah mulai tahun 2018 hingga 2020 relatif kecil dan tidak mengalami perubahan secara signifikan. Keberhasilan terhadap penurunan ini atas usaha dan partisipasi Pemerintah baik pusat maupun daerah seperti BOS, BOP, Bansos, hibah dan lain lain.

Pada gambar dapat diketahui bahwa Persentase angka putus sekolah tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu mencapai 0,03%. Persentase putus sekolah SD/MI pada tahun 2018 sebesar 0.02% atau 47 siswa dari 189.319 siswa lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,04% atau 85 siswa dari 186.210 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa angka putus sekolah SD/MI berkurang dari tahun ketahun menurun secara signifikan. Keberhasilan terhadap penurunan ini atas usaha dan partisipasi Pemerintah baik pusat maupun daerah seperti BOS, BOP, Bansos, hibah dan lain lain.



Grafik 2.35. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

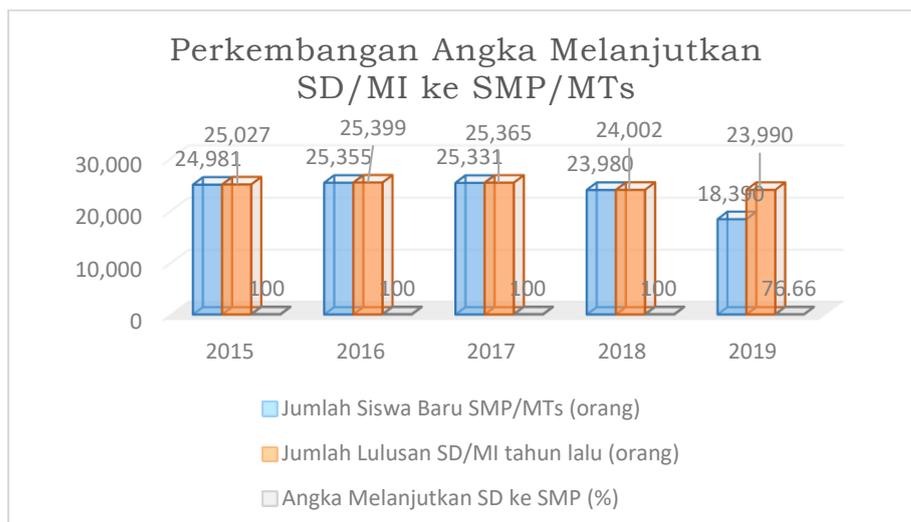
Dapat diketahui dari gambar indikator persentase putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 0,21%. Sedangkan Pada jenjang SMP /MTs persentase putus sekolah tahun 2018 sebesar 0,02% atau 21 siswa dari 84.880 siswa, capaian ini sama dengan capaian tahun 2017, namun bila dicermati kesamaan persentase bukan berarti sama, secara absolut lebih rendah dibanding dengan tahun 2017 sebesar 0,02% atau 20 siswa dari 84.880 siswa atau sama dengan target yang ditentukan, walaupun dari sisi jumlah siswa lebih meningkat. Dalam upaya menurunkan realisasi angka putus sekolah adalah bagian dari program penuntasan Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berusaha dengan melaksanakan kegiatan diantaranya pembinaan SMP terbuka, mendirikan SMP satu atap, menyediakan dana BOS, Bansos, BOP APBD, hibah APBD dan lain lain.



Grafik 2.36. Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

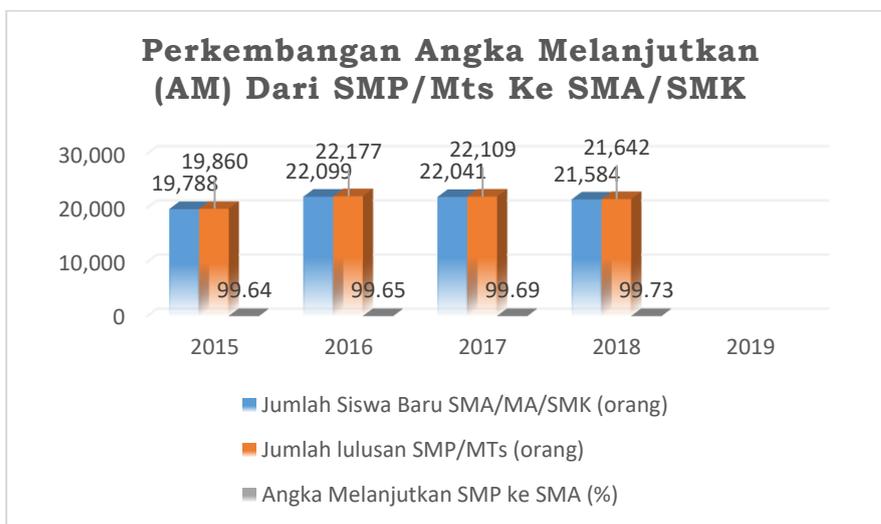
4 Angka Melanjutkan Sekolah

Untuk angka melanjutkan ini pembahasan difokuskan pada tingkat pendidikan SD dan Sekolah Menengah Pertama (karena Wajib Dikdas 9 Tahun). Angka melanjutkan adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I (kelas 7 untuk SMP, kelas 10 untuk SMA/SMK/MA) dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Berikut merupakan Angka Melanjutkan di SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.37. Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI Ke SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Dapat diketahui pada gambar capaian tahun 2019 Pada jenjang SD/MI angka melanjutkan ke SMP/MTs tahun 2018 sebanyak 100%, atau 23.980 siswa apabila dibandingkan dengan capaian ditahun 2017 menunjukkan kenaikan sebesar 0,04% yakni sebesar 100%. Artinya bahwa semakin tinggi angka melanjutkan semakin baik, semua siswa lulusan SD dan MI melanjutkan ke jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi yakni SMP/MTs. Sementara pada tahun 2019 persentase angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019 yaitu 100%.



Grafik 2.38. Perkembangan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs Ke SMA/SMK di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Pada jenjang SMP/MTs angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA tahun 2018 sebanyak 99,91%, atau 21.584 siswa apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 menunjukkan kenaikan sebesar 0,04%. Tren kenaikan tersebut menggambarkan kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Pasuruan semakin baik, tidak saja pada Wajib Dikdas 9 tahun namun secara pasti beberapa tahun kebelakang telah merambah pada Wajib belajar 12 tahun.

Angka melanjutkan sekolah dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat pendidikan SDM di daerah tertentu. Angka melanjutkan sekolah dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah



siswa baru dibandingkan dengan jumlah kelulusan tingkat pendidikan dibawahnya.

Tabel.2.25 Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020

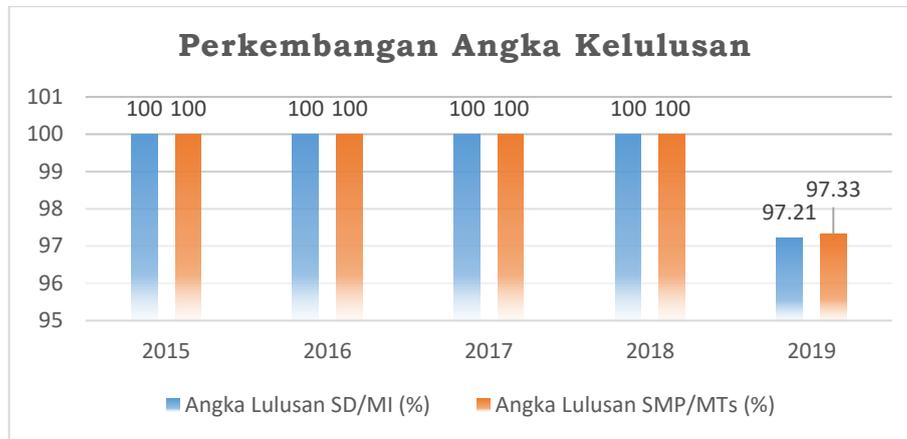
Indikator	2018	2019	2020
AM SD/MI	99,91	99,94	99,94
AM SMP/MTs	99,73	99,83	99,83

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase angka melanjutkan sekolah mulai tahun 2018 hingga 2020 angka melanjutkan relatif tinggi dan ada kecenderungan naik setiap tahun. Keberhasilan terhadap peningkatan ini atas usaha dan partisipasi Pemerintah baik pusat maupun daerah seperti BOS, BOP, Bansos, hibah dan lain lain. Selain itu adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya.

5. Angka Kelulusan

Terdapat faktor, atau indikator yang memberikan sumbangsih, serta menjadi tolak ukur pula terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Pasuruan yaitu adalah Angka Kelulusan baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Angka Kelulusan (AL) merupakan cerminan dari pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Angka Kelulusan (AL) akan memberikan dampak positif terhadap kualitas sekolah serta terhadap Kabupaten Pasuruan. Karena, apabila Angka Kelulusan (AL) sekolah tinggi di Kabupaten Pasuruan, maka akan mencitrakan bahwa potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan terutama usia 7-15 tahun keatas sangat luar biasa dan berpendidikan, dan akan membuat nama suatu instansi pendidikan (sekolah) menjadi lebih baik. Dalam hal ini, diperlukan perhatian dan kerjasama yang baik dan bersinergi antara segala elemen yang dapat menunjang tingginya

Angka Kelulusan (AL) di kabupaten Pasuruan. Berikut adalah capaian dalam 5 tahun terakhir.



Grafik 2.39. Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Angka Kelulusan SD/MI mengalami penurunan menjadi 97,21%. Sementara untuk lulusan SMP/MTs pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 97,33%. Untuk pendidikan SD/MI realisasi angka kelulusan tahun ajaran 2017/2018 sebesar 100% atau dari 24.002 siswa peserta ujian dinyatakan lulus, hal ini sama dengan realisasi pada tahun ajaran 2016/2017 sebesar 100% dan sama dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 100%. Sementara untuk pendidikan SMP/MTs realisasi angka kelulusan tahun ajaran 2017/2018 sebesar 100% atau dari 21.642 siswa peserta ujian dinyatakan lulus, hal ini sama dengan realisasi pada tahun ajaran 2016/2017 sebesar 100% dan sama dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 100%.

Tabel. 2.26. Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
AL SD/MI	100	97,21	100
AL SMP/MTs	100	97,33	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase angka kelulusan mulai tahun 2018 hingga 2020 relatif tinggi. Keberhasilan terhadap



peningkatan ini atas usaha dan partisipasi Pemerintah baik pusat maupun daerah seperti BOS, BOP, Bansos, hibah dan lain lain. Selain itu adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholder* pendidikan lainnya

6. Rasio guru terhadap murid

Seorang guru tidak hanya sekedar *transfer of knowledge* saja, akan tetapi juga harus membentuk kepribadian peserta didik sesuai kultur yang ada. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid dan jumlah guru yang tersedia, agar tercapai mutu pembelajaran, berikut dapat di lihat pada:

➤ SD/MI

- a. Kondisi SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus, di Kabupaten Pasuruan terpotret sbb: sebesar 96% atau 969 dari 1009 SD/MI memiliki cukup guru, sebesar 4% atau 40 SD/MI belum tercukupi sesuai standar, hal ini dapat disebabkan karena: penempatan tenaga guru belum merata, terdapat guru pensiun belum ada pengganti.
- b. Kondisi kecukupan guru SD/MI, dengan indikator satu guru untuk setiap 32 peserta didik (siswa) tergambar sbb: yakni capaian kecukupan guru sebesar 97% atau 979 dari 1009 SD/MI, masih terdapat 3% atau 30 SD/MI belum tercukupi gurunya. Masih terdapat guru yang merangkap mengajar, banyak guru pensiun belum ada pengganti.

➤ SMP/MTs

- b. Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 guru untuk setiap rumpun mata pelajaran,



menunjukkan sbb: (1) sebesar 18% atau 53 dari 288 SMP/MTs terpenuhi, (2) sebesar 82% atau 235 SMP/MTs belum memiliki, hal ini dapat disebabkan karena: penempatan tenaga guru mata pelajaran tertentu yang belum merata, banyak tenaga guru mata pelajaran tertentu memasuki masa pensiun dan belum ada pengganti.

B. Kesehatan

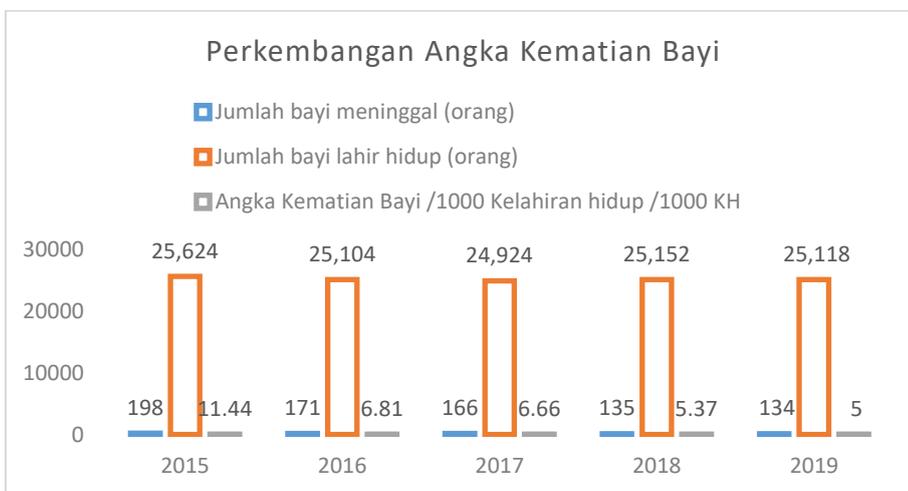
Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan dalam empat tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Target dari

Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 12 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif.



Grafik 2.40. Perkembangan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 angka kematian bayi mengalami penurunan yaitu sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi Kabupaten Pasuruan tahun 2018 tercapai sebesar 5,37 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami penurunan 1,29 jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 6,66 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2018 sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup maka pencapaian tahun 2018 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Jumlah kematian bayi tahun 2018 sebanyak 135 kasus, menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 166 kasus. Penyebab kematian terbesar adalah karena : BBLR sebanyak 52 kasus (38,5%), asfiksia sebanyak 25 kasus (18,51%), Sepsis sebanyak 13 kasus (9,62%), kelainan kongenital



bawaan sejumlah 20 kasus (14,81%), lain lain sebanyak 17 kasus, Pneumonia sebanyak 4 kasus (2,96%), Infeksi sebanyak 4 kasus (2,96%).

Kematian bayi terbanyak karena BBLR disebabkan Ibu Hamil dalam keadaan KEK dan PEB, Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan asfiksia oleh bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi pada bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil agar bayi asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan. Kasus Kematian bayi yang terjadi ditolong oleh Bidan sebanyak 70 kasus (51,85%), Dokter sebanyak 59 kasus (43,70%), dan untuk persalinan yang ditolong dukun sebanyak 6 kasus (4,44%). Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 95,6%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Dari 135 bayi yang meninggal, kasus kematian di RSUD Bangil sebanyak 89 (65,92%) kasus kematian terjadi di RS Luar Wilayah sebanyak 12 (8,88%), RS Swasta sebanyak 7 (5,18%), BPM sebanyak 2 (1,48%), Puskesmas sebanyak 1 (0,74%), di Perjalanan sebanyak 6 (4,44%), Rumah Ibu sebanyak 18 (13,33%). Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Asuhan

Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, seperti pada tabel berikut :

Tabel.2.27 . Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	Jml bayi meninggal	134	105
2	Jml lahir hidup	25.118	23.702
3	AKB/1.000 KH	5,33	4,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan LKPJ 2020

Angka Kematian Bayi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 tercapai sebesar



4,40 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,33 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari target RPJMD untuk tahun 2020 sebesar 6,5 per 1.000

kelahiran hidup maka pencapaian tahun 2020 sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Jumlah kematian bayi tahun 2020 sebanyak 105 kasus, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 135 kasus. Penyebab kematian terbesar adalah karena: Asfiksia sebanyak 44 kasus (42%) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 31 kasus (29%), kelainan kongenital bawaan sejumlah 14 kasus (13%), Sepsis sebanyak 5 kasus (5%), lain lain sebanyak 10kasus (10%). Kematian bayi terbanyak karena Asfiksia disebabkan karena mendapat penanganan Resusitasi yang kurang maksimal, dan banyak ibu Hamil Yang terkonfirmasi positif Covid 19. Saat mau merujuk sangat kesulitan karena tidak semua Rumah Sakit bisa menerima ibu hamil dengan Rapid test Reaktif. Sehingga penanganan bayi menjadi terlambat selain itu



ketrampilan petugas perlu selalu di tingkatkan dan di update sehingga lebih siap dalam penanganan ibu Hamil di Masa Pandemi Covid 19. Disamping penyebab diatas, salah satu penyebab yang lainnya adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang disebabkan karena ibu Hamil Mengalami KEK dan Anemia sehingga Bayi mengalami hambatan Tumbuh Kembang Sejak dalam Kandungan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk menekan angka kematian bayi diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil di Posyandu dengan revitalisasi posyandu (ibu hamil sadar Posyandu);
3. Penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Gawat darurat Maternal Neonatal, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Grafik 2.41. Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Berdasarkan data tahun 2019 dapat diketahui bahwa angka kematian ibu mengalami penurunan yaitu sebesar 83,61 per 1000.000 kelahiran hidup. Capaian angka kematian ibu Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sebesar 111,32 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2018 menurun dibandingkan capaian tahun 2017 yakni sebesar 27,06 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2018 sebanyak 28 kasus sedangkan tahun 2017 sebanyak 21 kasus. Naiknya angka kematian ibu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan khususnya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC/ *Ante Natal Care*) pada ibu hamil secara kontinyu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Bidan);
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal;
3. Membuat SIP (sistem informasi posyandu);

4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni
 - a. Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu
 - b. Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).
 - c. Pertemuan kader KIBBLA
 - d. Audit Maternal Perinatal
 - e. Pengembangan P4K di desa masalahat
 - f. Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak
 - g. Supervisi fasilitatif
 - h. Pelatihan APN
 - i. Pelatihan Kelas ibu hamil
 - j. Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA).
 - k. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu.
 - l. Drill *emergency* kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas.
 - m. Meningkatkan kerjasama sistem rujukan kesehatan
 - n. Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur.

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh



dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun disbanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals) harus dibawah 70 per 100.000 Kelahiran



Hidup pada tahun 2030 serta target RPJMD adalah 83 per 100.000 Kelahiran Hidup untuk tahun 2020.

Capaian angka kematian ibu Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 sebesar 80,00 per 100.000 kelahiran hidup menurun dibandingkan capaian tahun 2019 yakni sebesar 83,61 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 21 kasus sedangkan tahun 2020 sebanyak 19 kasus. Menurunnya angka kematian ibu menjadi menunjukkan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan khususnya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan.

Tabel.2.28 . Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	Jml ibu melahirkan yg mati	21	19
2	Jumlah kelahiran hdp	25.118	24.887
3	AKI /100.000 KH	83,61	76,34

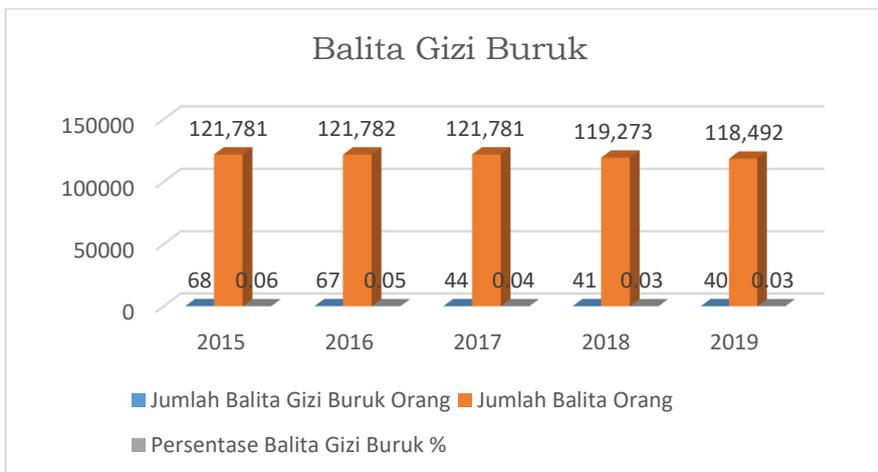
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penurunan angka kematian ibu adalah:

1. Membuat SIP (Sistem Informasi Posyandu)
2. Dilakukan scoring (penilaian) faktor resiko, bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk melakukan pendataan kepada para ibu hamil yang tinggal di desa;
3. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;
5. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2019 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dengan capaian sebesar 0,03% atau sebanyak 40 balita dari 118.492 balita. Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2018 sebesar 0,03% atau sebanyak 41 balita dari 119.273 balita yang diperiksa di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar 0,04% atau 44 balita maka mengalami penurunan sebesar 0,01%. Capaian tahun 2018 ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 0,03%. Kedepannya penanganan balita gizi buruk akan lebih ditingkatkan.



Grafik 2.42. Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase balita dengan gizi buruk menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini menggambarkan kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus

gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tabel .2.29. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

NO	Uraian	2019	2020
1	Jml balita gizi buruk	40	34
2	Jml balita	118.492	117.832
3	% Balita Gizi Buruk	0,03	0,029

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan



Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,029% atau sebanyak 34 balita dari 117.832 balita di Kabupaten Pasuruan. Persentase capaian tahun 2020 sama dengan capaian di tahun 2019, tetapi jumlah balita yang mengalami gizi buruk mengalami penurunan dari 40 balita menjadi 34 balita.

Dalam menanggulangi kasus balita gizi buruk, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain :

- 1) Melakukan sejumlah intervensi spesifik dan sensitive, diantaranya dengan sosialisasi kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil terkait pemenuhan gizi;
- 2) Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan (PMT-P) kepada balita dan bumil KEK (ibu hamil Kekurangan Energi Kronis).
- 3) Melakukan kegiatan Evaluasi program gizi di Puskesmas secara rutin.
- 4) Meningkatkan kegiatan Surveylans Gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sehingga penemuan penanganan kasus sedini mungkin.



- 5) Mengoptimalkan dukungan dari pihak terkait diantaranya CSR untuk kegiatan penanganan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan.

4. Angka kesehatan penderita hipertensi

Hipertensi atau **tekanan darah tinggi** adalah kondisi ketika **tekanan darah** di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Pasuruan dapat di sajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.30. Perkembangan Jumlah Penderita Hipertensi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Jumlah penderita hipertensi	397.488	289.787

Berdasarkan tabel di atas jumlah penderita hipertensi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan bahwa pengobatan dan tata laksana pada penyakit hipertensi yang merupakan penyakit sistemik menahun menunjukkan kemajuan secara sigifikan sehingga pada saat control kunjungan di fasilitas kesehatan di dapatkan hasil pemeriksaan kondisi tekanan darah penderita mengalami penurunan mendekati angka normal.

5. Angka Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Jumlah penderita Diabetes Militus di Kabupaten Pasuruan dapat di sajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.32. Perkembangan Jumlah Penderita Diabetes Militus di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2020

Indikator	2019	2020
Jumlah penderita diabetes militus	27.336	25.929

Berdasarkan tabel di atas jumlah penderita diabetes militus dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan penatalaksanaan diabetes militus (asupan makanan dari bahan karbohidrat dan glukosa), kepatuhan masyarakat terhadap penatalaksanaan pengobatan diabetes militus yang meliputi penatalaksanaan diet dan keteraturan minum obat yang menyebabkan gula darahnya terkontrol.

6. Angka Penderita gangguan jiwa berat

Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Jumlah penderita gangguan jiwa di Kabupaten Pasuruan dapat di sajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.33. Perkembangan Jumlah Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2020

Indikator	2019	2020
Jumlah penderita gangguan jiwa berat	3.039	3.148

Berdasarkan tabel di atas jumlah penderita gangguan jiwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang berdampak pada banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan sementara kebutuhan hidup harus dipenuhi.

7. Angka Kesehatan orang dengan TBC

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. Kasus TBC di Kabupaten Pasuruan harus ditemukan dan diobati sehingga tidak lagi menjadi sumber penularan di masa



akan dating selain faktor lingkungan dan perilaku hidup bersih & sehat turut mempengaruhi penularan TBC. Berikut ini data jumlah penerima TBC :

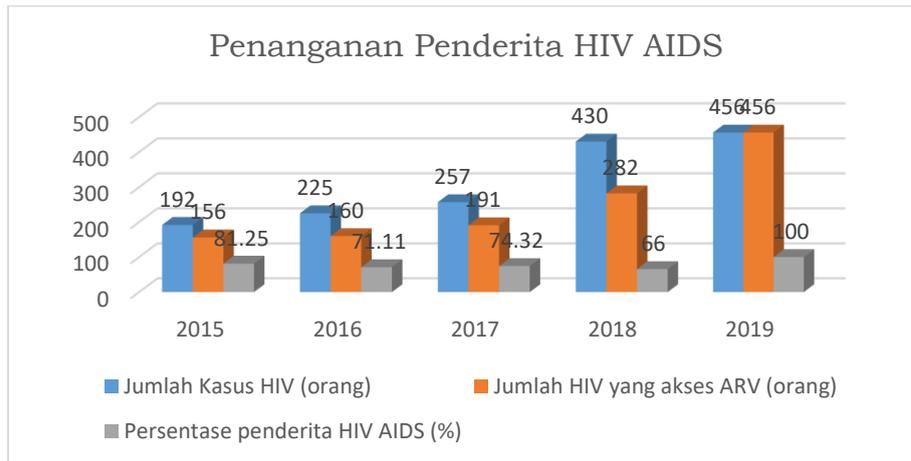
Tabel.2.34. Perkembangan Jumlah Penderita TBC di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2020

Indikator	2019	2020
Jumlah penderita TBC	3.181	1753

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penderita TBC pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan sinergitas, komitmen serta dukungan lintas sektor mulai tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan Program Inovasi GREBEK TB yang di rekomendasikan oleh Pemerintah Pusat.

8. Angka penderita HIV

Salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan HIV adalah pengobatan Anti Retro Virus (ARV). Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pengobatan ARV mengalami peningkatan dari 2013 sampai 2015 karena masih beberapa fasilitas kesehatan yang bisa melakukan pemeriksaan HIV. Pada tahun 2015 fasyankes yang melakukan pemeriksaan bertambah sehingga kasus yang ditemukan juga bertambah. Namun jumlah penderita HIV yang mendapatkan ARV mengalami penurunan karena layanan Pendampingan Dukungan Pengobatan (PDP) dimana layanan ini memberikan pengobatan ARV hanya ada 1 di Kabupaten Pasuruan yaitu di RSUD Bangil. Sehingga keterbatasan akses (biaya dan transportasi) membuat penderita HIV tidak mau ke RSUD Bangil.



b. Grafik 2.43. Penanganan Penderita HIV AIDS tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan

Jumlah penderita HIV yang mendapatkan ARV masih kurang disebabkan kurangnya layanan ARV sebelum tahun 2019 yaitu hanya ada 1 di Kabupaten Pasuruan yaitu di RSUD Bangil. Bertambahnya layanan Pendampingan Dukungan Pengobatan (PDP) menjadi 9 layanan di tahun 2019 ditambah 3 layanan lagi di tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan layanan memberikan pengobatan ARV.

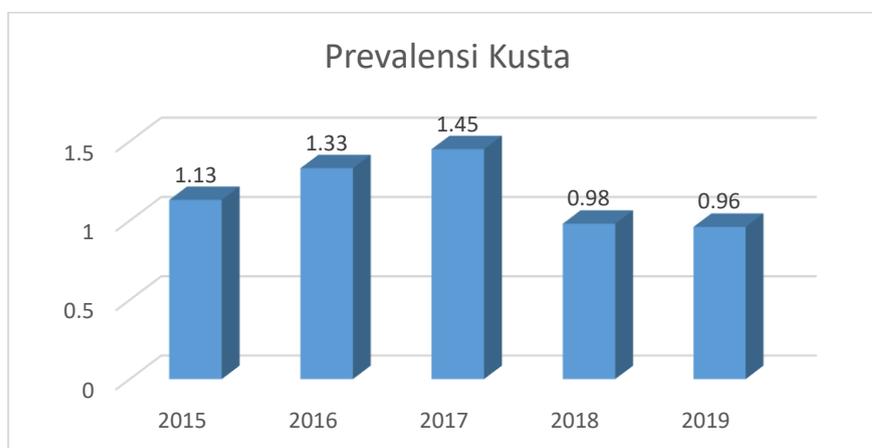
Tabel.2.35. Perkembangan Jumlah Penderita HIV AIDS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2020

Indikator	2019	2020
Jumlah Penderita HIV	28.279	25.493

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penderita HIV pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya Program Inovasi ODHA LINK (Orang Dengan HIV AIDS LINK) yang merupakan program penanganan HIV AIDS yang komprehensif dan integrative yang meliputi promotive preventif, kuratif dan rehabilitative bagi penderita HIV AIDS dan keluarga.

9. Angka Penderita Kusta

Berdasarkan Hasil capaian program penanggulangan penyakit kusta bahwa prevalensi rate penyakit kusta Kabupaten Pasuruan tidak terjadi perubahan yang signifikan, dari tahun 2014 sebesar 1,37, pada tahun 2015 prevalensinya adalah 1,13, prevalensi pada tahun 2016 adalah 1,33, sampai dengan tahun 2017 terjadi kenaikan prevalensi kembali. Hal tersebut diakibatkan adanya program *intensive case finding* yang mana kasus penyakit kusta semakin banyak ditemukan. Maka dengan banyaknya kasus yang ditemukan menyebabkan prevalensi yang tinggi. Kabupaten Pasuruan ditargetkan dapat eliminasi tahun 2018, tetapi bila dilihat kemampuan dan masih banyaknya temuan kasus yang didapatkan petugas dan layanan kesehatan, maka target eliminasi kusta di Kabupaten Pasuruan diusahakan menjadi tahun 2019. Jadi akhir tahun 2019 Kabupaten Pasuruan dapat mencapai eliminasi kusta yaitu prevalensi sebesar 0,99 per 100.000 penduduk atau kurang dari 1 per 100.000 penduduk.



Grafik 2.44. Prevalensi Kusta Tahun 2015-2019 Kab. Pasuruan

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Jumlah kasus baru kusta menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 yaitu ada 59 kasus laki-laki dan ada 35 kasus Perempuan (sehingga total kasusnya sebanyak 94 kasus dan *Case detection rate* CDR



nya adalah 5,74 / 100.000 penduduk). Angka tersebut memang turun dari tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh adanya pembatasan terkait pandemi covid 19 tahun 2020. Kemudian kegiatan *intensive case finding* yang tidak dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kasus terdaftar pada tahun 2020 adalah sebanyak 102 kasus sehingga itu mempengaruhi prevalensi kasus yaitu sebesar 0,62 / 10.000 yang mana lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kabupaten Pasuruan sudah eliminasi Kusta pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2020 ini adalah kegiatan memelihara dan menjaga eliminasi kusta. Adapun data penderita kusta di Kabupaten Pasuruan yaitu :

Tabel.2.36. Perkembangan Jumlah Penderita Kusta di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2020

Indikator	2019	2020
Jumlah Penderita Kusta	178	94

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penderita kusta pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya Program Inovasi SURYA MAS JELITA (Penanganan Penderita Kusta Secara Komprehensif) yang merupakan program penanganan kusta yang komprehensif dan integrative yang meliputi promotive prefentif, kuratif dan rehabilitative bagi penderita kusta dan keluarga.

10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di unit kesehatan di Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan kesehatan di Puskesmas secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan selanjutnya. Bagi

masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja unit pelayanan kesehatan.

Tabel 2.37. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2020

TAHUN	JML IKM	JML PUSK	PERSENTASE
Th 2018	2.709	33	82,08
Th 2019	2.730	33	82,72
Th. 2020	2.731	33	82,75

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Salah satu Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD

Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien atau keluarga pasien. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Baku yang ditetapkan oleh Kemenpan RB Nomor : 14 Tahun 2017 tentang : Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana pada Tahun 2020 capaian IKM RSUD Bangil sebesar 85,19 %, pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 82,32 % (melebihi target 2,87 %).

Tabel 2.38. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan RS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
IKM terhadap layanan RS	91,52	85,19

12. Persentase ODF

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.



Adapun data ODF di Kabupaten Pasuruan dapat di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.39. Perkembangan Jumlah ODF di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
ODF	21,20%	22,19%

Berdasarkan tabel di atas untuk jumlah ODF di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Capaian sebesar 22,19% perlu mendapatkan perhatian dan upaya konkrit dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu salah satu upaya yang sudah dilakukan yaitu dengan cara menetapkan lokasi khusus desa ODF dengan Keputusan Bupati Pasuruan.

13. Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Capaian Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan Sehat tahun 2017 dan 2018 mengalami kestabilan sebesar 47,3%, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2016 sebesar 44,45%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 51,24%. Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak rentan terkena penyakit. Kegiatan hidup bersih dan sehat lebih menekankan pada kegiatan promotif dan preventif

Tabel 2.40. Capaian Indikator Kinerja Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan Sehat

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rumah Tangga yang ber PHBS	Rumah Tangga	23,614	53.392	53.392	49.196	41.106
2.	Jumlah RT/KK	RT/KK	53,124	112.718	112.718	94.026	



	yang disurvei						84.864
3.	Persentase Rumah Tangga PHBS	%	44,45	47,37	47,37	51,24	51,50
4.	Persentase Sanitasi Sehat	%	68,75	74,29	n/a	83,88	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Persentase Rumah Tangga Sehat dicapai dengan melakukan Survey Mawas Diri pada Keluarga di Kabupaten Pasuruan setiap tahun. Hasil Survey Tahun 2020 sebesar 84.864 KK (51,50%) sedangkan Tahun 2019 sebesar 94.026 KK (51,20%) capaiannya meningkat meskipun di masa pandemi Covid-19. Capaian ini sudah memenuhi target, namun demikian tetap perlu ditingkatkan agar masyarakat sadar akan pentingnya ber-PHBS dalam pencegahan penyakit.

Dalam masa pandemi COVID 19 sejak Maret tahun 2020, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan diantaranya yaitu meningkatkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan cara:

- a. Menggalakkan Program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat) yaitu :
 - i. Memakai masker;
 - ii. Mencuci tangan pakai sabun;
 - iii. Menjaga jarak;
 - iv. Mengonsumsi suplemen / vitamin agar imun tubuh kuat.
- b. Menggalakkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

14. Persentase Desa Siaga

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan



kesehatan secara mandiri. Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong - royong. Dikatakan Desa Siaga Aktif apabila Desa tersebut mempunyai Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang membuka pelayanan setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku.

Pengembangan desa / kelurahan siaga aktif di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah aktif semua (100%) namun mayoritas masih berada pada strata Aktif Madya. Sedangkan untuk desa / kelurahan siaga aktif Puri (Purnama dan Mandiri) di Kabupaten Pasuruan masih rendah. Hal ini terkendala sulitnya mencapai kriteria banyaknya (prosentase) pembinaan PHBS rumah tangga di desa / kelurahan, di masa pandemi Covid-19 sulit untuk mengadakan pembinaan dengan mengumpulkan sasaran dalam jumlah banyak.

Tabel.2.41. Pencapaian Desa Siaga di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020
Jumlah Desa Siaga Aktif	365	365
Aktif Pratama	80	77
Aktif Madya	236	230
Aktif Purnama	46	53
Aktif Mandiri	3	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Salah satu Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan



perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut.

15. Persentase Puskesmas dan RSUD yang Terakreditasi Strata Madya

Akreditasi Puskesmas merupakan suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi Fasilitas pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan (FKTL) terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit yang sesuai dengan standar Mutu Pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tabel .2.42. Persentase Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi strata madya di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

Uraian	2019	2020
Terakreditasi minimal madya	32	32
Jumlah Puskesmas dan RSUD	34	34
Persentase	94	94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

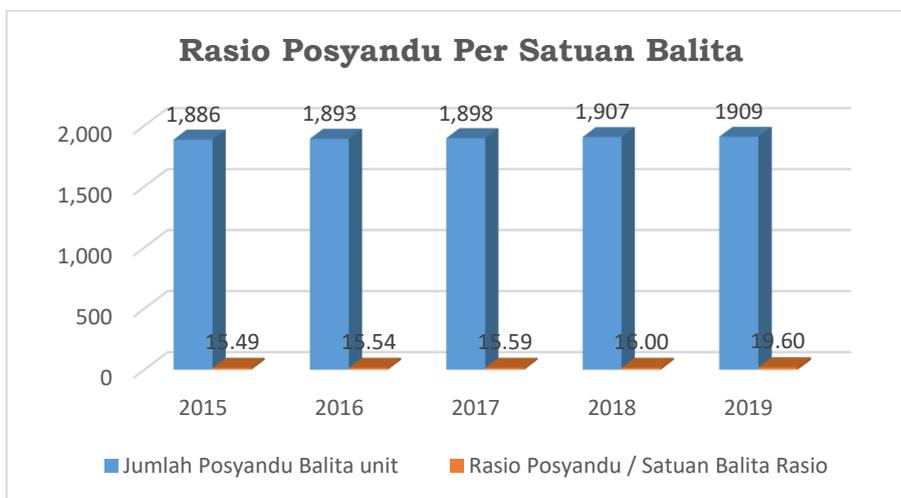
Akreditasi Puskesmas pada wilayah Kabupaten Pasuruan dimulai tahun 2016 berawal dari 4 Puskesmas (12%) dari 33 Puskesmas. Pada tahun 2020 seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan sebanyak 33 sudah terakreditasi dengan rincian 2 Puskesmas strata Dasar, 18 Puskesmas strata Madya, 12 Puskesmas strata Utama dan 2 Puskesmas strata Paripurna serta RSUD Grati terakreditasi madya.

Upaya Dinas kesehatan dalam meningkatkan presentase puskesmas dan RSUD yang terakreditasi strata madya yaitu dengan melaksanakan penilaian

akreditasi pada seluruh layanan Fasilitas pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan (FKTL) yang ada

16. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan posyandu di masyarakat. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah posyandu dibagi jumlah balita dikalikan 1.000. Rasio Posyandu per 1.000 balita tahun 2018 sebesar 16.



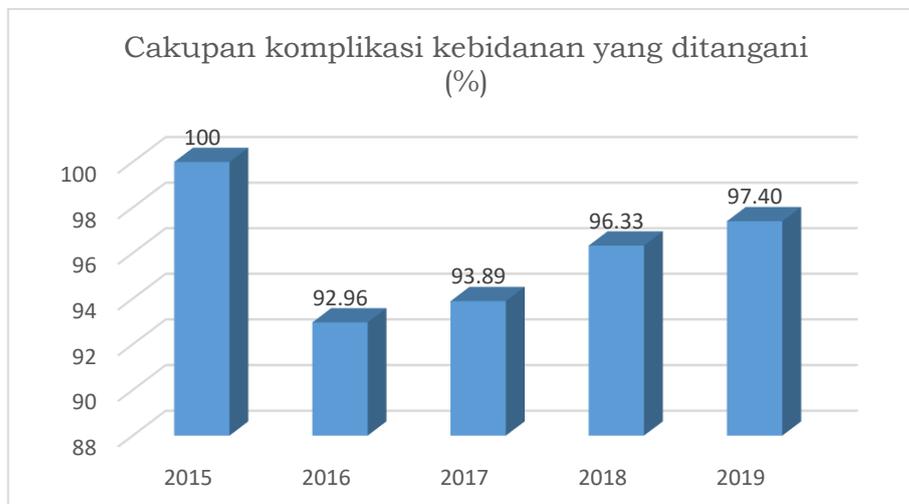
Grafik 2.45. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kab.Pasuruan Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 jumlah posyandu yang ada sebesar 1.909 posyandu. Pada tahun 2018 Jumlah posyandu yang ada sebanyak 1.907 posyandu dan balita yang terlayani sebanyak 119.214 balita sehingga 1 posyandu melayani 64 balita. Jika dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar 15,59 posyandu, maka terjadi peningkatan sebesar 0,41. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu (Nasional) Rasio Posyandu di Kabupaten Pasuruan masih dalam batas ideal yakni 1 posyandu melayani antara 80–100 balita. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan Rasio Posyandu per 1.000 balita melalui revitalisasi posyandu, pemberian jasa insentif kader, dan pengembangan Taman Posyandu, serta kegiatan Paguyuban Kader tingkat Kabupaten.

17. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menggambarkan tentang ibu hamil yang mengalami komplikasi pada waktu hamil dilakukan penanganan dan perawatan kebidanan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Capaian komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2019 mencapai 97,40%. Capaian komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2018 mencapai 96,33%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 93,89%, maka capaian tahun 2018 mengalami kenaikan 2,44%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 92%, maka capaian komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan



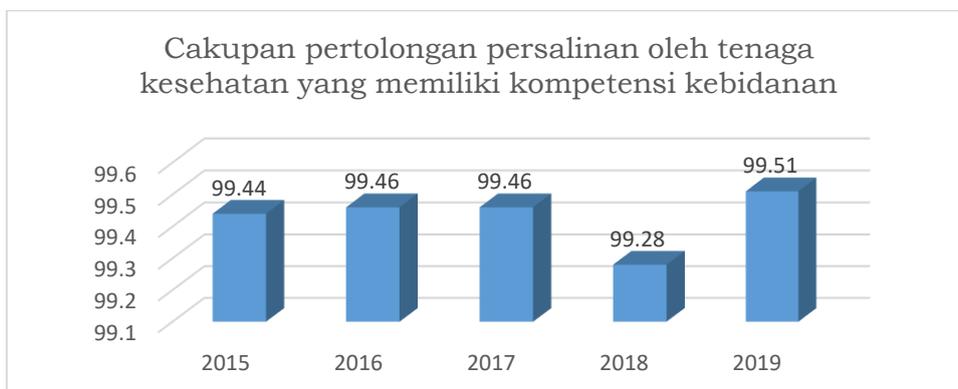
Grafik 2.46. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani pada tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan

Disamping itu jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan mengalami penurunan pada tahun 2018 yakni sebanyak 5.266 dari tahun 2017 sebesar 5.320, hal ini menunjukkan keberhasilan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah sosialisasi masyarakat terhadap bahaya kehamilan, peningkatan sistem rujukan serta terlaksananya rujukan berjenjang dan terencana lebih baik. Pada dasarnya telah dilaksanakan program untuk penanganan ibu hamil dengan komplikasi yakni dirujuk ke rumah sakit atau ke Puskesmas Pelayanan *Obstetric Neonatal Emergency* Dasar (PONED).

18. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menggambarkan tentang pertolongan persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019 mencapai angka 99,51%. Realisasi cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2018 mencapai 99,28%. Capaian ini menurun jika dibandingkan tahun 2017 yang tercapai sebesar 99,46%, namun apabila dilihat dari jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan maka mengalami kenaikan yakni tahun 2018 sebanyak 25.132 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 24.838.

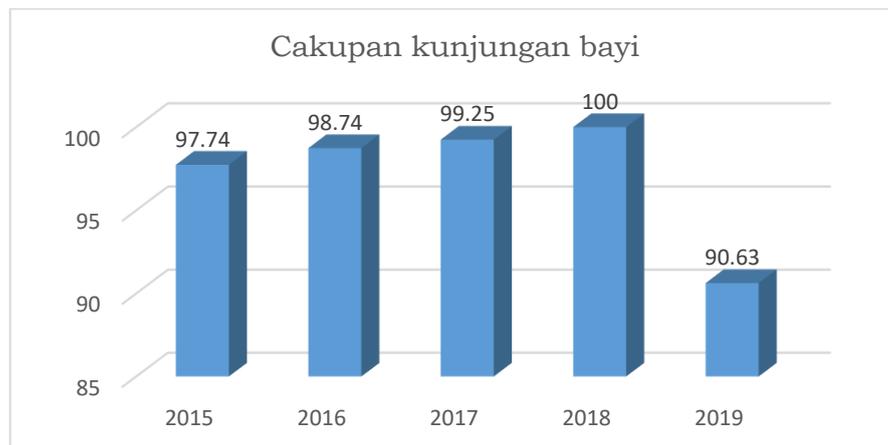


Grafik 2.47. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

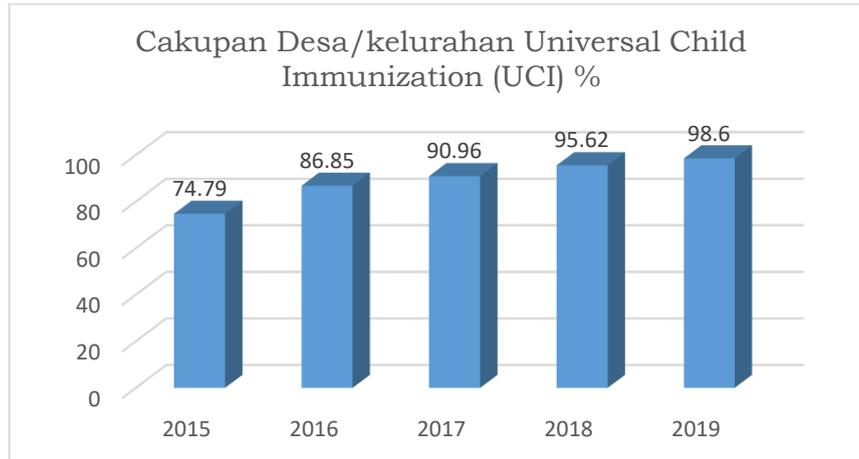


19. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah atau cakupan kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan. Cakupan Kunjungan Bayi tahun 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 90,63%. Cakupan kunjungan bayi tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang mencapai 99,25%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 96%, maka capaian tahun 2018 telah melampaui target. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan cakupan kunjungan bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar yaitu dengan adanya bantuan sosial dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang salah satu pelayanannya adalah kunjungan bayi dan pendampingan Bumil Resti, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk bumil KEK dan Kurang Gizi.



Grafik 2.48. Cakupan Kunjungan bayi tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan



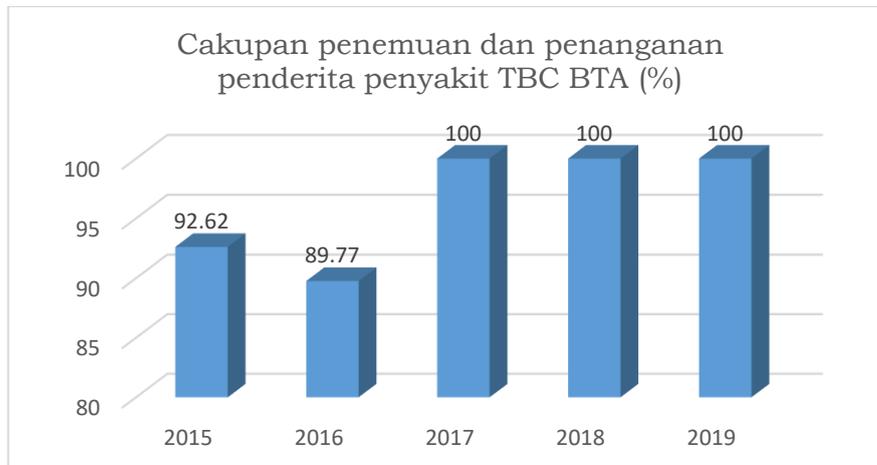
Grafik 2.49. Cakupan desa / kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Cakupan desa / kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menunjukkan tercapainya jumlah anak dalam satu desa / kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah desa/ kelurahan yang UCI dibagi dengan jumlah seluruh desa/kelurahan. Capaian tahun 2018 sebesar 90,96% atau sebanyak 332 desa/kelurahan, capaian ini meningkat dari tahun 2016 yang terealisasi 86,85% atau sebanyak 317 desa/kelurahan yang UCI.

20. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DB

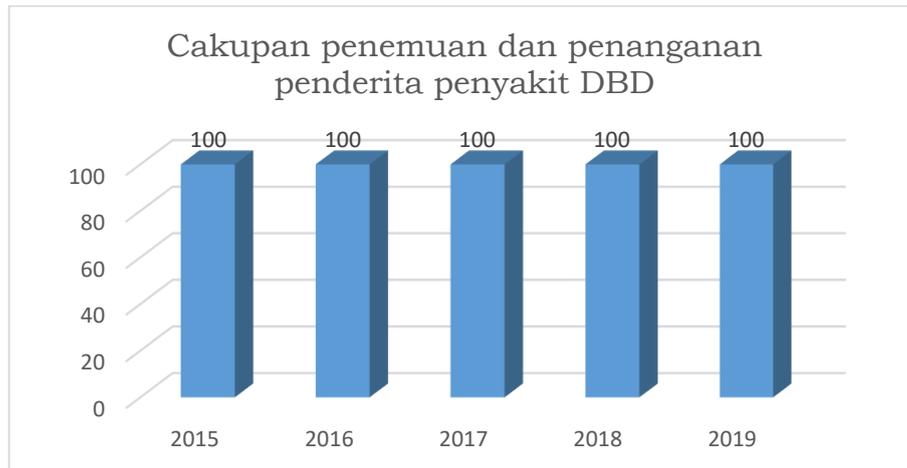
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC menggambarkan jumlah penderita TB paru yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Hal ini menggambarkan kewajiban pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kepada seluruh orang dengan TBC sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pada tahun 2019 sebesar 100%. Realisasi tahun 2018 sebesar 100%, dan apabila dikategorikan sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan, maka capaian di atas 80% termasuk dalam kategori sebesar 100%. Dilihat dari penemuan penderita TBC yang diobati, maka tahun 2018 sebanyak 2.728 orang. Hal ini

mengindikasikan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi penyakit TBC.



Grafik 2.50. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan

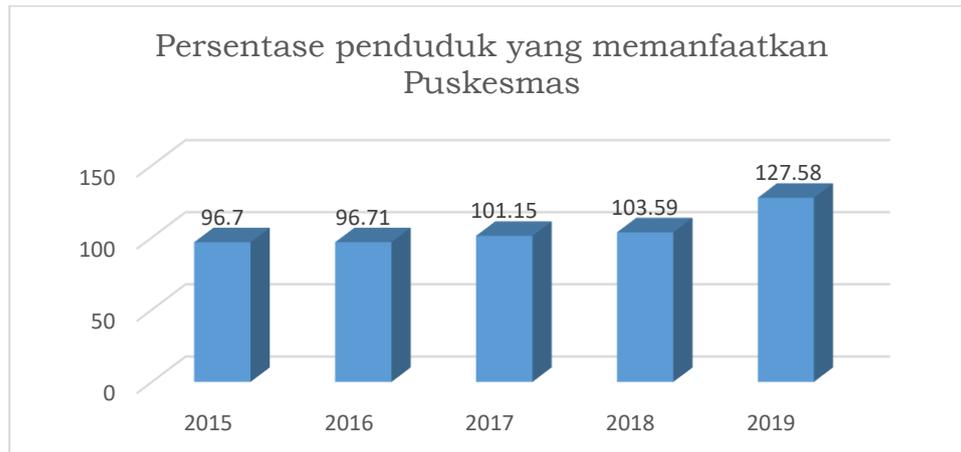
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menggambarkan tentang penanganan penderita penyakit demam berdarah dengue. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai dengan SOP dibagi jumlah penderita yang ditemukan. Kasus penderita penyakit demam berdarah dengue yang menyerang masyarakat dinilai dalam bentuk kejadian per 100.000 penduduk. Batas maksimal angka kesakitan DBD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 51 orang per 100.000 penduduk khusus untuk daerah yang endemis. Capaian penanganan kasus DBD tahun 2018 dan 2019 sebesar 100%. Capaian tersebut sama dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 100%. Jumlah penderita pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 317 orang pada tahun 2017 menjadi 191 orang.



Grafik 2.51 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

21. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas

Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan strata 1 (pertama) dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya kuratif, promotif dan preventif. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kunjungan pasien puskesmas dengan jumlah penduduk. Penduduk yang berobat di Puskesmas tahun 2018 sebesar 103,59%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercapai sebesar 101,15%, dan jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 87,50%, maka capaian tahun 2018 telah melebihi target. Apabila dilihat dari jumlah penduduk yang memanfaatkan puskesmas maka terjadi peningkatan sebanyak 177.788 kunjungan, dari tahun 2017 sebesar 1.799.954 ke tahun 2018 sebesar 1.900.359.



Grafik 2.52 Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas masih menjadi pilihan utama dalam penanganan kesehatan serta menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan pelayanan.

22. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter tahun 2018 yang ada Kabupaten Pasuruan berdasarkan daftar registrasi dokter (STR) pada Dinas Kesehatan sebanyak 256 orang, sehingga rasio dokter tahun 2018 sebesar 69,77. Angka tersebut menunjukkan rasio antara dokter dengan jumlah penduduk adalah satu orang dokter melayani penduduk sebanyak 7.166 orang. Capaian indikator rasio dokter persatuan penduduk tahun 2018 meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 51,08% (satu orang dokter melayani penduduk sebanyak 10.166).

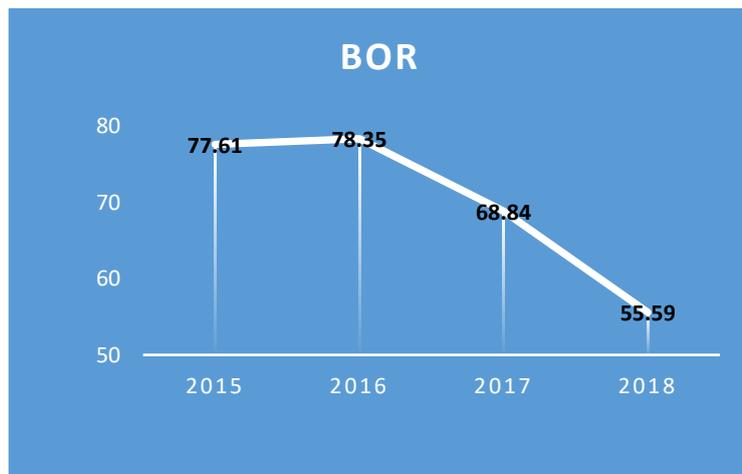
Tabel 2.43. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Dokter Persatuan Penduduk	20,48	48,94	51,08	69,77	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

23. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

Indikator BOR digunakan untuk mengetahui tingkat hunian RSUD yang menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur yang ada pada rumah sakit. Rumusan ini diperoleh di jumlah hari perawatan RSUD dalam periode satu tahun dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari pada periode tahun tersebut, dikalikan 100%. BOR yang ideal adalah antara 60% sampai dengan 85%. BOR tahun 2018 sebesar 55,59%, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 sebesar 68,84% maka mengalami penurunan sebesar 13,25%. Adanya kebijakan dari BPJS tentang pendaftaran jarak rujukan pasien dari fasilitas kesehatan pertama yang semula 25 km diturunkan menjadi 15 km, sehingga pasien yang berasal dari kesehatan pertama dengan jarak lebih dari 15 km tidak dapat mengakses RSUD Bangil.



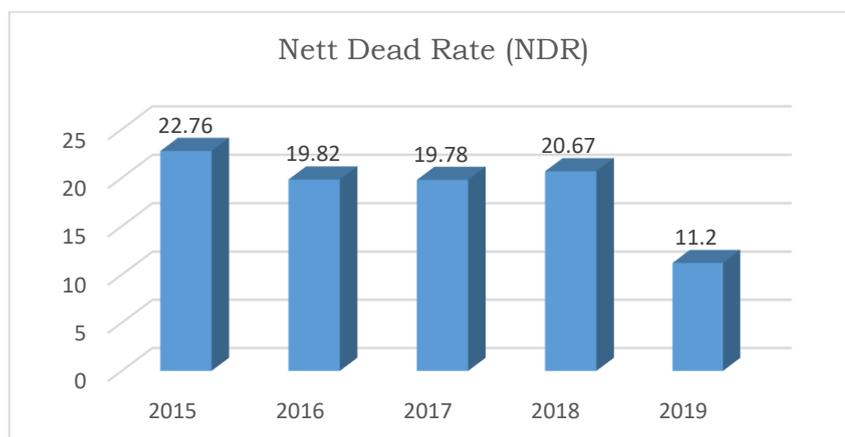
Grafik 2.53 *Bed Occupancy Rate (BOR)* tahun 2015-2018 di Kabupaten Pasuruan

24. *Nett Dead Rate (NDR)*

NDR digunakan untuk mengetahui angka kematian yaitu kematian diatas 48 jam setelah dirawat untuk setiap seribu (1000) penderita yang keluar baik hidup atau mati. NDR pada tahun 2018 sebesar 20,67 per mil, dengan angka tersebut dipeoleh dari jumlah kematian pasien diatas 48 jam setelah dirawat sebanyak 477 orang dari jumlah pasien keluar hidup dan mati

sebanyak 23.109 orang. Angka tersebut masih dalam batas ideal yaitu 20 - 25 per mil.

Upaya yang dilakukan oleh RSUD Bangil. Untuk menurunkan NDR. Diantara lain melengkapi sarana prasarana penunjang antara lain: sterilisator suhu rendah untuk mensterilkan alat kedokteran, ventilator transport untuk membantu pernafasan pasien saat dirujuk dan, pasien monitor untuk memantau kondisi pasien di IGD, defibrilator untuk menstimulasi detak jantung), alat kesehatan dan kedokteran, penambahan tenaga dokter spesialis, dokter sub spesialis, serta peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek, seminar, workshop, inhouse training, kegiatan audit medik dan audit kasus kematian, pembangunan Instalasi Farmasi, inovasi pelayanan pada klinik VCT/ CST dengan ODHALINK (Online sms, *Delivery Service, High Access*), pelayanan hemodialisa.



Grafik 2.54. Nett Dead Rate tahun 2015-2019 di Kabupaten Pasuruan

25. Tercukupinya Pelayanan Masyarakat Miskin (PBI dan PBID)

Dalam rangka menunjang program Pemerintah Pusat yaitu ProgramUHC (*Universal Health Coverage*) dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan melalui PBI dan PBID terhadap warga negaranya secara menyeluruh sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia, maka Pemerintah kabupaten pasuruan memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan. Implementasi kebijakan tersebut oleh Pemerintah Daerah



melalui RSUD Bangil diwujudkan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang masuk dalam PBI dan PBID.

Tabel 2.44. Tercukupinya pelayanan masyarakat miskin tahun 2016-2020 di Kabupaten Pasuruan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tercukupinya Pelayanan masyarakat miskin	100%	100%	100%	n/a	n/a

Indikator tercukupinya pelayanan masyarakat miskin menggambarkan tentang banyaknya kunjungan pasien miskin sesuai dengan ketentuan yang datang dan dilayani RSUD Bangil dalam satu tahun dibagi dengan jumlah pasien miskin yang datang ke RSUD Bangil dalam periode tahun tersebut dikalikan seratus persen. Tahun 2018 realisasi indikator tercukupinya kunjungan masyarakat miskin sebesar 100%. Capaian tersebut sama dengan capaian tahun 2017 dan melebihi target yang ditetapkan yakni 96%. Jumlah kunjungan masyarakat miskin dengan PBI dan PBID tahun 2018 sebanyak 79.977 (PBI sejumlah 46.203 dan PBID sejumlah 33.774), kunjungan tersebut terdiri dari kunjungan rawat jalan dan kunjungan rawat inap. Jika dibandingkan dengan kunjungan pelayanan masyarakat miskin tahun 2017 sebanyak 27.651, pada tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 52.362 kunjungan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam peningkatan layanan kesehatan serta kemudahan dalam akses pemberian kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin.

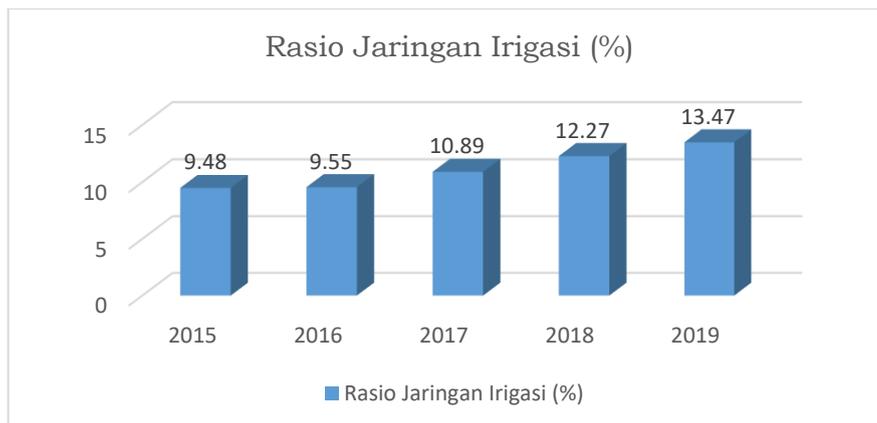
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu aspek yang prioritas untuk dilakukan dan wajib menjadi perhatian semua pihak, karena pengelolaan sumber daya air yang kurang baik akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius seperti banjir saat musim hujan, kekeringan lahan pertanian saat musim kemarau, sulitnya air baku untuk air minum, menurunnya debit sumber air atau bahkan banyak sumber air yang hilang atau mati.

1. Rasio Jaringan Irigasi



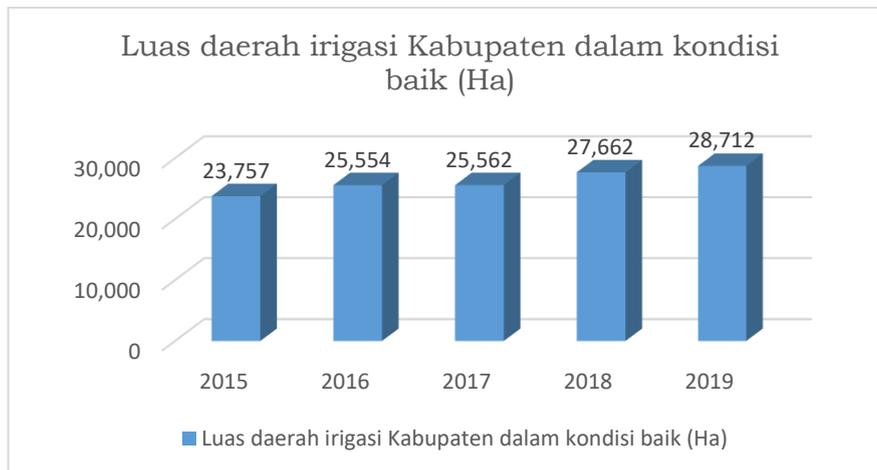
Grafik 2.55. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Jaringan Irigasi Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 13,47%. Pada tahun 2018 target kinerja yang ditetapkan untuk Rasio Jaringan Irigasi sebesar 8,84% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 12,27%, dan jika melihat capaian kinerja pada tahun 2017 yakni sebesar 10,89% maka pada tahun 2018 ada penambahan rasio jaringan irigasi sebesar 1,38% atau penambahan panjang saluran pada tahun 2018 sepanjang 5.621 meter, dimana angka ini didapatkan dari panjang saluran yang direhabilitasi tahun 2018 sebesar 20.566m dikurangi kerusakan yang terjadi selama tahun 2018 sebesar

14.945m. kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh kejadian alam berupa banjir maupun karena usia konstruksi sudah tua.

2. Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

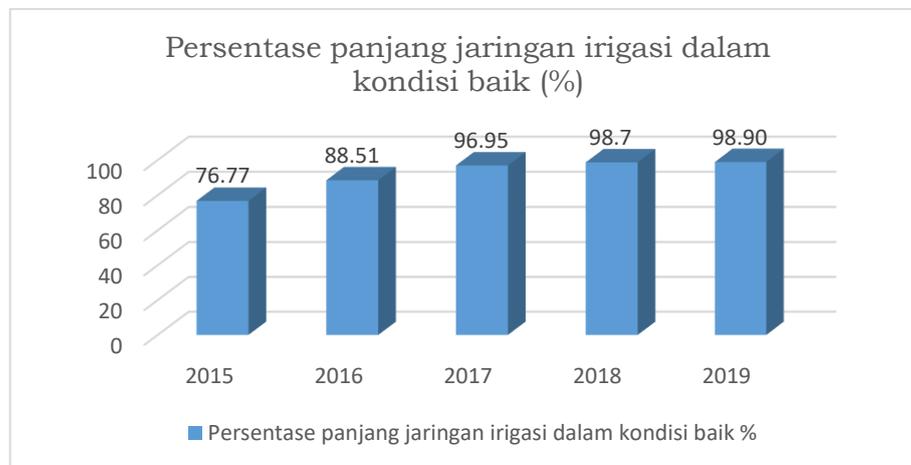
Luas daerah irigasi dalam kondisi baik merupakan gambaran dari sudah baiknya daerah irigasi di Kabupaten Pasuruan yang mendapatkan pengairan dari sistem irigasi teknis. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu mencapai 28.712. Pada Tahun 2018 capaian kinerja dari indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dimana untuk target kinerja tahun 2018 adalah seluas 25.776 ha dengan capaian kinerjanya seluas 27.662 ha. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 seluas 26.562 ha maka pada tahun 2018 terdapat pertambahan daerah irigasi dalam kondisi baik seluas 1.100 ha. Peningkatan kinerja ini selain didukung adanya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, juga adanya peran serta masyarakat (HIPPA/GHIPPA) dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi maupun perbaikan - perbaikan ringan.



Grafik 2.56. Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

3. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

Luasnya ketersediaan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan menjadikan pertanian sebagai sektor yang berpotensi besar dalam penyediaan komoditi pertanian dan ketahanan pangan, hal ini tentunya harus didukung oleh keberadaan jaringan irigasi yang baik. Kondisi jaringan irigasi yang baik berpengaruh langsung terhadap tingkat pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam proses budi daya tanaman pangan (khususnya tanaman padi). Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 98,90%. Target kinerja indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2018 sebesar 71,60%, dengan capaian kinerja sebesar 98,70%, dapat dilihat capaian kinerja tahun 2018 naik secara signifikan dari target yang ditetapkan. Dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 96,95%, terdapat peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 1,75% atau sepanjang 5000 m.



Grafik 2.57. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

4. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Penilaian kinerja pelayanan irigasi khususnya pemenuhan kebutuhan air disaat musim tanam diperlukan adanya indikator untuk menilai yakni indikator

Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 77,5% dengan capaian kinerjanya melebihi daripada target yang telah ditetapkan yakni sebesar 78,21%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 75,71%, maka pada Tahun 2018 terdapat peningkatan pelayanan irigasi sebesar 2,5% dan berdasarkan SPM Pekerjaan Umum untuk kinerja pelayanan irigasi di Kabupaten Pasuruan dikategorikan baik. Kondisi yang demikian ini didukung adanya upaya mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jaringan irigasi, pemberdayaan Petani Pemakai Air serta dukungan dana hibah Pemerintah melalui Program WISMP-2

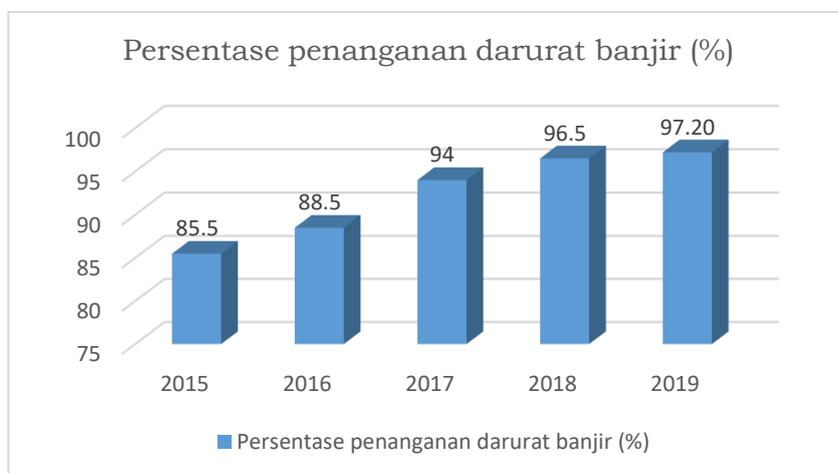


Grafik 2.58. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

5. Persentase penanganan darurat banjir

Wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui oleh sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar antara lain Sungai Kedunglarangan, Sungai Rejoso, dan Sungai Welang beserta anak sungainya. Sungai sungai ini berhulu di kawasan Gunung Arjuna-Welirang dan Gunung Bromo yang bermuara di laut utara Jawa. Penyebab kerawanan banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat kompleks mulai dari penyempitan dan pendangkalan sungai, kemudian berkurangnya hutan di hulu sehingga air langsung turun saat hujan lebat, dan kondisi pasang surut air laut. Penanganan masalah banjir dan pengelolaan sungai merupakan

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dalam upaya penanganan dan pencegahan bencana banjir, Pemerintah Kabupaten hanya dapat melakukan penanganan darurat pada titik-titik wilayah banjir. Pada tahun 2019 penanganan banjir meningkat yaitu mencapai 97,20%. Terkait target kinerja penanganan darurat banjir pada tahun 2018 adalah sebesar 90% dengan capaian sebesar 96,50%, sehingga capaian kinerja tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 94% terdapat peningkatan dalam penanganan darurat banjir pada tahun 2018 yakni sebesar 2,50%.



Grafik 2.59. Persentase penanganan darurat banjir di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

6. Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung

Dalam upaya penanggulangan banjir dan konservasi air, di wilayah Kabupaten Pasuruan telah dibangun embung dan akan dibangun beberapa embung lagi pada tahun-tahun mendatang. Pembangunan embung dibiayai oleh Pemerintah sedangkan lahan harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2018 sebanyak 1 lokasi, dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 1 lokasi, sehingga total Embung yang terbangun sampai dengan Tahun 2018 sejumlah 6 (enam) lokasi dari target 8 (delapan) lokasi, disebabkan proses SID untuk 2 (dua) lokasi masih dalam proses. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi total 7 lokasi.



Grafik 2.60. Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Dalam RPJMD yang berlaku yaitu tahun 2019-2023, untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait Pengelolaan sumber daya air indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a. Indeks ketahanan air

Indeks Ketahanan air merupakan nilai kemampuan untuk menjaga keberlanjutan dalam pemenuhan kebutuhan air baku, baik dalam jumlah yang mencukupi serta mutu yang dapat diterima. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan perkembangan sosial-ekonomi; menjamin perlindungan atas pencemaran air dan bencana terkait air; serta melestarikan ekosistem dalam suasana damai dan kondisi politik yang stabil.

Indeks ketahanan air diperoleh dari proporsi antara air baku yang dibutuhkan dengan jumlah ketersediaan air baku yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2020 ditargetkan 77,68%, sedang realisasinya mencapai 77,65% atau terdapat pencapaian 99,96%. Volume ketersediaan air baku dihitung dari jumlah volume air tampungan, volume mata air termasuk air yang mengalir pada semua jaringan irigasi. Dari sisi volume ketersediaan air baku sebetulnya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 2.065.900.104 m³/tahun menjadi 2.067.860.000 m³/tahun, atau terjadi peningkatan 1.959.896 m³/tahun, peningkatan debit ini terjadi pada



mata air yang dilakukan pemeliharaan. Namun demikian kebutuhan air baku juga meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan dari 1.779.045 menjadi 1.876.881 atau meningkat 97.836 jiwa dimana kebutuhan air baku mencapai 100 ltr/hari/jiwa, sehingga dibutuhkan tambahan ketersediaan air baku mencapai 3.571.014 m³/per tahun.

b. Persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Berkembangnya Kabupaten Pasuruan yang di iringi pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan air bersih menjadi meningkat, sedangkan sumber air bersih menjadi terdegradasi. Sumber air di wilayah Kabupaten Pasuruan di ambil dari mata air Umbulan dan sumber air permukaan yang berasal dari beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari 7 (tujuh) sungai yang bermuara di Selat Madura yaitu:

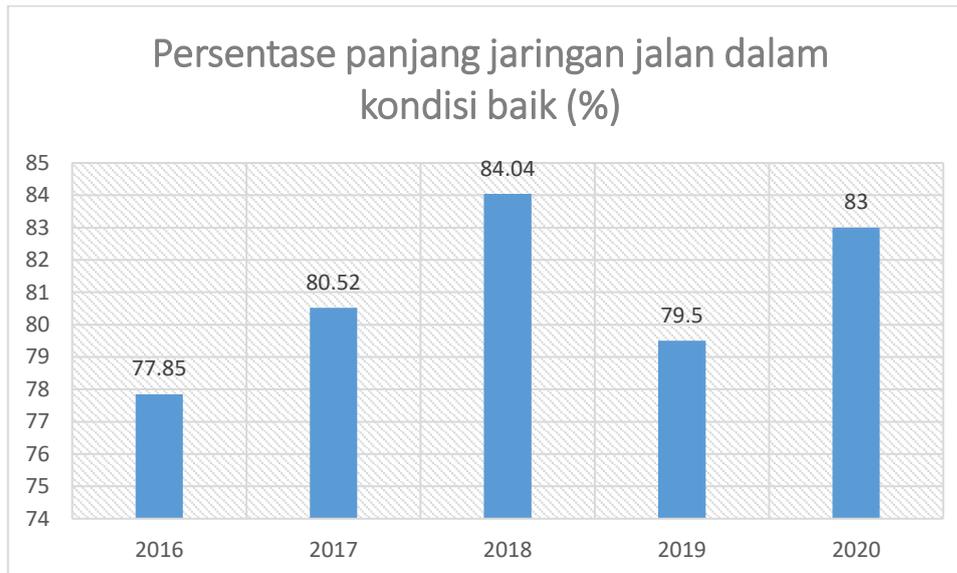
- a. Sungai Laweyan : bermuara di Desa Penunggul - Kecamatan Nguling
- b. Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
- c. Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
- d. Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto – Kecamatan Kraton
- e. Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci – Kecamatan Bangil
- f. Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kali Larangan
- g. Sungai Petung : bermuara di Kecamatan Kraton

Indikator kinerja persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku di wilayah Kabupaten Pasuruan diperoleh dari persentase perbandingan sumber air baku dalam kondisi baik dengan jumlah sumber air baku keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Target kinerja untuk indikator ini pada tahun 2020 sebesar 54,20 %, realisasi capaian kinerja tahun 2020 sebesar 52,58%, atau dikatakan capaian kinerja tahun 2020 lebih dari cukup yaitu sebesar 97,01%.



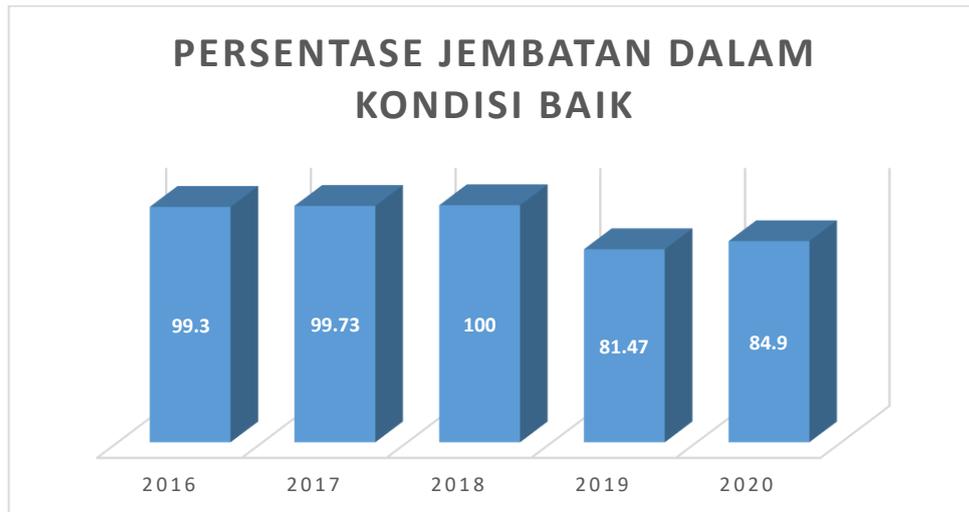
7. Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Salah satu wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan salah satu standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah penyediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik. Pada indikator ini ditahun 2018 target capaiannya sesuai RPJMD 2018 sebesar 84% atau sepanjang 1.945,35 km dari panjang jalan kabupaten keseluruhan sepanjang 2.315,89 km. Pada tahun 2018 dukungan untuk mewujudnya hal tersebut baik dari segi kebijakan maupun pendanaan cukup memadai sehingga diperoleh capaian pada akhir tahun 2018 sebesar 84,04% atau 1.946,22 km, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 80,52% atau sepanjang 1.864,67 km, maka pada tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,19% atau sepanjang 81,55 km. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 79,80%. hal ini disebabkan karena umur masa jalan berakhir pada tahun 2019 yang mana kondisi jalan pada saat itu mengalami rusak berat, sehingga mempengaruhi terhadap target capaian perencanaan pembangunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 83%.



Grafik 2.61. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Jembatan merupakan penghubung antar ruas jalan yang berfungsi untuk kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat, jika kondisi jembatan dalam keadaan baik maka mobilitas masyarakat akan lancar yang manfaat bagi masyarakat setempat khususnya dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Target dan capaian indikator ini pada tahun 2018 adalah 100% atau sebanyak 1.140 jembatan dari total jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Capaian ini didukung oleh segi kebijakan maupun pendanaan yang cukup memadai sehingga dapat dikatakan capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 99,73% atau mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,27%. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu mencapai 81,47%, sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 84,90%.



Grafik 2.62. Persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

8. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

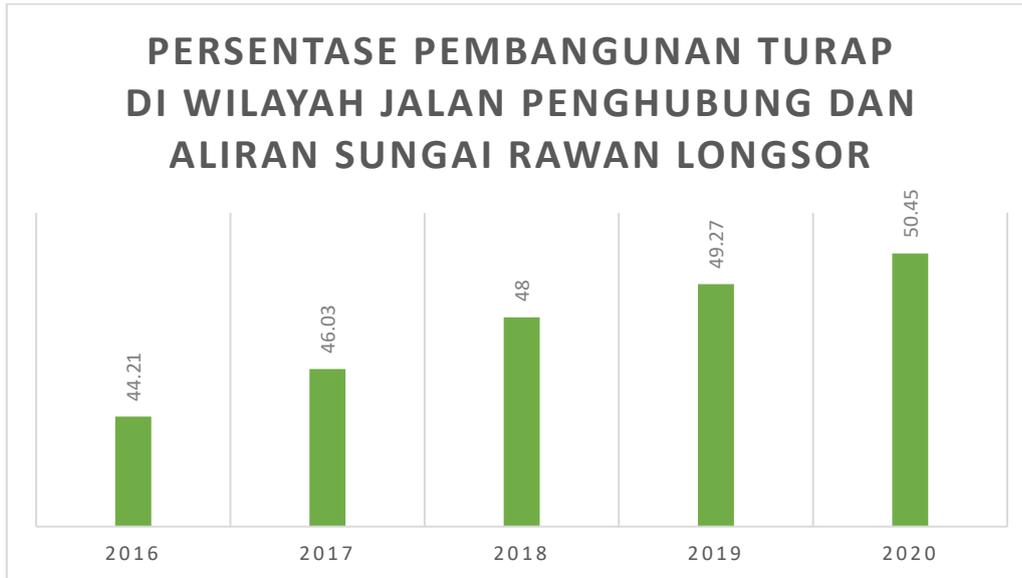
Drainase berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan dari badan jalan. Jika saluran drainase tidak berfungsi dengan baik maka akan terjadi genangan yang mengakibatkan rusak atau turunnya kondisi jalan. Sehingga untuk kondisi drainase perlu diperhatikan secara khusus. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 26,72%. Pada tahun 2018 target kinerja drainase dalam kondisi sebesar 26,00% atau sepanjang 99,84 km dari panjang drainase yang ada di Kabupaten Pasuruan sepanjang 384 km, dengan adanya dukungan untuk mewujudkan hal tersebut baik dari segi kebijakan maupun pendanaan yang cukup memadai sehingga diperoleh capaian realisasi kinerjanya sebesar 26% atau telah sesuai dengan target. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017, target kinerja drainase dalam kondisi baik sebesar 25%, realisasi capaian kinerjanya sebesar 25,87%, maka pada tahun 2018 ada penambahan drainase dalam kondisi baik sebesar 0,13% atau sepanjang 0,5 Km, di tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 27,51%. Peningkatan ini dikarenakan adanya pemeliharaan rutin dan penambahan pembangunan panjang draenase pada titik rawan genangan.



Grafik 2.63. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

9. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

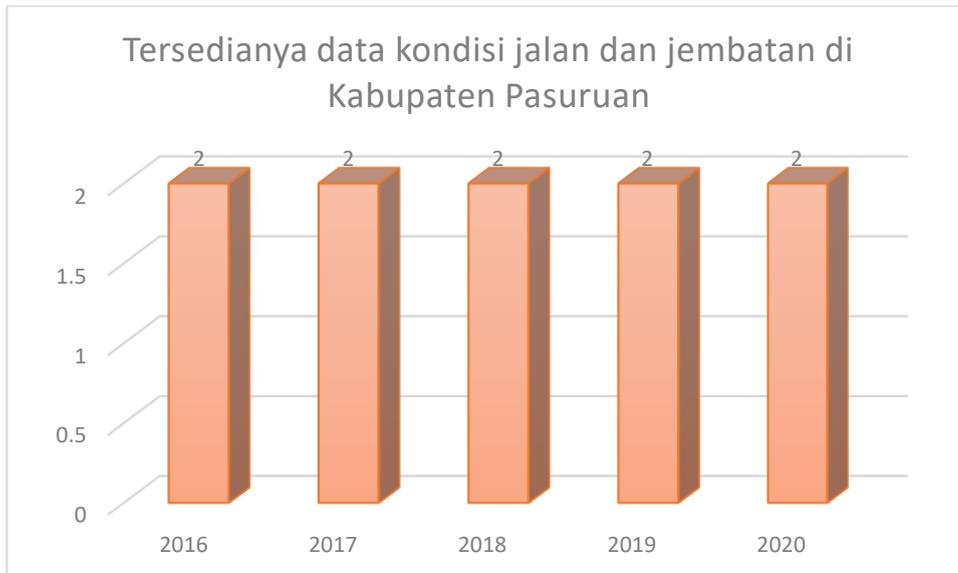
Turap dibangun di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor bertujuan untuk memperkuat badan jalan dari bahaya longsor. Turap biasanya dibangun pada daerah - daerah pegunungan atau wilayah dataran tinggi dan ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai, saluran atau laut, kerusakan jalan dapat disebabkan oleh bencana longsor. Pada tahun 2019 Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sehingga menjadi 49,25%. Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 48,00% atau sepanjang 457,44 km dari panjang turap yang ada di kabupaten pasuruan sepanjang 953 km dengan realisasi sebesar 48% atau sesuai target. Sedangkan target kinerja pada tahun 2017 sebesar 46% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 46,03%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 maka ada peningkatan persentase pembangunan turap sebesar 1,97%. Hingga tahun 2020 persentase pembangunan turap di Kabupaten Pasuruan selalu meningkat sebesar 50,45%.



Grafik 2.64. Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

10. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasuruan rutin dilakukan oleh OPD agar dapat diketahui kondisi jalan dan jembatan. Data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh OPD terkait sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur. Target kinerja tersedianya data kondisi jalan dan jembatan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 2 dokumen, setiap tahunnya reliasasi dari indikator ini sebanyak 2 dokumen atau 100% yaitu dokumen data kondisi jalan dan dokumen data kondisi jembatan. Begitu juga dengan target kinerja tahun 2017 terdapat data sebanyak 2 dokumen, dan telah dilakukan pembaharuan data kondisi jalan dan jembatan dengan capaian sebanyak 2 dokumen.



Grafik 2.65. Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

11. Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pemenuhan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu standar pelayanan dan keselamatan transportasi yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dalam perencanaan pembangunan lima tahun jumlah kebutuhan Lampu PJU dihitung dari panjang jalan kabupaten 2.315,89 km dan setiap 50 m panjang jalan dibutuhkan 1 titik LPJU. Target kinerja pada tahun 2018 yaitu sebanyak 45.083 titik dari 46.317 titik yang dibutuhkan, dengan capaian kinerja sesuai target yang ditentukan yaitu sebesar 45.083 titik. Dibandingkan pada tahun 2017, target kinerja indikator ini sebanyak 45.016 titik PJU, dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai 45.860 titik, maka pada tahun 2018 ada penurunan pemasangan PJU sebanyak 777 titik. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 46.440, penurunan ini disebabkan karena anggaran untuk PJU mengalami pengurangan. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali meskipun ada refocusing anggaran tetapi untuk kegiatan PJU mengalami penambahan anggaran.



Grafik 2.66. Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

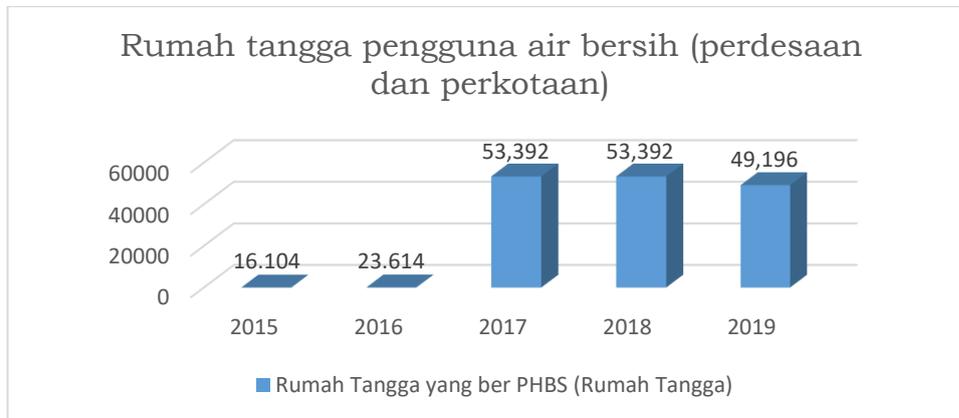
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Berikut indikator Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan:

1. Rumah Tangga pengguna air bersih (pedesaan dan perkotaan)

Di wilayah Kabupaten Pasuruan pemenuhan pelayanan air minum dilaksanakan oleh PDAM untuk wilayah perkotaan dan oleh masyarakat sendiri melalui wadah HIPPAM untuk wilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan yang tidak terjangkau layanan PDAM. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 49.196. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2018 sebesar 369.128 KK, realisasi capaian kinerja tahun 2018 sebesar 380.768 KK atau sebesar 103%. Layanan air bersih untuk masyarakat didukung oleh layanan PDAM untuk wilayah perkotaan dan melalui program PPAB yang dikelola oleh HIPPAM. Capaian

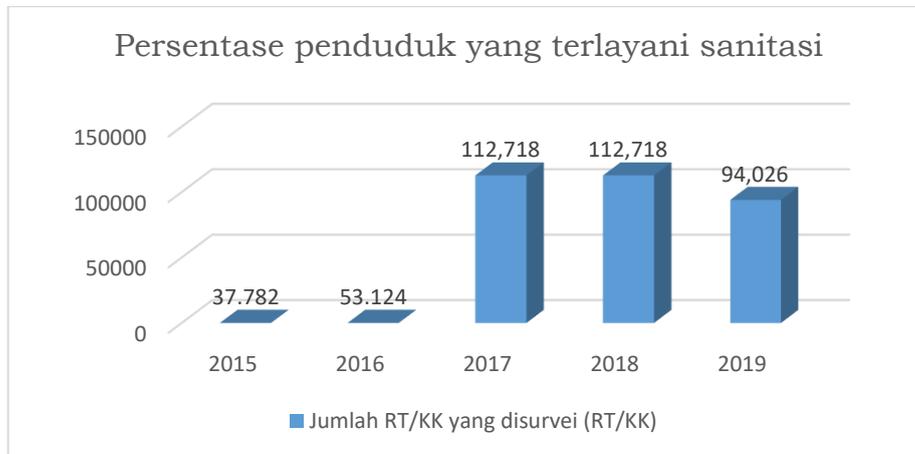
kinerja air bersih yang cukup signifikan ini didukung oleh dana DAK, dana Hibah Air Minum Perdesaan, dan melalui program Pamsimas.



Grafik 2.67. Rumah Tangga pengguna air bersih (pedesaan dan perkotaan) di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Program Pamsimas yang bertujuan mempercepat pencapaian akses air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat, di Kabupaten Pasuruan dimulai pada tahun 2014 dan sampai saat ini telah mencakup 52 desa/15.600 KK. Pendanaan program ini merupakan sharing antara dana APBN, APBD Kabupaten dan partisipasi masyarakat. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 akses air bersih masyarakat sebesar 360.748 KK, maka pada tahun 2018 terdapat peningkatan akses air bersih masyarakat sebesar 20.036 KK. Capaian akses air bersih ini juga telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2013–2018, tetapi untuk pencapaian target 100% masyarakat terlayani air bersih pada tahun 2019 masih diperlukan kerja keras semua pihak.

2. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi



Grafik 2.68. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi tahun 2015-2019

Selain akses air bersih pada tahun 2019 Pemerintah melalui RPJMN tahun 2014-2019 juga menargetkan capaian akses sanitasi, khususnya akses masyarakat pada pengelolaan air limbah (jamban), sebesar 100%. Karena peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan derajat kesehatan masyarakat salah satunya juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana pengelola air limbah. Pada tahun 2019 Penduduk yang terlayani sanitasi sebesar 94.026. Sementara Pada Tahun 2018 target penduduk terlayani sanitasi sebesar 80%, capaian kinerja tahun 2018 sebesar 80,70% atau lebih besar dari target. Dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat peningkatan akses sanitasi sebesar 5,70%. Pencapaian kinerja akses sanitasi ini tidak hanya didukung oleh pendanaan APBD Kabupaten, tetapi juga adanya dukungan program Pamsimas, dana DAK, dana desa dan juga swadaya masyarakat. Capaian akses sanitasi masyarakat ini juga telah melebihi target akhir RPJMD tahun 2013 – 2018, meskipun demikian Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih memiliki pekerjaan yang cukup berat untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Pasuruan ODF (bebas dari BAB's).

3. Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan



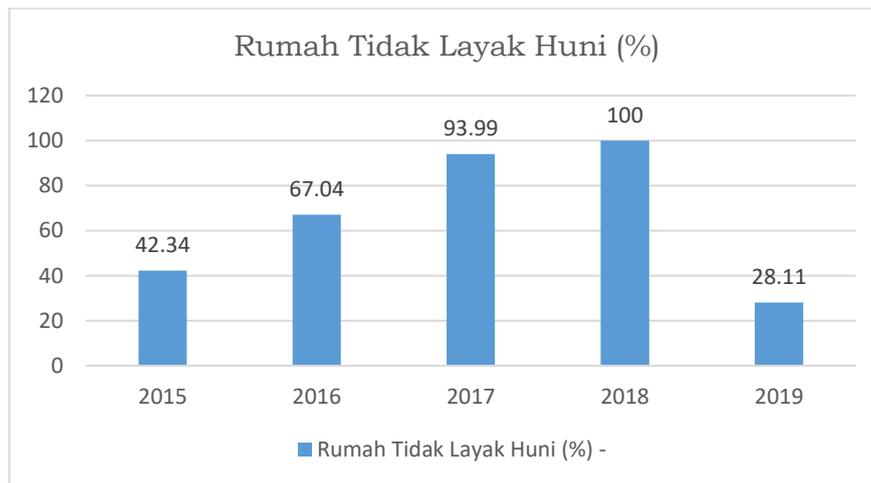
Grafik 2.69. Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan tahun 2015-2019

Salah penentu kualitas kawasan permukiman adalah tersedianya jalan lingkungan yang dilengkapi dengan drainasenya, selain itu jalan lingkungan juga sangat diperlukan guna mendukung aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pada tahun 2019 panjang jalan lingkungan perkotaan mengalami peningkatan yaitu mencapai 198.849,23 m'. Target kinerja ketersediaan jalan lingkungan pada tahun 2018 sepanjang 158.863 m' dengan capaian kinerja sepanjang 188.949,23 m'. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sepanjang 170.098,79 m', atau ada penambahan jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Pasuruan sepanjang 12.850 m'.

4. Rumah Tidak Layak Huni yang direhab

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakatnya, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2019 telah diberikan bantuan kepada masyarakat berupa stimulan untuk rehab rumah tidak layak huni. Pada tahun 2019 Rumah Tidak layak huni mencapai 28,11%. Sampai dengan tahun 2018 telah dilakukan rehab sebanyak 6.002 rumah tidak layak huni (RTLH) yang didukung oleh dana APBD

Kabupaten maupun dana APBN. Rehab RTLH bertujuan menyediakan rumah/hunian yang layak secara kesehatan, teknis dan kenyamanan. Bantuan stimulan rehab RTLH ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau sangat rendah (MBR), kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor informal atau masyarakat miskin. Target kinerja yang ditetapkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2018 sebesar 48,06% dari 6.002 unit RTLH atau sebanyak 2.884 unit. Capaian kinerja rehab RTLH tahun 2018 sebesar 100% atau 6.002 unit. Sejak tahun 2017 guna mewujudkan pencapaian Kabupaten Pasuruan ODF, pada program rehab RTLH para penerima bantuan diharuskan untuk membangun jamban keluarga dari dana yang diberikan.



Grafik 2.70. Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Dalam RPJMD yang berlaku yaitu tahun 2019-2023, untuk urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman indikator kinerjanya adalah Persentase capaian lingkungan permukiman yang layak huni. Target indikator 2020 sebesar 79,20% dan realisasi sebesar 78,70% dengan capaian 99,37%. Indikator tujuan ini di dukung oleh 3 indikator sasaran yaitu :

- **Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman**

Target tahun 2020 indikator ini sebesar 78,89% dan realisasi sebesar 78,39% dengan capaian 99,36%. Indikator ini sangat dipengaruhi oleh akses air



bersih dan akses sanitasi. Jumlah akses air bersih sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 392.295 KK. Sedangkan jumlah akses sanitasi sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 389.287 KK.

- **Persentase Rumah layak huni**

Target tahun 2020 indikator ini sebesar 32,71% dan realisasi sebesar 32,38% dengan capaian 98,99%. Indikator ini diperoleh dari jumlah rumah swadaya yang direhab dibagi jumlah keseluruhan rumah swadaya dikalikan 100%. Jumlah rumah swadaya yang direhab pada tahun 2020 sebanyak 2.032 unit. Sedangkan jumlah keseluruhan rumah swadaya adalah sebanyak 42.634 Unit.

- **Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)**

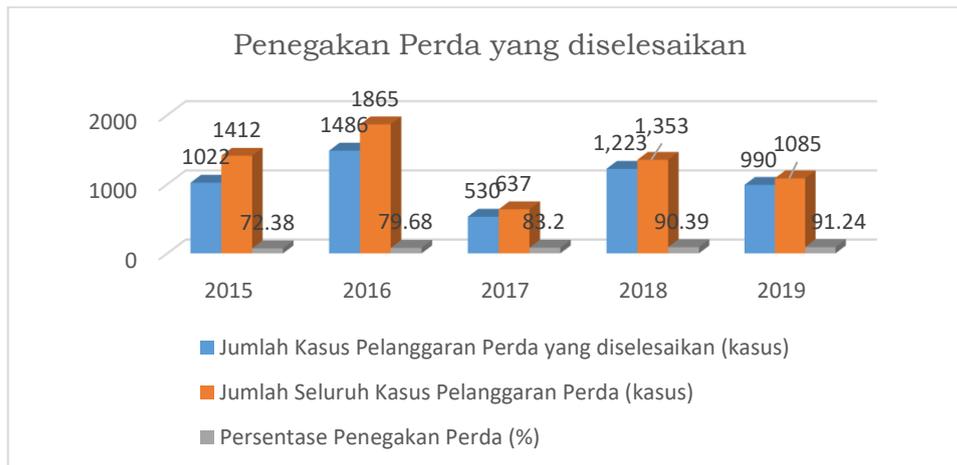
Target tahun 2020 indikator ini sebesar 0,006% dan realisasi sebesar 0,005% dengan capaian 83,33%. Indikator ini diperoleh dari jumlah bangunan Gedung ber SLF dibagi jumlah bangunan gedung dikalikan 100%. Jumlah bangunan Gedung ber SLF sampai dengan tahun 2020 sebanyak 18 unit. Sedangkan jumlah bangunan Gedung sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 504.677 unit.

E. Ketentraman, Ketertban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki setiap pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan masyarakat yang tentram, kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri. Penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan penghargaan dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatan dengan tertib dan tentram. Menurut Undang-undang 23 tahun 2014 urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraannya di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan indikator Penegakan PERDA dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda yang ditangani. Berikut merupakan capaian Penegakan PERDA yang diselesaikan.



Grafik 2.71. Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan indikator Penegakan PERDA dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda yang ditangani. Pada tahun 2019 capaian indikator mencapai 91,24%. Pada tahun 2018 Capaian indikator penegakan perda sebesar 90,39%, sedangkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90% sehingga tingkat pencapaiannya 100,44%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar 83,20% tampak mengalami kenaikan sebesar 7,19%. Untuk penegakan perda ditahun mendatang lebih fokus pada :

1. Lebih mengintensifkan jejaring komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran instansi terkait agar penanganan penindakan pertama dapat segera dilakukan

2. Meningkatkan volume pengawasan terhadap badan huk, badan usaha dan masyarakat untuk memastikan penanganan pelanggaran perda sehingga cepat tertangani
3. Melakukan jemput paksa terhadap pelanggar yang tidak kooperatif.

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum diinterpretasikan menjadi 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan dan Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan. Adapun capaian kinerja dari indikator dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel.2.46. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

No	Uraian	2019	2020
1.	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	91,24 %	92,13 %
2.	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100 %	100 %

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Pasuruan

Indikator **persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan** diukur dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda.



Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 738 kasus dibagi dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda sebanyak 801 kasus. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 92,13% sedangkan target yang ditetapkan



dalam kinerja sebesar 92% sehingga tingkat pencapaiannya 92,13%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 91,24% tampak mengalami **kenaikan** sebesar 0,89%.

Dalam menekan jenis pelanggaran tahun 2020 dikatakan berhasil karena kasus-kasus pelanggaran Perda sudah mengalami penurunan. sesuai target yang telah ditentukan tetapi pelanggaran tidak bisa ditekan secara signifikan dikarenakan :

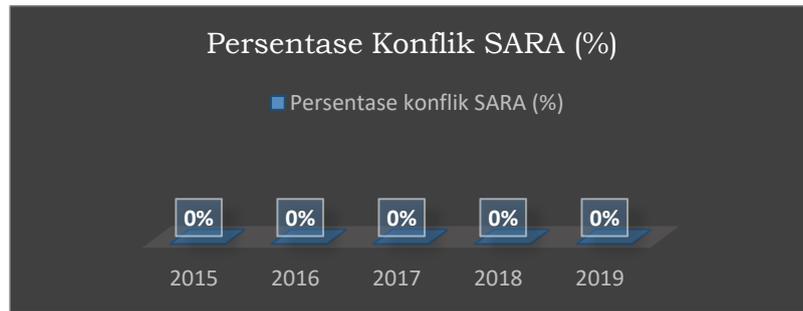
- a. Pelanggaran tidak bisa diprediksi.
- b. Banyaknya PHK sehingga masyarakat cenderung melanggar Perda.
- c. Pencabutan Perda perijinan yang berakibat tindakan tidak bisa maksimal.
- d. Kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Adapun langkah yang ditempuh dalam pelanggaran perda yaitu melakukan penindakan dengan tegas berupa Surat tegoran, panggilan dinas, penyetopan, penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan Pengukuran indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang diselesaikan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan dengan jumlah gangguan trantibum yang ditangani. Jumlah gangguan trantibum yang ditangani pengukurannya adalah jumlah gangguan trantibun yang ditangani terhadap jumlah gangguan trantibum, data tersebut diambil dari kreteria dari jenis gangguan trantibum antara lain : unjuk rasa, Gepeng, anak jalanan dan anak punk.

Berdasarkan tabel diatas persentase gangguan trantibum yang diselesaikan adalah jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sebanyak 50 kasus dibagi jumlah gangguan trantibum yang ditangani sebanyak 50 kasus, sehingga tingkat pencapaian persentase gangguan trantibum yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan jumlah gangguan trantibum sebanyak 178 kasus sehingga mengalami penurunan terhadap gangguan trantibum sebanyak 128 kasus tetapi capaiannya sama yaitu sebesar 100%.

2. Persentase Konflik SARA

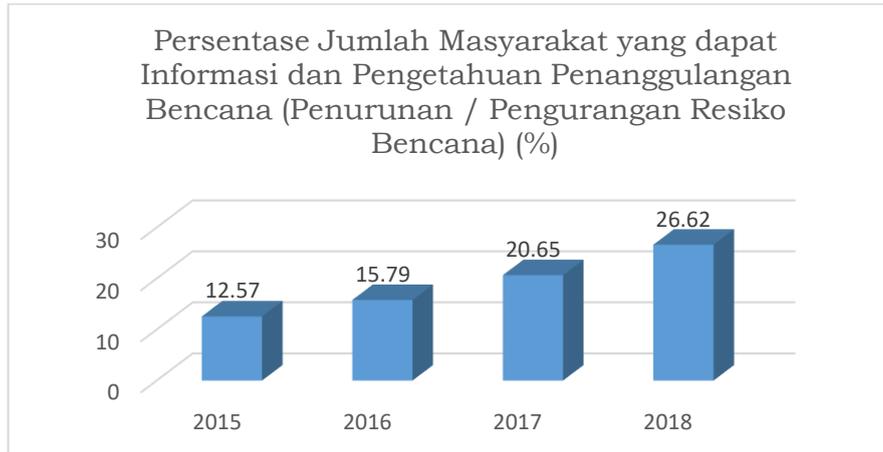


Grafik 2.72. Persentase Konflik SARA di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan beberapa indikator yang termuat dalam dokumen perencanaan salah satunya yaitu Persentase penurunan konflik SARA indikator ini merupakan indikator baru yang pada periode RPJMD sebelumnya menggunakan indikator Forum Antar Umat Beragama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun indikator tersebut diganti menjadi Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat pada tahun 2019.

3. Persentase Pengurangan Risiko Bencana

Kabupaten Pasuruan, karena posisi geografisnya, memiliki banyak potensi bencana. Potensi bencana tersebut antara lain: banjir, tanah longsor, puting beliung, ancaman erupsi gunung berapi dan Rob. Oleh karena itu pencegahan dini dan penanggulangan kejadian bencana menjadi salah satu perhatian pemerintah.



Grafik 2.73. Persentase Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana, prioritas pada 3 (tiga) strategi yaitu :

1. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana pada kebijakan, perencanaan dan program pembangunan yang berkelanjutan yang memprioritaskan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penurunan tingkat kerentanan.
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan nasional, daerah serta masyarakat untuk bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi ancaman bencana.
3. Penyertaan pendekatan pengurangan resiko bencana pada perencanaan, pelaksanaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana diukur melalui presentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Hasil ini merupakan perbandingan antara jumlah warga negara di Kabupaten Pasuruan yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibanding dengan jumlah warga negara di Kabupaten Pasuruan yang berada di kawasan rawan bencana di suatu kabupaten.

Tabel.2.47. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	2019	2020



1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,46 %	0,05 %
----	---	--------	--------

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan hasil bahwa ada penurunan persentase warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana. Tahun 2019 terdapat 1.950 jiwa dari total 425.751 jiwa yang berada di kawasan rawan bencana, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1.050 jiwa dari total 1.915.413 jiwa.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diukur melalui presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Hasil ini merupakan perbandingan antara jumlah warga negara di Kabupaten Pasuruan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding dengan jumlah warga negara di Kabupaten Pasuruan yang berada di kawasan rawan bencana di suatu kabupaten.

Tabel.2.48. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Pasuruan

No	Uraian	2019	2020
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,47 %	0,0042 %

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan hasil bahwa ada penurunan persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Tahun 2019 terdapat 2.000 jiwa dari total 425.751 jiwa yang berada di kawasan rawan bencana, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 80 jiwa dari total 1.915.413 jiwa.

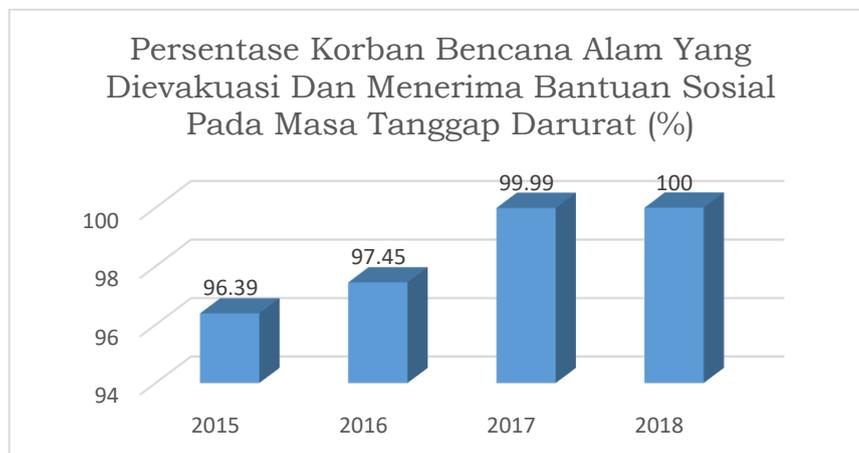
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diukur melalui presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Hasil ini merupakan perbandingan antara jumlah warga negara di Kabupaten Pasuruan yang memperoleh layanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana dibanding dengan jumlah keseluruhan korban bencana di suatu kabupaten.

Tabel.2.49. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %

4. Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat



Grafik 2.74. Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Keberhasilan upaya penanggulangan bencana dinilai dengan indikator indeks resiko bencana, resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Indeks untuk menghitung resiko bencana memperhatikan banyak aspek, seperti dampak posisi geologi, lingkungan, geografi dan kependudukan, ekonomi, dan profil bencana yang sudah terjadi, serta dilengkapi dengan perkiraan nilai kerugian yang timbulkan. Indeks resiko bencana berfungsi



untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di satu daerah dengan memperhatikan perlakuan beberapa parameter resiko dengan dasar yang jelas dan terukur, serta menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan melalui beberapa hal antara lain : pelatihan masyarakat dalam menghadapi bencana, peringatan dini terjadinya bencana, dan pembentukan desa tangguh bencana. Sampai akhir tahun 2017 di Kabupaten Pasuruan telah terbentuk 7 (tujuh) desa tangguh bencana.

5. Persentase Pelanggaran Perda

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan indikator Penegakan PERDA dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda yang ditangani. Berikut merupakan capaian Penegakan PERDA yang diselesaikan.

Tabel. 2.50. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1.	Persentase Palanggaran Perda	%	80,19	73,82
2.	Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	91,24	92,13
3.	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100	100

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Pasuruan

Indikator ini diukur dengan formula perhitungan jumlah pelanggaran Perda tahun 2020 dibanding dengan jumlah pelanggaran Perda tahun 2019. Jumlah pelanggaran perda tahun 2020 sebanyak 801 sedangkan jumlah

pelanggaran tahun 2019 sebanyak 1.085. Untuk Persentase Pelanggaran Perda pada tahun 2020 mencapai 73,82 %, capaian ini melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 73 %

6. Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan

Indikator ini diukur dengan menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda.

Tabel. 2.51. jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan, dibandingkan dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020
Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	990	738
Jumlah Penindakan pelanggaran Perda	1.085	801
Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)	91,24	92,13



Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 738 kasus dibagi dengan jumlah penindakan pelanggaran Perda sebanyak 801 kasus. Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 92,13% sedangkan target yang ditetapkan dalam kinerja sebesar 92% sehingga tingkat pencapaiannya 92,13%

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 91,24% tampak mengalami **kenaikan** sebesar 0,89%.



Dalam menekan jenis pelanggaran tahun 2020 dikatakan berhasil karena kasus-kasus pelanggaran Perda sudah mengalami penurunan. sesuai target yang telah ditentukan tetapi pelanggaran tidak bisa ditekan secara signifikan dikarenakan :

- e. Pelanggaran tidak bisa diprediksi.
- f. Banyaknya PHK sehingga masyarakat cenderung melanggar Perda.
- g. Pencabutan Perda perijinan yang berakibat tindakan tidak bisa maksimal.
- h. Kurangnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Adapun langkah yang ditempuh dalam pelanggaran perda yaitu melakukan penindakan dengan tegas berupa Surat tegoran, panggilan dinas, penyetopan, penyelidikan dan penyidikan.

7. Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan

Pengukuran indikator kinerja persentase gangguan trantibum yang diselesaikan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan dengan jumlah gangguan trantibum yang ditangani. Jumlah gangguan trantibum yang ditangani pengukurannya adalah jumlah gangguan trantibum yang ditangani terhadap jumlah gangguan trantibum, data tersebut diambil dari kriteria dari jenis gangguan trantibum antara lain : unjuk rasa, Gepeng, anak jalanan dan anak punk.

Tabel. 2.52. Gangguan Trantibum Yang Diselesaikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

URAIAN	2019	2020
Jumlah gangguan trantibum yang ditangani	178	50
Jumlah kasus gangguan trantibum diselesaikan	178	50
Jumlah Seluruh Kasus gangguan trantibum	178	50
Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)	100	100

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tabel diatas persentase gangguan trantibum yang diselesaikan adalah jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sebanyak 50 kasus dibagi jumlah gangguan trantibum yang ditangani sebanyak 50



kasus, sehingga tingkat pencapaian persentase gangguan trantibum yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan jumlah gangguan trantibum sebanyak 178 kasus sehingga mengalami penurunan terhadap gangguan trantibum sebanyak 128 kasus tetapi capaiannya sama yaitu sebesar 100%.

8. Jumlah Konflik SARA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan beberapa indikator yang termuat dalam dokumen perencanaan salah satunya yaitu Persentase penurunan konflik SARA indikator ini merupakan indikator baru yang pada periode RPJMD sebelumnya menggunakan indikator Forum Antar Umat Beragama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun indikator tersebut diganti menjadi Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat pada tahun 2019.

Kesatuan bangsa dan politik diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, pertahanan, dan keamanan serta peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM, dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Capaian kinerja Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik untuk melaksanakan Unsur Pemerintahan Umum tahun 2020 sebagaimana Tabel berikut

Tabel. 2.53. Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Tujuan : Menurunnya konflik SARA	Jumlah konflik SARA	kali	0	0
2	Sasaran : Meningkatnya situasi dan kondisi masyarakat yang toleran dalam kehidupan beragama dan kemajemukan	Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	%	100	100
		Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	%	100	100

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan

1. Jumlah Konflik SARA

Pada tahun 2019 – 2020 tidak pernah terjadi konflik SARA di Kabupaten Pasuruan. Hal ini mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2. Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah

Pada indikator ini membandingkan antara potensi konflik yang dapat dicegah terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Pada tahun 2020 indikator ini tercapai sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan tidak ada potensi konflik yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

3. Prosentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat

Indikator ini membandingkan antara konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan konflik yang terjadi. Pada tahun 2020 capaian indikator ini juga terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan tidak terjadi konflik yang harus diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan banyak unsur dan Pimpinan Daerah.

9. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Pasuruan, karena posisi geografisnya, memiliki banyak potensi bencana. Potensi bencana tersebut antara lain: banjir, tanah longsor, puting beliung, ancaman erupsi gunung berapi dan Rob. Oleh karena itu pencegahan dini dan penanggulangan kejadian bencana menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Tabel.2.54. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1.	Tujuan : Menurunnya dampak bencana	Indeks Resiko Bencana	N/A	180.34	156.26
2.	Sasaran :				
	➤ Meningkatkan kemampuan daerah/kapasitas penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana berkategori utama	%	7.50%	12.50%
	➤ Terpenuhinya bantuan dan pemulihan dampak bencana	Persentase korban bencana tertangani	%	100	100
Persentase pemulihan sarana dan prasarana akibat dampak bencana		%	100	100	

Sumber : BPBD Kabupaten Pasuruan

❖ Indeks Resiko Bencana

Kerawanan bencana yang dilakukan penilaiannya dalam IRBI diartikan sebagai tingkat kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh jenis bencana tertentu. Dengan demikian perhitungan indeks rawan bencananya diperoleh dari dampak korban jiwa (meninggal dan luka-luka) dan kerusakan (rumah dan fasilitas/infrastruktur) serta kepadatan penduduk. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan berkembangnya metoda dan pengkajian resiko bencana, maka dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia ini telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan resiko bencana. Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang mempunyai indeks resiko bencana tertinggi nomor 3 di Propinsi Jawa Timur.

Indeks Resiko Bencana Multi Ancaman Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019 sebesar 180,34 dengan kelas resiko tinggi, sedangkan Indeks Resiko Bencana pada Tahun 2020 turun menjadi 156,26 namun masih dalam kategori level ancaman kelas resiko tinggi, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan pengurangan resiko bencana.



❖ **Persentase Desa Tangguh Bencana Berkategori Utama**

Desa / Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa / Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. . Dari 365 Desa / Kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan 21,92% atau 80 Desa / Kelurahan diantaranya adalah masuk dalam kriteria rawan bencana berkategori tinggi. Sehingga, masyarakatnya perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan

dalam upaya meningkatkan mitigasi dan ketahanan daerah untuk menghadapi kejadian bencana. Adapun salah satu bentuk kegiatannya yaitu Pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. Tingkat Desa / Kelurahan Tangguh Bencana dibagi dalam 3 kriteria yaitu:

- a. Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor penilaian 20-35)
- b. Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Madya (skor penilaian 36-50)
- c. Desa / Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor penilaian 51-60)

Ketiga kriteria Desa / Kelurahan Tangguh Bencana itu diperoleh dari pengisian kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek dan indikator Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. Kuesioner ini terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan lainnya. Pembentukan Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Pasuruan saat ini ada 2 kriteria yaitu Madya dan Utama.

❖ **Persentase Korban Bencana Tertangani**

Pada tahun 2020 terdapat korban yang terdampak bencana sebesar 265.144 jiwa meliputi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan kekeringan. Adapun capaian untuk korban bencana yang tertangani sebesar 265.144 jiwa, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Upaya penanganan korban bencana banjir yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pasuruan meliputi Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan identifikasi ke lokasi kejadian bersama Muspika, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Aparat Pemerintah Desa/ Kelurahan terdampak beserta Relawan. Dan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan bersama dengan Pol PP dan Relawan

melakukan Pertolongan Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) kepada korban yang terdampak banjir, maupun bencana lainnya. Penyaluran bantuan tanggap darurat bencana kekeringan berupa air bersih bagi masyarakat terdampak.



❖ **Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana**

Pada tahun 2020 terdapat rumah yang terdampak bencana sebesar 85 rumah akibat bencana meliputi bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan musibah kebakaran. Adapun capaian untuk pemulihan rumah akibat dampak bencana yang tertangani sebesar 85 rumah, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Sampai saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Pasuruan melakukan assesment untuk menghitung kerusakan rumah yang terdampak bencana dan kemudian diusulkan untuk pemulihan melalui dana Bansos yang anggarannya melekat di BKD. Sedangkan pemulihan sarana dan prasarana akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan beberapa penanganan yaitu : Pemasangan bronjong melalui BTT, pemasangan sandbag di tanggul yang jebol, dan normalisasi sungai.



Pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana, prioritas pada 3 (tiga) strategi yaitu :

4. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana pada kebijakan, perencanaan dan program pembangunan yang berkelanjutan yang memprioritaskan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penurunan tingkat kerentanan.
5. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan nasional, daerah serta masyarakat untuk bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi ancaman bencana.
6. Penyertaan pendekatan pengurangan resiko bencana pada perencanaan, pelaksanaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

F. Sosial

Sosial merupakan interaksi antar individu, atau kelompok yang menciptakan suatu pola sehingga terjadilah kegiatan yang bersifat umum dan menjadi ciri khas tersendiri. Dengan adanya proses sosial maka pasti akan tercipta suatu permasalahan pula yang menjadi tugas seluruh elemen khususnya pemerintah agar dapat tertangani. Sosial tidak hanya sekedar interaksi melainkan pula berhubungan atau berdampak pada ekonomi, stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Maka, sosial bersifat sangat penting bagi suatu daerah untuk memajukan dan mensejahterakan daerah tersebut.

1. Persentase Penanganan PMKS

Penanganan PMKS menggambarkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pasuruan telah ditangani dan mendapat perlindungan sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir. Oleh karena itu penanganan PMKS menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang sosial.

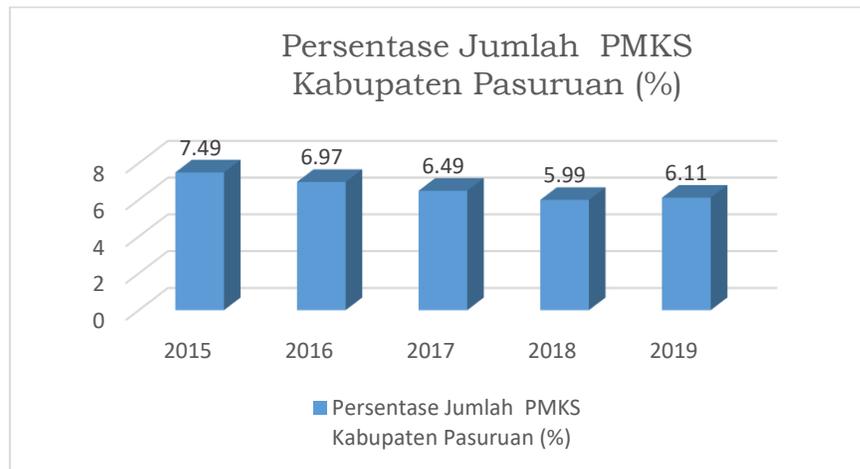


Grafik 2.75. Persentase Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Dapat diketahui bahwa dari grafik tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2015 capaian penanganan PMKS sebesar 31,35%. Pada tahun 2016 capaian penanganan PMKS sebesar 81,85%. Lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,99%. Tidak hanya itu, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 99,99%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi 99,93%.

2. Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan

Pengukuran kinerja atas indikator persentase jumlah PMKS dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk tahun 2018 sebesar 109.903 orang atau 5,99% dari jumlah penduduk sebesar 1.834.529 orang. Pencapaian tahun 2018 mengalami penurunan 0,5% bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai presentase sebesar 6,49% (115.502 orang). Capaian ini juga melebihi dari target akhir yang ditetapkan yakni sebesar 6%.



Grafik 2.76. Persentase Jumlah PMKS Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Tabel. 55. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1.	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Persentase PMKS	%	6,18	5,41
2.	Sasaran : Meningkatnya potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Persentase Penanganan PMKS	%	99,99	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Penanganan PMKS menggambarkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pasuruan telah ditangani dan mendapat perlindungan sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir. Oleh karena itu penanganan PMKS menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, didefinisikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi



kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,00 % dibandingkan tahun 2019, sebagaimana tabel berikut :

Tabel.56. Persentase PMKS Kabupaten Pasuruan

Uraian	2019	2020
Jumlah PMKS (orang)	114.741	87.986
Jumlah Penduduk (orang)	1.876.881	1.627.400
% PMKS	6.11	5.41

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

Pengukuran persentase PMKS dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2020 sebesar 87.986 orang atau sebesar 5.41 % dari jumlah penduduk 1.627.400 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 114.741 orang atau 6,11 % dari jumlah penduduk sebesar 1.876.881 orang.

Penurunan jumlah PMKS ini secara signifikan dipengaruhi oleh program yang dilakukan antara lain Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pola penanganan yang telah dikembangkan selama ini untuk mengurangi jumlah PMKS adalah melalui bantuan keuangan terhadap masyarakat sasaran dalam bentuk pemberdayaan, pemberian modal kerja maupun pelatihan pengembangan ketrampilan usaha yang dilakukan secara bertahap dengan partisipasi pekerja sosial kesejahteraan sosial (PSKS) yang membantu penurunan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pasuruan. PSKS telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada PMKS. Kedepannya pemerintah daerah akan berupaya lebih baik dan memberikan perhatian

khusus terutama untuk penanganan dan pengembangan usaha PMKS binaan sehingga penurunan PMKS lebih signifikan.

2.1.3.1.2 Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah diluar pelayanan dasar. Berbagai indikator ditampilkan untuk menjelaskan Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

1. Rasio penduduk yang bekerja



Grafik 2.81. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.605.969 jiwa, terdiri dari penduduk usia kerja sebanyak 1.242.393 dan angkatan kerja sebanyak 868.795 orang. Jumlah Angkatan Kerja tersebut terbagi



menjadi angkatan kerja yang bekerja sebanyak 814.614 orang dan pengangguran sebanyak 54.181 orang. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk maka angkatan kerja semakin besar. Hal ini dapat menjadi beban tersendiri bagi perekonomian karena meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja sehingga akan menyebabkan naiknya angka pengangguran.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja di Kabupaten Pasuruan. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator ini bisa digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja antara lain :

- a. Usia angkatan kerja, jenis kelamin dan tingkat pendidikan
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi
- c. Tingkat investasi yang masuk
- d. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
- e. Peningkatan SDM melalui keterampilan keahlian, sertifikasi serta kompetensi.
- f. Perkembangan perluasan kerja yang berorientasi pada kewirausahaan (minat usaha)
- g. Regulasi pemerintah pada bidang ketenagakerjaan



Grafik 2.82. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

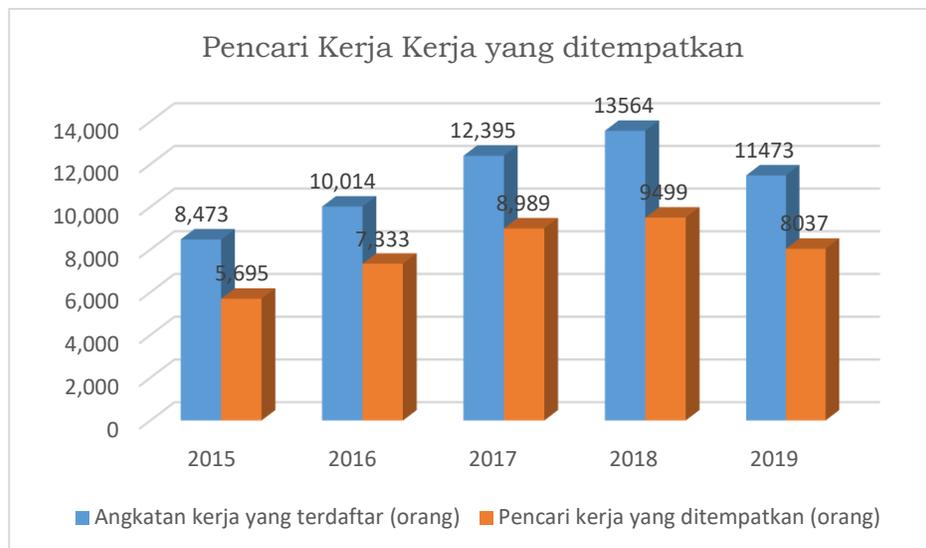
Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun ini mencapai angka 69,58%, mengalami kenaikan sebanyak 4,47% dari tahun 2017 (66,61%). Jika dibandingkan dari target RPJMD 2013-2018 yang ditentukan sebesar 70,90% maka realisasi maka tingkat partisipasi angkatan kerja tidak tercapai atau kurang sebesar 1,8%. Jumlah penduduk yang tinggi menjadi masalah di bidang ketenagakerjaan khususnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk itu perlu adanya lapangan kerja baru yang menyerap angkatan kerja yang tersedia dan perlunya pola pendidikan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, lewat balai latihan dan pendidikan baik bersifat formal maupun informal.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan adalah para calon tenaga kerja baik yang bekerja dalam institusi pemerintah maupun perusahaan, bekerja di luar negeri sebagai TKI, maupun melakukan wirausaha secara mandiri. Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan wujud keberhasilan suatu daerah dalam mengatasi/mengurangi masalah pengangguran yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat diketahui dari Gambar 2.83. bahwa jumlah tenaga kerja yang ditempatkan tahun 2020 diangka 1.839 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 diangka 8.949. Jumlah tenaga kerja yang

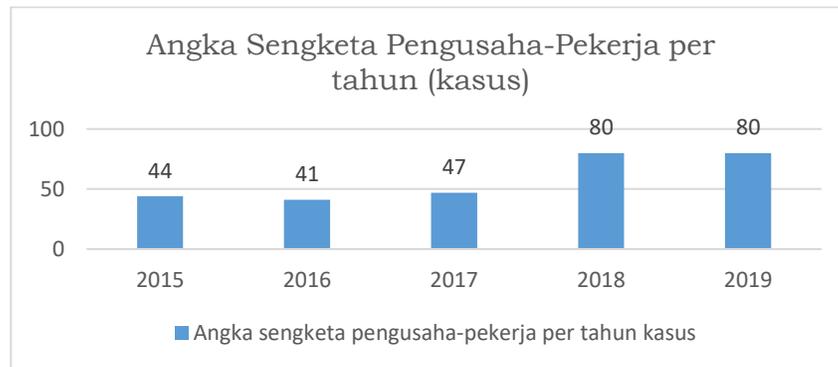
ditempatkan tahun 2018 sebanyak 9.499 orang atau 70,03% dari 13.564 pencari kerja yang mendaftar. Kondisi tersebut mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 70% dan bila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,67%. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja serta peluang kesempatan kerja terbuka melalui even atau *job fair/job matching*.



Grafik 2.83. Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

4. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Sengketa pengusaha dengan pekerja bisa diakibatkan karena adanya perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Perselisihan hak terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak dalam hubungan pengusaha dengan pekerja, masing-masing memiliki beda pelaksanaan dan penafsiran mengenai haknya baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan muncul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja. Perselisihan PHK muncul karena tidak ditemuinya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.



Grafik 2.84. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja diperoleh dari jumlah sengketa/perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan baik berupa anjuran mediator maupun perjanjian bersama, pada tahun 2018 ini terdapat 80 kasus yang dapat diselesaikan dari target 80 kasus yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan (tercapai 100%). Pada tahun 2019 juga sama yaitu realisasi mencapai 80 kasus dengan rincian tercapai 100%.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan persentase angkatan kerja yang termasuk pengangguran dimana akan memperlihatkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh dengan membandingkan jumlah pengangguran usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2018 TPT naik dari tahun sebelumnya 4,97% menjadi 6,11% disebabkan oleh beberapa hal yaitu masa survei Badan Statistik Nasional dilakukan pada bulan Agustus dimana pada periode tersebut Kabupaten Pasuruan sedang tidak musim tanam, lulusan dari dunia pendidikan yang tidak melanjutkan *study* nya. Faktor lainnya yaitu menurunnya jumlah kebutuhan tenaga kerja di perusahaan karena sudah tergantikan dengan mesin-mesin industri/komputer dengan sistem padat modal dan *hightech* dan belum *link-match* -nya dunia pendidikan dan dunia industri. Sementara pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 5,42%.



Grafik 2.85. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Salah satu awal dari jenis pendidikan non formal adalah pelatihan, kegiatan pelatihan memberikan manfaat yang cukup besar bagi peserta pelatihan apabila dikelola dengan baik. Dewasa ini banyak orang telah memanfaatkan pelatihan untuk membantu mereka dalam melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan, pada hakikatnya pelatihan merupakan pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku dalam hal ini pengetahuan *skill* dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan.

Salah satu akibat dari globalisasi adalah terjadinya persaingan yang semakin kuat di bidang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut kualitas tenaga kerja yang dicetak (*Supply*) harus memenuhi standar kebutuhan dan permintaan (*demand*) dunia usaha dan dunia industri. Proses pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai (*match*) dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu diklat keterampilan dan produktifitas tenaga kerja bagi masyarakat sangat diperlukan.

Adapun lembaga pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan adalah UPT LKD yang beralamatkan Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan guna menjawab tantangan tersebut dan memberikan bekal kepada masyarakat untuk ikut bersaing dan untuk meningkatkan pendapatan. Begitu urgennya penanganan masalah pengangguran masyarakat bagi pemerintah daerah, maka

Pemerintah Pasuruan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten melaksanakan berbagai pelatihan *skill* / keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Lembaga ini memiliki tujuan mempersiapkan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan IPTEK.

Dapat diketahui bahwa pada gambar dijelaskan mengenai gambaran data tenaga kerja yang mendapat pelatihan kerja di Kabupaten Pasuruan. Pelatihan Kerja tersebut dibagi menjadi dua yaitu Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan. Pelatihan Berbasis Masyarakat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 dengan capaian 350 kali pelatihan. Sedangkan Pelatihan Berbasis Masyarakat juga sama-sama mengalami tren peningkatan. Hal tersebut dikarenakan capaian pada tahun 2019 yaitu 350 kali pelatihan. Sehingga pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.86. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Tabel 2.58. Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

KEJURUAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
TEKNOLOGI MEKANIK	32	160	192	n/a	16



KEJURUAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
LISTRIK	48	96	96	n/a	16
OTOMOTIF	112	208	192	n/a	16
TATA NIAGA	48	96	96	n/a	0
BANGUNAN	n/a	n/a	n/a	n/a	0
PERTANIAN	n/a	96	n/a	n/a	0
ANEKA KEJURUAN	208	368	384	n/a	16

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, 2020

Dapat diketahui bahwa pada tabel dijabarkan mengenai pelatihan yang dilakukan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja. Dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk pelatihan kejuruan diantaranya Teknologi Mekanik, Listrik, Otomotif, Tata Niaga, Bangunan, Pertanian, dan Aneka Kejuruan. Dari masing-masing pelatihan tersebut berdasarkan realisasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuatif.

2. Rasio Proporsi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Menggambarkan peluang/kondisi yang tersedia terhadap angkatan kerja yang bekerja. Rasio Tingkat Kesempatan Kerja diperoleh atas perbandingan jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Dapat diketahui bahwa dari tabel, Indikator Rasio Proporsi tingkat Kesempatan Kerja (TKK) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 27,88%. Sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan secara signifikan sehingga mencapai 94,58%.

Tabel 2.59. Proporsi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	24,51%	n/a	27,88%	n/a	94,58%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, 2020

Kinerja Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel/ 57. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,42	6,24
2	Meningkatnya ketrampilan pencari kerja, penempatan dan perluasan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	70,05	43,4
		Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	%	68,75	75

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 diangka 6,24% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 diangka 5,42% . Presentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 menunjukkan angka 43,4% menurun dibandingkan tahun 2019 diangka 70,05%. Hal ini dikarenakan pandemic covid 19 .

B. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak harus terus diperkuat. Hal ini dirasa perlu mengingat perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi penting untuk masa depan suatu daerah.

1. Persentase Rasio KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), antara 40 hingga 70 persen perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,



pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.60. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rasio KDRT
2015	28	418.244	0,014
2016	16	420.232	0,004
2017	69	422.561	0,016
2018	39	449.450	0,008
2019	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2020

Dari data dapat dilihat bahwa rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,008% dimana dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dari 449.450 Rumah Tangga terdapat 39 kasus KDRT. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 0,016% dan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh RPJMD tahun 2018 sebesar 0,008%, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat keberanian, kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keberhasilan program inovasi SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Dengan semakin banyak kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keberhasilan pembangunan dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu sendiri karena secara normatif perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama juga mempunyai peranan penting dalam usaha perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun disisi lain banyak permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan salah satu diantaranya adalah kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan di Lembaga pemerintahan khususnya sejak dilakukan moratorium



rekrutmen ASN. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam menentukan kebijakan daerah. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan penentuan kebijakan sangat penting sehingga kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan - kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan diperoleh dari perbandingan Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Jumlah Pekerja Perempuan.

Pada tabel dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terhadap pekerja di Kabupaten Pasuruan mencapai 1,80% di tahun 2018 yang berarti bahwa dari 308.180 pekerja perempuan terdapat 5.537 pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2% dan mengalami penurunan jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan namun secara Persentase mengalami peningkatan sebesar 0,12% dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.61. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	1,97	1,97	1,68	1,8	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2020

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur kesempatan kerja dan peluang yang diperoleh perempuan dalam berusaha serta memiliki kesempatan kerja dan aktif dalam kegiatan yang bernilai ekonomis. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merupakan perbandingan dari jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan Jumlah Angkatan Kerja Perempuan.



Tabel 2.62. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	46,88	46,91	48	56,54	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2020

Dari data Tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2018 mencapai 56,54%, dimana dari 545.079 angkatan kerja perempuan terdapat 308.180 partisipasi angkatan kerja perempuan, nilai tersebut telah melebihi target RPJMD tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 40,06%, capaian tahun 2018 meningkat sebesar 8,54% dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari 50% dari angkatan kerja perempuan telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya dunia kerja.

3. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan upaya awal dari penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya pengaduan tindakan kekerasan menjadi indikator yang penting terkait peran aktif Masyarakat, organisasi perempuan dan Lembaga Perlindungan Anak untuk bersama-sama menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk KDRT didalamnya).

Tabel 2.63. Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	91,38	100	100	100	n/a

Sumber: Dinas KBPP, 2020

Tabel.2.64. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1.	Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	90,68	90,68
2.	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anggaran yang Responsif Gender	%	3,16	18,31
		Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	%	0,0067	0,0063

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan

4. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

IPG tahun 2020 mengacu pada hasil capaian tahun 2019 yaitu 90,68 %. Hal ini disebabkan oleh karena sampai dengan laporan ini di sajikan data dimaksud belum ada.

5. Presentase Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi :

- Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.



- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jumlah kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Dari data dapat dilihat bahwa persentase kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2020 sebesar 0,0063 %.

Tabel. 2.65. Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

No	Uraian / Data	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah Kekerasan(KDRT)	kasus	55	48
2.	Jumlah Perempuan & Anak	jiwa	820.893	761.653
3.	Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	%	0,0067	0,0063



No	Uraian / Data	Satuan	2019	2020
----	---------------	--------	------	------

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan

Data tersebut menunjukkan persentase kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2020 mencapai 0,0063 %. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,0002 %.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program inovasi SAKERA JEMPOL, (Sadari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola), sosialisasi tentang Undang – Undang Penghapusan Rumah Tangga serta peran Tim PPT PPA sebagai garda depan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan banyaknya kasus yang terungkap maka semakin mudah menentukan strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

6. Presentase Anggaran yang Responsif Gender

Tabel. 2.64. Presentase Anggaran yang Responsif Gender

No	Uraian / Data	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah ARG	Rp.	37.996.522.084,-	277.769.419.428,-
2.	Jumlah Anggaran	Rp.	1.201.692.208.820,-	1.516.839.718.422,-
3.	Persentase anggaran yang reponsif gender	%	3,16	18,31

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan

Jumlah Anggaran yang Responsif Gender pada tahun 2020 sebesar Rp. 277.769.419.428,- atau 18,31 % dari jumlah anggaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. yaitu sebesar Rp. 1.516.839.718.422,- Hal ini menunjukkan bahwa OPD di Kabupaten Pasuruan sudah berkomitmen dalam mendukung percepatan pengarusutamaan gender.



C. Pangan

Pembangunan ketahanan pangan pada tataran implementasi secara teknis adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani dalam membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terkait dengan upaya ketahanan pangan pemerintah daerah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sedangkan masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, serta terjangkau sesuai dengan daya beli.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik yang diolah maupun tidak diolah. Selain itu pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sebagai komponen dasar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan prinsip atau asas penyelenggaraan pangan di Indonesia harus berdasarkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap daerah mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Pembangunan pangan memiliki permasalahan dan tantangan yang besar. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan semakin terbatas karena adanya kompetisi pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain.

Infrastruktur penunjang pangan diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, meliputi:

- 1.) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu untuk menunjang kelancaran barang masuk. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa jalan penghubung



antar desa-kota, gudang penyimpanan sarana produksi pertanian dan tempat bongkar muat sarana produksi pertanian;

- 2.) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm*) untuk peningkatan produksi budidaya pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan); 3.) Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*off farm*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa sarana pengeringan hasil pertanian, gudang penyimpanan hasil pertanian termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*), sarana pengolahan hasil pertanian, sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian, terminal dan tempat bongkar muat barang termasuk Sub Terminal Agribisnis (STA) serta sarana penunjang (pembangkit listrik/generator listrik, sarana air bersih, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan).

2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan penting lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha pangan serta melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan. Adapun tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan melalui indikator ketersediaan pangan utama yang diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibanding jumlah penduduk dikalikan seratus persen.

3. Keamanan Pangan

Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis,



kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (UU RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Pangan).

Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan setiap tahunnya telah dilakukan uji laboratorium pangan segar meliputi sayuran dan buah yang ada di pasar kecamatan terhadap kandungan residu pestisida dan hasilnya tidak ditemukan adanya residu pestisida yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Selain itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang sasarannya anak-anak Sekolah Dasar (SD) tentang jajanan anak sekolah yang aman dan sehat. Kegiatan ini juga diberikan kepada ibu-ibu TP PKK tentang pangan yang sehat dan aman.

1. Stabilitas harga dan pasokan pangan

Pada tahun 2018 capaian nilai stabilitas harga dan pasokan pangan mencapai 97% yang menunjukkan harga dan pasokan 9 komoditas utama selama 1 tahun cukup stabil (stabilnya harga dan pasokan pangan yaitu jika nilai perhitungan mencapai 100%). Realisasi tersebut sudah dapat mencapai target yang telah ditetapkan didalam RPJMD periode 2013 –2018 sebesar 97%. Stabilitas harga dan pasokan pangan merupakan informasi harga per minggu selama 1 tahun untuk 9 komoditas utama, yaitu beras, jagung pipilan, kedele, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah

Tabel 2.65. Stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	96	93	95	97	n/a

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, 2020

2. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kebutuhan bahan pangan masyarakat Kabupaten Pasuruan dari setiap komoditas berpedoman pada angka kebutuhan perkapita pertahun. Hasil Susenas tahun 2010 yaitu 2.400 kkal/kapita/hari.



Berdasarkan hasil survei identifikasi pola konsumsi yang dilakukan setiap tahunnya oleh Tim dari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan pada masyarakat tingkat sosial ekonomi rendah, menengah dan tinggi (responden di 9 kecamatan masing-masing 10 rumah tangga) meliputi Kecamatan Gempol, Beji, Rembang, Purwodadi, Prigen, Winongan, Bangil, Kraton dan Rejoso, bahwa konsumsi beras menunjukkan skor sama dengan skor maksimal yaitu 25 dari Pola Pangan Harapan (PPH). Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi beras masih sulit digantikan oleh bahan pangan non beras (umbi-umbian) dan pangan alternatif lainnya (sorgum) sebagai upaya diversifikasi pangan. Sedangkan skor konsumsi minyak dan lemak sudah sesuai dengan harapan (nilai PPH).

Tabel 2.66. Stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

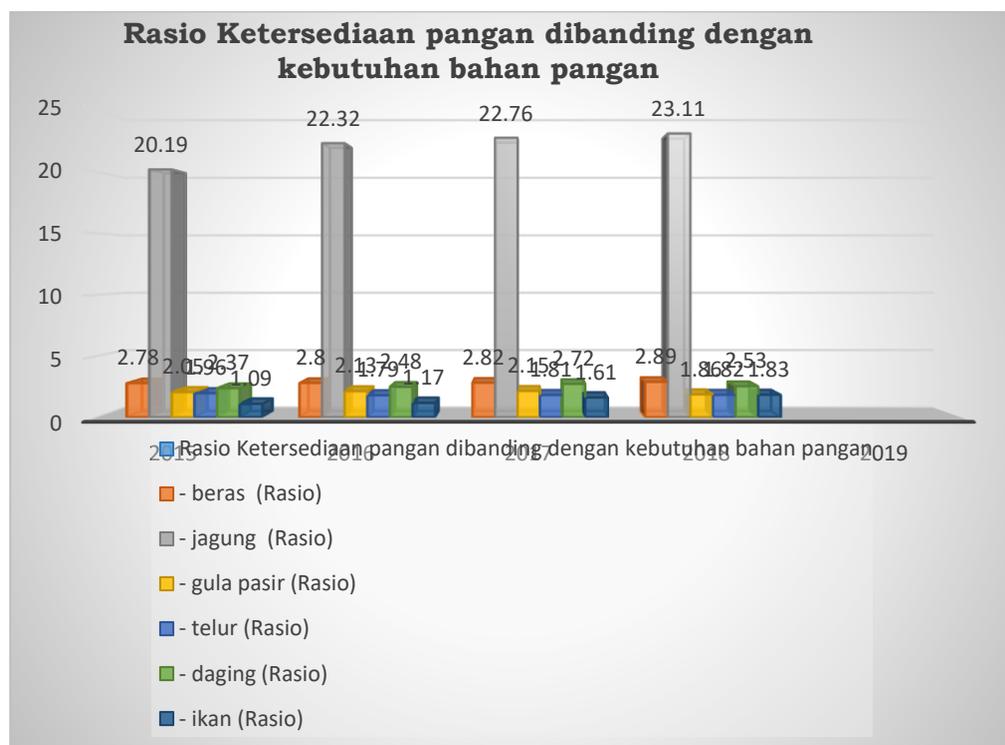
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Nilai)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	86,4	86,4	86,8	87,2	n/a

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, 2020

Angka skor PPH tahun 2018 ini 87,2 menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masih belum beragam dan seimbang, hal ini ditunjukkan dengan nilai konsumsi protein hewani dan konsumsi sayuran dan buah masih di bawah angka ideal, sehingga skor PPH belum dapat mencapai nilai skor 100. Meskipun demikian, angka skor PPH 87,2 sudah melampaui target tahun 2018 yaitu sebesar 87 naik dibanding tahun 2017. Kenaikan ini selain disebabkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang semakin meningkat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) juga disebabkan lokasi survei sebagian di kecamatan yang merupakan wilayah pengembangan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang memiliki ketersediaan pangan terutama protein hewani dan sayuran di pekarangan. Selain itu dilaksanakannya kegiatan pelatihan olahan pangan lokal (umbi-umbian) dan pangan alternatif lainnya (sorgum) dan penyuluhan sumber pangan alternatif sebagai substitusi beras telah mampu meningkatkan skor PPH.

3. Rasio Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan

Penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama di dalam pelaksanaan ketahanan pangan daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan bahan pangan domestik khususnya pangan utama sumber karbohidrat, protein nabati dan hewani untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat. Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah, dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk.



Grafik 2.87. Ketersediaan pangan dibanding dengan kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Capaian indikator tersebut didukung oleh rasio ketersediaan pangan beberapa komoditas bahan pangan dibandingkan dengan kebutuhan pangan yang terdiri dari :

1) **Beras.**



Rasio ketersediaan beras dibandingkan dengan kebutuhan beras tahun 2018 yaitu sebesar 2,89 sudah diatas target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan periode tahun 2013 – 2018 yaitu sebesar 2,41, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,82. Meskipun kebutuhan beras meningkat akibat kenaikan jumlah penduduk, tetapi jumlah produksi padi tahun 2018 telah mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.67. Rasio Ketersediaan Beras di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ketersediaan Beras (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	2,78	2,8	2,82	2,89	n/a

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, 2020

2) Jagung

Rasio ketersediaan jagung dibandingkan dengan kebutuhan jagung tahun 2018 yaitu sebesar 23,11 telah melampaui dari capaian tahun 2017 sebesar 22,76 dan target yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan periode tahun 2013 – 2018 yaitu sebesar 13,14. Meskipun kebutuhan jagung meningkat akibat kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan konsumsi jagung perkapita per orang akibat diversifikasi pangan, tetapi meningkatnya jumlah produksi jagung tahun 2018 telah mampu mencukupi kebutuhan jagung penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.68. Rasio Ketersediaan Jagung di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ketersediaan Jagung (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	20,19	22,32	22,76	23,11	n/a

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, 2020

3) Gula Pasir

Rasio ketersediaan gula pasir dibandingkan dengan kebutuhan gula pasir tahun 2018 sebesar 1,86 sedikit dibawah dari capaian tahun 2017 sebesar 2,15 dan tapi capaian itu sudah diatas target yang ditetapkan di



dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan periode tahun 2013 – 2018 yaitu sebesar 1,56. Hal ini disebabkan meningkatnya produktifitas tanaman tebu yang berdampak terhadap peningkatan produksi gula.

Tabel 2.69. Rasio Ketersediaan Gula Pasir di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ketersediaan Gula Pasir (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	2,05	2,13	2,15	1,86	n/a

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, 2020

4) Telur

Rasio ketersediaan telur dibanding dengan kebutuhan telur tahun 2018 yaitu sebesar 1,82 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,81, hal ini disebabkan produksi telur tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017. Angka rasio tersebut masih dibawah target tahun 2018 yaitu sebesar 2,10. Kenaikan jumlah kebutuhan telur, akibat kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan konsumsi per kapita per orang dapat diimbangi dengan kenaikan produksi telur, meskipun rasio telur sedikit dibawah target. Konsumsi telur yang meningkat disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan berprotein, pengetahuan tentang gizi dan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.

Tabel 2.70. Rasio Ketersediaan Telur di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ketersediaan Telur (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	1,96	1,79	1,81	1,82	n/a

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, 2020

5) Daging

Rasio ketersediaan daging dibandingkan dengan kebutuhan daging tahun 2018 yaitu sebesar 2,53 sedikit dibawah target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,10 Rasio tahun 2018 turun jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 2,72. Walau demikian persediaan daging masih mencukupi kebutuhan penduduk. Kenaikan

jumlah kebutuhan daging akibat kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan konsumsi perkapita per orang belum diimbangi dengan kenaikan produksi daging sehingga rasio sedikit dibawah target tahun 2018. Konsumsi daging baik ruminansia maupun unggas meningkat disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan berprotein, pengetahuan tentang gizi dan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.

Tabel 2.71. Rasio Ketersediaan Daging di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ketersediaan Daging (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	2,37	2,48	2,72	2,53	n/a

6) Ikan

Rasio ketersediaan ikan dibanding dengan kebutuhan ikan tahun 2018 yaitu sebesar 1,83 meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 1,61, hal ini disebabkan produksi ikan baik budidaya maupun tangkap tahun 2018 naik dibanding tahun 2017 dan telah mencapai target tahun dalam RPJMD Periode 2013-2018 sebesar 1,48. Meskipun terjadi kenaikan jumlah penduduk dan konsumsi yang meningkat tetapi telah diimbangi pula dengan kenaikan produksi ikan baik hasil tangkap maupun budidaya.

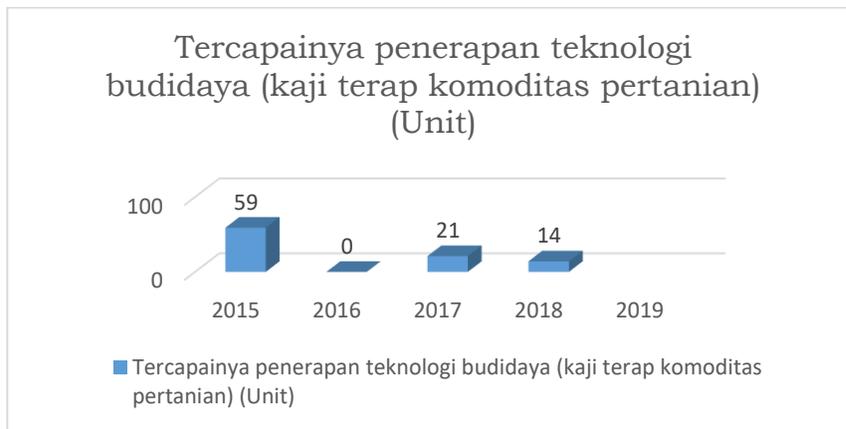
Tabel 2.72. Rasio Ketersediaan Ikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ketersediaan Ikan (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio	1,09	1,17	1,61	1,83	n/a

Sumber: Dinas Perikanan, 2020

Kaji terap komoditas pertanian merupakan metode penyuluhan berupa percontohan usaha tani yang menerapkan teknologi hasil penelitian oleh Balai Penelitian Pertanian. Hasil teknologi tersebut diterapkan di lokasi hasil Musrenbang. Jika hasilnya sesuai yang diharapkan maka akan direkomendasikan di lokasi tersebut sebagai komoditas hasil inovasi baru. Di tahun 2018 kegiatan kaji terap dapat

terrealisasi 14 belum memenuhi target yang telah ditetapkan telah ditetapkan di dalam RPJMD Periode 2013-2018 sebesar 25. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga jumlah kaji terap disesuaikan dengan anggaran yang ada.



Grafik 2.88. Tercapainya penerapan teknologi budidaya di abupaten Pasuruan tahun 2015-2019

4. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Penyuluh

Indikator kinerja pembangunan daerah ini merupakan indikator di dalam pengukuran kinerja penyuluhan pertanian. Adapun output dari indikator ini berupa penyusunan program penyuluhan sebagai metode penyuluhan yang menjadi dasar/acuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan penyuluh. Setiap tahun disusun programa penyuluhan sebanyak 25 buku. Pada tahun 2018 capaian realisasi penyusunan Programa Penyuluhan sebanyak 25 buku sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018 sebanyak 25 buku.

Kinerja Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan tahun 2020 yang diampu oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana berikut:



1. Indeks Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2020 berada diangka 68,78 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 69,38.
2. Rasio Ketersediaan Pangan
Rasio Ketersediaan Pangan pada tahun 2020 berada diangka 2,58 meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berada diangka 2,53.

D. Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Pertanahan di Kabupaten Pasuruan dinilai menggunakan tolok ukur keberhasilan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013 – 2018 yaitu :

1. Persentase Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten

Target RPJMD 2013 – 2018 untuk indikator Persentase sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 32,05% dan terealisasi sebesar 11,85%, atau lebih kecil dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 23,89% maka capaian tahun 2018 ini lebih rendah atau mengalami penurunan, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya:

- (i) Adanya penambahan aset tanah yang baru. Selama tahun 2017 - 2018 telah dilakukan inventarisasi tanah dibawah jalan dan dibawah saluran. Dari hasil inventarisasi tersebut terjadi penambahan aset sebanyak 1.159 bidang sehingga total keseluruhannya menjadi 2.431 bidang.
- (ii) Dalam proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah harus disertai dengan dokumen riwayat tanah. Hal ini menjadikan proses pensertifikatan aset menjadi lama.

Tabel 2.73. Persentase Sertifikat Tanah Aset Pemerintah di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Sertifikat Tanah Aset Pemerintah (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	24,81	23,92	23,89	n/a	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018



2. Tertanganinya Kasus dan Sengketa Pertanahan

Target indikator kinerja penanganan kasus dan sengketa pertanahan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 32,05% dan terealisasi sebesar 100%, atau lebih besar dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 maka capaian kinerja pada tahun 2018 sama capaian tahun 2017 sebesar 100%, hal ini menggambarkan bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus dan sengketa tanah yang ada agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Tabel 2.74. Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan (Rasio)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	100	100	100	n/a	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018

Guna menunjang ketercapaian target kinerja urusan pertanahan pada tahun 2018 dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembinaan administrasi pertanahan desa

Pada kegiatan pembinaan administrasi pertanahan desa mempunyai tujuan pengsaduran Buku C desa untuk membantu masyarakat apabila akan memproses sertifikat tanah.

2. Identifikasi dan pemetaan tanah negara selain oloran

Kegiatan identifikasi dan pemetaan tanah negara selain oloran bertujuan untuk mengidentifikasi tanah terutama tanah negara. Pada tahun 2018 sasaran kegiatan ini yaitu tanah negara untuk tanah eigendom, karena efisiensi anggaran untuk tahun 2018 maka ditiadakan.

3. Bimtek Administrasi Pertanahan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan sasaran pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap proses pendaftaran awal mengenai pembuatan akta tanah di tingkat Desa dan Kecamatan.

Sedangkan dalam RPJMD yang berlaku yaitu tahun 2019-2023, untuk tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Pertanahan



menggunakan indikator kinerjanya adalah Persentase pengelolaan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yg berlaku, dimana capaian kinerjanya pada tahun 2019 dan tahun 2020 sudah 100%, yang berarti pembinaan yang dilakukan telah efektif mencapai target yang diharapkan. Pembinaan yang dilakukan antara lain:

- Penyaduran Buku C desa untuk membantu masyarakat apabila akan memproses sertifikat tanah.
- Peningkatan pemahaman pelaksana PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tentang proses pembuatan akta tanah di tingkat desa dan kecamatan.

E. Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup pada tahun 2018 sesuai dengan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2015 - 2018 sebagai berikut :

1. Persentase Luas Cakupan Permukiman yang dilayani Pengangkutan Sampah

Pelayanan pengangkutan sampah di wilayah permukiman merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, pelayanan pengangkutan sampah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Urusan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2018 target kinerja cakupan pelayanan pengangkutan sampah sebesar 21,70% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 21,76% atau 776,7 ha. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017, sebesar 19,19%, terdapat peningkatan cakupan pelayanan pengangkutan sampah sebesar 2,57%. Pencapaian kinerja ini didukung adanya penambahan sarana prasarana pengangkutan sampah, penambahan TPS dan TPS-3R, serta meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan swadaya masyarakat pada pengangkutan sampah dari permukiman ke TPS/TPS-3R.

Tabel 2.76. Persentase Luas Cakupan Pemukiman yang dilayani Pengangkutan Sampah di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Luas Cakupan Pemukiman yang dilayanan Pengangkutan Sampah (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	17,2	18,96	19,19	21,76	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018

2. Terbangunnya TPA Baru

Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) di Desa Kenep - Kecamatan Beji, secara teknis sudah mengalami *over load*, sehingga perlu segera dilakukan pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) baru di Kabupaten Pasuruan. Pembangunan TPA baru direncanakan di wilayah Desa Wonokerto - Kecamatan Sukorejo. Target kinerja pembangunan TPA pada tahun 2018 sebesar 100% atau TPA sudah terbangun dan dapat dimanfaatkan. Tetapi sampai akhir tahun 2018 tahapan yang dicapai sama dengan Tahun 2017 yaitu tersedianya lahan untuk pembangunan TPA baru pada lokasi yang direncanakan atau sebesar 35% dari proses pembangunan TPA. Kinerja pembangunan TPA ini tidak dapat direalisasikan dikarenakan DED TPA yang berlokasi di Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo baru selesai bulan Desember Tahun 2018.

Tabel 2.78. Terbangunnya TPA Baru di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Terbangunnya TPA Baru(%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	15	30	70	n/a	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018

3. Tersedianya TPS dan TPS-3R

Guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta guna memperpanjang usia teknis TPA, sampah yang dihasilkan terlebih dulu diolah oleh masyarakat langsung di sumbernya atau di TPS / TPS-3R. Target kinerja penyediaan TPS dan TPS-3R pada tahun 2018 sebanyak 30 unit dengan capaian kinerja sebesar 123 unit. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 89 unit, pada tahun 2018 terdapat penambahan 34 unit TPS dan TPS-3R yang terdiri dari 33 unit TPS dan 1

unit TPS-3R. Disamping itu guna menunjang pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengadakan container sampah sebanyak 96 unit.

Tabel 2.79. Tersedianya TPS dan TPS-3R di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Tersedianya TPS dan TPS-3R (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	66	76	89	123	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2019

4. Persentase Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan sesuai Peraturan Perundangan.

Dokumen lingkungan dan ijin lingkungan merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sebagai pedoman pengelolaan lingkungan dan upaya pengurangan polusi, kerusakan lingkungan hidup, serta upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berwawasan lingkungan maka indikator ini ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU). Pada tahun 2018 target kinerja indikator ini sebesar 90% dengan capaian sebesar 90,86% jadi dapat dikatakan untuk indikator ini sudah mencapai target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2017 ketercapaian kinerja sebesar 83,31%, atau dapat dikatakan indikator ini pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,55.

Tabel 2.80. Persentase Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan sesuai Peraturan Perundangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan sesuai Peraturan Perundangan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	85	83	83,31	90,86	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018



5. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Target kinerja pada indikator ini sebesar 80% dengan capaian sebesar 100%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ini melebihi target yang ditentukan. Sama dengan tahun 2017 capaian indikator kinerja sebesar 100%, sehingga dalam dua tahun ini terdapat keberhasilan dalam indikator kinerja ini karena sudah dapat melakukan penegakan hukum sebesar 100%, hal ini didukung dengan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang penegakan hukum lingkungan.

Tabel 2.81. Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penegakan Hukum Lingkungan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	88,89	91	100	100	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018

6. Luas Ruang Terbuka Publik Kawasan Perkotaan

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan satu pendukung wilayah perkotaan yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Ruang terbuka hijau adalah sarana perkotaan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sarana rekreasi, olahraga dan aktifitas sosial lainnya. Selain itu, ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan berfungsi sebagai paru-paru kota. Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 5,5 ha dengan ketercapaian kinerja sebesar 5,70 ha atau lebih tinggi dari target. Dibandingkan dengan tahun 2017 ketercapaian kinerja sebesar 5,43 ha, sehingga pada tahun 2018 terdapat penambahan RTH publik sebesar 0,28 ha yang berlokasi di Taman Patung Kuda Tretes, Taman Patung Sapi Pandaan, Taman Kompleks Perkantoran Raci, Taman Desa Gempol, Taman Gang Dahlia, dan Taman Jalan Raya Raci, Taman Ngemplak Prigen, Taman Melikan.

Tabel 2.82. Luas Ruang Terbuka Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	5,2	5,3	5,43	5,7	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2019

7. Penurunan Tingkat Pencemaran

Penurunan tingkat pencemaran merupakan hasil upaya masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pengukuran tingkat pencemaran meliputi : pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran limbah cair dan pencemaran limbah padat. Target kinerja dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator pada tahun 2018 sebagai berikut :

a) Air

Target kinerja penurunan tingkat pencemaran air pada tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 66,67%, sehingga capaian indikator ini dapat dikatakan tidak mencapai target. Dibandingkan dengan tahun 2017 capaian indicator ini mengalami penurunan sebesar 11,11%, hal ini disebabkan masih adanya masyarakat yang membuang limbah dan sampah ke sungai serta menjadikan sungai sebagai MCK, jumlah sumber pencemar (Perusahaan) semakin tahun semakin banyak sedangkan jumlah kapasitas badan air terbatas.

Tabel 2.83. Penurunan Tingkat Pencemaran Air di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penurunan Tingkat Pencemaran Air (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	88,89	88,89	77,78	66,67	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2018

b) Udara

Target kinerja penurunan pencemaran udara pada tahun 2018 terpenuhi sebesar 100% atau tidak ditemukan pencemaran udara pada titik-titik pengamatan, dengan capaian kinerja yang sama pada tahun

2017 sebesar 100% maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat maupun kalangan pengusaha / industri telah memiliki pemahaman yang cukup tinggi akan pentingnya menjaga kebersihan udara.

Tabel 2.84. Penurunan Tingkat Pencemaran Udara di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penurunan Tingkat Pencemaran Udara (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	100	100	100	100	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2018

c) Limbah Cair

Target kinerja penurunan pencemaran akibat limbah cair pada tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 29,17%. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2018 menurun sebesar 70,83%, dalam hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran baik dari masyarakat maupun kalangan usaha dalam pengelolaan limbah cair yang akan dibuang ke sungai atau badan air di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.85. Penurunan Tingkat Pencemaran Limbah Cair di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penurunan Tingkat Pencemaran Limbah Cair (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	98	99	100	28,17	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2018

d) Limbah Padat

Target kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100%, sehingga target kinerja tahun 2018 tercapai. Begitu juga dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100% maka dapat dikatakan tidak lagi terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah padat. Ketercapaian kinerja ini didukung peran serta masyarakat maupun industri dalam menjaga kebersihan lingkungan akibat limbah padat.

Tabel 2.86. Penurunan Tingkat Pencemaran Limbah Padat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penurunan Tingkat Pencemaran Limbah Padat (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019



Persentase	100	100	100	100	n/a
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2020

8. Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah diharuskan untuk menyusun informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah (KLHS dan SLHD) yang merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, informasi kualitas SDA dan LH merupakan dokumen yang harus ada dan dimiliki oleh Pemerintah. Target indikator pada tahun 2017 sebesar 100% (2 dokumen) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% (2 dokumen) yaitu tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Pasuruan yang merupakan acuan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.87. Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	100	100	100	100	n/a

Sumber: AMJ Bupati Pasuruan, 2018

Sedangkan dalam RPJMD yang berlaku yaitu tahun 2019 – 2023 indikator kinerja untuk urusan lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan terkini bertambah baik atau sebaliknya, tekanan terhadap lingkungan akibat perubahan media lingkungan (air, udara dan lahan / hutan) dari kegiatan manusia dan respon atau upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten



Pasuruan dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dari penyusunan Laporan IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Pasuruan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang urusan Lingkungan Hidup.

Hasil yang dicapai berupa tersedianya data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebesar 57,38 dengan kategori kurang. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,167 poin, menjadi 62,547. Indikator sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

❖ **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian namun di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta pelaku usaha. Pada tahun 2020 realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) di



Kabupaten Pasuruan sebesar 52,14 dengan capaian kinerja sebesar 88,87% dari target yang ditentukan sebesar 58,67.

❖ **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pada tahun 2020 nilai untuk Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Pasuruan adalah 82,22 poin dengan target capaian adalah sebesar 82,25poin dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2019 yakni 78,83 poin.

❖ **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan sangat dipengaruhi oleh luas tutupan lahan. Luas tutupan lahan total adalah dengan menjumlahkan luasan tutupan hutan, belukar dan semak belukar, hutan kota, kebun raya, taman kota dan RTH kabupaten. Target IKTL Tahun 2020 sebesar 43,64 poin dan realisasi sebesar 44,04 poin dengan capaian sebesar 101%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (43,89 poin) mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin.

❖ **Nilai TPA (Program Adipura)**

Sebagai upaya mendukung penilaian Program Adipura dimana salah satunya adalah Nilai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

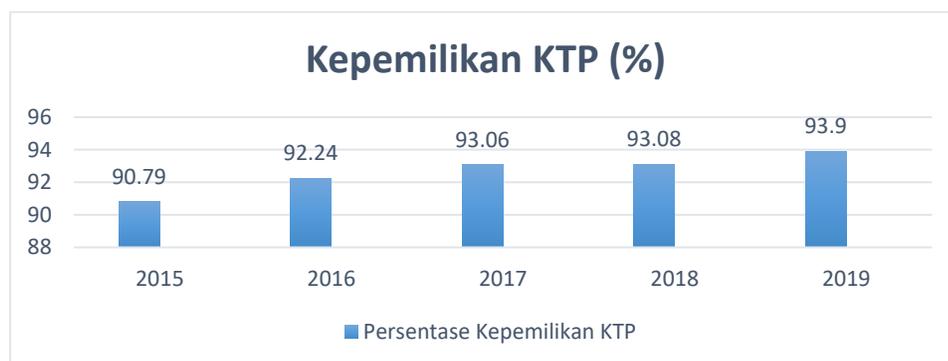
- a. Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan,
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan,
- c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan;
- d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dan
- e. Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (Pembangunan/ Penyediaan TPA)

Pada tahun 2020 realisasi Nilai TPA Kabupaten Pasuruan adalah 79 poin melebihi target yang telah ditentukan yakni 78 poin maupun standar nilai program adipura sebesar 76 poin sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Pasuruan memperoleh Penghargaan Adipura untuk kesekian kalinya.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib). Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah yang tercapai sebagaimana tabel berikut.

1. Kepemilikan KTP



Grafik 2.89. Kepemilikan KTP di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Capil 1.834.529 orang. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP pada tahun 2018 mencapai 1.319.174 orang atau 93,08% dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.417.322 orang. Persentase ini sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,11%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (93,06%), maka terjadi peningkatan sebesar 0,2%. Hal ini disebabkan oleh :

1. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP sebagai identitas mereka;
2. meningkatnya wajib KTP;
3. meningkatnya usia pemula kepemilikan KTP (17 tahun);

4. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan di bidang kependudukan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan KTP. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah operasional mobil unit layanan keliling sebanyak 2 (dua) unit tujuan dari penyediaan mobil unit layanan keliling adalah untuk mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat melalui sistem jemput bola, sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dengan adanya sistem jemput bola dapat meningkatkan jumlah kepemilikan KTP serta kepemilikan akta kelahiran

Pada tahun 2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 93,09%. Jumlah penduduk yang memiliki KTP di kabupaten Pasuruan dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan persentase setiap tahun nya.

2. KTP Nasional Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan)



Grafik 2.90. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Pada tahun 2017 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah selesai melaksanakan penerbitan, pencetakan dan pendistribusian NIK kepada masyarakat se Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.286.159 jiwa, sedangkan tahun 2018 mencapai 1.319.174 jiwa. Capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 1.032.952 jiwa. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terjadi peningkatan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK. Peningkatan tersebut dikarenakan bertambahnya usia pemula kepemilikan KTP (17 Tahun) serta meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan di desa – desa terpencil dan desa masalahat melalui mobil pelayanan jemput bola. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.347.885 jiwa.

3. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk



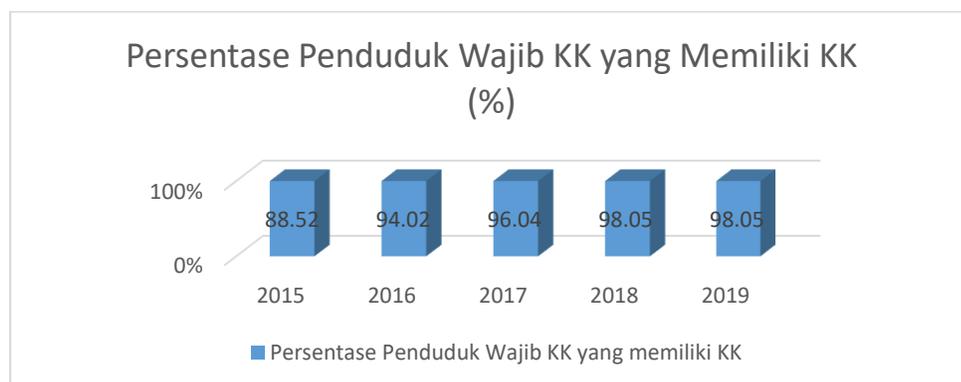
Grafik 2.91. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ber-akta kelahiran dengan jumlah penduduk dan dikalikan 1.000. Kepemilikan Akta tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga mencapai 700. Kepemilikan akta kelahiran tahun 2018 mencapai 694 per 1000 penduduk. Jika dibandingkan dengan kepemilikan akta kelahiran tahun 2017 sebanyak 688 per 1000 penduduk, maka terjadi peningkatan sebanyak 5 per 1000

penduduk. Peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasuruan ini dikarenakan Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran serta adanya program yang terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Fasilitas pelayanan Kesehatan serta adanya kebijakan satu paket untuk pengurusan Akte dan Kartu Keluarga secara bersama-sama.

4. Persentase penduduk wajib KK yang memiliki KK

Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 1.834.529 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KK pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 745.851 penduduk atau 98,05% dari jumlah penduduk wajib KK (759.685 penduduk). Persentase ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terutama yang baru menikah untuk mengurus KK. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang memiliki KK tahun 2017 yang mencapai 709.509 penduduk atau 96,04% dari jumlah penduduk wajib KK (738.743 penduduk), maka terjadi peningkatan sebesar 2,1%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KK sebagai dokumen kependudukan yang harus mereka miliki terutama bagi kepala keluarga baru dan juga dikarenakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan fasilitas layanan BPJS.



Grafik 2.92. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019



Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 menggunakan indikator kinerja dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel .2.89.Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	85,97	n/a
	Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan KTP elektronik dan KK	Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	93,09	93,11
		Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KK	%	98,05	98,10
	Meningkatnya Kepemilikan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Akte Kematian	Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	%	72	72
		Prosentase Penerbitan Akte Perkawinan	%	100	100
		Prosentase Penerbitan Akte Kematian	%	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKM tahun 2019 mencapai 85,97 dan masuk dalam kategori 'baik'. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin meningkat.

2. Persentase Penduduk Wajib KTP yang Nemiliki E-KTP

Indikator Kinerja Persentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP adalah salah satu dari 3 (tiga) Indikator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025. Untuk



mendukung Indikator Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang pertama ini adalah Jumlah kepemilikan KTP dan Jumlah penduduk wajib ber KTP.

Tabel . 2.90. Persentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP

Uraian	2019	2020
Jumlah penduduk ber KTP	1.314.885	1.106.229
Jumlah penduduk Wajib ber KTP	1.447.926	1.188.088
Kepemilikan KTP (%)	93,09	93,11

Sumber : Data DKB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan (Data DKB) pada Dinas Kependudukan dan Capil tahun 2020 1.603.550 orang. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP pada tahun 2020 mencapai 1.106.229 Orang atau 93,11 % dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.188.088 orang.

Persentase ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91,45 .%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (93,09 %), maka terjadi peningkatan sebesar 0,2 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP sebagai identitas mereka;
2. Meningkatnya wajib KTP;
3. Meningkatnya usia pemula kepemilikan KTP (17 tahun);
4. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan di bidang kependudukan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan KTP. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah program KENDUREN MAS, Kios E PAK LADI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi) di 57 Desa dan Kelurahan di 13 Kecamatan, PAK SAMIN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Minggu) dan operasional mobil unit layanan keliling sebanyak 2 (dua) unit tujuan dari penyediaan mobil unit layanan keliling adalah untuk mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil kepada



masyarakat melalui system jemput bola, sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dengan adanya program – program inovasi tersebut dapat meningkatkan jumlah kepemilikan KTP serta kepemilikan akta kelahiran

3. Persentase Penduduk Wajib KTP Yang Memiliki KK

Tabel.2.91. Persentase Penduduk Wajib KTP yang Memiliki KK

Uraian	2019	2020
Jumlah penduduk ber-KK	765.472	560.965
Jumlah penduduk wajib ber-KK	780.674	571.851
Persentase Penduduk Wajib KK yang memiliki KK	98,05 %	98,10 %

Sumber : Data DKB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 1.603.550 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KK pada tahun 2020 mencapai 560.965 penduduk atau 98,10% dari jumlah penduduk wajib KK (571.851 penduduk). Berdasarkan data Persentase ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 97%. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terutama yang baru menikah untuk mengurus KK. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang memiliki KK tahun 2019 yang mencapai 765.475 penduduk atau 98,05% dari jumlah penduduk wajib KK (780.674 penduduk), berdasarkan maka ada peningkatan sebesar 0,05%, namun demikian dengan melihat pertambahan jumlah penduduk pencapaian itu telah melebihi target sebesar 101%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KK sebagai dokumen kependudukan yang harus mereka miliki terutama bagi kepala keluarga baru dan juga dikarenakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan fasilitas layanan BPJS.



5. Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran

Indikator Kinerja ketiga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019-2025 adalah Prosentase Penduduk . Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran. Untuk mendukung Indikator yang ketiga ini adalah Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.92. Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran

Uraian	2019	2020
Jumlah Penduduk ber-akte kelahiran	1.314.244	.1.154.704
Jumlah Penduduk	1.876.881	1.603.550
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	720	720

Sumber : * Data DKB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran dengan jumlah penduduk dan dikalikan 1.000. Kepemilikan akte kelahiran tahun 2020 mencapai 720 per 1000 penduduk. Jika dibandingkan dengan kepemilikan akte kelahiran tahun 2019 sebanyak 720 per 1000 penduduk, maka tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan per 1000 penduduk. Capaian kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Pasuruan ini dikarenakan Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya kepemilikan Akte Kelahiran serta adanya program yang terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Fasilitas pelayanan Kesehatan serta adanya kebijakan satu paket untuk kepengurusan Akte dan Kartu Keluarga secara bersama-sama.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dinilai dari beberapa indikator kinerja pemerintah daerah, antara lain sebagaimana berikut :

1. Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan



Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan bahwa salah satu indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Lembaga Ekonomi Pedesaan yang di maksud adalah Badan Usaha Ekonomi Desa (BUMDes). Saat ini jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 117 unit atau sebanyak 34% dari 341 Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018, persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan sebesar 100% dengan jumlah lembaga ekonomi yang dibina sebanyak 117 lembaga, pada RPJMD target capaian Tahun 2018 sebesar 99,99% sehingga indikator ini sudah mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan capaian 90,72%, mengalami kenaikan sebesar 9,28%.

Tabel 2.93. Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	73,96	67,4	90,72	100	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Guna mendukung indikator ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan BUMDesa / BUMDesa Bersama. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 hari yaitu hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2018 bertempat di Hotel Tretes Raya dan dihadiri oleh 117 Unit BUMDes. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peranan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa serta meningkatkan perekonomian desa.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa

Pada tahun 2018 Indikator peningkatan sarana dan prasarana pasar desa di targetkan sebanyak 54 unit, realisasi pada tahun 2018 sebanyak 102 unit. Dibandingkan dengan tahun 2017 capaian sebesar 74 unit, maka capaian 2018 mengalami peningkatan sebanyak 28 unit, sebanyak 54 unit terfasilitasi dari dana APBD. Pasar Desa merupakan kegiatan perekonomian masyarakat desa dan agar keberadaan pasar desa

semakin optimal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melakukan pembinaan dalam pengelolaannya dan hal ini di tuangkan dalam kegiatan Pembinaan Pasar Desa. Salah satu bentuk wujud hasil dari Pembinaan Pasar Desa adalah diraihnya Penghargaan Pasar Desa Terbaik Jawa Timur Tahun 2018, salah satunya diraih oleh Pasar Desa Ngopak.

Tabel 2.94. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Desa (Unit)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Unit	36	59	74	102	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

3. Rata-Rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah lembaga masyarakat yang dibina dengan jumlah lembaga masyarakat seluruhnya Tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah binaan lembaga pemberdayaan masyarakat ini sasarannya terdiri atas Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 85 kader. Capaian untuk indikator rata-rata jumlah binaan lembaga masyarakat pada tahun 2018 sebesar 100%, capaian tersebut meningkat sebesar 1,90% dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.95. Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	40,06	120,5	98,1	100	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan bahwa salah satu indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan adalah Rata - Rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat. Persentase capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2018 sebesar 100% atau sesuai target yang ditentukan, sedangkan jumlah kelompok

masyarakat yang dibina yaitu sebanyak 255 kelompok. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 77,67% atau sebesar 22,33%. Kelompok masyarakat yang dibina adalah kelompok usaha ekonomi kecil masyarakat.

Tabel 2.96. Rata-rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rata-rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	38,74	63,3	77,67	100	n/a

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2020

Guna mendukung indikator ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 hari yaitu hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 17 s/d 21 Desember 2018 bertempat di 3 tempat yaitu : Gedung Maju Bersama di Nguling, Gedung Pertemuan Eks. PNPM di Nguling dan Balai Desa Balunganyar Kec. Lekok dan dihadiri masing – masing tempat 85 orang. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan kelompok masyarakat khususnya bagi KRTP / Kepala Rumah Tangga Perempuan. Hal ini mengingat untuk keselarasan program jalin matra yaitu bantuan jalin matra bagi KRTP / Kepala Rumah Tangga Perempuan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

➤ **Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :**

❖ **Prosentase Desa Mandiri**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa yang dimaksud dengan Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya



kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa menyebutkan bahwa di Jawa Timur terdapat 332 Desa Mandiri dan empat diantaranya ada di Kabupaten Pasuruan, jumlah adalah hasil akumulasi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebanyak 2 Desa Mandiri dan 2 Desa Mandiri di tahun 2020.

Adapun desa mandiri tersebut adalah :

1. Desa Sidogiri Kec. Kraton
2. Desa Warungdowo Kec. Pohjentrek
3. Desa Purwodadi Kec. Purwodadi
4. Desa Karangsono Kec. Sukorejo

Capaian kinerja indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah sebesar 1,17%. Pencapaian ini sudah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0.88%. Hal ini didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan secara maksimal berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016.

❖ **Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) Mandiri**

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satunya adalah Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri. Sampai dengan tahun 2020, jumlah Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan sebanyak 168 unit atau bertambah 48 unit dari tahun sebelumnya yaitu 120 unit, dari 168 unit BUMDes yang ada dan aktif terdapat 50 unit yang sudah mandiri. Tahun 2020 ditetapkan target sebesar 3% dan realisasi 29,76%.



❖ **Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang Aktif**

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) yang aktif dengan jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) seluruhnya tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah kelembagaan masyarakat desa (LPM) yang aktif sebanyak 61 unit dari 341 unit LPM. Capaian untuk indikator kinerja adalah 17,89%. Capaian tersebut melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 7%.

❖ **Prosentase Pemerintah Desa yang berkualitas**

Indikator kinerja yang ketiga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Prosentase Pemerintah Desa yang Berkualitas. Prosentase capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2020 sebesar 18,75 % atau melebihi target yang ditentukan. Capaian kinerja ini dihitung dari jumlah desa yang memiliki kinerja pemerintahan desa yang baik yaitu sebanyak 9 Desa dibanding dengan jumlah desa maju sebesar 48 desa. Guna mendukung indikator ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan beberapa upaya yaitu memberikan pembinaan terhadap lembaga pemerintahan desa dan perangkat serta aparatur pemerintahan desa secara optimal dan berkelanjutan

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat. Dimana tolok ukur keberhasilan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana grafik berikut.



Grafik 2.93. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur menajadi Peserta KB Aktif

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari indikator cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif. Dilihat dari tabel dan grafik, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga menjadi 75,14%, sedangkan pada tahun 2018 pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sejumlah 254.126 atau 73,12% dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 347.570. Capaian tahun 2018 ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 sebesar 71,55%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 72,9%, maka capaian cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif mengalami kenaikan sebesar 0,22% yang berarti bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.

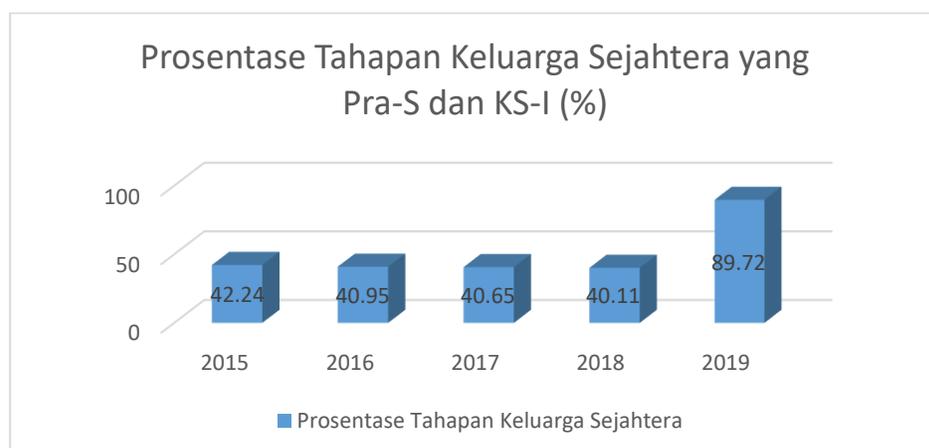


Grafik 2.94. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menajadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 – 2019

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal KB. Kedepannya Pemerintah daerah akan lebih berkomitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan peserta KB aktif pada PUS.

2. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I

Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I ini akan menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan social psikologis (*social psychological needs*).



Grafik 2.95. Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019



Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga PraS dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah keluarga Miskin (Keluarga Pra-S dan KS-1) pada tahun 2019 mencapai 89,72%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 198.286 KK atau 40,11% dari jumlah KK di Kabupaten Pasuruan yaitu sebanyak 494.414 KK. Jumlah ini menurun sebesar 0,54% bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercapai sebesar 40,65%. Penurunan ini disebabkan karena akseptor KB dari keluarga Pra-S dan KS-1 mendapatkan pelayanan dari program UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan akseptor. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial.

Kinerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan bidang urusan keluarga berencana dan pengendalian penduduk tahun 2020 sebagaimana berikut :

- ❖ **Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif** Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkatcapaiannya dapat dilihat dari indikator persentase sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA).

No	Uraian / Data	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah peserta KB aktif (PA)	Akseptor	273.503	269.473
2.	Jumlah pasangan usia subur (PUS)	Orang	363.982	359.716
3.	Persentase sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB aktif	%	75,14	74,91

Sumber : Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan & BPS



Dilihat dari tabel dan grafik diatas pada tahun 2020 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif sejumlah 269.473 akseptor atau 74,91 % dari Jumlah pasangan usia subur sebanyak 359.716 orang. Capaian tahun 2020 ini sedikit turun dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD perubahan tahun 2020 sebesar 75,20 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 75,14 %, maka capaian sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 4.030 akseptor atau sebesar 0,23 % yang disebabkan karena pengaruh pandemi covid-19 selama periode tahun 2020. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah peserta KB aktif bagi pasangan usia subur (PUS) yakni meliputi kegiatan pelayanan KB gratis melalui kegiatan Baksos, KIE Berbagai Media dan MUPEN, Kesatuan Gerak PKK, TNI manunggal KB. Kedepan Pemerintah Daerah akan lebih berkomitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan peserta KB aktif pada PUS.

❖ **Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I**

Pada indikator Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi pada tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah, sehingga target grup penggarapan program KB Nasional, diutamakan pada Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), keluarga tersebut dalam kategori belum dapat memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) dan social psikologis (social psychological needs).

Tabel Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-1

No	Uraian / Data	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I	kk	197.750	N/A
2.	Jumlah Keluarga	kk	497.809	N/A
3.	Persentase tahapan keluarga sejahtera yang Pra-S dan KS-I	%	39,72	N/A

: Dinas KB dan PP Kabupaten Pasuruan & BPS

Pada tahun 2020 BKBN sudah menggunakan indikator IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) sehingga untuk capaian tahun 2020 masih menggunakan pada tahun 2019. Akan tetapi bersamaan dengan adanya pandemik maka Pendataan Keluarga akan dilaksanakan pada tahun 2021 (April sampai dengan Mei 2021)

H. Perhubungan

Ketercapaian pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib) dan aspek daya saing daerah (fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur). Urusan perhubungan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam menyediakan prasarana transportasi bagi masyarakat. Tolok ukur keberhasilan kinerja urusan perhubungan dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2015 – 2018. Capaian kinerja masing-masing indikator pada tahun 2015 - 2018 sebagai berikut :

1. Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.97. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Rasio Ijin Trayek (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	0,0182	0,016	0,0001012	0,000118	n/a

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2020

Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Dilihat dari tabel 2.71 maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0,0001012% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,0000168%. Namun capaian kinerja tahun 2018 sebesar 0,000118% lebih rendah dari target kinerja tahun 2018 yang sebesar 0,0296%.

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Setiap angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan wajib memiliki uji KIR, karena melalui uji KIR maka angkutan tersebut secara teknis dinyatakan layak beroperasi. Pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 10.998 unit, mengalami penurunan sebanyak 726 unit dibanding tahun 2017 yang sebesar 11.724 unit. Untuk target indikator ini pada tahun 2018 sebesar 11.891 unit sedangkan realisasinya sebesar 10.998 unit, atau mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebanyak 893 unit.

Tabel 2.98. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Unit	10.961	10.932	11.724	10.998	n/a

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2020

Kepemilikan KIR ini menggambarkan semakin meningkatkan kesadaran pemilik angkutan umum akan pentingnya uji kendaraan angkutan umum, dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Indikator ini untuk menilai perbandingan antara angkutan umum yang tidak ber-KIR dengan seluruh angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan. Target kinerja tahun 2018 sebesar 4,12% dengan capaian kinerja sebesar 1,71% atau lebih rendah dari target kinerja. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 2,164%, maka capaian kinerja pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,45%. Penurunan kepemilikan KIR ini menggambarkan rendahnya kesadaran pemilik angkutan umum akan pentingnya uji kendaraan angkutan umum, selain itu Pemerintah



Kabupaten Pasuruan juga harus semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan proses pelayanan uji KIR angkutan umum.

Tabel 2.99. Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	2,84	4,78	2,164	1,71	n/a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2020

3. Jumlah Terminal

Ketersediaan Terminal di Kabupaten Pasuruan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan transportasi. Target jumlah Terminal pada tahun 2018 sebanyak 5 unit dengan capaian kinerja sebanyak 5 unit atau sesuai dengan target. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 5 unit, maka pada tahun 2018 tidak ada penambahan unit Terminal baru, hanya menyelesaikan pembangunan Sarpras Terminal Pasrepan yang juga merupakan salah satu Terminal pendukung wisata kawasan Bromo.

Tabel 2.100. Jumlah Terminal di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah Terminal (Unit)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Unit	5	5	5	5	n/a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2020

4. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di kabupaten Pasuruan dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan. Target capaian kinerja di tahun 2018 adalah 768.873 orang dan terealisasi sejumlah 769.737 orang yang mana melampaui target capaian kinerja pemerintah kabupaten Pasuruan 2018. Capaian ini dikarenakan

meningkatkan rasa nyaman masyarakat terhadap layanan angkutan umum yang sudah diperbaiki.

Tabel 2.101. Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Orang)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang	708.243	727.798	749.737	769.737	n/a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2020

Ketercapaian pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum (fokus layanan urusan wajib) dan aspek daya saing daerah (fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur). Urusan perhubungan merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam menyediakan prasarana transportasi bagi masyarakat dan menurunnya angka kecelakaan. Tolok ukur keberhasilan kinerja urusan perhubungan sesuai RPJMD Tahun 2018 – 2023 dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel.2.102. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Meningkatnya Akseibilitas Transportasi	Prosentase (%) Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum	%	7,18	7.91
2	Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan	Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan	%	11,16	-19.44

Sumber :DinasPerhubunganKabupatenPasuruan

➤ **Indikator Kinerja Dinas Perhubungan :**

❖ **Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan**

Perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama sebagai alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari – hari Akan tetapi, peningkatan jumlah kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan jumlah angka kecelakaan. Penyebab keceakaan lalu lintas kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor pengendara dan kendaraan yang kurang laik jalan.



Untuk memenuhi target dari penurunan tingkat kecelakaan dari nilai target -2.93% dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan bagi para pengguna jalan capaian realiasinya - 19.44%, yang berarti terjadi penurunan angka kecelakaan, yaitu dari 977 kejadian di tahun 2019 menjadi 818 kejadian di tahun 2020.

Berdasarkan hasil tersebut, kecelakaan akibat kendaraan bermotor tetap menjadi perhatian sehingga masih perlu meningkatkan fasilitas keselamatan pengguna jalan.

❖ **Prosentase Wilayah yang Teroneksi Angkutan Umum**

Jaringan transportasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan perkembangan untuk suatu wilayah, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi daerah maupun konektivitas antar daerah atau wilayah. Konektivitas jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas dan menjadi peranan penting dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan penghubung wilayah berupa adanya angkutan umum menjadi tujuan utama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Untuk memenuhi tujuan dari peningkatan aksesibilitas transportasi yang mana target capaian pada tahun 2020 dengan angka 11.29% pelaksanaannya berupa peningkatan koneksi antar wilayah dengan adanya angkutan umum dan realisasinya menunjukkan 7,91% dari target yang akan dicapai. Berdasarkan data diatas belum terpenuhinya layanan akses angkutan umum yang terintergrasi dan mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Disamping itu juga, jaringan jalan menjadi salah satu faktor penghambat belum terpenuhinya konektivitas antar wilayah.

I. Komunikasi dan Informatika

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika dinilai dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019. Capaian target indikator kinerja sebagai berikut :



1. Website Milik Pemerintah Daerah

Situs web (*website*) Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dan harus ada, karena *website* merupakan salah satu media informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/publik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan maupun permasalahan daerah. Saat ini bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

Media *website* Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran agar seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. *Website* Pemerintah Kabupaten Pasuruan dibuat untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, dan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- 1) Informasi dapat diperoleh secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan;
- 2) Materi yang diakses melalui *website* pemerintah meliputi :
 - semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
 - semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan rahasia pribadi);
 - semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun



2010, keberadaan *website* Pemerintah Daerah merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana keberadaan *website* menjadi salah satu SPM dan indikator kinerja Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2018 jumlah pengunjung website sejumlah 675.000, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 228.000 pengunjung, yang berarti terdapat peningkatan karena adanya moment pendaftaran CPNS. *Website* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2017 sudah diperbarui dengan ditambahkan form *vote* penilaian masyarakat terhadap *website* agar masyarakat dapat menilai seberapa puas masyarakat terhadap isi dari *website* tersebut.

2. Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerapkan sistem *e-government* (*e-gov*) sebagai upaya peningkatan koordinasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun manfaat sistem jaringan komunikasi antar organisasi perangkat daerah antara lain:

- a. Sebagai tulang punggung komunikasi dan pertukaran informasi.
- b. Menjadi media seluruh aplikasi online milik OPD dan Pemda.
- c. Memberikan akses internet pada OPD yang belum memiliki koneksi internet.

Pada tahun 2018 seluruh OPD (65 OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah terhubung dalam jaringan E-Gov, sehingga pada tahun ini kegiatan yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pemanfaatan secara maksimal dan perawatan dengan baik serta maksimal. Perawatan jaringan dan tower dilakukan agar perawatan jaringan komunikasi dapat bekerja dengan normal, serta dapat mengidentifikasi peralatan jaringan yang tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat difungsikan kembali secara optimal, dan mengganti peralatan jaringan yang tidak berfungsi. Perangkat Daerah saat ini dapat terhubung melalui media komunikasi berupa internet dan integrasi data *website* OPD.



Tabel 2.103. Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kab. Pasuruan tahun 2016-2020

Peningkatan Sistem Komunikasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Unit)					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit	65	65	65	n/a	65

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2020

3. Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter

Telecenter merupakan suatu fasilitas masyarakat dimana mereka dapat berinteraksi, belajar, bekerja, dan bermain dengan memanfaatkan komputer, internet dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya. Walaupun berbeda-beda bentuknya, telecenter mempunyai karakteristik khusus yaitu untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti membantu kegiatan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi keterisolasian serta mengurangi kesenjangan digital.

Tabel 2.104. Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Pusat Layanan Internet Kecamatan/Telecenter (Unit)					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Unit	4	5	5	n/a	0

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2020

Di wilayah Kabupaten Pasuruan masih ada beberapa daerah yang mengalami kesenjangan digital dan kesenjangan informasi, khususnya pada wilayah yang jauh dari pusat perkotaan dan disebabkan oleh faktor geografis. Guna menjembatani kesenjangan tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun pusat layanan internet kecamatan / telecenter guna membuka akses informasi pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan melek teknologi informasi dan komunikasi menuju *Smart City* dapat terlaksana.



Pada tahun 2018 tidak ada peningkatan jumlah telecenter karena pada awalnya Telecenter merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sudah dihentikan, sehingga tidak ada dasar regulasi yang mengatur penyediaan telecenter dan dananya dialokasikan ke pemeliharaan infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi software. Sehingga jumlah telecenter dari tahun 2017 tetap berjumlah 5 (lima) unit yang tersebar di Desa Tukur Kecamatan Tukur, di Desa Panditan Kecamatan Lumbang, di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen, dan di Desa Gratitunon Kecamatan Grati, dan Desa Kertosari Kecamatan Purwosari. Ketersediaan telecenter ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dan meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan masyarakat, serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pada tahun 2020 pusat layanan telecenter diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah desa. Sehingga capaian adalah 0.

4. Media Luar Ruang

Media merupakan salah satu sarana yang cukup efektif dalam menyebarkan informasi, membangun *branding* dan mempromosikan sebuah wilayah guna menarik investor maupun wisatawan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan berbagai media luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan maupun potensi wilayah Kabupaten Pasuruan. Indikator ini merupakan salah satu SPM yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tabel 2.105. Jumlah Akses Media Luar Ruang di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Media Luar Ruangan (Kali)					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Kali	10.932	11.724	10.998	n/a	14.705

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2020

Selain melalui media luar ruang, penyampaian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan melalui pertunjukan rakyat (ketoprak, ludruk), dialog publik dan dialog interaktif melalui



siaran radio Suara Pasuruan. Pada Tahun 2018 target kinerja indikator ini sebanyak 13 kali, dengan capaian kinerja kurang dari target sebanyak 10 kali disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran dan pengalihan prioritas pada kegiatan lainnya. Penyebaran informasi lewat pertunjukan rakyat lebih disukai oleh masyarakat, karena selain mendapatkan informasi masyarakat juga mendapat hiburan. Terjadi peningkatan pada tahun 2020, hal ini selaras dengan adanya penyebaran media luar ruangan yang bertepatan terkait COVID-19 dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar dan memahami terkait informasi pandemi ini.

5. Pameran / Expo

Tabel 2.106 Pameran/Expo di Kab. Pasuruan tahun 2016-2020

Pameran / Expo					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan (kegiatan)	11	10	2	n/a	0
Keikutsertaan (Kali)	3	3	2	n/a	0

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2020

Untuk membangun ekonomi daerah, perlu adanya promosi produk unggulan daerah, potensi investasi daerah, potensi pariwisata maupun potensi pasar, dengan demikian ajang promosi/publikasi dan pameran mempunyai peran penting sebagai sarana informasi, serta promosi potensi wilayah, potensi investasi maupun potensi produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan. Selain itu, pameran sekaligus dapat dimanfaatkan oleh *Buyer* untuk melakukan bisnis maupun investasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, melalui pameran pelaku usaha juga dapat meningkatkan peluang dan kesempatan dalam mengelola pengembangan dalam jejaring kerja (*networking*). Target kinerja penyelenggaraan pameran pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dan realisasinya pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan pelaksanaan pameran sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pameran BIATTEX di Batam dan NTB EXPO di Mataram.



Di samping menyelenggarakan pameran Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga ikut serta dalam pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain sebanyak 2 kali, antara lain pameran Bengkulu Expo di Bengkulu dan di PIATTEX Jakarta. Kegiatan Pameran Pembangunan tidak mencapai target pada Tahun 2018 disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran dan pengalihan prioritas pada kegiatan lain. Untuk tahun 2020 capaian yang diperoleh adalah 0, disamping adanya refocusing anggaran ditambah lagi karena adanya sebaran pandemi covid-19 dengan tujuan untuk meminimalisir kegiatan di luar demi terhindar dari terpapar virus.

6. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok informasi masyarakat (KIM) berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain menjembatani antara masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, oleh karena itu KIM ini harus selalu dibina dan dipantau keaktifannya. Indikator pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan merupakan salah satu SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan menjadi salah indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara mandiri, meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi untuk mengatasi kesenjangan informasi, dan mengembangkan serta meningkatkan aktifitas KIM dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai



tambah masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menyerap/menyalurkan informasi.

Tabel 2.107. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					
Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	132	137	121	n/a	121

Sumber : Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2020

Kegiatan Tahun 2018 difokuskan pada pembinaan KIM, capaian kinerja Pembentukan KIM di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 menurun dari dibandingkan tahun 2017 sebesar 16 KIM, namun capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 121 KIM. Secara nasional Kabupaten Pasuruan telah melebihi target dimana menurut Standar Pedoman Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011) untuk target Nasional adalah sebesar 50% dari jumlah kecamatan, yakni sebesar 12 kelompok KIM. Dengan demikian capaian kinerja yang cukup signifikan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat, serta mendukung program Desa Maslahat. Sedangkan di tahun 2020 capaian kinerja mengalami stagnan yaitu mencapai 121 jumlah kelompok.

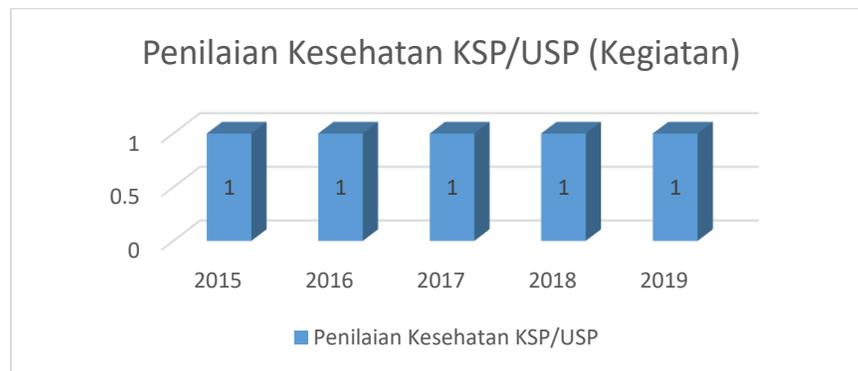
I. Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah tahun 2015 - 2019 termasuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus layanan urusan wajib. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut :

1. Penilaian Kesehatan KSP/USP

Penilaian Kesehatan KSP/USP adalah Penilaian Dalam rangka memberikan penilaian kinerja usaha simpan pinjam yang diperlukan

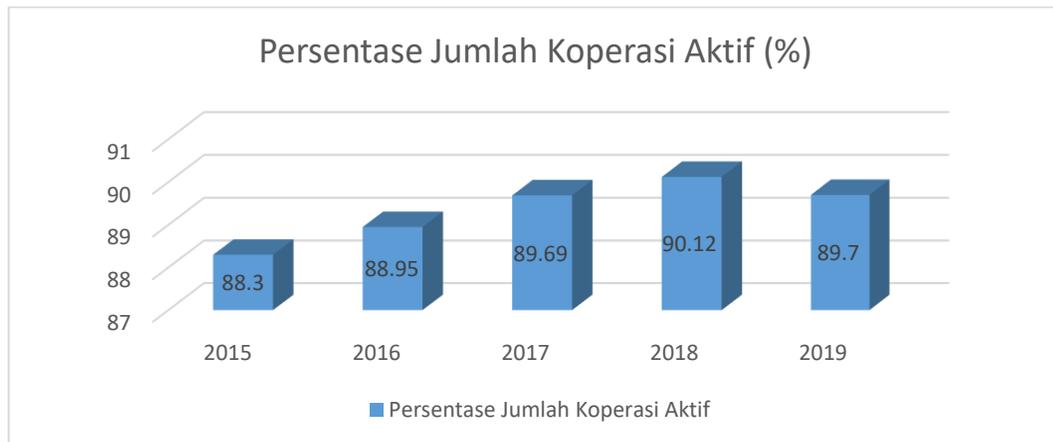
perangkat kerja yang mumpuni, baik dari sisi kemampuan teknis maupun tingkat integritas. Penilaian Kesehatan KSP/USP dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Penilaian Kesehatan KSP/USP dari tahun 2015 sampai pada tahun 2019 memiliki 1 kegiatan yakni Penilaian Kesehatan KPS/USP Koperasi.



Grafik 2.96. Penilaian Kesehatan KSP/USP di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

2. Persentase Koperasi Aktif

Indikator tersebut menggambarkan jumlah koperasi yang aktif dibandingkan jumlah seluruh koperasi, dikalikan seratus persen. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif tahun 2018 berjumlah 967 unit dari seluruh jumlah koperasi sebanyak 1.073 atau sebesar 90,12%. Jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 10 unit dibanding tahun 2017 yang berjumlah 957 unit. Adapun penambahan jumlah koperasi aktif tersebut berasal dari 6 unit pendirian koperasi baru serta 4 koperasi yang berhasil diaktifkan melalui kegiatan Pendampingan Akutansi Simpan Pinjam Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Dan KOPPONTREN serta Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif.



Grafik 2.97. Persentase Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

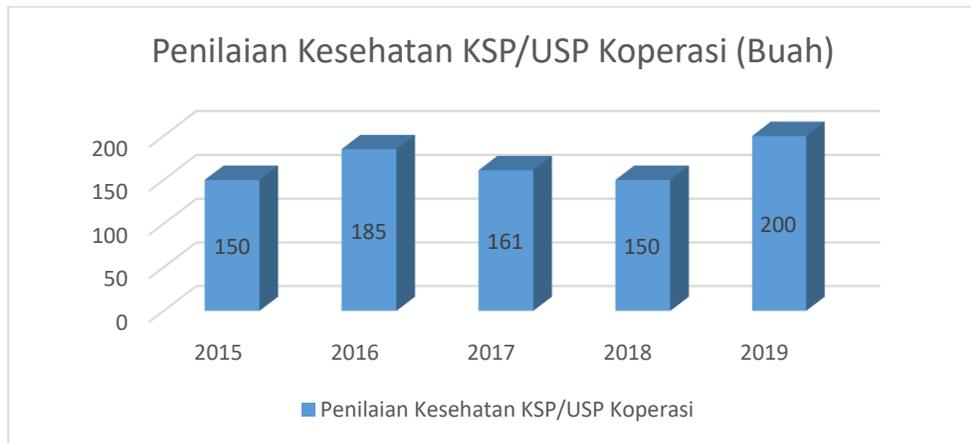
3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Istilah umum penilaian kinerja koperasi ini adalah penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi yang ada di wilayah kewenangannya baik diminta maupun tidak.

Penilaian kesehatan koperasi penting dilakukan mengingat selain untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan juga untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap koperasi. Artinya semakin banyak koperasi yang kinerjanya mencapai nilai sehat dan cukup sehat maka dapat pula diartikan perangkat daerah telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berpedoman pada peraturanperundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu PP No. 9/1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 13/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pedoman Akutansi Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi & UKM RI Nomor 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi & UKM RI Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSPPS & USPPS koperasi. Pada akhirnya dengan semakin banyaknya koperasi yang mencapai kategori sehat dan cukup

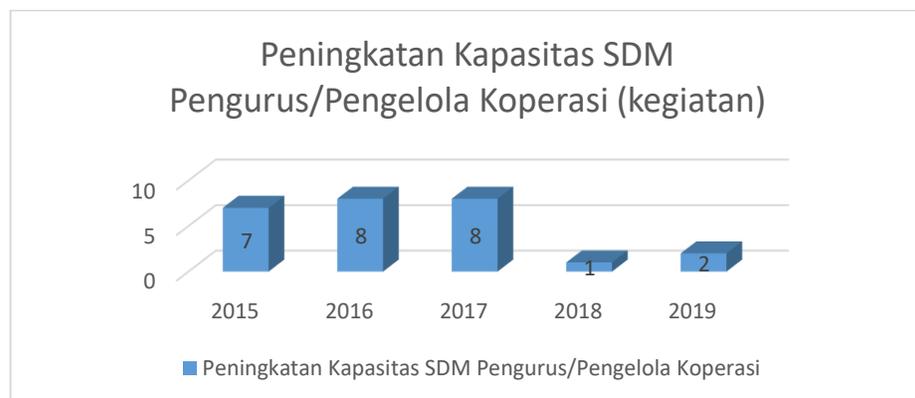
sehat diharapkan koperasi mampu menjadi penopang ekonomi dapat tercapai.



Grafik 2.98. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus/ Pengelola Koperasi

Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus/Pengelola Koperasi dilaksanakan oleh pemerintah yang di danai oleh ABBD. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus/Pengelola Koperasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 berjalan 8 kegiatan dan tahun 2018 dengan 1 Kegiatan.



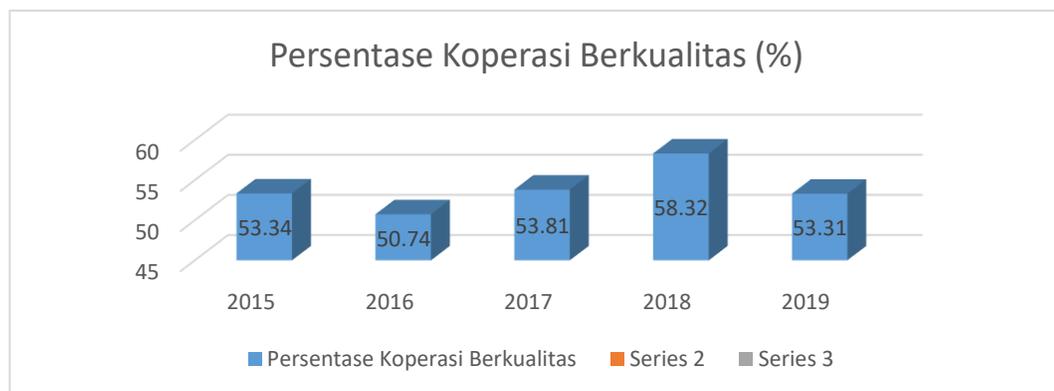
Grafik 2.99. Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus/Pengelola Koperasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

5. Persentase Koperasi Berkualitas

Indikator koperasi berkualitas dihitung dengan membandingkan jumlah koperasi berkualitas dengan jumlah koperasi aktif, dikalikan seratus persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi, ruang lingkup peningkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek yaitu (i) Aspek

kelembagaan koperasi (ii) Aspek usaha koperasi (iii) Aspek keuangan koperasi (iv) Aspek manfaat koperasi terhadap anggota (v) Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat dengan klasifikasi kualitas sebagai berikut :

- Koperasi dengan kualifikasi “Sangat Berkualitas” dengan predikat AAA;
- Koperasi dengan kualifikasi “Berkualitas” dengan predikat AAB;
- Koperasi dengan kualifikasi “Cukup Berkualitas” dengan predikat ABB;
- Koperasi dengan kualifikasi “Tidak Berkualitas” dengan predikat BBB.



Grafik 2.100. Persentase Koperasi Berkualitas di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah koperasi yang berkualitas pada tahun 2018 sebanyak 564 unit dari 967 unit koperasi aktif atau sebesar 58,32%. Pencapaian target indikator koperasi berkualitas telah memenuhi target tahun 2018 sebesar 53,38%. Jumlah koperasi berkualitas tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 515 unit sebanyak 49 unit.

6. Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi



Grafik 2.101. Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Agar koperasi tumbuh secara sehat diperlukan Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Koperasi melalui berbagai macam kegiatan. Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 8 kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi dan menurun pada tahun 2018 dengan 6 kegiatan.

7. Fasilitasi Permodalan Bagi Koperasi



Grafik 2.102. Fasilitas Permodalan Bagi Koperasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Fasilitasi Permodalan Bagi Koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengadvokasi permodalan bagi koperasi mengenai mekanisme tata cara pengajuan pinjaman atau pembiayaan produktif bagi koperasi. Dari data diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 2 kegiatan Fasilitas Pemodaln Bagi Koperasi dan menurun pada tahun 2017 terdapat 1 kegiatan fasilitasi.

Jumlah seluruh Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 mencapai 72 unit yang terdiri dari 62 unit Koppontren aktif dan 10 unit Koppontren tidak aktif. Dengan demikian persentase capaian indikator Koppontren aktif dibanding jumlah seluruh Koppontren menjadi 86,11%. Capaian persentase koppontren aktif pada tahun 2018 melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,00%. Peningkatan jumlah Koppontren aktif dikarenakan adanya kegiatan pendampingan bagi Koppontren serta revitalisasi koperasi tidak aktif yang dilakukan selama tahun 2018.

8. Persentase KOPPONTREN Aktif

Indikator pembangunan koperasi pada tahun 2018 seluruhnya meningkat sebagai hasil dari Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif, Pendampingan Akutansi Simpan Pinjam Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Dan Koppontren, Bimtek Pengembangan Usaha Bagi Koperasi, Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi serta Peningkatan Jaringan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Kegiatan Peningkatan Jaringan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada tahun 2018 telah berhasil menumbuhkan kemandirian permodalan koperasi melalui strategi permodalan bersama untuk kemudian digulirkan kepada anggota kelompok. Pada tahun 2018 jaringan usaha simpan pinjam yang telah dibentuk telah mampu menggulirkan pinjaman pada 4 koperasi yaitu :

- Kopwan Wirausaha Kecamatan Rejoso;
- Kopwan Bougenvile Kecamatan Prigen;
- Kopwan Sambang Desa Mandiri Kecamatan Purwodadi; serta
- Kopwan Sakinah UP2K Kecamatan Rejoso dengan nominal pinjaman masing –masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per koperasi.

Adapun indikator kinerja tambahan berupa Persentase jumlah KSP/USP yang sehat diukur berdasarkan rasio antara jumlah KSP/USP yang sehat terhadap jumlah keseluruhan KSP/USP yang dinilai dikalikan 100%. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.



Grafik 2.103. Persentase KOPPONTREN Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019



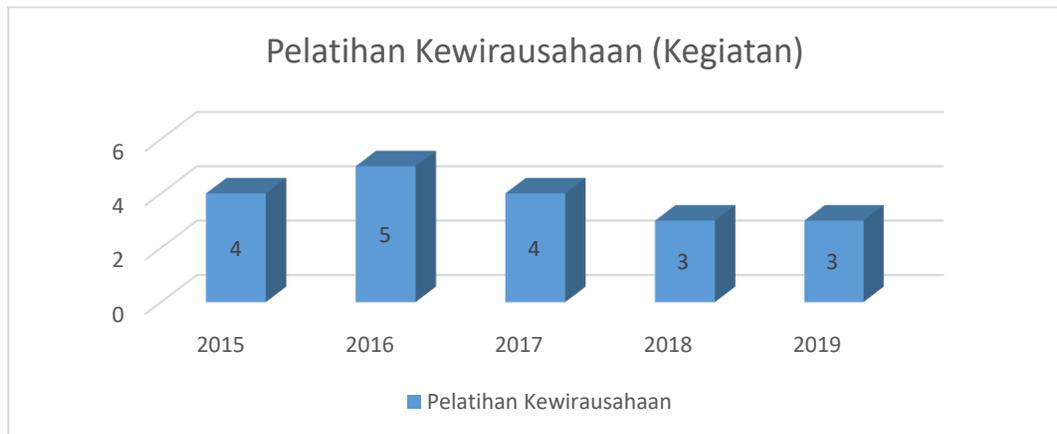
Adapun kriteria kesehatan KSP/USP koperasi adalah sebagai berikut :

- a. $80,00 \leq x < 100$ Sehat;
- b. $66,00 \leq x < 80$ Cukup Sehat;
- c. $51,00 \leq x < 66,00$ Dalam Pengawasan;
- d. $0 < x < 51,00$ Dalam Pengawasan Khusus;

Pada tahun 2018 jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai sebanyak 150 unit. Dari hasil penilaian kesehatan KSP/USP koperasi pada tahun 2018 diperoleh hasil dengan perincian 41 unit KSP/USP dengan kategori sehat serta 109 unit KSP/USP dengan kategori cukup sehat. Pada tahun 2018, proses penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dilakukan dengan melibatkan gerakan koperasi melalui aplikasi e-koperasi. Aplikasi e-koperasi merupakan inovasi layanan pelaporan kelembagaan dan usaha koperasi baik triwulanan maupun tahunan. Selain itu, aplikasi e-koperasi juga merupakan aplikasi penilaian kesehatan KSP/USP koperasi berbasis android yang bisa diunduh melalui *playstore*. Dengan adanya aplikasi e-koperasi, pelaporan kelembagaan dan usaha koperasi serta penilaian kesehatan KSP/USP koperasi bisa dilakukan secara mandiri oleh koperasi dengan menyertakan bukti foto laporan keuangan untuk kemudian akan diverifikasi kebenarannya oleh petugas.

9. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha. Dari grafik diatas pada tahun 2016 terdapat 5 pelatihan kewirausahaan dan menurun pada tahun 2017 dengan 4 kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang kewirausahaan.



Grafik 2.104. Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

10. Fasilitasi Promosi

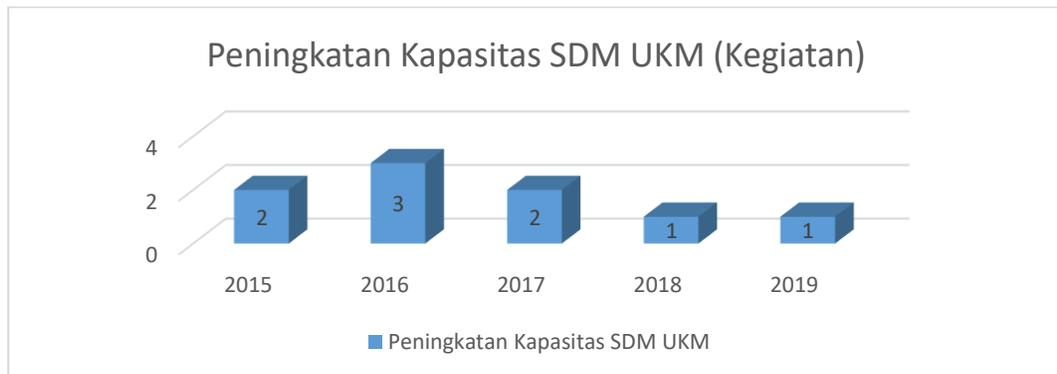
Fasilitasi Promosi merupakan pemberian fasilitas berupa promosi terhadap koperasi dan UMK. Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa ada 1 kegiatan fasilitasi promosi yang dilakukan setiap tahun nya mulai dari tahun 2015 hingga 2019.



Grafik 2.105. Fasilitasi Promosi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

11. Peningkatan Kapasitas SDM UKM

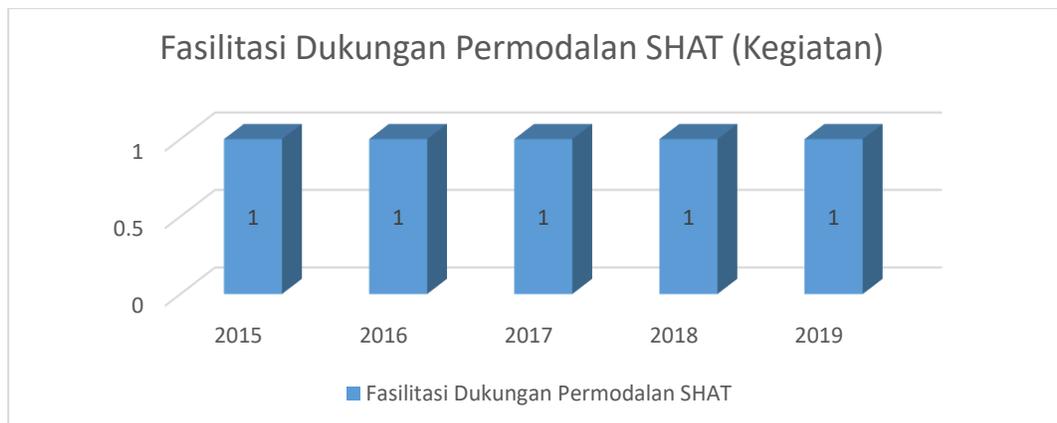
Peningkatan Kapasitas SDM UKM diperlukan guna meningkatkan kualitas UKM. Dari grafik diatas memperlihatkan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM UKM mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 3 kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM UKM dan menurun pada tahun 2017 dengan 2 kegiatan.



Grafik 2.106. Peningkatan Kapasitas SDM UKM di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

12. Fasilitas Dukungan Permodalan (SHAT)

Fasilitas Dukungan Permodalan SHAT memiliki 1 kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan Fasilitas Permodalan SHAT ini adalah kegiatan mengadvokasi masyarakat tentang cara memperoleh modal.



Grafik 2.107. Fasilitas Dukungan Permodalan SHAT di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

13. Persentase Peningkatan Usaha Mikro

Persentase Peningkatan Usaha Mikro di tahun 2018 mencapai 2,51% dan mengalami penurunan di tahun 2019 dengan persentase - 1,19%.



Grafik 2.108. Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

14. Persentase Jumlah Usaha Kecil

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu (1). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00. Persentase Jumlah Usaha Kecil didapatkan dengan membandingkan jumlah seluruh jumlah Usaha Kecil dengan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun yang sama, dikalikan seratus persen.

Tabel 2.108. Persentase Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Jumlah Usaha Kecil (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	4,32	4,33	4,36	4,38	n/a

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, 2020

Jumlah seluruh Usaha Kecil pada tahun 2018 sebanyak 12.044 unit atau sebesar 4,38% dibandingkan seluruh UMKM yaitu sebesar 275.112 unit. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 360 unit. Persentase jumlah Usaha Kecil melampaui target tahun 2018 sebesar 3,00% atau sebanyak 1,38%. Peningkatan



persentase jumlah Usaha Kecil menunjukkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM mampu mendorong peningkatan aset dan omset yang dimiliki UMKM sehingga skala usaha mereka meningkat dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil.

15. Persentase Jumlah Usaha Menengah

Yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah, yaitu (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00.

Tabel 2.109. Persentase Jumlah Usaha Menengah di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Persentase Jumlah Usaha Menengah (%)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase	0,39	0,39	0,39	0,4	n/a

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, 2020

Indikator ini membandingkan jumlah seluruh usaha menengah dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM. Pada tahun 2018 jumlah usaha menengah sebanyak 1.113 unit lebih tinggi dari tahun 2017 sebanyak 1.047 unit, meningkat sebanyak 66 unit. Persentase jumlah usaha menengah dibanding keseluruhan UMKM pada tahun 2018 sebesar 0,40% lebih rendah dari target RPJMD sebesar 2,00%. Hal ini mengingat sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/Kota hanya menyangkut pembinaan Usaha Mikro.

Meskipun indikator terkait perkembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi menjadi wewenang



Kabupaten/Kota untuk membinanya, namun perkembangannya menunjukkan bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Pasuruan cukup kondusif bagi usaha.

Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai RPJMD tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.110. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator or Kinerja	Satuan	2018	2019	2020
1.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi (Rp.)	Rp. (000)	1.295.048.000	1.697.507.779.000	1.718.018.068.385
2.	Sasaran : Terwujudnya Kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Unit	49	179	150
		Persentase masyarakat yang berkoperasi	%	9,29	12,87 14,22	13,53
3.	Terwujudnya Usaha Mikro dan koperasi yang Mandiri. Kuat dan Berdaya Saing	Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi (Rp.)	Rp. (000)	17.453.000	392.578.779.000	20.510.289.385

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan

➤ **Indikator Kinerja Dinas Koperasi :**

❖ **Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi**

Indikator Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi dengan target tahun 2020 sebesar Rp. 1.330.491.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.718.018.068.385,- atau 129,12 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.697.507.779.- maka terjadi peningkatan Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi sebesar 4,78%.

❖ **Jumlah koperasi yang berkualitas**

Indikator jumlah koperasi yang berkualitas secara kumulatif apabila dibandingkan tahun 2019 sebesar 179 unit koperasi sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 150 unit koperasi, mengalami penurunan sebanyak 29 unit koperasi,



penurunan ini dikarenakan adanya pandemi covid-19, namun demikian apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 140 unit koperasi, dapat diartikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melampaui pencapaian target yaitu sebesar 107,14 %.

❖ **Persentase masyarakat yang berkoperasi**

Persentase masyarakat yang berkoperasi dengan target pada tahun 2020 sebesar 9,39 % dan terealisasi sebesar 13,53 %. Jika dibandingkan capaian pada tahun 2019 target sebesar 9.34 % dan terealisasi sebesar 12,87 % mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) hal jika ditinjau dari rumus yang digunakan untuk menghitung persentase masyarakat berkoperasi yaitu jumlah anggota koperasi per jumlah penduduk ber-KTP, yaitu:

- (1) Jumlah anggota koperasi sebagai pembilang mengalami penurunan disebabkan adanya pembubaran koperasi karyawan yang perusahaannya tutup karena terdampak Pandemi Covid-19 seperti PT. Murni Mapan Makmur, serta adanya kebijakan manajemen perusahaan yang melarang adanya aktivitas koperasi di dalam lingkungan perusahaan. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2019 sebanyak 172.155 Jiwa dan pada tahun 2020 menjadi 166.756 Jiwa.
- (2) Meningkatnya jumlah penduduk ber-KTP yang pada tahun 2019 sebanyak 1.210.365 Jiwa menjadi 1.232.908 Jiwa pada tahun 2020.

Oleh karena terjadi penurunan jumlah anggota koperasi dan kenaikan jumlah penduduk ber-KTP, maka secara persentase masyarakat yang berkoperasi mengalami penurunan.

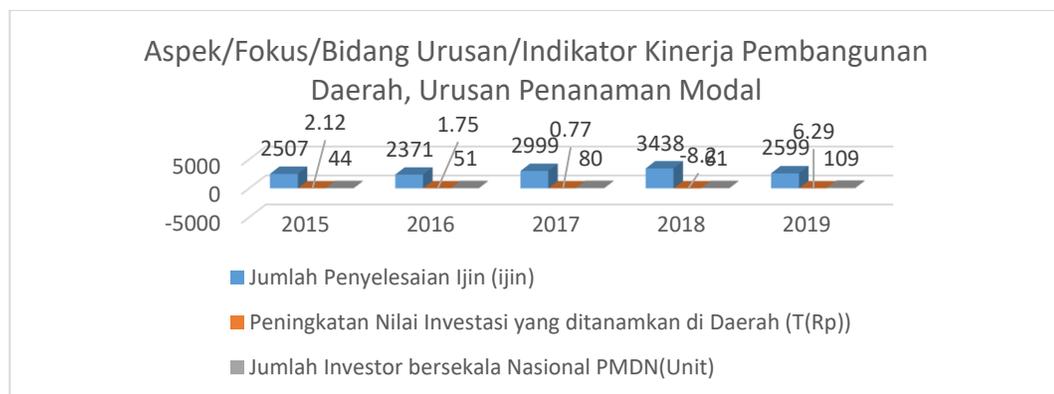
❖ **Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi**

Target tahun 2020 jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi sebesar Rp. 17.810.000.000 lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 17.633.000.000.- dan realisasinya 101 % dari target. Omset usaha mikro dan koperasi pada awal Pandemi Covid -

19 sekitar Bulan Maret 2020 mengalami penurunan drastis dikarenakan terjadinya penghentian kegiatan yang menimbulkan kerumunan untuk mencegah penyebaran Covid - 19. Namun seiring keberhasilan menggeser pola usaha dari *offline* ke *online* maka volume usaha Koperasi dan Usaha Mikro mengalami peningkatan, karena sejak anak-anak Belajar Dari Rumah (BDR) dan para pegawai melakukan *Work From Home*, maka konsumsi rumah tangga meningkat. Hal ini juga didukung oleh Himbauan Belanja ke Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Pasuruan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

J. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal termasuk Aspek Pelayanan Umum (Fokus Layanan Urusan Wajib) dengan indikator kinerja jumlah penyelesaian ijin, peningkatan investasi yang ditanamkan di daerah dan jumlah investor berskala nasional PMDN.

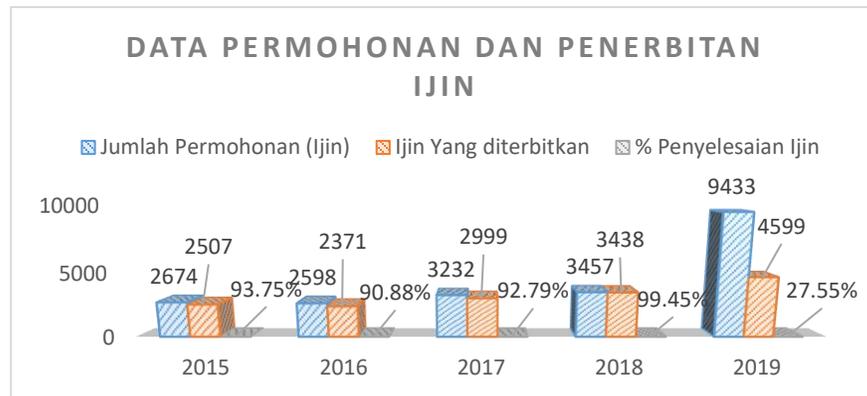


Grafik 2.109. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Penanaman Modal di Kab. Pasuruan tahun 2015-2019

1. Jumlah Penyelesaian Ijin

Pada tahun 2019 Jumlah Permohonan Ijin sebesar 9.433 ijin, jumlah tersebut naik dibanding tahun 2018. Jumlah penyelesaian ijin tahun 2018 sebesar 3.438 ijin naik sebanyak 474 ijin atau sebesar 15,28% jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 2.964. Capaian indikator jumlah penyelesaian ijin pada tahun 2018 melampaui target RPJMD 2013 – 2018 sebanyak 2.265 ijin. Jika dilihat dari persentase ijin yang diterbitkan dibandingkan jumlah permohonan ijin yang masuk

sebanyak 3.457 ijin maka kinerja DPMPT meningkat dibanding tahun lalu menjadi 99,45%. Data detil tentang jumlah permohonan ijin, ijin yang diterbitkan dan persentase penyelesaian ijin selengkapnya disajikan pada grafik.



Grafik 2.110. Data Permohonan dan Penerbitan Ijin di Kabupaten Pasuruan 2015-2019

2. Nilai Investasi yang ditanamkan di daerah

Nilai investasi menggambarkan besarnya investasi dari berbagai sektor yang masuk. Pada tahun 2019 dapat diketahui bahwa nilai investasi yang ditanamkan di daerah naik sebesar 6,29%. Pada tahun 2018 nilai investasi yang ditanamkan sebesar Rp. 9.655.229.121.273,- menurun sebesar Rp. 8.211.097.808.832,- dari tahun 2017 yang mencapai Rp. 17.866.326.930.105.,-. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMD 2015 – 2019 peningkatan investasi yang ditanamkan sebesar Rp. 6.000.000.000.000.000.,- pada tahun 2018 tidak tercapai namun secara kumulatif tercapai. Jika dilihat jumlah ijin yang diterbitkan melampaui target, maka dapat disimpulkan bahwa investor yang masuk ke Kabupaten mayoritas berskala kecil. Fakta lain menunjukkan bahwa beberapa proyek dengan nilai investasi yang tinggi telah selesai pengerjaannya seperti: jalan tol (Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, Pasuruan-Grati), Proyek Umbulan dan proyek PGN. Selain itu banyak permohonan investasi di wilayah yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya berdasarkan PERDA Nomer 12 tahun 2010. Upah Minimum Kabupaten Pasuruan (UMK) yang tergolong tinggi, termasuk ring I se-Jawa Timur, menjadi salah satu faktor pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah. Di sisi lain Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur yang UMK-nya lebih rendah, terus berkembang dan

memiliki fasilitas yang lengkap seperti *Seaport* (pelabuhan), terkoneksi akses tol dan sebagainya.

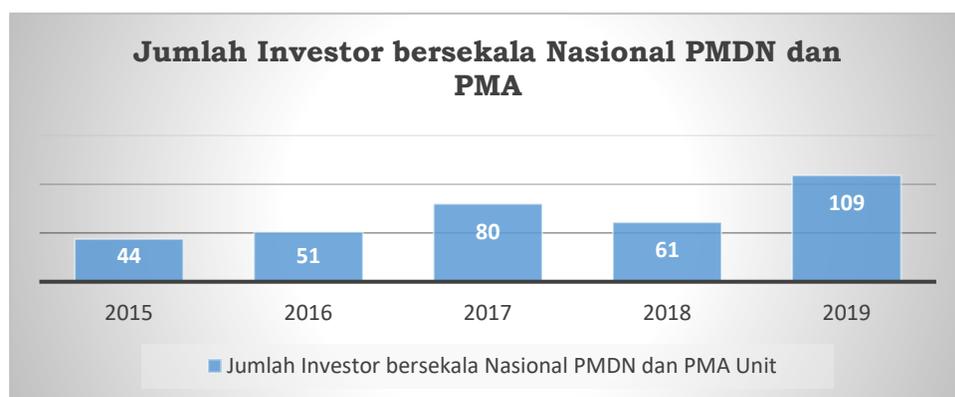


Grafik

2.111. Peningkatan nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

3. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN

Perkembangan investor melihat kepada perusahaan berskala nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan dihitung sebagai bagian penanaman modal dalam negeri. Target jumlah investor berskala nasional PMDN tahun 2018 sebanyak 16 Unit dan tercapai 39 Unit atau mencapai 249%. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan promosi untuk menarik investor dalam negeri maupun mancanegara untuk mendukung percepatan pembangunan guna memenangkan persaingan antar daerah. Sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 109 unit.



Grafik 2.112. Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

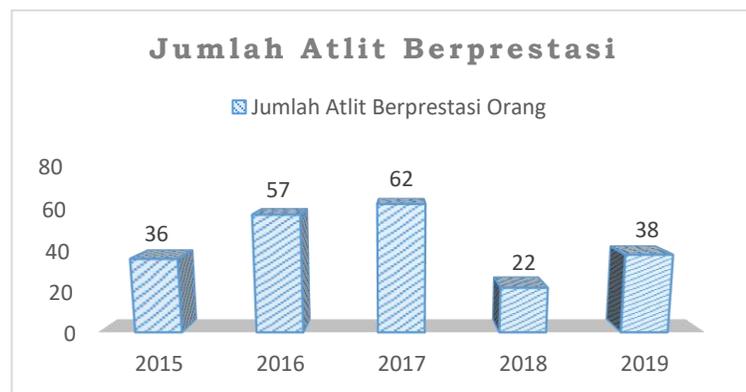
K. Kepemudaan dan Olahraga

Peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional sangatlah penting artinya dan telah dibuktikan dalam berbagai peran pemuda seiring dengan kehidupan suatu bangsa. Pemuda adalah generasi penerus dan penentu masa depan sebuah bangsa. Pada RPJMD tahun 2013-2018 selain sasarannya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan juga terdapat sasaran lain yang mendukung misi ke 3 tersebut yaitu meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja pada Grafik sebagai berikut :

1. Jumlah atlit yang berprestasi

Dapat diketahui bahwa Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 38 orang. Pada tahun 2018 atlit yang berprestasi berjumlah 22 orang, capaian ini menurun dari pada target yang ditentukan yaitu 25 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 62 orang atlit mengalami penurunan sebanyak 40 orang atlit. Hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2018 jumlah event kompetisi olahraga terbatas dan atlit dari Kabupaten Pasuruan yang lolos dan mengikuti even tersebut pada tingkat propinsi dan tingkat nasional lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 2.113. Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

2. Jumlah Pemuda Berprestasi

Dapat diketahui bahwa indikator jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 hingga tahun 2016 berjumlah 12 orang. Sementara pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 13 orang. Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dapat menghasilkan bibit-bibit pemuda prestasi antara lain dengan melaksanakan kegiatan :

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
2. Seleksi Siswa Pasukan Paskibraka
3. Pameran prestasi hasil karya pemuda
4. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
5. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
6. Pelatihan pendidikan pendahuluan bela Negara



Grafik 2.114. Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

L. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik mendukung tugas pemerintah wajib pada aspek pelayanan umum dan fokus layanan urusan wajib. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan statistik dinilai dengan ketersediaan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan.

Perhitungan angka PDRB dan IPM Kabupaten Pasuruan merupakan tugas pokok dari BPS Kabupaten Pasuruan, sejak tahun 2016 kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data IPM dan PDRB dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang didanai dari APBN sehingga untuk menghindari tumpang tindih anggaran, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak lagi menganggarkan dana penyusunan PDRB



dan IPM Kabupaten Pasuruan. Pengukuran terhadap kedua indikator kinerja pada urusan Statistik dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 BPS Kabupaten Pasuruan telah menyusun buku PDRB Kabupaten Pasuruan, dan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

M. Kebudayaan

Keberhasilan pelaksanaan urusan Kebudayaan dinilai sebagai salah satu indikator kinerja pada aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum, untuk indikator pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum memenuhi target karena tidak semua kawasan benda situs dapat dijadikan lokasi untuk pagelaran seni budaya, sedangkan upaya – upaya pelestarian benda dan kawasan cagar budaya dapat di lakukan melalui pagelaran budaya di lokasi, dan dalam rangka pengenalan dan pelastarian kawasan cagar budaya tersebut. Gambaran kondisi awal tahun 2018 tentang capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.111. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kebudayaan

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	431	388	419	425	420
2	Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kali	10	11	17	18	n/a
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	6	2	1	5	n/a

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2020

Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya daerah melalui pemeliharaan situs-situs sejarah dan penyelenggaraan event budaya. Sasaran yang akan dicapai pada urusan kebudayaan adalah Meningkatnya kreatifitas seni budaya. Untuk menilai keberhasilan sasaran tersebut digunakan 3 indikator sebagai berikut :



1. Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Tabel 2.112. Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional (Kelompok)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Kelompok	431	388	419	425	420

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2020

Kelompok kesenian merupakan salah satu faktor pendukung dari meningkatnya seni budaya dan juga sebagai salah satu faktor pendukung daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018, kesenian tradisional sebanyak 419 kelompok meliputi seni pencak kembangan, wayang, ludruk, musik kentong tretim janger, reog, sangar seni tari, kuda kacak, dan bantengan.

Hal tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 387 kelompok, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 6 kelompok. Peningkatan ini membuktikan bahwa pelestarian kesenian di Kabupaten Pasuruan tinggi dan kesadaran dari seniman untuk mendaftarkan keseniannya masih tinggi.

2. Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya

Indikator ini menunjukkan jumlah even seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan secara rutin setiap tahunnya. Semakin banyak event seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan seni dan budaya di Kabupaten Pasuruan, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkeaktifitas di urusan seni budaya. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan sasaran terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah adalah dengan mengadakan event seni dan budaya. Tahun 2018 Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan event sebanyak 18 kali. Capaian ini jauh melebihi target yang ditetapkan dan juga meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya terselenggara 17 kali.



Tabel 2.113. Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya (kali)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Kali	10	11	17	18	n/a

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2020

3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tabel 2.114. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)					
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Unit	6	2	1	5	n/a

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2020

Indikator ini menunjukkan jumlah semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dan seberapa banyak yang telah ditangani dalam upaya pelestariannya. Pada tahun 2018, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 5 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 10 unit. Hal tersebut disebabkan Hal tersebut disebabkan disebabkan minimnya informasi dari masyarakat terhadap keberadaan dan temuan benda cagar budaya sehingga upaya pelestarian terhadap temuan baru tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan urusan Kebudayaan tahun 2020 yang diampu oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana berikut :

1. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi pada tahun 2020 mencapai 16 jenis meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 15 jenis.

2. Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi



Jumlah karya budaya yang diinventarisasi pada tahun 2020 menunjukkan angka 422 kelompok mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 diangka 420 kelompok.

P. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan mendukung pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana berikut.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan, baik itu pengunjung di perpustakaan tetap maupun di perpustakaan keliling, tahun 2018 mencapai 329.672 orang, sementara target yang ditetapkan sebesar 329.600 orang, sehingga target tercapai 100% lebih. Apabila dibandingkan tahun 2017 capaian tersebut secara kuantitatif mengalami peningkatan sebesar 21.904 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat baca masyarakat semakin meningkat atau dengan kata lain masyarakat sudah semakin sadar manfaat membaca bagi peningkatan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini cukup efektif meningkatkan minat baca masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan *story telling* dan mobil perpustakaan keliling untuk menumbuhkan minat baca sejak dini, peningkatan sarana prasarana pendukung seperti perbaikan gedung perpustakaan dan penambahan koleksi buku bacaan. Penambahan buku bacaan tahun 2018 sebanyak 7.000 eksemplar.



Grafik 2.115. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Tahun 2019 mencapai 351.450 orang. Jumlah pengunjung mulai tahun 2017 hingga 2019 secara kuantitatif selalu mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan mencapai 317.432 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat baca masyarakat semakin meningkat atau dengan kata lain masyarakat sudah semakin sadar manfaat membaca bagi peningkatan ketrampilan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini cukup efektif meningkatkan minat baca masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan *story telling* dan mobil perpustakaan keliling untuk menumbuhkan minat baca sejak dini, peningkatan sarana prasarana pendukung seperti perbaikan gedung perpustakaan dan penambahan koleksi buku bacaan. Penambahan buku bacaan tahun 2018 sebanyak 7.000 eksemplar.

Tabel 2.114. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan	329.672	351.450	317.432



2. Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Pada tabel dapat dilihat bahwa koleksi buku bacaan, baik dari jumlah buku maupun jumlah judul, menunjukkan peningkatan. Persentase koleksi buku pada tahun 2018 menunjukkan angka 26,24%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat 25,50%. Berdasarkan jenisnya, koleksi buku bacaan yang ada terdiri dari buku bahasa / sastra / cerita anak / fiksi 26.820 eksemplar (31,89%), buku keagamaan 22.400 eksemplar (26,63%), buku ensiklopedia 500 eksemplar (0,59%), dan buku ilmu pengetahuan umum dan terapan 34.388 eksemplar (40,89%).

Tabel 2.115. Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah judul buku	17.663	19.663	22.069	n/a	n/a
2	Jumlah koleksi buku	71.708	77.108	84.108	n/a	n/a
3	Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	24,63	25,50	26,24	n/a	n.a

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2020

Q. Kearsipan

Urusan Kearsipan mendukung pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan kearsipan dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.116. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	98,66	100	100	100	100



2	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	100	100	100	100	100
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2020

Unit kerja dinilai telah mengelola arsip secara baik apabila telah memenuhi standar pengelolaan arsip dinamis aktif (yaitu pemakaian lembar disposisi, buku agenda surat masuk/keluar, dan penomoran buku agenda secara benar), sedangkan unit kerja dinilai telah mengelola arsip secara baku apabila telah memenuhi standar pengelolaan arsip dinamis aktif (yaitu pemakaian lembar disposisi, buku agenda surat masuk/keluar, dan penomoran buku agenda secara benar) dan memiliki petugas arsip yang memahami kode klasifikasi penataan arsip dinamis aktif.

1. Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku

Jumlah unit kerja yang mengelola arsip secara baku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat jumlah unit kerja yang mengelola arsip secara baku sebanyak 149 unit kerja atau 100% dari jumlah unit kerja yang dibina dengan predikat baik sebanyak 149 unit. Kondisi tersebut tetap jika dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2.117. Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unit Kerja Yang Dibina	149	149	149	149	149
2	Jumlah Unit Kerja Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	147	149	149	149	149
3	% Unit Kerja Mengelola Arsip Secara Baku	98,66	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2020

Dalam rangka mendorong agar pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan dengan baik dan baku sesuai ketentuan, di tahun 2018 telah dilakukan monitoring langsung terhadap masing-masing unit kerja, sedangkan untuk indikator kinerja peningkatan SDM pengelola kearsipan tahun 2018 telah tercapai 100% atau seluruh aparatur yang mengikuti bimtek kearsipan (sebanyak 275 orang) telah dinilai memiliki ketrampilan yang baik. Capaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 yaitu sebanyak 175 orang. Pembinaan SDM pengelola kearsipan selain dilakukan melalui bimtek, juga dilakukan langsung di tempat melalui kegiatan monitoring.

2. Persentase Peningkatan SDM Pengelola Arsip

Dalam rangka pelayanan pengarsipan Pemerintah Daerah dibutuhkan tenaga-tenaga SDM yang memenuhi syarat guna mendukung proses pengarsipan. Sejak tahun 2015 kebutuhan SDM pengelolah arsip di Kabupaten Pasuruan telah terpenuhi 100%.



Grafik 2.116. Persentase Peningkatan SDM Pengelola Arsip di Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2019

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan urusan kearsipan menurut RPJMD tahun 2018 -2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel .2.118. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	nilai	n/a	62,15 (cukup)	79,67 (sangat baik)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan



➤ **Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip :**

✓ **Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan**

Nilai audit arsip yang dilakukan tahun 2020 memperoleh nilai 79,67 (sangat baik), meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 62,15 (cukup). Penilaian audit arsip tahun 2020 mengalami perubahan dari 5 pengelompokan menjadi menjadi 7 (tujuh), yaitu :

1. Nilai 90 s/d 100 dengan kategori AA (Sangat memuaskan)
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan)
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik)
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik)
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup)
6. Nilai Lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang)
7. Nilai 0 s.d 30 dengan Kategori D (Sangat Kurang)

Parameter yang diukur dalam audit kearsipan adalah: ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; program kearsipan; pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang- kurangnya 10 tahun; penyusutan arsip; pengelolaan arsip statis; SDM kearsipan; kelembagaan; prasarana dan sarana kearsipan

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

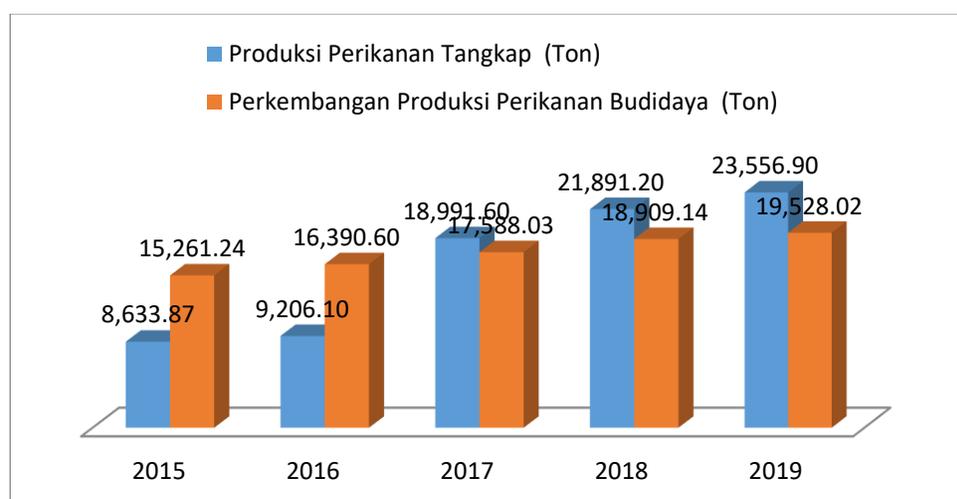
Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Berikut adalah penjelasan serta data terkait.

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keberpihakan kepada rakyat miskin (*pro poor*), lapangan kerja (*pro jobs*) dan pertumbuhan (*pro growth*) dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan secara intensif, efisien dan terintegrasi antara sentra produksi budidaya dan tangkap dengan pengolahan dan pemasaran hasil sehingga

menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah yang selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya.

Sedangkan sub sektor perikanan Pasuruan, didukung oleh produksi ikan. Dilihat perkembangannya, hasil tangkapan ikan terus mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah tangkapan itu berdampak pada nilai yang dihasilkan. Berikut ini adalah perkembangannya produksi, nilai ikan dan konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015-2019.



Grafik 2.117. Aspek Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan

Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan terus mengalami kenaikan. Produksi perikanan tangkap pada 2019 sebesar 23.556,90 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 21.891,20. Sedangkan pada Perkembangan produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 19.528,02 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18.909,14 ton.

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai RPJMD Tahun 2018 – 2023 dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020 yang diampu oleh Dinas Perikanan sebagaimana tabel berikut :



Tabel. 2.118.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Meningkatkan produktivitas sub sector perikanan dengan mendorong		Milyar Rupiah	782,31	802,11
2	perkembangan ekonomi kreatif	PDRB sub sector perikanan	%	5,59%	3,43
3	Meningkatnya produksi perikanan berbasis potensi lokal yang berdaya saing	% produksi perikanan % produksi usaha	%	3,35	4,43
	Terwujudnya usaha agribisnis perikanan	perikanan yang mandiri			

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan

2.1.3.2.2. Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata dinilai dengan indicator jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Pasuruan. Indikator ini menggambarkan besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Pasuruan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung mengindikasikan semakin meningkatnya daya tarik wisata, juga pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi obyek wisata utama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 mencapai 1.431.688 jiwa mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 2.687.987 jiwa. Hal ini dikarenakan pandemic covid 19. Tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 2.533.447 jiwa. Sedangkan tahun 2017 yang mencapai 2.930.495 jiwa mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 2.270.624 jiwa.



Grafik 2.118. Kunjungan Wisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

2.1.3.2.3 Pertanian

Berdasarkan kewenangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana prasarana pertanian diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu peningkatan nilai tambah sektor unggulan berbasis wilayah serta pemantapan ketahanan pangan daerah dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini tentunya disinergikan dengan prioritas nasional dan provinsi yaitu peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselerasi pariwisata.

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran pada urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dijelaskan sebagai berikut :

2.1.2.2.2 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tanaman Pangan

1) Padi

Produktivitas padi tahun 2019 sebesar 906,687kw/ha. Secara keseluruhan capaian realisasi produktivitas padi periode 2015-2019 fluktuatif. Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 753,343kw/ha mengalami peningkatan. Hal ini merupakan keberhasilan dari penerapan teknologi tepat guna, penggunaan benih bersertifikat dan penggunaan pupuk berimbang yang berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan padi

2) Jagung

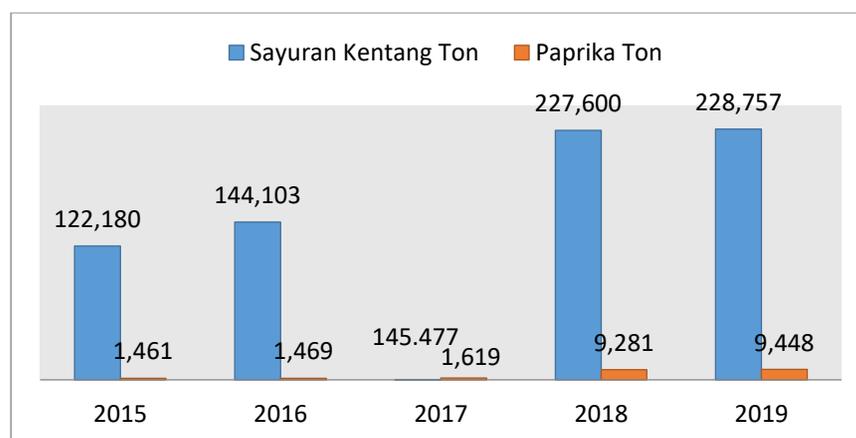
Produktivitas jagung pada tahun 2019 sebesar 388.389kw/ha, mengalami peningkatan terus menerus dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dukungan program pengembangan jagung hibrida kepada para petani berupa bantuan benih dan pupuk urea bersubsidi melalui anggaran APBN serta kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman sejak dini melalui SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman) yang didukung oleh anggaran APBD Kabupaten. Selain itu bantuan obat-obatan untuk hama penyakit tanaman juga diberikan melalui anggaran APBD Provinsi. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi jagung adalah terjadinya perubahan pola tanam di beberapa sentra kedelai beralih ke komoditas jagung seperti Kecamatan Kraton, Pohjentrek, Sukorejo, Wonorejo, Purwosari dan Gempol.

3) Kedelai

Produktivitas kedelai pada tahun 2019 sebesar 2.407kw/ha, mengalami peningkatan terus menerus di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan pola tanam dari beberapa sentra pengembangan komoditas kedelai beralih kepada komoditas jagung hibrida yang mempunyai nilai ekonomis lebih menjanjikan.

b. Tanaman Hortikultura

1) Sayuran Kentang dan Paprika



Grafik 2.118. Hortikultura tanaman kentang dan paprika Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Produktivitas sayuran kentang pada tahun 2019 sebesar 228.757 Kw/ha, tanaman kentang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di

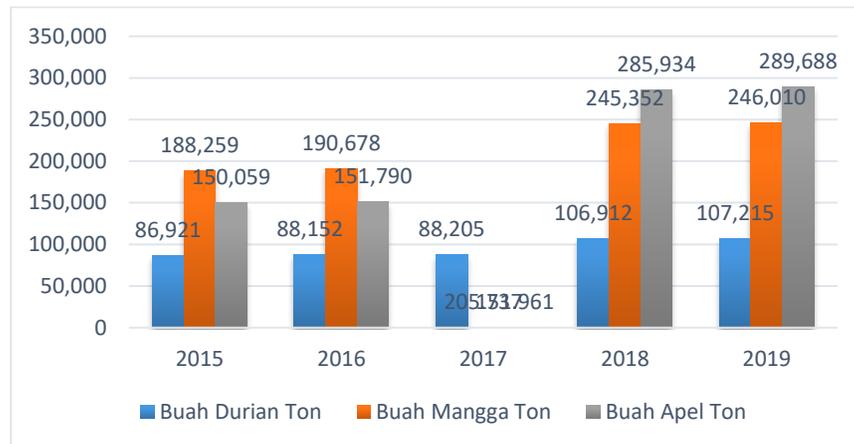


kabupaten pasuruan. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 227.600 Kw/ha, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan produktivitas kentang tersebut antara lain disebabkan penggunaan benih unggul dan bermutu yang dipenuhi dari Pusat Perbenihan Kentang di Kawasan sentra kecamatan Tosari, pemupukan yang berimbang dan penggunaan mulsa plastic serta perubahan iklim yang cenderung basah sepanjang tahun. Didukung harga komoditas kentang dipasaran sangat menjajikan/menguntungkan bagi petani sehingga petani lebih antusiasberbudidaya kentang dalam skala luasan yang cukup besar.

Sedangkan Produktivitas paprika pada tahun 2019 sebesar 9.448 Kw/ha, sayuran paprika mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Produktivitas komoditas paprika di kawasan sentra pengembangan cukup melimpah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk yang disalurkan melalui sistem irigasi tetes, pembangunan jaringan irigasi tetes dan pengendalian OPT sejak dini. Disamping itu harga komoditas paprika lebih menguntungkan secara ekonomis jika dibandingkan dengan komoditas lainnya sehingga petani sangat antusias untuk berbudidaya komoditas paprika.

2) Buah Durian, Mangga dan Apel

Produktivitas durian pada tahun 2019 sebesar 107,215kg/phn. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 106,912 kg/phn, menunjukkan adanya peningkatan produktivitas. Peningkatan Produktivitas Durian disebabkan oleh beberapa faktor antar lain iklim yang mendukung serta pemeliharaan tanaman secara intensif berupa pemangkasan tunas-tunas lateral sehingga memicu tahap pembungaan dan pembuahan. Disamping itu harga komoditas durian mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.



Grafik 2.119. Hortikultura Buah Durian, Mangga dan Apel Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Produktivitas mangga pada tahun 2019 sebesar 246,010 kg/phn. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 245,352 kg/phn, menunjukkan adanya peningkatan. Produktivitas komoditas mangga yang cukup melimpah disebabkan oleh penerapan teknologi pembuahan komoditas mangga diluar musim (*offseason*) menggunakan paklobutrazol, penggunaan pupuk organik, pemangkasan bentuk dan pemangkasan produksi serta pengembangan sentra kawasan mangga gadung klon 21 atau mangga alpukat yang dikembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan antara lain berupa bantuan bibit mangga melalui anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.

Produktivitas apel pada tahun 2019 sebesar 289,688 kg/phn, jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 285.934 kg/phn, menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan produktivitas tanaman apel disebabkan adanya penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar, penggunaan pupuk organik, pengendalian OPT melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu(SL-PHT) dan Sekolah Lapang Agens Hayati (SL-AH), pemeliharaan tanaman berupa pemangkasan serta pengembangan kawasan sentra apel. Selanjutnya akan dilakukan upaya branding apel Nongkojajar.

3) Bunga Sedap malam dan Bunga Krisan

Produktivitas sedap malam pada tahun 2019 sebesar 90.091.503 tangkai/m², jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 89.457.858 tangkai/m², menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan

produktivitas tanaman sedap malam disebabkan adanya penggunaan varietas sedap malam unggul (varietas Roro Anteng dan Dian Arum), budidaya sedap malam yang intensif sesuai SOP serta pengendalian OPT sejak dini. Didukung permintaan pasar yang cukup menjanjikan.



Grafik 2.120. Hortikultura Bunga Sedap Malam dan Bunga Krisan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Produktivitas krisan pada tahun 2019 sebesar 93.752.963 tangkai/m², jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 9.281 tangkai/m², menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini disebabkan pengembangan sentra budidaya krisan yang cukup luas dan sangat diminati oleh petani dan prospek pasar yang cukup menjanjikan.

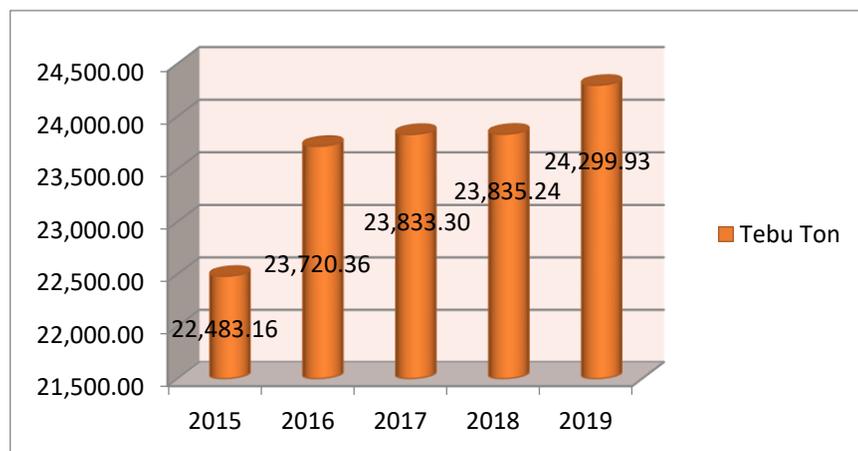
2.1.2.2.3. Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penerapan teknologi budidaya, perbaikan infrastruktur perkebunan/sarana prasarana (sumur resapan, Irigasi air tanah, dam/parit, jalan Produksi) yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan produksi Perkebunan. Adapun produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

A. Produksi Tanaman Tebu (Mitra Perusahaan)

Pengembangan produksi tanaman tebu rakyat dilakukan secara terintegrasi antara petani tebu dengan pihak Pabrik Gula sebagai mitra kerja. Pola kemitraan ini dilakukan baik secara aspek teknis budidaya dan pengolahan tebu petani untuk menjadi kristal gula maupun sebagai fasilitator untuk penguatan kelembagaan kelompok petani berupa

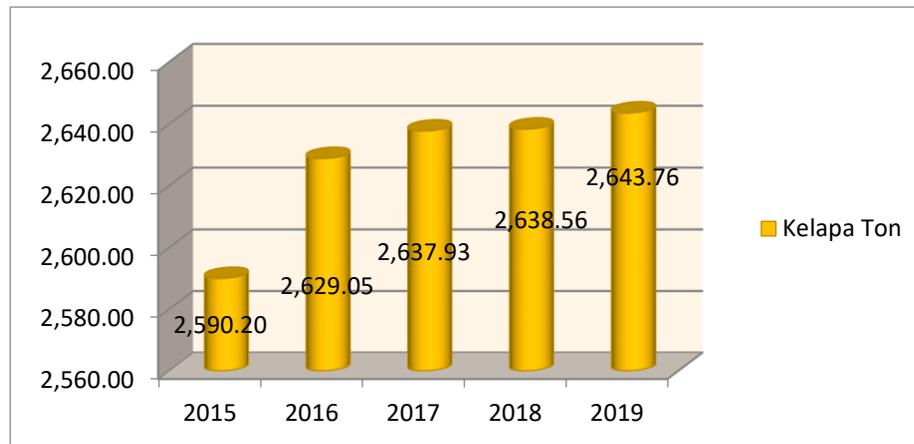
sosialisai dan pembinaan kepada petani. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan berperan sebagai penanggung jawab program dan fasilitator kemitraan antara pabrik gula dengan petani melalui sarana Forum Temu Kemitraan/FTK PG. Kedawung dan PG. Candi. Produksi tebu tahun 2019 mencapai 24.299,93 ton, dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan produksi tebu ini disebabkan penerapan teknologi budidaya, penggunaan bibit yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana perkebunan serta pemeliharaan tebu(keprasan dan bongkaratun) yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.



Grafik 2.121. Produksi Tanaman Tebu Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

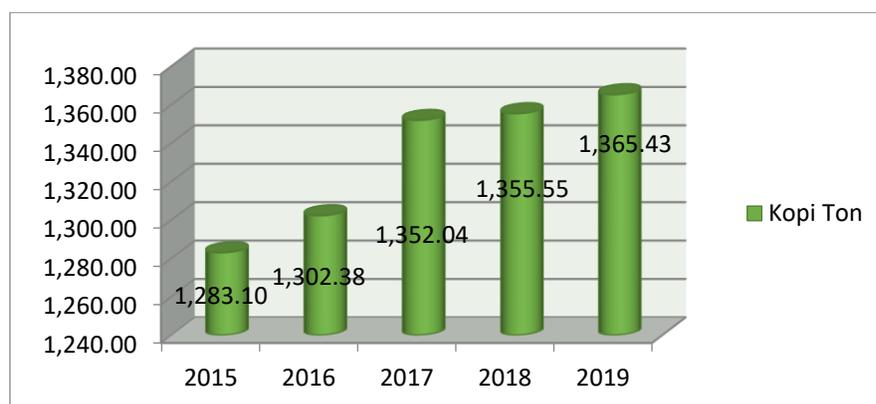
1. Produksi Tanaman Kelapa

Produksi tanaman Kelapa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tanaman kelapa sebesar 2,590,20. Pada tahun 2016 tanaman kelapa mengalami kenaikan sebesar 2,629,05. Pada tahun 2017 tanaman kelapa mengalami kenaikan sebesar 2.637,93. Pada tahun 2018 tanaman kelapa mengalami kenaikan sebesar 2.638,56. Sedangkan pada tahun 2019 tanaman kelapa terus mengalami kenaikan sebesar 2.463,76. Hal ini disebabkan adanya kegiatan peremajaan tanaman kelapa secara kontinyu yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.



2. Produksi Kopi

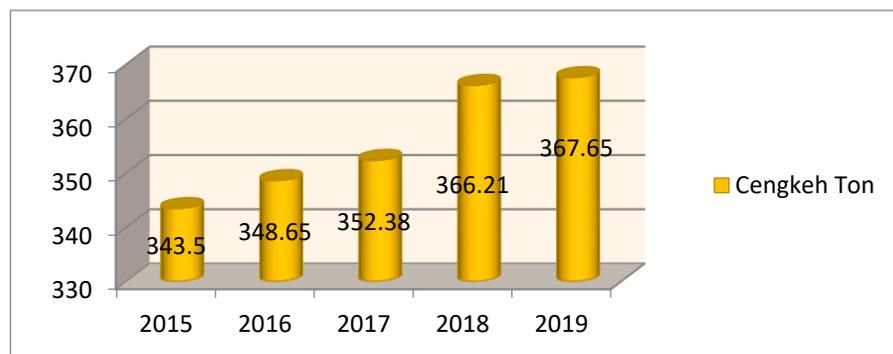
Produksi tanaman Kopi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 tanaman kopi sebesar 1,283,10. Pada tahun 2016 tanaman kopi mengalami kenaikan sebesar 1,302,38. Pada tahun 2017 tanaman kopi mengalami kenaikan sebesar 1,352,04. Pada tahun 2018 tanaman kopi mengalami kenaikan sebesar 1,355,55. Sedangkan pada tahun 2019 tanaman kopi terus mengalami kenaikan sebesar 1,365,43. Komoditas kopi di Kabupaten Pasuruan dikenal dengan istilah kopi KAPITEN (Kopi Asli Kabupaten Pasuruan) merupakan Komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan dan mempunyai prospek pasar yang cukup menjanjikan. Peningkatan produksi kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Penerapan teknologi budidaya mulai dari penggunaan sarana produksi yang dibutuhkan (bibit unggul, pupuk dan obat-obatan), sarana prasarana pendukung budidaya dan penanganan pasca panen kopi yang dilakukan secara intensif serta peningkatan SDM petani melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani.



Grafik 2.122. Produksi Tanaman Kopi Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

3. Produksi Cengkeh

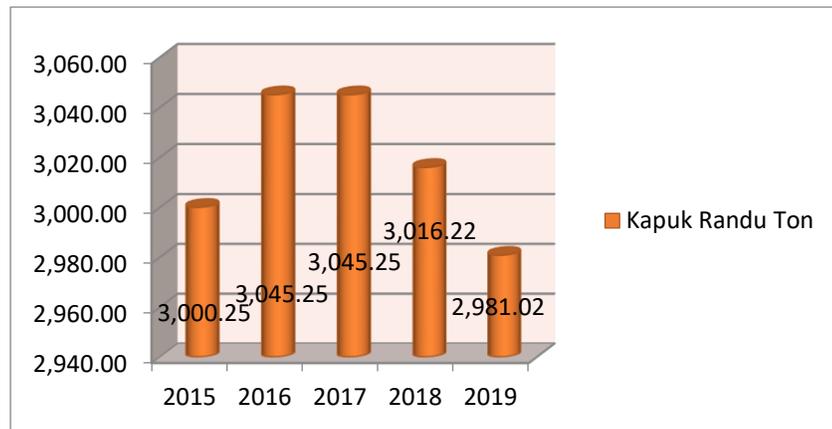
Produksi Cengkeh di Kabupaten Pasuruan sebagian besar dikembangkan pada daerah-daerah dataran tinggi. Produksi cengkeh tahun 2019 sebesar 367,65 ton. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan yang berpengaruh terhadap proses generative (tahap pembungaan) sehingga berpengaruh terhadap produksi cengkeh yang dihasilkan. Disamping itu terdapat pula beberapa tanaman cengkeh yang kurang produktif dilakukan peremajaan kembali untuk merangsang produksi cengkeh.



Grafik 2.123. Produksi Tanaman Cengkeh Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

4. Produksi Kapuk Randu

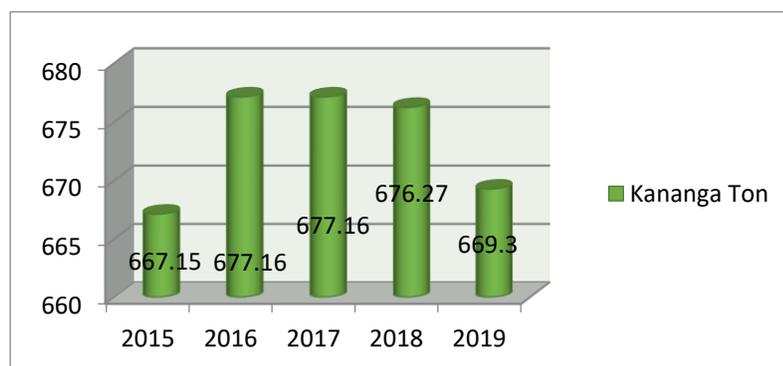
Produksi Kapuk Randu tahun 2019 sebesar 2.981,02 ton. Budidaya kapuk randu saat ini memang kurang diminati oleh petani karena prospek pasar yang kurang menjanjikan, namun demikian Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya untuk menggerakkan masyarakat agar membudidayakan kapuk randu dalam rangka meningkatkan produksi antara lain penanaman baru (rehabilitasi tanaman kapuk randu) yang bersumber dari APBD Kabupaten.



Grafik 2.124. Produksi Kapuk Randu Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

5. Produksi Kenanga

Produksi kenanga tahun 2019 sebesar 669,3 ton. Hal ini disebabkan kurangnya minat petani untuk membudidayakan kenanga. Secara ekonomis kenanga mempunyai peluang pasar yang cukup menjanjikan, karena kenanga ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alat kosmetik dan minyak kenanga.



Grafik 2.125. Produksi Kenanga Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Kinerja Dinas Pertanian sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Tahun 2020 yang diampu oleh Dinas Pertanian sebagaimana Tabel berikut :



Tabel.2.118.2. Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	PDRB Subsektor pertanian			
		ADHB	Rp.Juta	4.325.856,18	2.990.292.1
		ADHK	Rp.Juta	2.740.506,41	1.888.370.4
		PDRB Sub sector perkebunan			
		ADHB	Rp.Juta	1.518.458,15	1.553.596,7
		ADHK	Rp.Juta	1.067.208,43	1.075.300,4
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	4,19	2,096%
		Peningkatan produksi tanaman pangan	%	17,59	8,09%
		Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	%	0,62	0,48%
		Peningkatan produksi tanaman sayur	%	1,16	0,56%
		Peningkatan produksi tanaman hias	%	1,16	0,36%
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	0,82	0,99%
3	Meningkatnya usaha pertanian dan perkebunan yang terstandarisasi	Persentase produk hasil pertanian/agribisnis yang terstandarisasi	%	28,57%	28,57%

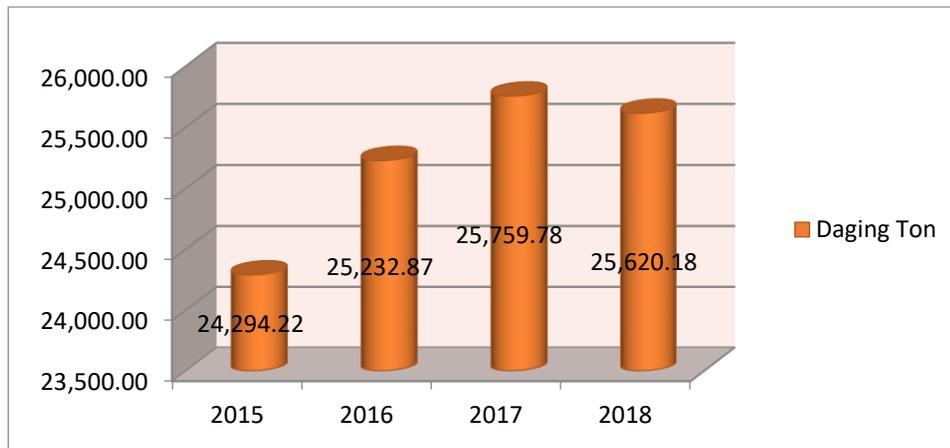
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan

2.1.2.2.4. Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan Produksi Peternakan ditentukan oleh adanya peningkatan populasi ternak baik ternak besar dan kecil. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat produksi peternakan yang meliputi daging, telur dan susu.

1. Daging

Produksi daging pada tahun 2018 adalah sebesar 25.620,18 ton. Peningkatan produksi daging disebabkan oleh meningkatnya populasi ternak, baik ternak besar, kecil dan unggas sehingga pemotongan ternak besar, kecil dan unggas untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal mengalami peningkatan.



Grafik 2.126. Produksi Daging Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2018

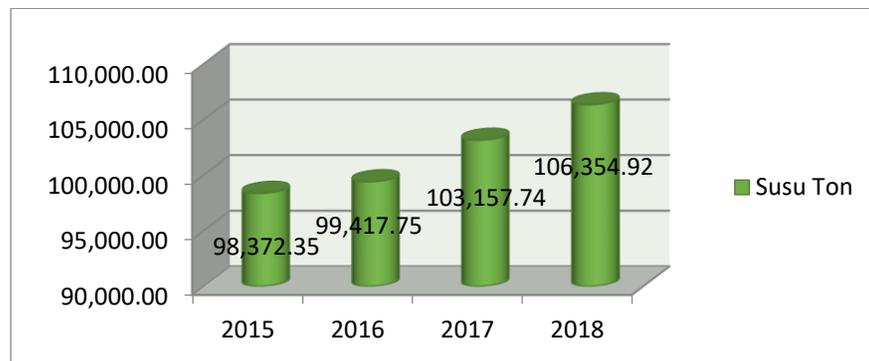
2. Telur

Dari grafik dapat dilihat produksi telur di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2015. Hal tersebut disebabkan adanya peremajaan induk petelur sehingga produksi telur belum optimal.



Grafik 1.28. Produksi Telur Kab. Pasuruan Tahun 2015 - 2018

Produksi Susu pada tahun 2018 adalah sebesar 106.354,92 ton, jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi tahun 2017 sebesar 103.157,74 ton menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,10%. Hal ini disebabkan meningkatnya populasi sapi perah dan kambing.



Grafik 2.129. Produksi Susu Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2018

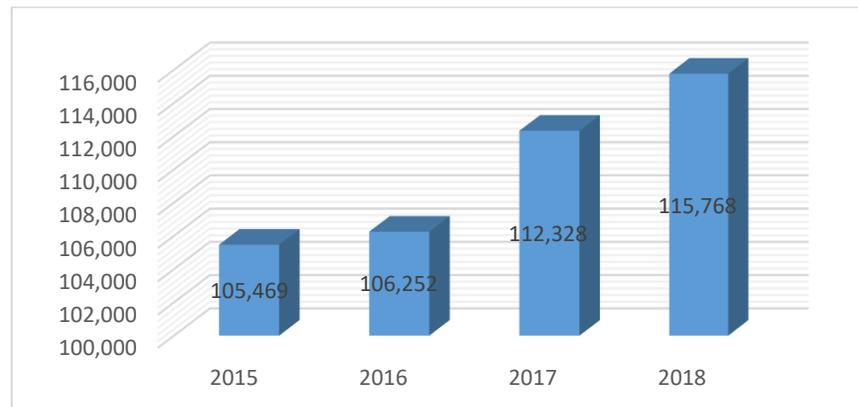
2.1.2.2.5. Peningkatan Produksi Ternak

Indikator ini diaplikasikan untuk mengukur perkembangan populasi ternak yang terdiri ternak besar dan ternak kecil yang meliputi: sapi potong, sapi perah, kambing dan domba. Sedangkan ternak unggas meliputi; ayam petelur, ayam pedaging dan itik dengan uraian sebagai berikut:

a. Ternak besar dan kecil

1) Sapi Potong

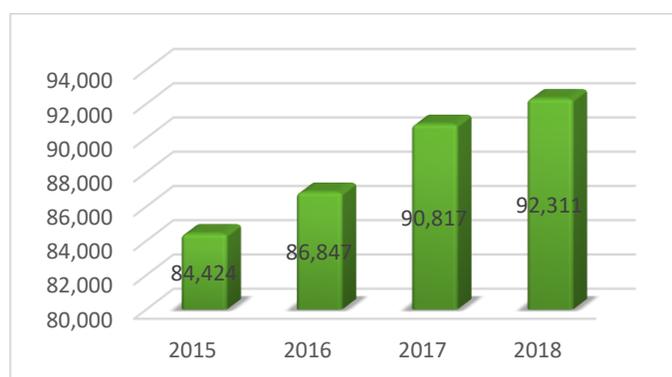
Populasi sapi potong pada tahun 2018 adalah sebesar 115.768 ekor, melebihi capaian realisasi populasi tahun 2017 sebesar 112.328 ekor, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,06%. Peningkatan populasi sapi potong ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah meningkatnya kinerja Inseminasi Buatan (IB) dengan program SIWAB, pengendalian pengeluaran ternak antar daerah serta pelarangan pemotongan ternak betina produktif sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang pelarangan pemotongan ternak betina produktif.



Grafik 2.130. Sapi Potong Kab. Pasuruan Tahun 2015-2018

2) Sapi Perah

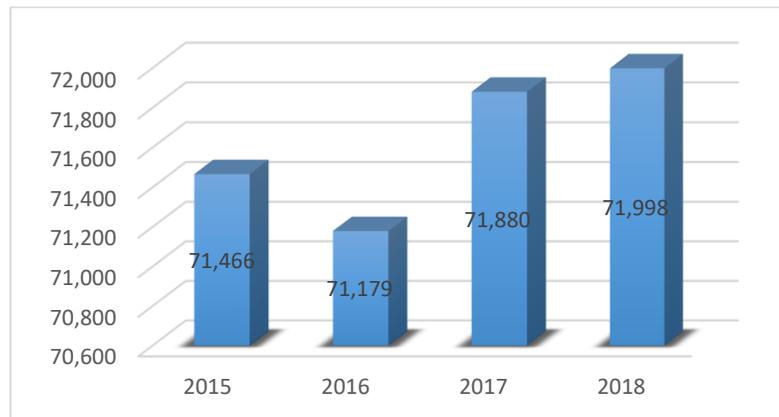
Populasi sapi perah pada tahun 2018 adalah sebesar 92.311 ekor, jika dibandingkan dengan capaian realisasi populasi tahun 2017 sebesar 90.817 ekor mengalami peningkatan sebesar 1,65%. Peningkatan populasi sapi perah ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kinerja Inseminasi Buatan (IB) dengan program SIWAB, pengendalian pengeluaran ternak antar daerah dan adanya pelarangan pemotongan ternak betina produktif sesuai regulasi yang ada.



Grafik 2.131. Sapi Potong Kab. Pasuruan Tahun 2015-2018

3) Kambing

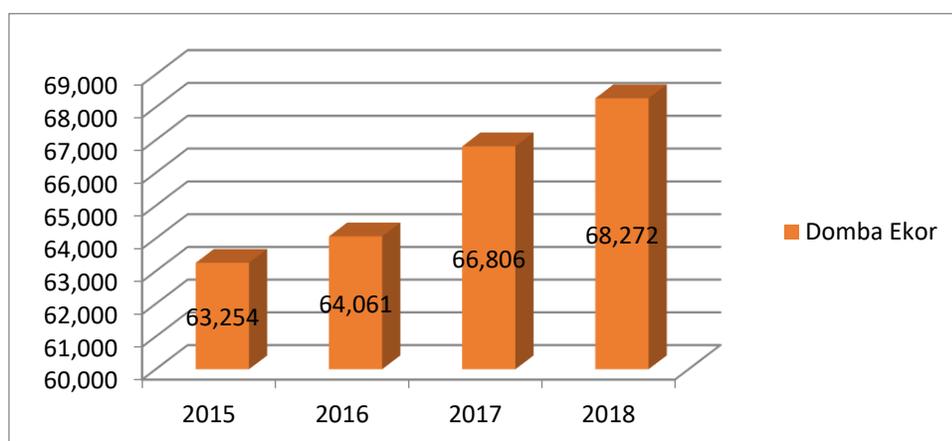
Populasi kambing pada tahun 2018 adalah sebesar 71.998 ekor, jika dibandingkan dengan capaian realisasi populasi tahun 2017 sebesar 71.880 ekor mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Peningkatan populasi kambing ini disebabkan adanya angka kelahiran yang meningkat dan angka kematian yang menurun sebagai dampak pembinaan yang lebih intensif dan tepat sasaran.



Grafik 2.132. Kambing Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2018

4) Domba

Populasi domba pada tahun 2018 adalah sebesar 68.272 ekor, jika dibandingkan dengan capaian realisasi populasi tahun 2017 sebesar 66.806 ekor mengalami peningkatan sebesar 2,19%. Peningkatan populasi domba ini sama dengan kambing disebabkan adanya angka kelahiran yang meningkat dan angka kematian yang menurun sebagai dampak pembinaan yang lebih intensif kepada peternak.



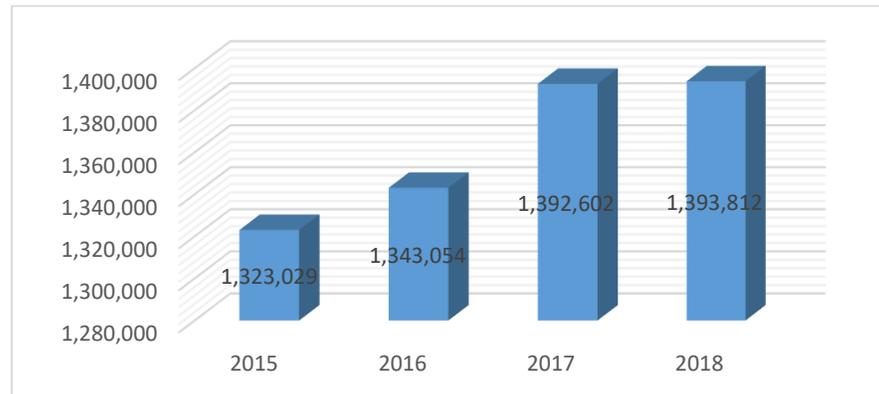
Grafik 2.133. Domba Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2018

b. Ternak unggas

1) Ayam Petelur

Populasi ayam petelur pada tahun 2018 adalah sebesar 1.393.812 ekor, Jika dibandingkan dengan capaian realisasi populasi tahun 2017 sebesar 1.392.602 ekor mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Peningkatan populasi ayam petelur ini disebabkan adanya pengendalian penyakit unggas yang memberikan hasil cukup optimal sehingga dapat

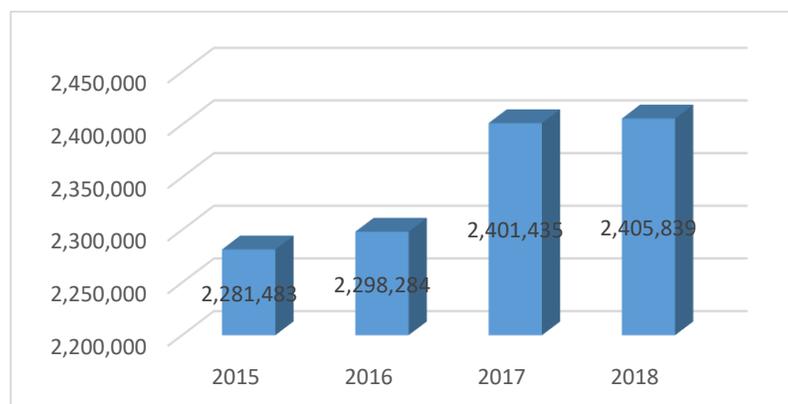
menekan angka kematian unggas. Disamping itu peningkatan usaha ayam petelur mempunyai prospek bisnis yang cukup menjanjikan sehingga peternak antusias untuk membudidayakan.



Grafik 2.134. Ayam Petelur Kab. Pasuruan Tahun 2015-2018

2) Ayam Pedaging

Populasi ayam pedaging pada tahun 2018 adalah sebesar 2.405.839 ekor, jika dibandingkan dengan capaian realisasi populasi tahun 2017 sebesar 2.401.435 ekor mengalami peningkatan sebesar 0,18%. Peningkatan populasi ayam pedaging ini disebabkan adanya pengendalian penyakit unggas yang dilakukan secara intensif sehingga berdampak langsung terhadap penurunan angka kematian unggas.

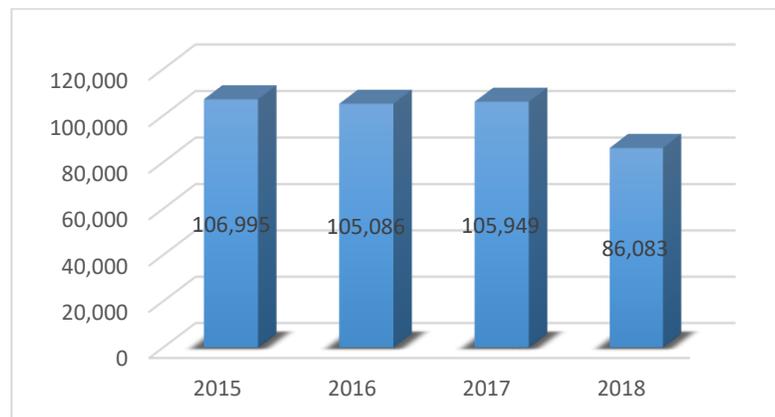


Grafik 2.135. Ayam Pedaging Kab. Pasuruan Tahun 2015-2018

3) Itik

Populasi itik pada tahun 2018 adalah sebesar 86.083 ekor, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 105.949 atau turun sebesar 18,75%. Penurunan populasi itik ini disebabkan adanya permintaan akan itik pedaging yang tinggi, yang

belum dapat diimbangi oleh produksi bibit, ke depan ini membuka peluang untuk usaha penetasan telur dan pembibitan itik.



Grafik 2.136. Perkembangan Jumlah Itik Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2018

Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dinas Peternakan & Ketahanan Pangan sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dengan capaian Kinerja tahun 2020 sebagaimana dibawah ini :

Tabel.2.118.3. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Dinas Peternakan & Ketahanan Pangan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Meningkatnya produksi peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan			
		- Daging	%	2,14	0,18
		- Telur	%	3,15	0,18
		- Susu	%	2,15	0,02

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan

Peningkatan produksi peternakan untuk daging pada tahun 2020 diangka 0,18% menurun dibandingkan 2019 diangka 2,14%. Untuk produksi telur pada tahun 2020 diangka 0,18% mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 diangka 3,15%. Sedangkan Susu ditahun 2020 menunjukkan angka 0,02% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 2,15%. Hal ini dikarenakan pandemic covid 19.



2.1.3.2.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dalam upaya penyediaan dan pendistribusian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sektor industri melalui mekanisme pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perdagangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Tabel 2.119. Indikator Perdagangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Surat	2.203	2.402	2.860	2.974	3.201
2	Revitalisasi Pasar Daerah	Unit	6	9	12	14	n/a
3	Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Daerah	Unit	4	3	3	2	n/a
4	Nilai Transaksi Perdagangan	Rupiah	n/a	n/a	n/a	1.938.102.000	1.964.493.500
6	Pameran Dagang	Kali	18	17	13	21	31
7	Pameran Dagang Nasional	Kali	5	7	4	4	7
8	Pameran Dagang Lokal	Kali	13	10	9	17	24
10	Jumlah UTTP	Unit	n/a	31	13.970	n/a	n/a
11	Jumlah Retribusi	Rp	n/a	20.386.000	528.388.600	n/a	n/a
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Skor)	n/a	n/a	n/a	80,25	n/a
13	Nilai SKM Disperindag	Range Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	90,55



No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Interval (%)					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2020

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan perdagangan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 melalui indikator kinerja sebagaimana Tabel berikut :

Tabel .2.118.4. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Tujuan PD : meningkatkan pertumbuhan usaha perdagangan	Indeks Daya Beli			
2	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan sektor perdagangan	Nilai transaksi perdagangan	Rp.	1.964.493.500	4.192.630.500
3	Sasaran : Meningkatnya perlindungan Konsumen	Persentase alat Ukur yang Terstandarisasi	%	-	75,31

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan

➤ **Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan :**

1) Indeks Daya Beli

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh Indikator komposit Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli. Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur yang dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Tahun 2020 realisasi indeks daya beli Kabupaten Pasuruan sebesar 70,63 (98,12 % dari target 71,98)



2) Nilai Transaksi Perdagangan

Pada tahun 2020 nilai transaksi perdagangan mengalami peningkatan sebesar 113,42% dibandingkan tahun 2019. Dan apabila dibandingkan dengan target tercapai 483,53% (target 2020 sebesar Rp. 867.085.000,-).

Hasil perolehan transaksi berasal dari omzet pelaksanaan pameran yaitu pasar murah, gelar produk, misi dagang dan promosi dagang, baik lokal, regional, dan nasional. Berikut kegiatan pasar murah, gelar produk, misi dagang dan promosi dagang Tahun 2020

No	PAMERAN LOKAL	TANGGAL	TEMPAT
1	Misi Dagang Provinsi Jatim	4-6 Maret 2020	Riau – Sumatera
2	Pameran Gelar Kriya Dekranasda Provinsi Jatim ke-2 Tahun 2020	4-8 Maret 2020	Grand City – Surabaya
3	Pameran Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional	8 Maret 2020	Pandaan - Pasuruan

3) Persentase alat Ukur yang Terstandarisasi

Indikator persentase alat ukur yang terstandarisasi diukur dari hasil jumlah pelayanan tera dan tera ulang (UTTP) diantaranya wajib tera ulang pemilik alat ukur/ pengguna alat ukur yang berada di kecamatan, pasar rakyat, SPBU, perusahaan/pabrik dan tera secara mandiri di kabupaten pasuruan. Pelayanan tera tera ulang ini untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran hasil pengukuran serta jaminan hukum atas penggunaan alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal melalui kegiatan standarisasi dlm pelayanan tera dan tera ulang. Pada tahun 2020 target UTTP bidang metrology legal sebesar 14.279 dan telah terealisasi sebesar 10.754 (75,31% dari target atau 150,62% dari Target 2020 50%)



2.1.3.2.5 Perindustrian

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.

Urusan perindustrian mengemban tugas utama untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan menyelaraskan jenis industri yang berkembang dengan potensi sumber daya lokal (sektor primer) untuk menciptakan rantai pasok industri, penataan kawasan industri dan peruntukan industri, penciptaan *green and clean* industri untuk meminimalisasi limbah dan menjaga kelestarian lingkungan serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan sektor industri.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka pada tahun 2013 telah disusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Pasuruan agar Pengembangan Industri di Kabupaten Pasuruan berjalan dengan optimal. Dengan terbitnya UU No. 3 tahun 2014 dan PP 4/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta peraturan lain yang terkait dengan industri serta perkembangan kondisi yang ada, maka pada tahun 2018 dilakukan Review terhadap Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Pasuruan dengan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038. Dengan beberapa penyelarasan dokumen terhadap RIPIN 2015-2035 diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pengembangan industri bisa berjalan optimal, terarah, tepat sasaran untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk industri Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan perindustrian. Untuk mencapai hal tersebut maka produk yang dihasilkan haruslah



produk yang bagus sesuai standar yang berlaku. Dengan demikian maka legalitas dari pelaku industri juga harus dipenuhi untuk memberikan jaminan kepercayaan bagi pasar.

Fasilitasi bagi standarisasi produk telah dilakukan secara rutin untuk memberi kemudahan kepada pelaku industri terutama IKM agar produknya lebih berdaya saing. Sedangkan Pemenuhan legalitas didorong dengan kebijakan tentang kemudahan proses perijinan yang difasilitasi dengan Program SATRYA EMAS, dimana para pendampingnya aktif melakukan pendampingan terhadap IKM agar usaha dan produk yang mempunyai legalitas yang dibutuhkan. Hal tersebut diatas diharapkan akan mendorong pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan Besar di Kabupaten Pasuruan yang berimplikasi pula pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Tabel 2.120. Aspek Perindustrian Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah	Unit	64	50	56	54	n/a
2	Tenaga Kerja	Orang	1.817	1.181	2.584	2.299	n/a
3	Nilai Investasi	Rupiah	151.194.254	72.245.922	656.555.216	117.700.035	n/a
4	Jumlah Produksi Sektor Industri	Jutaan Rupiah	n/a	n/a	n/a	62.147.131,60	n/a
5	Nilai Produksi Sektor Industri	Jutaan Rupiah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2020

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2020 sebagaimana Tabel dibawah ini :



Tabel 2.118.6. Capaian Kinerja Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Tujuan: Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan	PDRB Sektor Industri	%	6,46	n/a
2	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. Juta	62.147.131,62	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan

➤ **Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan :**

1) **PDRB Sektor Industri**

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu pemerintah kabupaten Pasuruan diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memiliki prospek potensial untuk dikembangkan. Sektor industri merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja berdampak positif terhadap PDRB.

Pada tahun 2020 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 6,46 % mengalami perlambatan/penurunan/.. dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 6,46%. Hal ini dikarenakan semakin besarnya sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB, terutama sektor perdagangan.



2) Nilai Produksi Sektor Industri

Nilai produksi sektor industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan/penurunan sedangkan kontribusi sektor industri mengalami kenaikan/penurunan.

Dalam meningkatkan pertumbuhan nilai produksi sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya-upaya terhadap IKM, antara lain :

1. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produksi
2. Memfasilitasi IKM agar lebih berdaya saing melalui program/ kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Menumbuhkan IKM wirausaha baru melalui pelatihan dan pembinaan, serta program Satrya Emas melalui pendataan dan pendampingan UMKM, meliputi :
 - Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan ketrampilan
 - Fasilitasi Perijinan legalitas Produk UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
 - Fasilitasi peningkatan pemasaran produk UMKM dalam bentuk online dan konvensional
 - Pendampingan untuk peningkatan kualitas manajemen pengelolaan usaha UMKM

2.1.3.2.6 Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan salah satu urusan pilihan pemerintah kabupaten yang kontribusinya cukup menentukan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan masih tinggi, maka perlu dilakukan upaya persebarannya dengan melakukan transmigrasi. Urusan ketransmigrasian dilaksanakan



untuk melayani masyarakat yang akan bertransmigrasi. Program transmigrasi secara regulasi masih bergantung pada Pemerintah Pusat/Provinsi, baik untuk sarana dan prasarana maupun lokal transmigrasi, sehingga keberhasilan program/kegiatan transmigrasi di daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat/ Provinsi.

Dalam melakukan kunjungan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten di luar jawa, pemerintah kabupaten daerah pengirim baru dapat melakukan pada awal tahun anggaran berjalan, karena data/informasi tentang calon lokasi transmigrasi baru diterima pada tribulan IV tahun sebelumnya, sehingga untuk waktu 12 bulan terkadang tidak cukup untuk menyelesaikan kerjasama antar daerah. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan transmigrasi dinilai dengan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian sebagaimana berikut:

Tabel 2.121. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Ketransmigrasian

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi (komulatif)	Lokasi	6	8	8	n/a	n/a
2	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	KK	5	10	n/a	4	n/a

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, 2020

Kinerja Dinas Tenaga Kerja sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2020 yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana Tabel berikut :



Tabel 2.118.7 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Calon transmigran yang diberangkatkan	orang	4	0
2	Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon transmigran yang di berikan penyuluhan	orang	480	255

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja urusan Transmigrasi meliputi jumlah calon transmigrasi yang diberangkatkan pada tahun 2020 angka 0 (nol) menurun dibandingkan tahun 2019 diangka 4 orang, sedangkan untuk indikator kinerja jumlah calon transmigrasi yang diberikan penyuluhan pada tahun 2020 diangka 255 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 diangka 480 orang. Terjadi penurunan pada kedua indikator kinerja tersebut dikarenakan pandemic covid 19 .

2.1.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.3.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Indikator kinerja pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan diukur dengan “persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen rencana yang baik”. Indikator tersebut memperlihatkan keberhasilan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA selaku lembaga yang ditunjuk sebagai penyusun perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD, berkewajiban juga mengendalikan



pelaksanaannya dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, yaitu Renstra dan Renja.

Urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum yang memiliki fokus pada layanan urusan wajib. Adapun tolok ukur keberhasilan pada urusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan penilaian yang menggunakan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini. Bappeda mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan.

Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Tabel 2.122. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda dan dievaluasi setiap tahun	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No.	Aspek/ fokus/ bidang urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Ketepatan waktu penyusunan LKPJ Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Pasuruan, 2020

2.1.3.3.2 Keuangan

Indikator kinerja Penunjang Urusan Keuangan adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kinerja menurut Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 31 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan atas proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah disampaikan tepat waktu kepada BPK-RI dan capaian indikator kinerja sasaran berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tingkat capaiannya seratus persen, dan sesuai juga dengan rencana yang ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan kinerja pengelolaan keuangannya.

Selain itu, indikator yang digunakan untuk menilai kinerja urusan keuangan adalah persentase kenaikan PAD. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan PAD selama kurun waktu 2015 – 2019 secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.123. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	13,48	0,52	58,07	(19,17)	95,14

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2020

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2015 sebesar 13,48%. pada tahun 2016 PAD mengalami penurunan sebesar 0,52%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 58,07%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 19,17%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 95,14%.

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2020 dalam melaksanakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Unsur Keuangan ditampilkan pada tabel berikut.

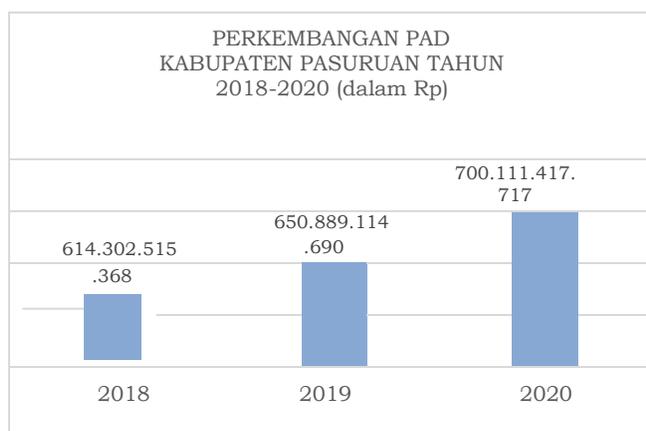
Tabel.2.118.8. Capaian Kinerja Unsur Keuangan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
	Tujuan :				
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi	Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100
	Sasaran :				
2	Meningkatnya tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	5,96	7,56
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart akuntansi Pemerintahan	%	100	100

Sumber : BKD Kabupaten Pasuruan

➤ **Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah**

- ◆ Badan Keuangan Daerah mempunyai tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akuntabel dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian indikator tersebut tahun 2019 dan 2020 sebesar 100%, yang dikuatkan dengan penilaian BPK RI berupa opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas LKPD tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.



- ◆ Adapun sasaran strategis BKD adalah Meningkatnya tata kelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan 2 indikator, yaitu:
(1). Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 7,56% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,96%; (2). Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standart akuntansi Pemerintahan, dengan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 100% sama dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semua perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

2.1.3.3.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 untuk Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Indikator ini dihitung mulai tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan. Perhitungan indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural sampai tahun ini dengan jumlah seluruh pegawai struktural.

2. Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah

Indikator ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah. Capaian indikator ini tahun 2017 adalah sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 87%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 (97,76%) capaian indikator ini juga mengalami kenaikan karena seluruh peserta dinyatakan lulus semua. Adapun capaian tersebut diperoleh dari dua data pendukung yaitu jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus ujian dinas Tk. I dan II serta jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah.

Tabel 2.124. Pegawai yang pernah mengikuti Pendidikan & Pelatihan Aparatur

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kepemimpinan ASN yang ikut Diklat Struktural	70	84	41	71	40
2	Sesuai Jabatan s/d tahun sebelumnya Seluruh Pegawai Struktur	564	634	714	759	830
3	Jumlah seluruh pegawai struktural	1097	1092	1093	1006	976
4	ASN yang pernah mengikuti Pendidikan & Latihan Struktural	57,79	65,75	69,53	82,50	89,13

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Daerah, 2020



Tabel 2.125. ASN Yang Mengikuti dan Lulus Ujian Tahun 2015-2019

Aspek	2015	2016	2017	2018	2019
UD tk. I	95	100	100	100	100
UD tk. II	100	0	100	100	100
Ujian PI	100	97,77	100	100	100
Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas TK.I	20	19	35	31	29
Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas TK.II	2	0	0	2	2
Jumlah pegawai yang lulus penyesuaian ijazah	33	219	51	32	0
Jumlah seluruh pegawai peserta ujian dinas TK.I	21	19	35	31	29
Jumlah seluruh pegawai peserta ujian dinas TK.II	2	0	0	2	2
Jumlah seluruh pegawai peserta penyesuaian ijazah	33	224	51	32	0

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah, 2020

Capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Tujuan :				
	Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur yang profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	indeks	70.2	70.09
2	Sasaran :				
	Meningkatnya kinerja aparatur sipil negara	Persentase pelanggaran disiplin	%	0.18	0.16
		Persentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP	%	99	99

Sumber :Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan

➤ **Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah :**

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Profesionalitas dalam birokrasi merupakan suatu hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi, karena dengan profesional maka birokrasi dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yang semakin berkualitas. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Secara teknis, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi



mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Sementara dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat

puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Adapun instrumen Pengukuran pada dimensi disiplin bobot penilaiannya adalah: bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Adapun Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari :

Tabel Indeks Profesionalitas ASN

Jml PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
9370	12.26	27.95	25	4.99	70.2

2. Prosentase Pelanggaran Disiplin

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil Negara. Indikator ini untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin



Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 0,18% sama dengan realisasi tahun 2018 dan belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 0,19%. Hal ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menegakkan disiplin aparatur melalui kegiatan antara lain :

- a. Melaksanakan pembinaan rutin pegawai yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD maupun
- b. Melaksanakan penanganan masalah kepegawaian dengan melakukan sidak, kunjungan lapangan dan sidang penanganan pelanggaran disiplin untuk menentukan penjatuhan hukuman disiplin.

3. Prosentase peningkatan kinerja ASN dalam penilaian SKP

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi “Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja;
- c. Penilaian kinerja;
- d. Tindak lanjut; dan
- e. Sistem Informasi Kinerja PNS.



Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Organisasi dan tata kerja;
- d. uraian jabatan; dan/atau
- e. SKP atasan langsung.

“SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). SKP bagi pejabat pimpinan tinggi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: a. rencana strategis; dan b. rencana kerja tahunan.

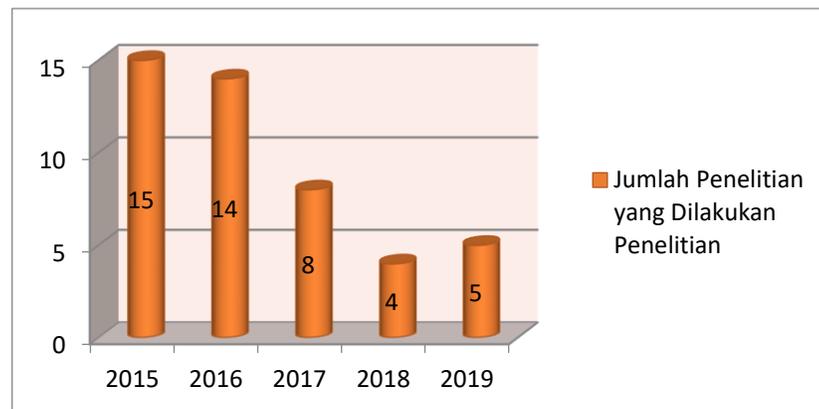
Pada tahun 2019 capaian indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja ASN dalam Penilaian SKP sebesar 99% atau sama dengan target dan realisasi tahun 2018. Hal ini karena upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membina Aparatur karena penilaian kinerja merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.

2.1.3.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (litbang) adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang litbang dinilai dengan indikator kinerja “persentase hasil litbang yang menjadi dasar kebijakan daerah”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan litbang yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Realisasi indikator kinerja tersebut tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 61,90%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan kegiatan litbang masih belum optimal.

Capaian jumlah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlah penelitian sebesar 15 penelitian. Pada tahun 2016 jumlah penelitian mengalami penurunan sebesar 14 penelitian. Pada tahun 2017 jumlah penelitian mengalami penurunan sebesar 8 penelitian. Pada tahun 2018 jumlah penelitian mengalami penurunan sebesar 4. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penelitian mengalami kenaikan sebesar 5.



Grafik 2.118. Presentase Hasil Litbang yang menjadi dasar Kebijakan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

Indikator ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari gambar dapat dilihat capaian indikator setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini disebabkan ketersediaan anggaran penelitian dan alokasi anggaran di Perangkat Daerah yang juga mengalami penurunan.

Penelitian dan Pengembangan merupakan kegiatan dalam rangka mencari kebenaran, baik yang bersifat epistemologi maupun yang bersifat empiris. Keberadaan penelitian dan pengembangan harus mampu mengungkapkan timbulnya gejala-gejala ketidaklurusan, harus mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang, serta harus mampu memberikan solusi yang tepat dengan jalan menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara representatif, obyektif, valid, dan reliable. Dengan demikian hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam



perumusan kebijakan Pemerintah, baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

2.1.3.3.5 Pengawasan

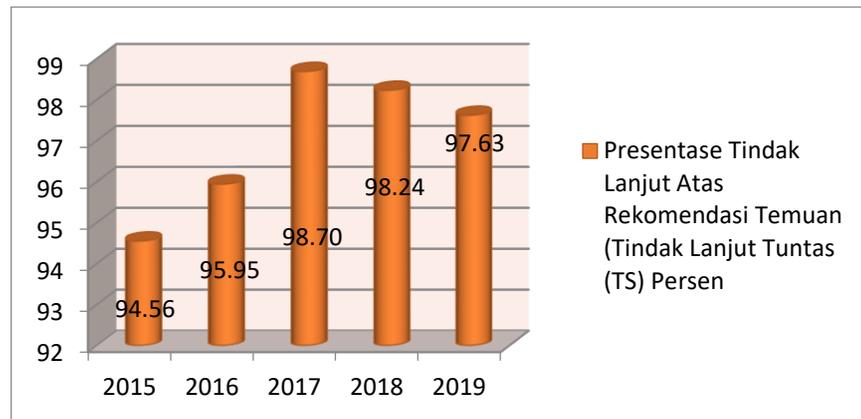
Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, dan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai. Dua indikator dalam pengawasan adalah presentase tindak lanjut temuan dan kasus pelanggaran disiplin pegawai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menyebutkan bahwa yang dimaksud Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dengan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Penyelesaian masalah atas rekomendasi temuan/tindak lanjut tuntas menjadi prioritas yang dilakukan secara terkoordinir oleh Inspektorat. Perkembangan Kinerja Layanan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat cenderung mengalami peningkatan dari tahun, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.119. Presentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Kab. Pasuruan Tahun 2015-2019

Kinerja Inspektorat sesuai RPJMD Tahun 2018-2020 dalam melaksanakan unsur pengawasan urusan pemerintahan tahun 2020 memiliki capaian sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemeritahan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP	WTP
2	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,52	3,62
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip OPD (Inspektorat)	Skor	72,34	81,11

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pasuruan

❖ Indikator Kinerja

1. *Meningkatnya kualitas sistem keuangan daerah*

Hasil Opini BPK Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Tahun 2019 mampu dipertahankan dengan Nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu **WTP**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

2. *Terwujudnya wilayah bebas korupsi*

Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Indeks Persepsi Korupsi pada Tahun 2020 sebesar **3,62**, jika dilihat dari target capaian



kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2020 yaitu sebesar **3,62**, maka untuk Tahun 2020 capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

3. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Nilai Sakip Inspektorat Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 ini meningkat dari yang sebelumnya BB dengan Skor 72,34 Menjadi A dengan Skor 81,11. Jika dilihat dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu **80,00**, capaian tersebut **sudah memenuhi target**.

Untuk diketahui bahwa Target Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD se Kabupaten Pasuruan yang berkategori minimal BB sebesar 30% atau sebanyak 17 SKPD, realisasi tahun 2020 nilai evaluasi implementasi SAKIP SKPD yang berkategori BB keatas sebesar 58,92% atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) SKPD. Dari hal tersebut capaian kinerja tercapai 194%.

2.1.3.3.6 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah penyelenggaraan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diukur melalui persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda, serta persentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.126. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2016-2020

No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020



No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	%	58	66	90	47,62	60
2.	Presentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil di fasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2020

Berdasarkan tabel diatas, persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda pada tahun 2019 sebesar 47,62%. Terdapat 10 Raperda dari total 21 Raperda yang disahkan menjadi Perda. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 60% yaitu terdapat 6 Raperda dari total 10 Raperda yang disahkan menjadi Perda. Tidak disetujuinya Raperda menjadi Perda dikarenakan adanya ketidaksepakatan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif dan juga belum ada fasilitasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, terdapat indikator persentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi yang mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah keluhan yang tercatat di tahun 2019 sebanyak 116 kali dan tahun 2020 menurun menjadi 102 kali. Penurunan ini dikarenakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sering turun langsung ke masyarakat untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.

2.1.3.3.7 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan indikator kinerja.

Tabel 2.127. Perkembangan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase UPP yang memiliki SPP dan IKM (target UPP= 250UPP (tahun 2018 target UPP= 250 UPP))	%	95,59	93,83	92,21	n/a	n/a
2	Peningkatan jumlah mitra kerjasama daerah	MoU	13	20	24	28	25
3	Ketepatan waktu penyusunan LPPD	%	100	100	100	100	n/a
4	Presentase proyek fisik yang di monitoring	%	80,65	87,96	63,89	76,66	76
5	Nilai SAKIP	Nilai	65,65 (B)	72,65 (BB)	72,70 (BB)	84,54 (BB)	83,70 (A)
6	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai	81,00	82,35	83,65	84,75	87,42

Sumber: Setda Kabupaten Pasuruan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 indikator kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu (1) Capaian peningkatan jumlah mitra kerjasama daerah pada tahun 2019 sebanyak 28 MoU dan mengalami penurunan di tahun 2020, hanya ada 25 MoU. Hal tersebut dikarenakan pada masa pandemi Covid-19, peninjauan dan kunjungan untuk survey mengalami penurunan; (2) Capaian persentase proyek fisik yang dimonitoring pada tahun 2019 sebesar 76,66% dan menurun menjadi 76% di tahun 2020 dikarenakan terbitnya Surat Edaran Bupati Pasuruan terkait larangan untuk tidak melakukan kegiatan berkerumun akibat pandemi Covid-19; (3) Nilai SAKIP pada tahun 2019 mencapai 80,54 (A) dan mengalami peningkatan di tahun



2020 yaitu 83,70 (A); (4) Meningkatnya kualitas layanan publik di tahun 2019 mencapai 84,75 (baik) dan meningkat di tahun 2020 yaitu 87,42 (baik).

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi (1) keselarasan, dan (2) keserasian. Selaras dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat pemerintahan, baik antar daerah maupun antara pusat dan daerah.

Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitas pada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional.

Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan



implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.

Dari hasil penelitian Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran didapatkan faktor-faktor pembentuk daya saing daerah yaitu : Perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, Iptek, sumber daya manusia, Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah, serta manajemen ekonomi mikro

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, nilai tukar petani dan indeks daya beli.

Kaitan antara kemampuan ekonomi daerah dengan aspek daya saing ialah suatu kapasitas ekonomi daerah harus memiliki kemampuan daya tarik tersendiri bagi setiap pelaku kegiatan ekonomi baik yang di dalam maupun luar daerah dalam upaya peningkatan daya saing daerah. Fokus kemampuan Ekonomi Daerah mempunyai beberapa indikator yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan), dan produktivitas total daerah. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang

menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan tembakau. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.

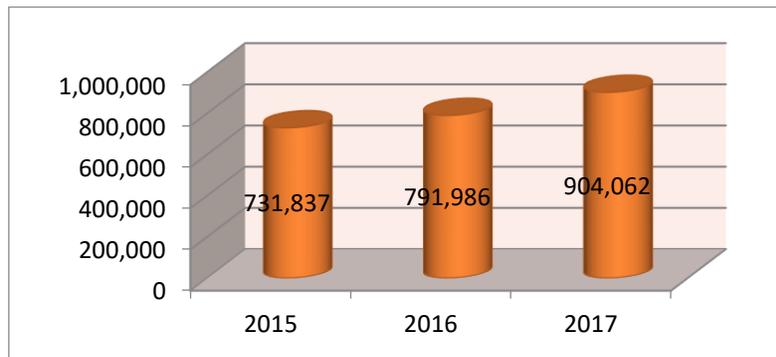
Tabel 2.128. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bln)	Rp/bln	731.837	791.986	904.062	n/a	n/a
2	Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (%)	%	49,37	45,66	45,16	n/a	n/a
3	Produktivitas total daerah (Rp. Juta/angka kerja)	Rp. Juta/ angka kerja	128,56	n/a	152,54	n/a	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2020

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

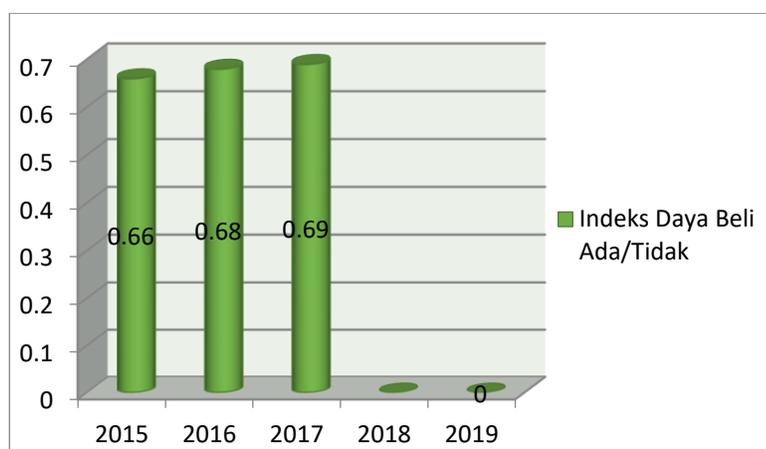
Pada gambar dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga per kapita setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.



Grafik 2.120. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2015-2017

2.1.4.1.2 Daya Beli

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada angka inflasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat secara umum dapat dipertahankan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang dikoordinasikan pelaksanaannya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota. Adapun gambaran indeks daya beli sebagai berikut :



Grafik 2.121. Indeks Daya Beli Kab. Pasuruan Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Daya Beli masyarakat mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 indeks daya beli di kabupaten pasuruan sebesar 0,66. Pada tahun 2016 indeks daya beli sebesar 0,68. Sedangkan pada tahun 2017 indeks daya beli sebesar 0,69. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita



masyarakat mengalami peningkatan sehingga kemampuan untuk melakukan konsumsi meningkat.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Sarana Prasarana Transportasi

Aspek daya saing daerah yang berkaitan dengan infrastruktur memiliki sasaran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Masukan/input yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur antara lain: (1) Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar, (2) Ketersediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi, (3) Ketersediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat.

Wilayah Kabupaten Pasuruan telah terhubung oleh jalan kabupaten sepanjang 2.315,89 km, dan didukung juga oleh adanya pembangunan jalan lingkungan. Selain itu konektivitas/aksesibilitas di wilayah Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalan nasional sepanjang 86,83 km dan jalan provinsi sepanjang 73,93 km. Guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa Timur, Pemerintah telah menetapkan proyek strategis pembangunan jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Pasuruan. Ruas jalan tol yang sudah selesai dibangun dan berfungsi adalah ruas Porong–Gempol, Gempol–Pandaan dan Gempol–Pasuruan, sedangkan yang masih dalam tahap penyelesaian adalah ruas Pandaan–Malang, dan Pasuruan–Probolinggo. Keberadaan jalan tol ini mendukung perkembangan wilayah, meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas orang, jasa dan barang. Selain pembangunan jalan tol, guna meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar arus distribusi orang dan barang, Pemerintah juga berencana untuk membangun lintasan KA *double track* lintas Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan Surabaya-Bangil-Banyuwangi. Sehingga ke depannya stasiun kereta api



Bangil bisa menjadi salah satu pusat angkutan barang maupun orang di wilayah Jawa Timur.

2.1.4.2.2 Jaringan Listrik

Saat ini energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama baik individu maupun badan usaha. Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

2.1.4.2.3 Ketersediaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku air minum di Kabupaten Pasuruan didapatkan dari mata air, air tanah, dan sumur dangkal. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan oleh masyarakat sendiri, SPAM perdesaan/HIPPAM dan PDAM, dimana pengembangan SPAM didukung oleh dana APBD Kabupaten, APBN maupun Hibah APBN/Pamsimas. Pengembangan sistem penyediaan air minum oleh PDAM seringkali terkendala pada ketersediaan sumber air baku, karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk pengairan irigasi maupun pelayanan SPAM perdesaan.

Pada tahun 2017–2019 Pemerintah melakukan pembangunan proyek strategis SPAM Regional Umbulan yang menggunakan Mata Air Umbulan (yang terletak di Kecamatan Winongan-Kabupaten Pasuruan) sebagai sumber air bakunya. Dari proyek SPAM Regional Umbulan ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui PDAM, mendapatkan jatah sebesar 410 l/dt yang akan digunakan untuk pengembangan pelayanan di Kecamatan Rejoso, Grati, Winongan, Pohjentrek, Kraton, Rembang, Bangil, Beji, dan Gempol.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.129. Penambahan Nilai Investasi Tahun 2015-2019

Tahun	Nilai Investasi Baru (Rp.)
2015	15.342.645.635.286
2016	17.093.259.895.706
2017	17.866.326.930.105
2018	9.655.229.121.273



Tahun	Nilai Investasi Baru (Rp.)
2019	18.944.471.131.733

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, 2020

Peningkatan Nilai Investasi menggambarkan besarnya investasi dari berbagai sektor yang masuk pada tahun 2017. Secara mutlak nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp. 17,87 Trilyun lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar Rp. 17,10 Trilyun.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan daerah maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja pembangunan ini perlu dilakukan untuk evaluasi sebagai masukan guna perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2020, akan disajikan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan sebuah alat yang digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mencapai hal tersebut perlu diidentifikasi perihal beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.97. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran Daerah	Permasalahan
1	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong	a. Kurangnya branding produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan, sehingga banyak produk unggulan yang diklaim oleh daerah lain.



No	Sasaran Daerah	Permasalahan
	perkembangan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none">b. Belum optimalnya kelembagaan dan kerja sama antar pelaku usaha ekonomi kreatif, sehingga kurang siap untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar.c. Kurangnya inovasi pemasaran produk-produk unggulan dan produk ekonomi kreatif Kabupaten Pasuruan.
2.	Meningkatnya kunjungan pariwisata	<ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya infrastruktur penunjang, pengelolaan kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta penyelenggaraan even-even wisata sehingga berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjungb. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata)c. Kurangnya kualitas dan kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata, serta lemahnya pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten/Kotad. Belum terakomodirnya pelaku ekonomi kreatif serta kurangnya kualitas SDM peningkatan inovasi usaha kreatif dan industri kreatif sebagai pendukung pengembangan pariwisata.
3.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum memenuhi kualitas yang ditetapkan (koperasi yang berkualitas 14,8%).b. Sebagian besar lembaga ekonomi masyarakat yang ada dalam kondisi mati suri, tidak memiliki kegiatan yang pasti.
4.	Meningkatnya Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan pemerintahan dan potensi desa belum optimalb. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi desa (BUMDes), dari 341 desa yang memiliki BUMDes baru 168 desa.c. Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam mendukung kegiatan ekonomi desa (BUMDes mandiri baru 50).
5.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Rantai distribusi pasar masih dikuasai tengkulak.b. Rendahnya nilai tawar petani terhadap pembeli/konsumen.c. Semakin menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.d. Masih rendahnya penghasilan masyarakat yang berusaha di sektor pertanian, utamanya pertanian tanaman pangan dan nelayan.



No	Sasaran Daerah	Permasalahan
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	a. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasuruan masih berpendidikan setara sekolah dasar (angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,02 tahun) b. Kurangnya ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berwiraswasta maupun mengisi posisi lowongan kerja yang ada.
7.	Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru	a. Tingginya angkatan kerja tidak diimbangi dengan kompetensi SDM pencari kerja yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja. b. Belum adanya kesesuaian antara Kurikulum SMK dengan Kompetensi SDM yang dibutuhkan (<i>Link and Match</i>) di dunia kerja. c. Naiknya angka pengangguran terbuka akibat pandemi covid-19 (dari 5,42% menjadi 6,24%).
8.	Meningkatnya Penanggulangan PMKS	a. Belum optimalnya verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). b. Belum terpadunya pelaksanaan program/kegiatan antar PD dalam penanganan PMKS.
9.	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda	Kurangnya personil pendukung penegakan Perda.
10.	Menurunnya Konflik Sara	Masih mudahnya masyarakat terhasut isu-isu terkait SARA.
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga lingkungan hidup. b. Masih banyak industri besar maupun industri rumah tangga yang langsung membuang limbahnya ke lingkungan tanpa proses pengolahan. c. Belum adanya pengolahan limbah B3 di Kabupaten Pasuruan. d. Kurangnya ketegasan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam menegakkan hukum lingkungan dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.
12.	Menurunnya Dampak Bencana	a. Semakin beragamnya jenis bencana, akibat perubahan iklim dan bentang alam. b. Masih banyak masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. c. Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan kesiapsiagaan masyarakat saat terjadinya bencana (desa tangguh bencana baru 12,5%). d. Penanggulangan banjir Kali Kedunglarangan, Kali Welang dan Kali



No	Sasaran Daerah	Permasalahan
		Rejoso.
13.	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	<ol style="list-style-type: none">Jalan dalam kondisi baik sebesar 81,23%.Masih banyak badan jalan yang tidak dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung jalan yaitu drainase jalan dan turap/plengsengan. Hal ini juga mempercepat laju kerusakan jalan.Penanganan badan/ruas jalan yang tidak menyeluruh atau sebagian, mengakibatkan kondisi jalan tidak mantap.
14.	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	<ol style="list-style-type: none">Masih sedikit ruas jalan maupun wilayah di Kabupaten Pasuruan yang terlayani angkutan umum orang maupun barang (aksesibilitas transportasi sebesar 7,91%).Semakin berkurangnya jumlah maupun trayek angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Pasuruan.Semakin berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, sehingga beralih menggunakan kendaraan pribadi.Kondisi angkutan umum yang rusak, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan umum.
15.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none">Semakin menurunnya jumlah dan debit sumber air (ketersediaan dan pemenuhan air baku sebesar 52,58%).Masih banyak sumber air yang dikuasai oleh perorangan, desa atau badan/lembaga, karena terletak di lahan pada wilayah pengusaannya.Semakin meningkatnya kerusakan wilayah pada daerah resapan air dan daerah aliran sungai.Semakin besarnya gap ketersediaan/debit air saat kemarau dan penghujan. Ketika kemarau krisis air/rawan air dan ketika penghujan krisis air bersih dan banjir.Penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan.
16.	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">Kurangnya pemahaman masing-masing Perangkat Daerah tentang Tugas dan fungsinya.Penilaian yang dilakukan masih sebatas kelengkapan administrasi, belum menyentuh pada isi substansi masing-masing dokumen.
17.	Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah	Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.



No	Sasaran Daerah	Permasalahan
18.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none">Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pelayanan publik.Perlunya peningkatan kompetensi SDM dengan bidang pelayanan yang diampu.Di beberapa wilayah akses dan sistem pelayanan publik masih sulit dijangkau masyarakat.
19.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	<ol style="list-style-type: none">Tidak adanya pembekalan maupun pembinaan pada calon ASN sebelum ditempatkan pada PD tertentu.Belum diterapkannya sanksi maupun reward, sebagai tolok ukur penilaian kinerja ASN.Kurang jelasnya tolok ukur kinerja ASN.
20.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">Belum optimalnya penerapan pola hidup bersih dan sehat (baru 51,50%).Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan dokter, menyebabkan pelayanan dasar kesehatan belum optimal.Masih tingginya angka kematian ibu (76,34).Pandemi covid-19 belum terkendali, dengan angka kematian sebesar 7,17% (di atas angka nasional 2,9%) .
21.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (PAUD dan Pendidikan Dasar), seperti Laboratorium IPA dan perlengkapannya, alat peraga pendidikan belum memenuhi SPM pendidikan dasar.Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di lembaga pendidikan yang berlokasi di daerah perdesaan.Masih terdapat guru dan kepala sekolah/madrasah yang belum memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV dan bersertifikat pendidik.
22.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Menurunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi covid-19.Naiknya harga beberapa kebutuhan pokok.
23.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">Masih banyak masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tidak layak huni (lingkungan permukiman layak huni sebesar 78,70%).Masih ada wilayah/kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan (10%).Belum semua wilayah terjangkau akses air bersih (85,79%) dan akses sanitasi (82,45%) tidak terlayani angkutan sampah.

No	Sasaran Daerah	Permasalahan
		d. Belum semua wilayah terlayani pengelolaan persampahan (baru 38%).
24.	Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang isu kesetaraan gender. b. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. c. Pemenuhan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas belum optimal.
25.	Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda	a. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan. b. Belum adanya pembinaan yang optimal secara berjenjang dan berkelanjutan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sebuah penyelenggaraan pembangunan daerah tentu tidak terlepas dari sebuah masalah baik terkait dengan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan secara umum.

Tabel 2.98. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Urusan Pembangunan Daerah

No	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
1	Pendidikan	a) Persentase Angka Putus Sekolah SD 2019 naik dibanding dengan 2018, dari 0,02% menjadi 0,03%. Sementara Angka Putus Sekolah SMP juga naik di tahun 2019 dari 0,02% menjadi 0,21% b) Angka Kelulusan tingkat SD pada tahun 2019 turun dibandingkan 2018, dari 100% menjadi 97,21%. Serta Angka Kelulusan SMP juga menurun di 2019 menjadi 97,33% yang mana di tahun sebelumnya adalah 100%. c) Masih adanya 4% atau sekitar 40 SD/MI yang belum memiliki cukup guru. Hal tersebut dikarenakan penempatan tenaga guru yang belum merata dan adanya guru yang telah memasuki masa pensiun dan belum ada penggantinya.
	Perpustakaan	a) Belum adanya bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



No	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
		b) Belum adanya penggalian, pengelolaan, dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno.
		c) Belum adanya penyusunan Bibliografi Daerah
		d) Koleksi bahan pustaka (cetak dan digital) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2	Kesehatan	a.) Masih Tingginya Angka AKI dan AKB
		b.) Masih tingginya Angka Prevalensi Gizi Butruk
		c.) Masih tingginya Prevalensi Penyakit Menular (TBC, HIV AIDS DAN KUSTA)
		d.) Masih rendahnya angka presentase ODF
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a) Disparitas pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Kabupaten Pasuruan.
		b) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengelolaan sanitasi lingkungan.
		c) Belum optimalnya pelayanan air minum perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
		d) Menurunnya persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 79,50% pada 2019.
4	Perumahan dan Permukiman	a) Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yang tidak dibarengi dengan penyediaan sarana prasarana lingkungan permukiman sehingga menyebabkan kawasan permukiman kumuh baik di perdesaan maupun perkotaan.
		b) Banjir di kawasan permukiman sepanjang Kali Mati yang memerlukan relokasi.
		c) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
	Perhubungan	a) Masih rendahnya kepemilikan KIR angkutan umum.
		b) Rendahnya ketersediaan pelayanan angkutan yang nyaman bagi masyarakat.
		c) Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi antar wilayah (baru mencapai 7,91%).
5	Komunikasi dan Informatika	a) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan, pemberdayaan serta pengembangan teknologi informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pasuruan.
		b) Terbatasnya Jumlah SDM TIK existing baik PNS maupun Tenaga Lepas yang memiliki keahlian dan Kemampuan pada spesifikasi bidang TIK.
		c) Kurangnya pembinaan lembaga profesi media massa di daerah.
		d) Adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal Komunikasi (Blank Spot) dikarenakan kondisi Geografisnya.



No	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
6	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a) Terjadinya konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok.
		b) Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan anak muda dan anak sekolah.
		c) Masih tingginya kasus pelanggaran perda.
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	a) Terbatasnya jaringan di desa terpencil dan dataran tinggi untuk mengakses data pelayanan administrasi kependudukan.
		b) Masih minimnya cakupan Kartu Identitas Anak (KIA).
		c) Rata - Rata Cakupan Penerbitan KTP el, Kartu Kelurga , akte Kelahiran dan Pencatatan Sipil lainnya masih belum 100%.
	Sosial	a) Belum optimalnya database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.
		b) Sumber daya manusia pelaku pembangunan Kesejahteraan Sosial belum memadai.
		c) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas.
		d) Pendampingan PMKS belum dapat dilakukan secara optimal.
	Kepemudaan dan Olahraga	a) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
		b) Belum adanya pembinaan yang optimal secara berjenjang dan berkelanjutan.
		c) Masih kurangnya pelestarian olahraga tradisional di kalangan masyarakat.
		d) Masih fluktuasinya jumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Pasuruan.
	Kebudayaan	a) Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal.
	Kearsipan	a) Masih adanya pergantian petugas arsip di unit kerja dikarenakan mutase/alih tugas sehingga perlu pembinaan dan pengawasan secara intensif.
		b) Belum memiliki data dan berkas arsip statis yang bernilai guna, sehingga perlu mengadakan sosialisasi terhadap perangkat daerah/oraganisasi yang memiliki arsip statis, menggali dan menghimpun arsip-arsip bersejarah mengenai Kabupaten Pasuruan.
7	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	a) Kurangnya jumlah ASN ditambah lagi dengan banyaknya ASN yang purna tugas.
		b) Kurang efektifnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian.



No	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	Statistik	<p>a) Belum adanya sistem data statistik yang terintegrasi.</p> <p>b) Belum adanya produk kompilasi data statistik sektoral lingkup kabupaten.</p>
	Keuangan	<p>a) Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak Daerah.</p> <p>b) Belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.</p> <p>c) Aset tanah dan bangunan masih banyak yang belum bersertifikat.</p> <p>d) Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada.</p>
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a) Kecenderungan jumlah kasus KDRT masih tinggi dari 39 kasus pada 2018 naik menjadi 55 pada tahun 2019.</p> <p>b) Jumlah dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum sepenuhnya terselesaikan.</p> <p>c) Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih belum optimal.</p> <p>d) Masih belum optimalnya peran dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT – PPA).</p> <p>e) Pemenuhan hak hak anak dan optimalisasi forum anak ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih kurang.</p>
9	Pangan	<p>a) Masih rendahnya penguasaan sistem pemasaran on line oleh petani/peternak.</p> <p>b) Kurang mutakhirnya data bidang peternakan dan pangan.</p> <p>c) Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan makin berkurangnya lahan HMT.</p> <p>d) Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya pertanian.</p>
10	Lingkungan Hidup	<p>a) Menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan karena tidak terjaganya catchment area maupun daerah aliran sungai.</p> <p>b) Masih adanya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan.</p> <p>c) Berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun.</p> <p>d) Belum optimalnya pengelolaan LH baik oleh Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>e) Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.</p> <p>f) Menurunnya kualitas udara akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan dan sektor transportasi.</p>
11	Penanggulangan Bencana Daerah	<p>a) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan</p>



No	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
		air/kekeringan, angina puting beliung, kebakaran hutan dan lahan).
		b) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana.
		c) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana.
12	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a) Masih rendahnya daya saing dan nilai tawar badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha lainnya.
		b) Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.
		c) Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi).
		d) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro tentang pentingnya legalitas usaha.
		e) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro tentang pentingnya berjejaring /berasosiasi antar pelaku usaha.
		f) Kapasitas SDM pengelola koperasi di Kabupaten Pasuruan yang kurang memadai dan tidak merata.
		g) Masih lambatnya proses regenerasi dalam koperasi.
		h) Masih kurangnya skema pembiayaan yang berpihak pada koperasi dan usaha mikro.
		i) Manajemen pengelolaan usaha mikro yang masih tradisional.
		j) Belum optimalnya pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan usaha dan pengembangan produk.
	b) Pemahaman masyarakat yang belum sesuai terhadap konsep pemberdayaan.	
		c) Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri belum maksimal.
		d) Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksebilitas beberapa data tarik wisata kurang mendukung.
		e) Virus corona atau Covid-19 yang mewabah di seluruh penjuru negeri memengaruhi industri pariwisata.
13	Pertanian	a) Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan. Beralihnya fungsi lahan pertanian akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan.
		b) Menejemen usaha tani komoditas unggulan belum sepenuhnya dilakukan secara profesional sehingga belum bisa menjamin Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk.
		c) Kelembagaan petani masih belum optimal sehingga perlu diberikan bimbingan dan pendampingan.
		d) Jaringan pemasaran belum sepenuhnya bisa menyalurkan distribusi produk pertanian kepada



No	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
		konsumen. f) Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian.
14	Perikanan	a) Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang kurang bertanggungjawab karena penggunaan alat penangkap ikan terlarang. b) Overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat. c) Sebagian besar pelaku usaha perikanan mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan ketrampilan usaha perikanan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya. d) Armada tangkap masih didominasi oleh nelayan kecil dengan alat tangkap dan armada yang relatif sederhana dan keterbatasan kapasitas prasarana tambat labuh untuk nelayan kecil. e) Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung yang menghambat distribusi produk perikanan. f) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan daerah dengan pelaku usaha/perusahaan perikanan. g) Lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka pengembangan usaha. h) Kurangnya kepatuhan penerapan standar mutu pada usaha perikanan budidaya sesuai dengan kaidah penanganan yang baik dan benar dalam pemenuhan food safety dan jaminan mutu usahanya.
15	Tenaga Kerja	a) Kompetensi yang dimiliki pencari kerja masih terbatas. b) Pelatihan yang disediakan tidak sesuai dengan pasar kerja. c) Harmonisasi hubungan industrial yang kurang.
16	Perindustrian	a) Belum adanya rencana induk pengembangan industri kabupaten (RPIK) untuk pedoman program pengembangan IKMB. b) Nilai UMK Kab. Pasuruan cukup tinggi sehingga investor mempertimbangkan hal tersebut untuk berinvestasi dengan membandingkan UMK daerah lain yang lebih rendah. c) Keterbatasan SDM Penerima sebagai ujung tombak pelayanan. d) Masih terdapat IKM yang memiliki skill rendah. e) Kesempatan mengikuti promosi dagang terbatas.



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Pasuruan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2022.

Kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian yang tak terlepaskan dari pembangunan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, target tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Pada awal tahun 2020, pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) membuat kondisi perekonomian global memburuk dan juga memberikan dampak pada kondisi ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan saat ini. Dampak dari Covid-19 dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19 dan membuat aktivitas perekonomian menurun. Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 baik pusat maupun daerah telah melakukan langkah luar biasa yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter.

Kondisi pandemi pada tahun 2021 diprediksi membaik sehingga kondisi perekonomian diperkirakan mulai beranjak bangkit. Prediksi perbaikan ini didukung dengan proses vaksinasi yang telah dimulai pada awal tahun 2021. Kebijakan ekonomi daerah yang juga merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodir dan mengelola sumberdaya yang

ada di Kabupaten Pasuruan. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan disusun dengan berpedoman terhadap kondisi ekonomi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Pasuruan. Kondisi ekonomi Kabupaten Pasuruan ditunjukkan melalui beberapa indikator sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kondisi dan Perkiraan Perekonomian
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2022

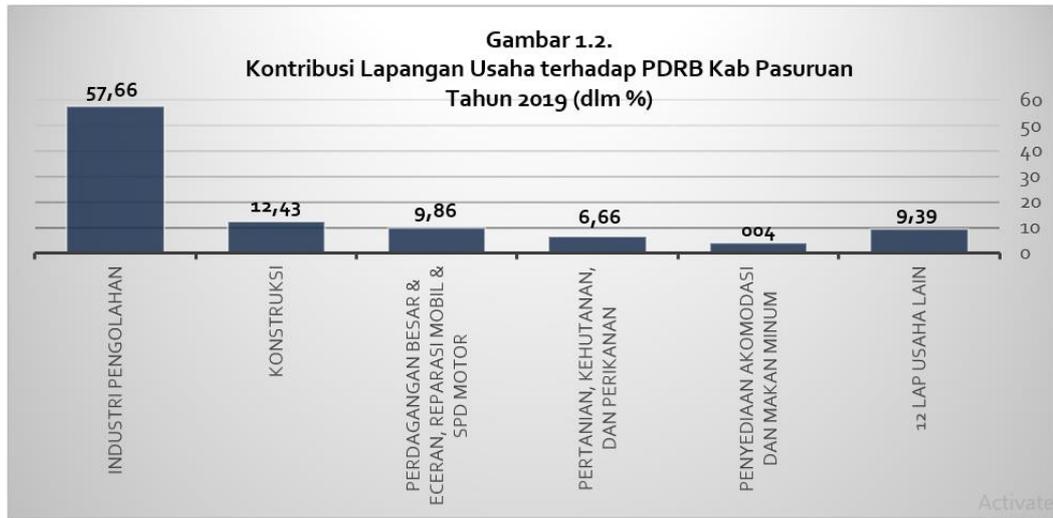
Indikator	2016	2017	Kondisi			Perkiraan	
			2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,44	5,72	5,73	5.83	-2,03	4,5 – 5,5	5,73 – 6
PDRB ADHB (Rp. Milyar)	144.882,8	124.879,8	135.866,0	145.875,8	145.592,0	151.415,0	160.500,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,18	4,97	5,94	5.22	6,24	5,04	5,01
Inflasi (%) :							
- Laju indeks implisit PDRB (inflasi tingkat produsen)	3,98	2,82	2,91	1,45	1,87	1,5 - 2	1,5-2
- Inflasi Kota Probolinggo	n/a	3,0	2,18	1,99	1,88		
Kemiskinan (%)	10,57	10,34	9,45	8.68	9,26	9,40	9,25

“Pada level Jawa Timur dan Nasional, pertumbuhan ekonomi juga berkontraksi sebesar 2,39 persen dan minus 2,07 persen dalam tahun 2020. Dengan persentase yang sudah terlampir, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 berada di atas angka Jawa Timur dan Nasional,” Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebesar 5,83%, terdapat



percepatan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,75%. Berdasarkan data sangat sementara BPS Kabupaten Pasuruan, pertumbuhan ekonomi tersebut terbesar dipengaruhi oleh lapangan usaha : (1) Transportasi dan Pergudangan tumbuh 7,42%, (2) Informasi dan komunikasi tumbuh 7,10%; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 6,94%; (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,65% ; (5) Jasa Pendidikan tumbuh 6,54% ; (6) Industri Pengolahan tumbuh 6,46%; (7)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,02% ; (8) Jasa Perusahaan tumbuh 5,91% ; (9) Real Estate tumbuh 5,53% ; serta 8 (delapan) lapangan usaha lain tumbuh rata-rata 3,13%.

Sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dapat dijelaskan berdasarkan seberapa besar kontribusi setiap lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Volume PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2019 atas dasar harga berlaku (data sangat sementara) mencapai Rp.147,977 Trilyun. Secara berurutan kontribusi lapangan usaha mulai dari yang terbesar yaitu : (1) Industri Pengolahan 57,55% ; (2) Konstruksi 12,86%; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,82%; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,63%; (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,93%, serta (6) dua belas lapangan usaha lainnya 9,21%.



Perekonomian nasional hingga saat ini masih diwarnai oleh pandemi Covid-19. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,07 persen (yoy). Pemerintah melalui PP No. 23/2020 menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi, mempertahankan, meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Perekonomian nasional secara bertahap mulai menggeliat kembali di triwulan I-2021 yang tercatat tumbuh sebesar -0,74 persen (yoy). Angka tersebut tumbuh positif bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi triwulan IV-2020.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berada pada kisaran 4,1 persen – 5,1 persen (yoy). Pemerintah menetapkan berbagai stimulus dan relaksasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kembali aktivitas ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi Daerah haruslah selaras dengan arah kebijakan ekonomi Nasional. Dengan mempertimbangkan kondisi makro dan fiskal pada 2022, maka fokus arah kebijakan ekonomi nasional akan diarahkan pada empat hal, yaitu kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun rencana pembangunan masih akan melanjutkan tujuh prioritas pembangunan nasional dengan 10 *Major Project* yakni:

1. Transformasi Digital;
2. Peningkatan Peran UMKM;
3. Kawasan Industri dan 31 Smelter;
4. Pengembangan 10 Destinasi Wisata;
5. *Food Estate*;
6. Energi Terbarukan;
7. Major Project di Wilayah Papua;
8. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
9. Sistem Kesehatan Nasional;
10. Ibu Kota Negara.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 difokuskan pada penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kondisi penyebaran pandemi Covid-19 maka perlu dipersiapkan mitigasi kebijakan

ekonomi yang responsive dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, *safe and secure* dari pandemi melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Arah kebijakan ekonomi makro daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 diantaranya:

1. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa melalui:
 - a. BUMDesa;
 - b. Koperasi Masyarakat.
2. Penguatan Potensi Unggulan Desa melalui sektor:
 - a. Pertanian;

- b. Pariwisata;
- c. Perdagangan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total



Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu dua tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan untuk mendanai pembangunan daerah pada dua tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang termasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Pasuruan meliputi: belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja operasi). Sementara itu, penyusunan kebijakan keuangan daerah tahun 2022 juga memperhatikan kegiatan ekonomi yang melemah akibat dampak dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2021 ini.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 antara lain: Pada tahun 2022, pendapatan daerah dapat bersumber dari:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:



- a. Pembenahan manajemen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha.
2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 4. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya:
 - a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah;
 - c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.
 5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pasuruan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;



2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan aset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan mempermudah birokrasi guna mempermudah investasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat, transfer Pemerintah Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun proyeksi/target Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi Tahun (2019)	Realisasi Tahun (2020)
1.1	Pendapatan asli daerah	650.889.114.689,79	700.081.904.384,41
1.1.1	Pajak daerah	364.181.321.493,99	360.032.334.142,91
1.1.2	Retribusi daerah	51.893.891.085,33	34.236.693.406,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	230.159.142.105,47	301.088.157.739,50
1.2	Dana perimbangan	1.889.565.990.493,00	1.755.653.880.426,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	270.400.507.183,00	271.830.390.452,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.218.496.788.000,00	1.103.294.454.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	400.668.695.310,00	380.529.035.974,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	828.353.439.395,00	718.144.911.050,00



No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi Tahun (2019)	Realisasi Tahun (2020)
1.3.1	Hibah	158.508.091.610,00	121.548.404.467,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	230.460.466.285,00	171.461.978.633,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	417.525.416.000,00	381.611.699.200,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	21.859.465.500,00	43.522.828.750,00
Jumlah Pendapatan Daerah		3.368.808.544.577,79	3.173.880.695.860,41

Sumber: BKD Kabupaten Pasuruan, 2021



Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi /Target pada Tahun (2023)
1	PENDAPATAN	3.277.918.264.191,00	3.223.613.746.875,96	3.296.103.057.301,28
1.1	Pendapatan Asli Daerah	724.005.471.953,00	696.001.128.850,03	721.984.115.692,16
1.1.1	Pajak daerah	420.514.644.254,00	421.808.713.012,77	438.681.061.533,29
1.1.2	Retribusi daerah	36.792.186.548,00	32.317.963.251,88	33.125.912.333,18
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	262.043.881.146,00	237.219.692.580,38	245.522.381.820,69
1.2	Pendapatan Transfer	2.386.634.192.238,00	2.396.499.018.025,93	2.443.005.341.609,12
1.2.1	Pendapatan Transfer	2.177.556.176.738,00	2.187.421.002.525,93	2.233.927.326.109,12



No	Uraian	Jumlah		
		Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi /Target pada Tahun (2023)
	Pemerintah Pusat			
1.2.1.1	Dana perimbangan	1.758.924.894.738,00	1.804.985.028.525,93	1.851.491.352.109,12
1.2.1.1.1	1. Dana Transfer Umum	1.400.212.791.000,00	1.427.004.772.525,93	1.473.511.096.109,12
1.2.1.1.1.1	a. Dana Bagi Hasil	267.104.765.000,00	293.896.746.525,93	303.042.959.525,93
1.2.1.1.1.2	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.133.108.026.000,00	1.133.108.026.000,00	1.170.468.136.583,19
1.2.1.1.2	2. Dana Transfer Khusus	358.712.103.738,00	377.980.256.000,00	377.980.256.000,00
1.2.1.1.2.1	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	71.862.744.738,00	91.130.897.000,00	91.130.897.000,00
1.2.1.1.2.2	b. Dana Alokasi Khusus	286.849.359.000,00	286.849.359.000,00	286.849.359.000,00



No	Uraian	Jumlah		
		Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi /Target pada Tahun (2023)
	Non Fisik			
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	52.967.720.000,00	16.772.412.000,00	16.772.412.000,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	365.663.562.000,00	365.663.562.000,00	365.663.562.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.078.015.500,00	209.078.015.500,00	209.078.015.500,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	187.300.000.000,00	187.300.000.000,00	187.300.000.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	21.778.015.500,00	21.778.015.500,00	21.778.015.500,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	167.278.600.000,00	131.113.600.000,00	131.113.600.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.165.000.000,00	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-



No	Uraian	Jumlah		
		Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi /Target pada Tahun (2023)
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	131.113.600.000,00	131.113.600.000,00	131.113.600.000,00

Sumber: BKD Kabupaten Pasuruan, 2021



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja daerah; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah.



Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi makakebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
5. Belanja daerah berupa belanja langsung Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;



6. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
8. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
9. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya;
10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
11. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
12. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).



Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:



Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi Tahun (2019)	Realisasi Tahun (2020)
2	BELANJA	3.244.331.996.857,72	3.183.636.256.379,82
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.877.145.234.211,00	1.974.230.642.609,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.025.912.267.478,00	997.301.803.350,00
2.1.4	Belanja Hibah	158.852.439.992,00	126.307.448.453,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.531.955.000,00	34.784.875.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	45.764.322.634,00	43.341.894.789,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	605.005.926.200,00	600.400.751.456,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	11.078.322.907,00	172.093.869.561,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.367.186.762.646,72	1.209.405.613.770,82
2.2.1	Belanja Pegawai	110.228.445.456,00	193.599.413.742,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	809.930.382.474,23	677.193.347.941,52
2.2.3	Belanja Modal	447.027.934.716,49	338.612.852.087,30

Sumber: BKD Kabupaten Pasuruan, 2021



Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi pada Tahun (2023)
5	BELANJA	3.453.772.772.839,00	3.295.356.982.792,96	3.367.846.293.218,28
5.1	BELANJA OPERASI	2.287.520.662.946,00	2.199.275.216.575,41	2.245.724.695.071,32
5.1.1	Belanja Pegawai	1.174.408.661.531,00	1.154.029.309.992,33	1.211.730.775.491,95
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	876.631.351.306,00	849.498.525.299,18S	828.246.538.295,47
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	195.313.037.177,00	152.392.381.283,90	157.392.381.283,90
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	41.167.612.932,00	43.355.000.000,00	48.355.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	500.489.182.930,00	431.360.357.318,83	427.634.750.258,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	190.000.000,00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.595.044.190,00	-	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.300.297.759,00	-	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	231.991.081.877,00	-	-



No	Uraian	Jumlah		
		Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi pada Tahun (2023)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	839.013.200,00	-	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	573.745.904,00	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	640.762.926.963,00	652.805.897.898,73	659.486.847.888,96
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	40.207.474.323,00	41.704.880.894,73	42.287.979.645,34
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	600.555.452.640,00	611.101.017.004,00	617.198.868.243,62
SURPLUS/DEFISIT		(175.854.508.648,00)	(98.534.731.442,92)	(71.743.235.917,00)

Sumber: BKD Kabupaten Pasuruan, 2021



3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2021 di Kabupaten Pasuruan antara lain diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin dapat ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu;
2. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis misalnya belanja tidak terduga maupun dana cadangan bencana alam; dan
3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (prudential).
4. Melakukan efisiensi kegiatan sehingga dihasilkan kegiatan yang benar-benar mendukung program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan di tahun 2018-2023 serta terhindar dari defisit yang berlebih.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:



Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah	
		Realisasi Tahun (2019)	Realisasi Tahun (2020)
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27
3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.000.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27
	SELISIH LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	302.450.746.781,27	302.450.746.781,27

Sumber: BKD Kabupaten Pasuruan, 2021



Tabel 3.6
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023
(Berdasarkan Struktur pada PP No. 12 Tahun 2019)

No	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi pada Tahun (2023)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-



No	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi pada Tahun (2023)
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.036.093.016,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.036.093.016,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-



No	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (2022)	Proyeksi pada Tahun (2023)
	PEMBIAYAAN NETTO	175.963.906.984,00	71.743.235.917,00	71.743.235.917,00
	SELISIH LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00

Sumber: BKD Kabupaten Pasuruan, 2021



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada hasil analisis terhadap: 1) Hasil evaluasi capaian pembangunan, 2) Identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, dan 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Penentuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan diharapkan lebih komprehensif dalam mengambil prioritas pembangunan yang pada akhirnya perencanaan pembangunan dapat menjadi solusi dan jawaban atas permasalahan yang ada di daerah.

Kabupaten Pasuruan menentukan prioritas dan sasaran pembangunan untuk menjadi fokus pembangunan daerah jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur guna menjaga keselarasan dan konsistensi pembangunan dari level pusat hingga ke level daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran



terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah “**Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing**”. Mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, maka telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan Melalui Penguatan Kelembagaan Sosial dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Desa Berbasis Masyarakat Dengan Cara Mempermudah Aspek Legal dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan meliputi UMKM/IKM, koperasi, pertanian dan pariwisata melalui penguatan kelembagaan desa serta mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah ekonomi. Meningkatkan nilai tambah dilakukan melalui peran pemerintah daerah dalam bentuk legalitas, pelatihan, penggunaan teknologi tepat guna sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah.



Misi 2. Melaksanakan Pembangunan Berbasis Keluarga dengan Memanfaatkan Modal Sosial Berbasis Religiusitas dan Budaya, Guna Mewujudkan Kohesi Sosial.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dengan memperkuat modal sosial (*social capital*) yaitu mewujudkan kekuatan dari dalam keluarga (kohesi sosial) sehingga akan tercipta imunitas sosial terhadap gangguan sosial dengan memperkuat religiusitas dan budaya.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Segenap Potensi Sumber Daya Alam secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan Sebagai Bentuk Konservasi Lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Pembangunan diprioritaskan pada upaya menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi. Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Pasuruan dimanfaatkan dalam jangka panjang dan tidak merusak. Pemanfaatan SDA tersebut harus diimbangi dengan konservasi lingkungan sekaligus mengatasi masalah bencana alam yang ada di Kabupaten Pasuruan serta sebagai pendukung keberhasilan pembangunan di berbagai sektor (Infrastruktur). Sektor-sektor produktif dan unggulan Kabupaten Pasuruan akan semakin bersaing ketika didukung dengan infrastruktur wilayah yang baik. Sehingga misi ini mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam rangka daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur.

Misi 4. Memperkuat dan Memperluas Reformasi Birokrasi yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel, dan Demokratis yang Berbasis pada Teknologi Informasi.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis melalui reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik mengarah pada pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna memangkas jarak, waktu dan biaya (patologi birokrasi). Keterbukaan informasi publik akan dilakukan guna mendukung pemerintahan yang transparan. Melalui TI, masyarakat akan didorong agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Misi 5. Meningkatkan Pelayanan Dasar Terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan-Pendidikan Formal dan Non-Formal Sebagai Wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan.

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dengan memperkuat modal sosial (*social capital*) yaitu mewujudkan kekuatan dari dalam keluarga (kohesi sosial) sehingga akan tercipta imunitas sosial terhadap gangguan sosial dengan memperkuat religiusitas dan budaya disertai dengan penyediaan layanan kesehatan dan permukiman serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pasuruan yang religius, cerdas dan mandiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan integrasi pendidikan formal dan non formal.

Berdasarkan kelima misi tersebut, adapun uraian misi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1. Hubungan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

VISI: Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing	
MISI	TUJUAN/SASARAN
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.	Tujuan 1.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor- sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kemandirian Desa
	Sasaran 1.1.5. Meningkatnya Ketahanan Pangan



VISI: Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing	
MISI	TUJUAN/SASARAN
	Tujuan 1.2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	Sasaran 1.2.1. Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru
	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
2.	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
	Tujuan 2.1. Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik



VISI: Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing	
MISI	TUJUAN/SASARAN
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.	Tujuan 3.1. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam menangani bencana
	Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
	Tujuan 4.1. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif
	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja



VISI: Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing	
MISI	TUJUAN/SASARAN
	Penyelenggaraan Instansi Pemerintah
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan-pendidikan formal dan non-formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.	Tujuan 5.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat
	Sasaran 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat
	Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000 Pemuda)



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, yang diselaraskan dengan kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2022 dan bersifat mandatory, serta memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 harus berdasarkan arah kebijakan / prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Prioritas Pembangunan juga mengacu pada program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dianggap masih relevan dengan kondisi saat ini. Adapun isu strategis yang digunakan sebagai dasar perencanaan

pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2. Isu Strategis Kabupaten Pasuruan 2022

No.	Isu Strategis Pembangunan
1.	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Dan Penguatan Kebal Covid-19
2.	Optimalisasi Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa
3.	Optimalisasi Fungsi Koperasi Sebagai Penyanggah Ekonomi Masyarakat
4.	Peningkatan Wirausaha Mandiri Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital
5.	Masih Adanya Disparitas Wilayah
6.	Penguatan sektor pertanian dan pariwisata dalam percepatan pemulihan ekonomi
7.	Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro

4.2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022, serta memperhatikan Prioritas Nasional dan Provinsi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, maka ditentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan 2022

No.	Isu Strategis Pembangunan
1.	Pembangunan Potensi Unggulan Desa
2.	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa



No.	Isu Strategis Pembangunan
3.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pendukung Potensi Unggulan
4.	Penguatan Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal
5.	Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan

4.2.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Global, Nasional dan Provinsi

A. Pandemi Corona Virus Disease 2019

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization.) Pandemi ini terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi ini telah menjangkiti banyak manusia, serta menimbulkan korban jiwa. Pandemi ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global. Menurut data *Congressional Research Service* (CRS), pandemi dapat memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0% menjadi 6,0% pada tahun 2020. Artinya virus ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Penurunan ekonomi akibat dari pandemi ini meningkatkan risiko resesi ekonomi global dengan meningkatnya pengangguran. Dalam jangka pendek prospek pemulihan ekonomi dunia diperkirakan tertahan seiring meluasnya COVID-19, yang memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan daerah ke depan harus mempersiapkan strategi yang mengarah terhadap



penanggulangan pandemic Covid-19, pemulihan, penguatan, dan peningkatan ekonomi, serta pelayanan dasar lainnya.

B. Telaah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan nasional, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan dokumen RKP tahun 2022. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024, visi yang dirumuskan adalah **“Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, upaya mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima)



arahan utama sebagai strategi yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Penjabaran dari 5 (lima) arahan utama tersebut adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Strategi pencapaian pembangunan SDM melalui peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Strategi pencapaian pembangunan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi dan pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan energi ketenagalistrikan, dan pengembangan teknologi informasi

3. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.



Strategi pelaksanaan penyederhanaan regulasi melalui penerapan pendekatan *Omnibus Law*, dan pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

Strategi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan e-government, reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan dan kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi pelaksanaan transformasi ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, serta penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2022, tujuh agenda pembangunan tetap dipertahankan menjadi prioritas nasional, sehingga prioritas nasional tahun 2022 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;



4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020 – 2024, maka RKP Tahun 2022 mengusung tema **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, etahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah :



1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Pengembangan wilayah tahun 2022 diarahkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta tetap mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prosek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan di tahun 2021, untuk lepas dari tekanan dan mempercepat pemulihan dampak Covid-19, pengembangan wilayah pada tahun 2022 ditujukan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di berbagai wilayah terdampak serta percepatan transformasi sosial ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan kompetitif wilayah, serta melalui percepatan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah dan strategi pemerataan yang diperkuat dengan mitigasi bencana dan pengurangan resiko. Strategi pengembangan wilayah tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan, koridor pemerataan, dan sebaran lokasi resiko bencana.



Pemantapan pemulihan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, pemulihan dan peningkatan daya beli, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, penguatan konektivitas antar wilayah, serta peningkatan intensitas perdagangan antar wilayah.

Sementara itu, upaya untuk menjamin pemerataan antar wilayah dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, memperkuat pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan menjamin hak-hak dasar masyarakat. Percepatan pemerataan dilakukan dengan meningkatkan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) agar terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, disertai dengan mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif di kawasan 3T. Fokus penanganan 3T adalah kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan terluar.

Pada tahun 2022, strategi pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah, yaitu :

- **Pertama**, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus yaitu KEK Kendal, KEK Singhasari, KEK Tanjung Lesung, serta dua kawasan industri manufaktur direktif Presiden yaitu KI Batang dan KI Subang yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa.
- **Kedua**, meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung



Lesung sesuai rencana induk kawasan pariwisata yang telah disusun.

- **Ketiga**, mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa.
- **Keempat**, mengendalikan konservasi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan lumbung-lumbung beras.
- **Kelima**, meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata.
- **Keenam**, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional wilayah Jawa-Bali.
- **Ketujuh**, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.

Adapun strategi pemerataan pembangunan wilayah Jawa-Bali akan dilaksanakan dengan empat langkah :

- **Pertama**, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara.
- **Kedua**, simultan dengan langkah pertama, mendorong pembangunan kota-kota kecil dan sedang menjadi pusat distribusi dan industri wilayah skala kecil-sedang, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. Pengendalian skala industri disesuaikan dengan daya dukung wilayah yang relatif berbukit dan banyak terdapat ekosistem karst.



- **Ketiga**, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu petani dan UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh input dengan lebih mudah.
- **Keempat**, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam peningkatan daya saing daerah.

Sedangkan arah penyediaan pendanaan pembangunan nasional tahun 2022 ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pelaksanaan vaksinasi, menjaga daya beli masyarakat, dan revitalisasi ekonomi domestik. Selain itu, penyediaan pendanaan akan difokuskan untuk mendorong transformasi yang dilakukan melalui reformasi menyeluruh, menjaga agenda pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan investasi publik yang memiliki dampak langsung untuk menjaga momentum pembangunan, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

C. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mewujudkan pembangunan yang bersinergi dan berkualitas baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Adapun visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana telah tertuang dalam



dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, untuk tahun 2022 adalah :

”Penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah untuk menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”



Sedangkan arah kebijakan pembangunan yang merupakan keterpaduan pembangunan antarsektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Jawa



Timur, didapatkan prioritas lokasi penanganan kewilayahan Provinsi Jawa Timur dengan fokus Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pasuruan.

Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru, dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara. Pusat-pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud.

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Adapun pembagian klaster

kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur, terbagi ke dalam 8 (delapan) klaster. Adapun Kabupaten Pasuruan termasuk dalam Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

Arahan pengembangan pada Klaster Metropolitan adalah:

- a. Aspek Sosial: Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah industrialisasi. Di daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai macam suku yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika, demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan.



Program dan kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Di daerah klaster Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu, lintas dan antar sektor.

- b. Aspek Ekonomi : Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang; Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat



inflasi daerah; dan

- c. Aspek Infrastruktur : Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stake holder.

Selain itu, dalam rencana pengembangan kawasan strategis prioritas pembangunan ekonomi Jawa Timur, **Kabupaten Pasuruan termasuk dalam beberapa kawasan rencana, yaitu : kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian terpadu berbasis korporasi, dan kawasan agropolitan klaster Bromo-Tengger-Semeru (BTS).**

D. Telaahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Salah satu peraturan perundangan yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana induk ini merupakan upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, arah pembangunan nasional telah berorientasi pada



penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan dan peningkatan keterkaitan dengan sentra-sentra produksi utama di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah sejalan dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan umum dalam RPJMD 2019-2024, dan RTRW 2011-2031 khususnya terkait peningkatan konektivitas dan sistem transportasi antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat dinamika kewilayahan yang mempengaruhi perubahan arah pengembangan wilayah dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, maka akan dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan RIPPE Jawa Timur.

Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:



- a. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
- b. Identifikasi simpul- simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
- c. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional; dan
- d. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur dilakukan untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, namun dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

Terdapat dua pendekatan yang akan diterapkan dalam percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu pendekatan untuk pusat pertumbuhan yang telah ada dan pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Pendekatan pusat pertumbuhan yang telah ada memerlukan penguatan infrastruktur, dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah



memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, yang dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pendekatan ini diterapkan untuk:

- a. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban dengan fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat capital-intensive serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan hub arus barang dan orang. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila didorong dengan pengembangan kawasan pendukung yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan. Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan, meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata;
- b. **Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, meliputi Kabupaten Pasuruan**, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Probolinggo dengan ***fokus utama pada sektor pariwisata, dan agroproduksi dan agroindustri***. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru didorong dengan pengembangan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan; dan
- c. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk,



Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS) merupakan kawasan yang terdiri atas wilayah inti dan kawasan pendukung yang ada di sekitarnya, dimana secara administrasi terdiri atas 3 (tiga) kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan.

Sektor unggulan di Kawasan BTS adalah potensi-potensi wisata yang beragam dan menyebar, baik wisata alam dan wisata budaya misalnya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol, seperti keberadaan flora langka yang menarik dan endemic, ekosistem yang khas gunung berapi yang aktif, habitat satwa migran, fenomena/gejala alam yang unik dan menakjubkan seperti kaldera di dalam kaldera, ranu/danau yang sangat luas dan indah di atas pegunungan, keunikan Kaldera Tengger dengan laut pasirnya, budaya dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger. Pemandangan kawah Bromo yang indah dan mempesona disaksikan secara dekat maupun dari titik penanjakan, kemudian adanya lautan pasir dan padang savanna yang mempesona.

Di bidang Agropolitan memiliki panorama alam yang unik, seperti lahan pertanian di Tosari, Argosari, dan lain-lain. Sektor budaya memiliki event tradisi budaya yang melembaga di masyarakat (terutama masyarakat Tengger), seperti: Karo, Yadnya Kasodo, Entas-entas, Unan-unan, Pujan Mubeng, dan lain-lain. Permukiman Suku Tengger yang memiliki ciri khas



khusus sehingga bisa dijadikan sebagai objek tujuan wisata yang memiliki arsitektur vernacular. Selain itu fasilitas rekreasi yang beraneka ragam seperti taman rekreasi, kolam renang, tempat berkemah, lapangan golf, dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan dapat membantu mengurangi kelebihan pengunjung di TN BTS, dimana di beberapa tempat telah melebihi kapasitas daya dukung lahan.

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berdampak pada diprioritaskannya program-program pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur maupun program peningkatan kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata telah menjadi prioritas dalam perencanaan K/ L.

Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata, merupakan konsep yang tepat terutama terkait upaya pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Program agropolitan/minapolitan yang mendukung percepatan Kawasan BTS memiliki berapa sasaran kegiatan diantaranya: Pengembangan Agropolitan Poncokusumo-Tirtoyudo - Ampelgading, Pengembangan Agropolitan Wajak Tumpang-Jabon - Kabupaten Malang, Sub Terminal Agrobis - Kabupaten Malang, Minapolitan Sendangbiru - Kabupaten Malang, Pengembangan Agropolitan Senduro-Candipuro- Pasrujambe-Gucialit - Kabupaten Lumajang, Pengembangan Agropolitan Sukapura-Lumbang-Sumber - Kabupaten Probolinggo, Pengembangan Agropolitan



Krucil - Kabupaten Probolinggo, ***Pengembangan Agropolitan Tosari-Tutur-Puspo - Purwosari - Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Wonosari - Andonosari - Kabupaten Pasuruan, Penataan dan Pengembangan kawasan minapolitan - Kabupaten Pasuruan, Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) - Kabupaten Pasuruan.***

E. Telaahan Kebijakan RTRW Kabupaten Pasuruan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan meliputi :

1. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten.
3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah memuat: kebijakan pengembangan struktur ruang, strategi pengembangan pusat

pelayanan, dan strategi pengembangan prasarana wilayah. Strategi pengembangan pusat pelayanan memuat :

1. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri.
2. Meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan.
3. Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu jalan tol dan pusat industri.
4. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
5. Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dalam lampiran Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, tertuang tahapan pelaksanaan pembangunan (indikasi program). Beberapa indikasi program yang berkaitan dengan tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 antara lain:

- a. Pengembangan agrowisata dan sistem agropolitan pada kawasan potensial.
- b. Pengembangan pusat desa berhierarki.
- c. Pengembangan produk unggulan perdesaan.
- d. Pengembangan kawasan lahan abadi pertanian pangan.
- e. Pengembangan sistem minapolitan pada kawasan potensial.

4.2.4. Sasaran dan Tema Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan atau Tema Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 ditentukan dengan memperhatikan dan mengacu pada Tema RKP Tahun 2021



dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2013, RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 dan dokumen proyek strategis nasional (Perpres Nomor 80 Tahun 2019), serta eksistensi kondisi dan potensi daerah Kabupaten Pasuruan, memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis (*khususnya terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional*), rancangan kerangka ekonomi kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2022, maka tema/fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 adalah:

“Percepatan Pengembangan Wilayah dan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa”.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 di tahun ke-empat penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan Rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Keterkaitan Usulan Tema RKP 2022, Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2022 dengan Tema RKPD Kabupaten Pasuruan 2022

 <p>Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural</p>	 <p>Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro</p>	 <p>Percepatan Pengembangan Wilayah dan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa</p>
---	---	---

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Potensi Unggulan Desa;
2. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pendukung Potensi Unggulan;
4. Penguatan Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal; dan
5. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya keselarasan antara tema pembangunan dengan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022
1	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	Pembangunan Potensi Unggulan Desa
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan	
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat	
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kemandirian Desa	
	Sasaran 1.1.5. Meningkatnya Ketahanan Pangan	
	Sasaran 1.2.1. Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru	
	2	



NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022
	mendorong perkembangan ekonomi kreatif	Desa
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Masyarakat Ekonomi	
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kemandirian Desa	
3	Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pendukung Potensi Unggulan
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	
4	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Penguatan Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal
	Sasaran 2.1.1.	



NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022
	Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda	
5	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menangani Bencana Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Instansi Pemerintah Sasaran 5.1.2.	Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan



NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	

4.2.5. *Grand Design* Pembangunan 2022

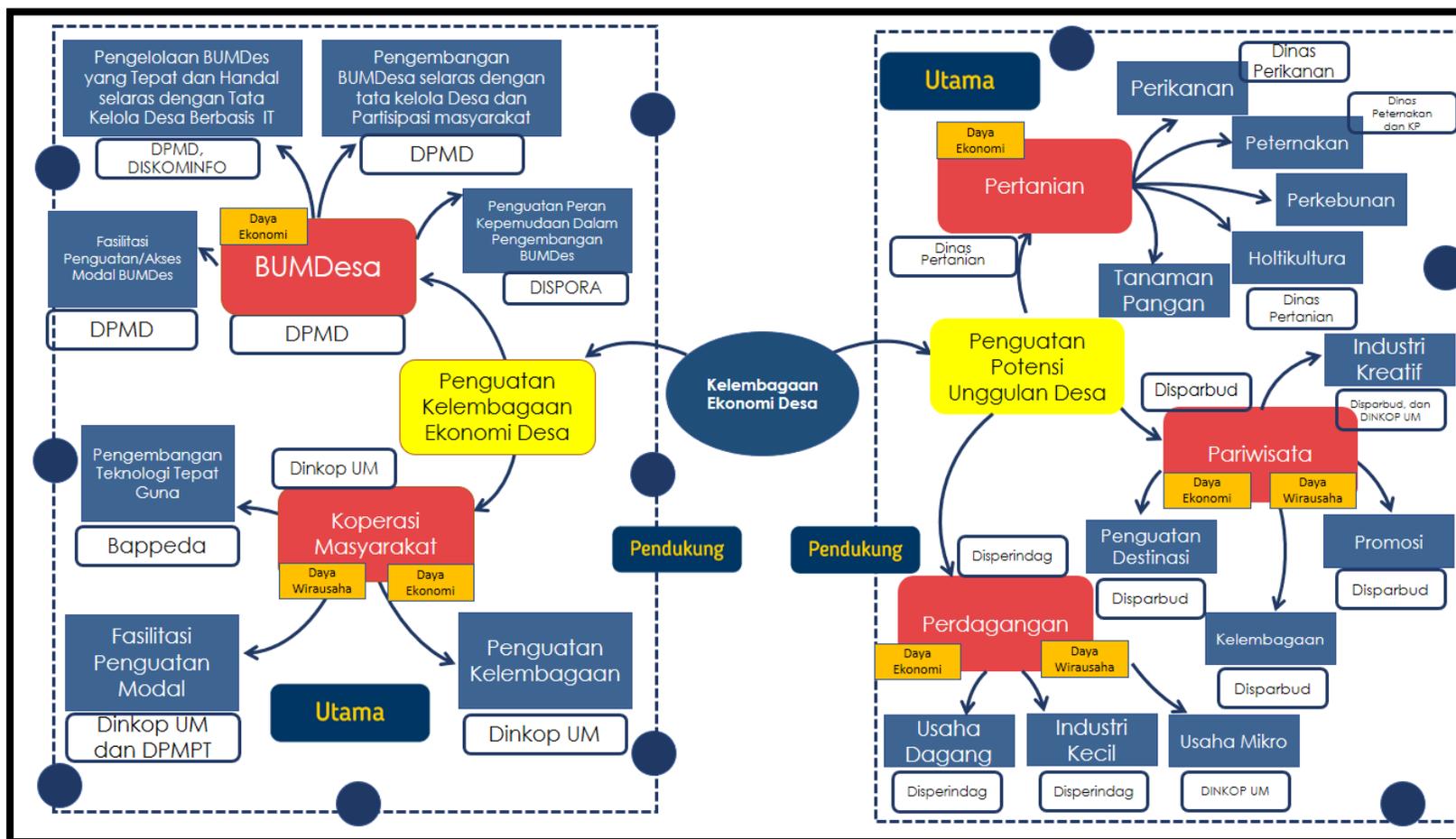
Grand design pembangunan 2022 Kabupaten Pasuruan adalah sebuah proses yang menunjukkan upaya/aktivitas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung terwujudnya dan tercapainya tema pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yaitu **“Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa”**. Adapun upaya/aktivitas dalam grand design tersebut dibedakan menjadi proses utama, proses pendukung, dan proses manajerial.

Berdasarkan *grand design* dibawah dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan percepatan pengembangan wilayah melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa yang menjadi perhatian penting adalah pada proses utama dengan fokus penguatan kelembagaan ekonomi Desa melalui BUMDesa dan koperasi masyarakat, serta penguatan potensi unggulan Desa melalui penguatan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan. Dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDesa dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek yang diantaranya yaitu *pertama*, pengelolaan BUMDes yang tepat dan handal selaras dengan tata kelola Desa berbasis IT; *kedua*, pengembangan BUMDesa selaras dengan tata kelola Desa dan partisipasi masyarakat; *ketiga*, fasilitasi penguatan/akses modal BUMDesa; dan *keempat*, penguatan peran kepemudaan dalam pengembangan BUMDesa. Selain peningkatan penguatan daya



ekonomi BUMDesa, penguatan kelembagaan ekonomi Desa didorong juga dengan penguatan daya wirausaha dan daya ekonomi melalui koperasi masyarakat. Penguatan daya wirausaha dan ekonomi melalui koperasi masyarakat dapat ditunjang dengan meningkatkan beberapa aspek yang diantaranya yaitu *pertama*, penguatan kelembagaan; *kedua*, fasilitasi penguatan modal; dan *ketiga*, fasilitasi penguatan peran serta pemuda.

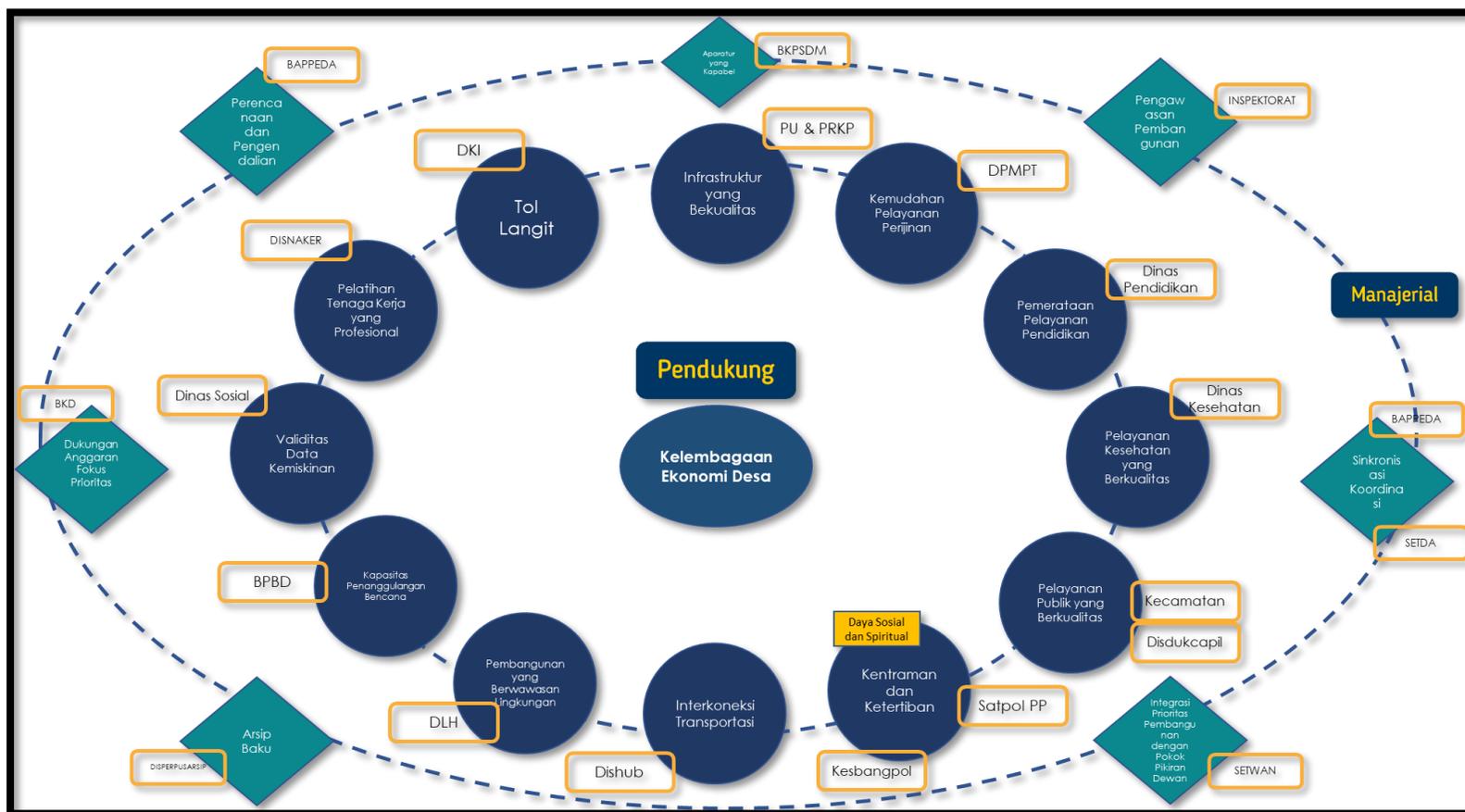
Sektor pertanian juga merupakan aktivitas/upaya dalam proses utama guna mewujudkan percepatan pengembangan wilayah melalui penguatan potensi unggulan desa dengan memperhatikan beberapa aktivitas/upaya dalam beberapa bagian yang diantaranya yaitu: *pertama*, perikanan; *kedua*, peternakan; *ketiga*, perkebunan; *keempat*, hortikultura; dan *kelima*; tanaman pangan. Selanjutnya sektor pariwisata dapat ditunjang dengan meningkatkan diantaranya yaitu: *pertama*, industri kreatif; *kedua*, promosi; *ketiga*, kelembagaan wirausaha; dan *keempat*, penguatan destinasi. Dalam sektor perdagangan dapat ditunjang dengan meningkatkan beberapa aspek diantaranya yaitu: *pertama*, usaha dagang; *kedua*, industri kecil; dan *ketiga*, usaha mikro.



Gambar 4.1
Grand Design Proses Utama Pembangunan 2022

Disamping proses utama, guna menunjang terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi Desa dan penguatan potensi unggulan Desa juga diperlukan proses pendukung terlaksananya proses utama dalam pembangunan agar dapat terlaksana. Proses pendukung kelembagaan ekonomi desa diantaranya yakni: 1) infrastruktur yang berkualitas; 2) kemudahan, pelayanan, perijinan; 3) pemerataan pelayanan pendidikan; 4) pelayanan kesehatan yang berkualitas; 5) pelayanan publik yang berkualitas; 6) ketentraman dan ketertiban; 6) interkoneksi transportasi; 7) pembangunan yang berwawasan lingkungan; 8) kapasitas penanggulangan bencana; 9) validitas data kemiskinan; 10) pelatihan tenaga kerja yang professional; dan 11) tol angin.

Proses yang penting pula dalam mewujudkan proses pendukung dan utama adalah mengenai proses lainnya yang mencakup: 1) aparatur yang kapabel; 2) pengawasan pembangunan; 3) sinkronisasi koordinasi; 4) integrasi prioritas pembangunan dengan pokok pikiran Dewan; 5) arsip baku; 6) dukungan anggaran fokus prioritas; dan 7) perencanaan dan pengendalian. Masing-masing dari faktor pendukung diampu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan penanggung jawab, seperti yang telah terpetakan dalam *gran design* faktor pendukung dan lainnya pada gambar 4.2.



Gambar 4.2
Grand Design Proses Pendukung dan Lainnya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa

Grand design Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 juga tetap memperhatikan program unggulan dan inovasi daerah Kabupaten Pasuruan dalam upaya penanganan covid-19. Inovasi tersebut adalah Kebal Covid-19 yang memetakan program unggulan didalamnya. Oleh karena hal tersebut, maka pembangunan di tahun 2022 juga harus memperhatikan Kebal Covid-19 dengan harapan pemulihan ekonomi, dan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berikut ini keterkaitan pembangunan 2022 dengan Kebal Covid-19 Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4.7. Keterkaitan Tema Pembangunan 2022 dengan Kebal Covid-19 dan Program Unggulan

Arah Kebijakan 2022	Proses	Proses Utama/Pendukung	Kebal Covid-19				
			Daya	Program Unggulan	Fokus	Aktivitas OPD	OPD
Proses Utama							
Kelembagaan Ekonomi Desa	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa	BUMDesa	Daya Ekonomi	Rumahku Surgaku	Ketahanan Pangan (Lambung Pangan)	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Koperasi Masyarakat	Daya Ekonomi	Satrya Emas, Pelasan, & Perwira Keluarga	Penguatan UMKM	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UM
			Daya Wirausaha	Satrya Emas, Pelasan, & Perwira Keluarga	Pelatihan Keterampilan Baru Pasca Pandemi	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	



Arah Kebijakan 2022	Proses	Proses Utama/Pendukung	Kebal Covid-19				
			Daya	Program Unggulan	Fokus	Aktivitas OPD	OPD
Proses Utama							
	Penguatan Potensi Unggulan Desa	Pertanian	Daya Ekonomi	Rumahku Surgaku	Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan)	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
						Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
					Tanaman Pekarangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
		Pariwisata	Daya Ekonomi	Rumahku Surgaku	Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan)	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Arah Kebijakan 2022	Proses	Proses Utama/Pendukung	Kebal Covid-19				
			Daya	Program Unggulan	Fokus	Aktivitas OPD	OPD
Proses Utama							
				Satrya Emas, Pelasan, & Perwira Keluarga	Penguatan UMKM	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UM
				Peningkatan Mamin	<i>New Normal</i> Kepariwisata an	Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Daya Wirausaha	Satrya Emas, Pelasan, & Perwira Keluarga	Pelatihan Keterampilan Baru Pasca Pandemi	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UM



Arah Kebijakan 2022	Proses	Proses Utama/Pendukung	Kebal Covid-19				
			Daya	Program Unggulan	Fokus	Aktivitas OPD	OPD
Proses Utama							
	Penguatan Potensi Unggulan Desa	Perdagangan	Daya Ekonomi	Satrya Emas, Pelasan, & Perwira Keluarga	Penguatan UMKM	Pengembangan Kewirausahaan dan	Dinas Koperasi dan UM
						Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	
						Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Yuk Nonggo	Penguatan Pedagang Klontong	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Daya Wirausaha	Satrya Emas, Pelasan, & Perwira Keluarga	Pelatihan Keterampilan Baru Pasca Pandemi	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UM



Arah Kebijakan 2022	Proses	Proses Utama/Pendukung	Kebal Covid-19				
			Daya	Program Unggulan	Fokus	Aktivitas OPD	OPD
Proses Utama							
						Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Proses Pendukung							
Kelembagaan Ekonomi Desa	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa	Kentraman dan Ketertiban	Daya Sosial dan Spiritual	Pasuruan Gumuyu	Keterlibatan Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan, Pesantren, dan Madin	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja

4.2.6. Persandingan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Pasuruan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, maka dalam penentuan prioritas perencanaan pembangunan harus mengacu dan mendukung pada pencapaian prioritas nasional dan provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, keterkaitan prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan akan kami sajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Persandingan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Pasuruan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor sekunder dan Pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektifitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Pembangunan Potensi Unggulan Desa
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktifitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	
Revolusi Mental dan Pembangunan dan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	Penguatan Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pendukung Potensi Unggulan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Pasuruan
Pelayanan Dasar		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Katahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Jawa Timur	

Dari persandingan prioritas di atas dapat dilihat bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 telah selaras dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk 2 (dua) prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yaitu peningkatan sumber daya manusia dan penguatan stabilitas ketertiban umum dan pelayanan publik, tidak menjadi prioritas di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 karena merupakan prioritas pada tahun 2019 dan 2020. Meskipun demikian kedua prioritas tersebut tetap akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada.

Sedangkan program pendukung prioritas pembangunan tahun 2022 dan sasaran pembangunan daerah akan kami sajikan dalam Tabel 4.9.



Tabel 4.9. Program Pendukung Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
1.	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif	PDRB	Pembangunan Potensi Unggulan Desa	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.291.140.615	Dinas Pertanian
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	8.646.506.402	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	249.939.000	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	674.366.350	Dinas Perikanan
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	40.120.000	Dinas Perikanan
				Program Pengolahan		Dinas



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
				dan Pemasaran Hasil Perikanan	220.207.000	Perikanan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	158.608.480	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	33.554.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	1.200.000.000	Dinas Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	750.000.000	Dinas Pariwisata
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Omset Usaha Mikro Dan Koperasi (Rp.000)		Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	350.000.000	Dinas Koperasi dan UM
				Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	250.000.000	Dinas Koperasi dan UM



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian	759.181.000	Dinas Koperasi dan UM
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	900.000.000	Dinas Koperasi dan UM
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	700.000.000	Dinas Koperasi dan UM
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri		Program Peningkatan Kerja sama Desa	605.350.000	Dinas PMD
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.939.368.248	Dinas PMD
	Sasaran 1.1.5. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	517.186.516	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	396.085.274	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
				Program penanganan kerawanan pangan	222.464.540	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
				Program penyuluhan pertanian	1.529.626.260	Dinas Peternakan dan KP
	Sasaran 1.2.1. Meningkatkan Kesempatan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.700.000.000	Dinas Tenaga Kerja
				Program penempatan tenaga kerja	200.000.000	Dinas Tenaga Kerja
				Program hubungan industrial	471.264.500	Dinas Tenaga Kerja
	Sasaran 1.1.1.	PDRB	Pengembangan	Program Peningkatan	605.350.000	Dinas PMD



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif		Kelembagaan Ekonomi Desa	Kerja sama Desa		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.939.368.248	Dinas PMD
	Sasaran 1.1.3. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Omset Usaha Mikro Dan Koperasi (Rp.000)		Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	350.000.000	Dinas Koperasi dan UM
				Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	250.000.000	Dinas Koperasi dan UM
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian	759.181.000	Dinas Koperasi dan UM



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	900.000.000	Dinas Koperasi dan UM
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	700.000.000	Dinas Koperasi dan UM
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri		Program Peningkatan Kerja sama Desa	605.350.000	Dinas PMD
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.939.368.248	Dinas PMD
	Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pendukung Potensi Unggulan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	441.332.545.000	Dinas PU Bina Marga
		Indeks Aksesibilitas Transportasi		Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	300.000.000	Dinas Perhubungan



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	2.931.240.600	Dinas Perhubungan
	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	Penguatan Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal	Program Pemberdayaan Sosial	527.300.000	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	1.139.092.000	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	243.900.000	Dinas Sosial
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	137.500.000	Satpol PP
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik	Jumlah Konflik Sara		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.449.897.600	Bakesbangpol



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	INDEKS DAYA BELI		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	158.608.480	Disperindag
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	15.000.000	Disperindag
	Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda	Indeks Permukiman Layak Huni		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.211.963.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan Perumahan	259.350.480	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	305.341.800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	2.157.348.000	Dinas Lingkungan Hidup



No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Program Pendukung	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	541.018.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	404.841.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Resiko Bencana				
	Sasaran 3.1.5. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Ketahanan Air		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.848.019.000	Dina PU SDA dan TR



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022, disusun berdasarkan hasil proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbang Desa), perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbang RKPD di Kecamatan), Forum Perangkat Daerah dan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten), serta memperhatikan usulan dan masukan dari pihak legislatif. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam proses musyawarah perencanaan secara komprehensif, yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, *bottom up* dan *top down*, ditetapkan kesepakatan-kesepakatan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perencanaan tahun 2022 merupakan perencanaan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan merupakan lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun sebelumnya, arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, isu-isu strategis, arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, arah kebijakan RKP Tahun 2022 dan program-program strategis nasional, maka prioritas dan



sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas diharapkan pada upaya mewujudkan tema yakni **“Percepatan Pengembangan Wilayah dan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa”**. Sesuai dengan grand design pembangunan tahun 2022, maka prioritas pembangunan tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan Potensi Unggulan Desa;
2. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pendukung Potensi Unggulan;
4. Penguatan Modal Sosial Berbasis Kearifan Lokal; dan
5. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan.

Dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, selain didasarkan dari hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, juga didasarkan pada target kinerja Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Tahun 2022.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 sebesar Rp 3.241.698.235.875,97 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 75.000.000.000,00, sedangkan proyeksi belanja tahun 2022 sebesar Rp 3.241.698.235.875,97 dengan proyeksi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3.256.764.083,00.

Alokasi belanja tahun 2022 terdiri dari (a) belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa,



belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (b) belanja modal; (c) belanja tidak terduga; dan (d) belanja transfer.

Rincian proyeksi belanja Kabupaten Pasuruan tahun 2022, sebagai berikut :

a. Belanja Operasi	Rp 2.199.275.216.575,41
- Belanja Pegawai	Rp 1.154.029.309.992,33
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 849.498.525.299,18
- Belanja Hibah	Rp 152.392.381.283,90
- Belanja Bantuan Sosial	Rp 43.355.000.000,00
b. Belanja Modal	Rp 431.360.357.318,83
c. Belanja Tidak Terduga	Rp 30.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp 652.805.897.898,73

Belanja daerah tahun 2022 diprioritaskan pada program Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan ke Kecamatan Bangil yaitu pembangunan sarana prasarana perkantoran di Kecamatan Bangil (Kantor Bupati, Kantor Perangkat Daerah, Kantor Sekretariat Daerah, dan beberapa bangunan kantor yang lain), pembangunan sarana pelayanan umum, Program Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan pariwisata (pembangunan Wisata Banyu Biru, pembangunan Arjuna Agro Techno Park dan Pembangunan Rest Area di Kecamatan Tukur) pengembangan lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan pengembangan koperasi, serta penanggulangan pandemi dan dampak pandemi Covid-19. Rekapitulasi jumlah program/kegiatan per urusan bidang pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana dalam tabel 5.1. dan rincian rencana pendanaan per urusan pemerintahan dalam Tabel 5.2.



Tabel 5.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
per Urusan Tahun 2022

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jml Prog	Jml Keg	Jml Sub Keg	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
1.	Pendidikan	5	17	83	999.228.144.904,02	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	9	16	104	567.869.057.284,37	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	23	72	105.666.942.439,14	Dinas PU Bina Marga; Dinas PU SDA dan TR
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	16	35	218.611.547.265,38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas	7	23	71	21.579.079.772,71	Dinas Polisi PP, dan BPBD
6.	Sosial	7	16	37	7.114.779.302,37	Dinas Sosial
7.	Tenaga Kerja	9	17	39	9.982.054.521,37	Dinas Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	14	29	3.124.844.310,00	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
9.	Pangan	9	24	49	5.938.720.000,00	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan
10.	Pertanahan	3	3	4	-	PU SDA dan TR
11.	Lingkungan Hidup	11	22	63	13.425.414.761,96	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	13	32	11.483.608.820,26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	35	20.023.785.677,98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jml Prog	Jml Keg	Jml Sub Keg	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
						dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	12	28	13.321.704.690,00	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
15.	Perhubungan	2	24	123	11.821.754.230,28	Dinas Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	3	9	37	25.507.909.869,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	13	28	12.907.170.855,36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
18.	Penanaman Modal	6	13	35	7.053.600.549,31	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	4	14	49	9.678.926.918,30	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20.	Statistik	1	1	6	148.639.925,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	2	5	527.640.300,00	
22.	Kebudayaan	5	8	19	1.157.755.615,31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	2	4	6	3.762.130.111,94	Dinas Perpustakaan dan Arsip
24.	Kearsipan	1	3	4	2.149.788.635,40	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	Kelautan dan Perikanan	5	16	38	7.171.313.502,94	Dinas Perikanan
26.	Pariwisata	4	13	56	8.490.207.845,64	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27.	Pertanian	6	12	26	30.198.880.235,03	Dinas Pertanian
28.	Perdagangan	7	16	34	1.964.493.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29.	Perindustrian	2	2	5	27.913.207.126,57	



No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jml Prog	Jml Keg	Jml Sub Keg	Pagu Indikatif (Rp)	PD Pelaksana
30.	Transmigrasi	1	1	2	-	Dinas Tenaga Kerja
31.	Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah	3	19	62	60.375.348.504,63	Sekretariat Daerah
	Sekretariat DPRD	2	13	28	48.576.625.530,21	Sekretariat DPRD
32.	Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Perencanaan	3	14	49	13.200.005.527,44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Keuangan	4	13	79	879.138.641.514,19	Badan Keuangan Daerah
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	12	39	10.549.163.738,69	BKPPD
	Penelitian dan Pengembangan	1	4	4	1.244.445.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33.	Pengawasan Urusan Pemerintahan					
	Inspektorat	1	10	27	8.452.994.256,86	Inspektorat
34.	Kewilayahan					
	Kecamatan (24)	103	229	573	108.366.776.233,46	Kecamatan
35.	Pemerintahan Umum					
	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	25	31.161.794.547,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH					3,173,221,955,384.34	





Tabel 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
URUSAN PENDIDIKAN				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar jenjang SD	Dinas Pendidikan	100 orang	420.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Penggunaan BOS Sekolah Dasar		1.971 laporan	99.543.600.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS		8 Laporan	187.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				57.533.750.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SPL, Paving dan Pagar SMP yang terpasang	Kab. Pasuruan	6 Paket	3.000.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SMP yang direhab	Kab.Pasuruan	33 Lembaga	11.500.250.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan TIK SMP	Kab.Pasuruan	4 Paket	1.334.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan olimpiade SMP	Kab.Pasuruan	1.812 orang	500.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Penerima Hibah BOP SMP Swasta	Kab.Pasuruan	10.249 orang	6.459.700.000
	Jumlah laporan hibah BOP MGMP MTs		16 mapel	
	Jumlah laporan hibah BOP Guru MTs		2.379 orang	
	Dewan Pendidikan		1 lembaga	6.459.700.000
	Jumlah organisasi penerima hibah (PGRI, IPI, APSI)		3 lembaga	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SMP yang lulus	Kab.Pasuruan	100%	500.000.000
	Jumlah peserta US I, US II dan UAM MTs		41.632 orang	500.000.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta sosialisasi penyiapan dan tindak lanjut Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab.Pasuruan	250 org	100.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penerima Bansos tunjangan Biaya Pendidikan Beasiswa S1 dan S2 Luar Negeri	Kab.Pasuruan	50 orang	1.675.800.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Kesejahteraan Tenaga Non PNS SMP di Daerah Khusus/Jauh dari jangkauan Fasilitas umum	Kab.Pasuruan	1.896 orang	4.74.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar jenjang SMP	Kab.Pasuruan	316 orang	4.20.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Penggunaan BOS Sekolah Menengah	Kab.Pasuruan	189 laporan	31.570.000.000
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				58.105.525.500
<i>Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</i>	Jumlah Ruang Kelas Baru Gedung PAUD	Kab.Pasuruan	21 lbg	3.600.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga DAK PAUD (Rehab Fisik)	Kab.Pasuruan	71 lbg	7.251.225.500
	Jumlah ruang kelas RA yang direhab		28 lbg.	6.964.719.500
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah peserta sosialisasi penyiapan dan tindak lanjut pada Satuan PAUD	Kab.Pasuruan	200 orang	100.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penerima Insentif Pendidik PAUD	Kab.Pasuruan	3258 orang	11.728.800.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Kab.Pasuruan		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta bimtek pengembangan kurikulum PAUD	Kab.Pasuruan		300.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta akreditasi lembaga PAUD	Kab.Pasuruan	450 orang	450.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima BOP TK Swasta / KB (DAK)	Kab.Pasuruan	1.079 lbg	23.817.600.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Hibah BOP Pengembangan Kelembagaan PAUD	Kab.Pasuruan	600 lbg	10.102.600.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				84.347.700.000
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas Baru Gedung PKBM	Kab.Pasuruan	4 lbg	720.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga MADIN / TPQ yang mendapat bantuan hibah rehab fisik	Kab.Pasuruan	183 lbg.	12.055.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Kejar Paket A	Kab.Pasuruan	200 org	47.250.000
	Jumlah peserta Kejar Paket B	Kab.Pasuruan	800 org	850.650.000
	Jumlah peserta Kejar Paket C	Kab.Pasuruan	2.500 org	2.435.100.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Bimtek Akreditasi Lembaga PNF	Kab.Pasuruan	100 orang	100.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta bimtek peningkatan IPM	Kab. Pasuruan	150 Orang	1.168.000.000
	Jumlah guru madin yang mendapat bantuan hibah beasiswa S-1		300 orang	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta Bimtek Kelembagaan dan manajemen	Kab. Pasuruan	2.500 orang	2.380.000.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK)	Kab. Pasuruan	46 lbg	3.495.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Hibah BOP	Kab. Pasuruan	3.950 lbg	61.994.600.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Dinas Pendidikan		260.000.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				160.000.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta bimtek Kompetensi Dasar muatan Lokal PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan		100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kenaikan guru berpendidikan S1/D.IV PAUD	Kab. Pasuruan	21%	9.777.000.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan		Kab. Pasuruan	4.364 orang & 3 Organisasi	6.472.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Pasuruan	4.054 orang & 3 Lembaga	6.472.000.001
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik yang didistribusikan	Dinas Pendidikan	620 orang	3.305.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase lembaga pendidikan yang berijin	Dinas Pendidikan	70%	200.000.000
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Perijinan kelayakan usul Pendidikan Dasar oleh masyarakat	Dinas Pendidikan	120 dokumen	100.000.000
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Perijinan kelayakan usul PAUD dan PNF oleh masyarakat	Dinas Pendidikan	75 dokumen	100.000.000
DINAS KESEHATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	118.335.583.915
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Pasuruan	100%	420.658.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kab. Pasuruan	4 Dokumen	320.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	100.658.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kab. Pasuruan	100%	113.131.926.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	12 bulan	106.616.926.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan lantor/lapangan melalui perjanjian	Kab. Pasuruan	12 org/bln	6.515.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasuruan	100%	972.999.415
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasuruan	34 Unit	449.679.825
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	1 paket	147.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Kab. Pasuruan	1 paket	223.830.590
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Kab. Pasuruan	12 Laporan	152.489.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan			1.450.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kab. Pasuruan	1 Unit	750.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan	Kab. Pasuruan	1 Unit	500.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Kab. Pasuruan	1 paket	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			1.260.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab. Pasuruan	12 bulan	960.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	Kab. Pasuruan	12 Org.bln	300.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi			1.100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor/Bangunan	Kab. Pasuruan	1 Unit	300.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	20 Unit	600.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	1 paket	200.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				45.650.000.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	50.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	RSUD Grati	100%	50.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	600.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon/Internet, Air dan Listrik	RSUD Grati	100%	600.000.000
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		1 Tahun	45.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD Grati	344%	45.000.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase angka kontak FKTP		100%	248.765.894.334
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart	Kab. Pasuruan	100%	67.873.761.072
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung yang dibangun	Kab. Pasuruan	1 paket	18.601.605.152
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terpeliharanya Gedung pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Pasuruan	1 paket	229.901.845
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab dan dipelihara	Kab. Pasuruan	25 Unit	17.225.492.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu yang direhab	Kab. Pasuruan	5 Unit	1.454.575.500
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana pendukung Faskes	Kab. Pasuruan	6 Unit	662.383.750
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarpras rs	Kab. Pasuruan	11 Paket	2.233.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan Alkes	Kab. Pasuruan	29 Paket	7.762.514.999
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat indikator nasional dengan tingkat Ketersediaan optimum	Kab. Pasuruan	4.000 jenis	9.122.505.008
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BMHP Pelayanan dasar dengan tingkat ketersediaan optimum	Kab. Pasuruan	6.000 unit	10.125.282.818
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat kesehatan & penunjang kesehatan	Kab. Pasuruan	1 paket	456.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				29.300.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung fasilitas kesehatan yang dibangun	RSUD GRATI	1 Paket	500.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/gedung pelayanan yang dipelihara	RSUD GRATI	1 Paket	500.000.000
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD GRATI	1 Paket	3.000.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan obat, vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD GRATI	2.300 jenis	5.000.000.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat habis pakai	RSUD GRATI	6.000 jenis	3.000.000.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat kesehatan & penunjang kesehatan	RSUD GRATI	100%	300.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah S/P/A yang sudah dimanfaatkan untuk pelayanan	RSUD GRATI	20 Unit	15.000.000.000
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan	Jumlah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD GRATI	100%	2.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan sesuai standar SPM	Kab. Pasuruan	100 jenis	175.715.653.262
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang diperiksa	Kab. Pasuruan	24.500	750.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu bersalin yang dilayani	Kab. Pasuruan	24.800	3.676.997.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang dilayani	Kab. Pasuruan	23.500	300.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang dilayani	Kab. Pasuruan	98.000	72.142.050
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang dilayani	Kab. Pasuruan	43.800	80.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang diperiksa	Kab. Pasuruan	864.066 org	150.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang diperiksa	Kab. Pasuruan	122.735 org	90.900.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Pasien hipertensi yang dilayani	Kab. Pasuruan	42139 org	200.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Pasien DM yang dilayani	Kab. Pasuruan	2.794 org	216.907.640
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Pasien TBC yang dilayani	Kab. Pasuruan	2.220 org	283.573.895
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang resiko infeksi HIV yang dilayani	Kab. Pasuruan	29.899 org	231.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pasien KLB yang dilayani	Kab. Pasuruan	10.000 org	235.307.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan terdampak krisis kesehatan	Kab. Pasuruan	1.200 keg	100.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Bumil dan balita yang mendapat PMT	Kab. Pasuruan	35.000 org	2.329.609.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK	Kab. Pasuruan	25 Pos	125.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Jumlah KK yang mengakses sanitasi dasar	Kab. Pasuruan	399.257	2.614.415.386
	2. Persentase TPM & TTU yang diperiksa	Kab. Pasuruan	6%	
	3. Persentase Desa yg dilakukan pemicuan STBM.	Kab. Pasuruan	1%	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan	Kab. Pasuruan	30 KK	237.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyelenggaraan Kesehatan Tradisional di puskesmas	Kab. Pasuruan	33	429.000.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyakit menular wabah yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	Kab. Pasuruan	14 jenis	550.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah ODGJ Berat yang dilayani	Kab. Pasuruan	31.120 org	538.395.000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pengamatan PES di Puskesmas	Kab. Pasuruan	5 Puskesmas	128.754.817
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah lokasi upaya Krisis Kesehatan	Kab. Pasuruan	1200%	656.500.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. jumlah kader gemas darling yg dilatih	Kab. Pasuruan	10000%	1.387.650.000
	2. Prevalensi kusta		1.2 Per 10.000 pnddk	
	3. Jumlah Kader pencegahan penyakit (P2) yang dilatih		320 Orang	
	4. Jumlah Desa Endemis DBD		60 lokasi	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah maskin PBID	Kab. Pasuruan	51.000 Orang	47.385.301.634



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	2. Jumlah Maskin yang di biyai non PBID		12 bulan	
	3. Jumlah masyarakat miskin yang di biyai pelayanan kesehatannya		40 Orang	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Pemicuan Jamban sehat	Kab. Pasuruan		250.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Bed Occupancy Ratio (BOR)	Kab. Pasuruan	0.64	
	2. Terakreditasi Madya	Kab. Pasuruan	100%	
Operasional Pelayanan Puskesmas Purwodadi	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.955	5.197.726.000
Operasional Pelayanan Puskesmas Nongkojajar	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	2.763	2.317.915.190
Operasional Pelayanan Puskesmas Sumberpitu	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	1.861	1.354.593.560
Operasional Pelayanan Puskesmas Puspo	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	4.245	
Operasional Pelayanan Puskesmas Tosari	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	2.548	1.680.837.081
Operasional Pelayanan Puskesmas Lumbang	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	4.058	3.022.975.460
Operasional Pelayanan Puskesmas Pasrepan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	4.743	3.816.007.332



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Operasional Pelayanan Puskesmas Kejayan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.829	3.535.324.936
Operasional Pelayanan Puskesmas Ambal-Ambil	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	3.891	1.731.942.980
Operasional Pelayanan Puskesmas Wonorejo	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	11.412	4.403.239.600
Operasional Pelayanan Puskesmas Purwosari	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	7.190	4.944.979.890
Operasional Pelayanan Puskesmas Karangrejo	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	2.473	1.498.456.949
Operasional Pelayanan Puskesmas Prigen	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	4.856	2.318.949.600
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulukandang	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	2.809	1.321.459.475
Operasional Pelayanan Puskesmas Sukorejo	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.801	3.706.282.805
Operasional Pelayanan Puskesmas Pandaan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	9.631	4.843.701.725
Operasional Pelayanan Puskesmas Sebani	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	2.558	1.309.246.785
Operasional Pelayanan Puskesmas Gempol	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.378	4.045.983.601



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Operasional Pelayanan Puskesmas Kepulungan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	2.716	1.541.953.628
Operasional Pelayanan Puskesmas Beji	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	12.084	4.38.138.930
Operasional Pelayanan Puskesmas Bangil	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	5.156	3.003.610.555
Operasional Pelayanan Puskesmas Raci	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	5.703	1.638.363.570
Operasional Pelayanan Puskesmas Rembang	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.040	3.778.666.830
Operasional Pelayanan Puskesmas Kraton	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	5.530	3.167.745.235
Operasional Pelayanan Puskesmas Ngempit	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	6.072	3.652.704.858
Operasional Pelayanan Puskesmas Pohjentrek	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	3.064	2.341.377.770
Operasional Pelayanan Puskesmas Gondangwetan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	7.861	4.617.367.585
Operasional Pelayanan Puskesmas Rejoso	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	5.773	3.686.106.090
Operasional Pelayanan Puskesmas winongan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.376	4.399.367.690



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Operasional Pelayanan Puskesmas Grati	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	9.036	4.185.651.785
Operasional Pelayanan Puskesmas Kedawungwetan	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	3.878	2.010.162.616
Operasional Pelayanan Puskesmas Lekok	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	7.911	5.539.940.565
Operasional Pelayanan Puskesmas Nguling	Jumlah kunjungan Puskesmas	Kab. Pasuruan	8.797	5.276.373.800
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kunjungan faskes	Kab. Pasuruan		2.612.956.800
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(labkesda)	jumlah kunjungan faskes	Kab. Pasuruan	82.000	842.016.274
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan survey akreditasi Puskesmas	Kab. Pasuruan	20 Puskesmas	2.500.000.000
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarpras telemedicine	Kab. Pasuruan	100 unit	400.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase fasyankes yang sudah berizin sesuai permenkes		9000%	5.176.480.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah monev mutu pelayanan faskes	Kab. Pasuruan	33 Puskesmas	4.256.480.000
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah monev mutu pelayanan FKTL	Kab. Pasuruan	800	920.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi		9.000	868.389.500
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan		9.000	868.389.500
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	Kab. Pasuruan	100 Orang	868.389.500
	2. Jumlah ijin nakes yang diterbitkan		1000 Ijin	
	3. Penilaian Angka Kredit (PAK) tenaga Kesehatan		27.500	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar	Kab. Pasuruan	8.200	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional	Kab. Pasuruan	1.500	200.397.960
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang dibina	Kab. Pasuruan	4.500	200.397.960
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang telah mendapatkan ijin edar	Kab. Pasuruan	13.000	230.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yg telah diawasi dan dibina	Kab. Pasuruan	10.000	230.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	Kab. Pasuruan	55%	2.374.472.200
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah Kegiatan promotif preventif yg dilaksanakan	Kab. Pasuruan	1.200	967.976.700
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan promosi PHBS yg dilaksanakan	Kab. Pasuruan	1.200	967.976.700
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi PHBS yg dilaksanakan	Kab. Pasuruan	800	1.169.495.500
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang dibina	Kab. Pasuruan	800	1.169.495.500
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan	Kab. Pasuruan	33	237.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah media Promosi Kesehatan yang digunakan	Kab. Pasuruan	800	237.000.000
RSUD BANGIL				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	RSUD BANGIL	100	150.100.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan	RSUD BANGIL	100%	100.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honor Pengelola Keuangan	RSUD BANGIL	12 bulan	100.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD BANGIL	82,37%	150.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD BANGIL	82,37%	150.000.000.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	RSUD BANGIL	100	31.037.883.168
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD BANGIL	82,37	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat kesehatan & penunjang kesehatan	RSUD BANGIL	1 kegiatan	1.450.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan	RSUD BANGIL	unit/set	6.621.200.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat habis pakai	RSUD BANGIL	1 kegiatan	3.947.170.173
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD BANGIL	23 jenis obat	6.682.800.000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana & pendukung fasilitas pelayanan	RSUD BANGIL	1 kegiatan	550.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/gedung pelayanan yang dipelihara	RSUD BANGIL	1 kegiatan	1.900.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung fasilitas kesehatan yang dibangun	RSUD BANGIL	1 fisik	9.386.712.995
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah peralatan penunjang kesehatan	RSUD BANGIL	1 fisik	500.000.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	DPKP Kab. Pasuruan	100%	10.893.316.568
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP Kab. Pasuruan	100%	51.041.320
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP Kab. Pasuruan	3 dokumen	25.212.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	DPKP Kab. Pasuruan	2 dokumen	25.829.320
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	DPKP Kab. Pasuruan	100%	5.908.938.920
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP Kab. Pasuruan	47 org.bln	5.594.048.000
Sub Kegiatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	DPKP Kab. Pasuruan	18 laporan	314.890.920
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	DPKP Kab. Pasuruan	100%	64.031.990
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPKP Kab. Pasuruan	47 orang	34.100.000
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan	DPKP Kab. Pasuruan	50 orang	29.931.990
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	DPKP Kab. Pasuruan	22 unit	2.151.310.700
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKP Kab. Pasuruan	2 unit	2.059.714.800
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	DPKP Kab. Pasuruan	20 unit	91.595.900



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Bangunan Lainnya				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPKP Kab. Pasuruan	100%	1.514.134.400
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	DPKP Kab. Pasuruan	150 kali	3.450.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	DPKP Kab. Pasuruan	12 rek-bln	372.022.900
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	DPKP Kab. Pasuruan	64 org-bln	1.138.661.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	DPKP Kab. Pasuruan	152 unit	398.831.774
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPKP Kab. Pasuruan	34 unit	319.948.574
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	DPKP Kab. Pasuruan	60 unit	5.082.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan / rehabilitasi	DPKP Kab. Pasuruan	58 unit	73.801.200



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	DPKP Kab. Pasuruan	100%	805.027.464
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKP Kab. Pasuruan	9 unit	7.734.650
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKP Kab. Pasuruan	30 unit	23.847.714
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	DPKP Kab. Pasuruan	49 unit	76.148.600
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan pengadaan	DPKP Kab. Pasuruan	20 unit	34.694.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	DPKP Kab. Pasuruan	1000 org	40.507.500
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	DPKP Kab. Pasuruan	50 laporan	622.095.000
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPKP Kab. Pasuruan	89,96%	24.137.320.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	DPKP Kab. Pasuruan	90%	24.137.320.000
Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah KK yang terlayani air minum	DPKP Kab. Pasuruan	15.000 KK	24.137.320.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	DPKP Kab. Pasuruan	92,30%	16.162.610.000
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam daerah Kabupaten / Kota	DPKP Kab. Pasuruan	92,3%	16.162.610.000
Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah KK yang terlayani akses sanitasi	DPKP Kab. Pasuruan	441.144 KK	16.162.610.000
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase tercapainya penataan bangunan gedung	DPKP Kab. Pasuruan	99,983%	153.300.155.700
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPKP Kab. Pasuruan	0,017%	153.300.155.700
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah SLF yang diterbitkan	DPKP Kab. Pasuruan	25 berkas	99.998.040
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan	Jumlah gedung kantor yang dibangun	DPKP Kab. Pasuruan	16 unit	150.150.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di monev bangunan gedungnya	DPKP Kab. Pasuruan	4 Kecamatan	100.159.840
Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dinas / gedung kantor yang direhab	DPKP Kab. Pasuruan	1 Unit	2.500.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	DPKP Kab. Pasuruan	3 Unit	449.997.820
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase tercapainya pengembangan perumahan	DPKP Kab. Pasuruan	28,48%	1.312.846.450
Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pendataan luasan perumahan	DPKP Kab. Pasuruan	23%	852.427.420
Identifikasi perumahan di lokasi rawan Bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Luasan perumahan yang di identifikasi	DPKP Kab. Pasuruan	250 Ha	852.427.420
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	DPKP Kab. Pasuruan	100%	301.068.550
Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design	Presentase fasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi program	DPKP Kab. Pasuruan	100%	301.068.550



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	pemerintah Daerah			
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	DPKP Kab. Pasuruan	2.kali	159.350.480
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah sosialisasi kebijakan bidang perumahan yang dilakukan	DPKP Kab. Pasuruan	3 kali	159.350.480
Program Pengembangan Permukiman	Persentase tercapainya pengembangan permukiman	DPKP Kab. Pasuruan	29,57%	4.642.243.303
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	DPKP Kab. Pasuruan	44,96 Ha	4.642.243.303
Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	DPKP Kab. Pasuruan	44,96 Ha	499.999.280
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas wilayah permukiman kumuh yang ditangani	DPKP Kab. Pasuruan	44,96 Ha	4.142.244.023
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase tercapainya peningkatan perumahan dan kawasan permukiman Kumuh	DPKP Kab. Pasuruan	29,57%	34.916.144.580



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang direhab	DPKP Kab. Pasuruan	2145 Unit	34.916.144.580
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang direhab	DPKP Kab. Pasuruan	2145 Unit	34.916.144.580
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DPKP Kab. Pasuruan	13,1%	20.724.443.878
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah urusan PSU perumahan yang diselenggarakan	DPKP Kab. Pasuruan	3 kali	20.724.443.878
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang jalan lingkungan dan tembok penahan tanah perkotaan yang ditangani	DPKP Kab. Pasuruan	69.900 m'	20.418.502.078
	Luas Genangan yang tertangani	DPKP Kab. Pasuruan	5 Ha	14.400.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kaw. permukiman yang dilakukan	DPKP Kab. Pasuruan	3 Kali	305.941.800
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Pasuruan		42.186.669.800



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Pasuruan		8.068.389.800
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan		6.542.489.800
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	12 bln	1.342.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jml laporan dan realisasi kinerja OPD yg tersusun	Kab. Pasuruan	12 lap	150.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml laporan prognosis semesteran dan realisasi keuangan akhir tahun yg disusun	Kab. Pasuruan	2 lap	33.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Pasuruan		157.990.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jml aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pasuruan	15 org	132.990.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml masyarakat yg mengikuti sosialisasi peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi	Kab. Pasuruan	100 org	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Pasuruan		454.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Pasuruan	12 bh	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia	Kab. Pasuruan	12 bln	78.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jml kebutuhan Barang Cetak yang tersedia	Kab. Pasuruan	12 bln	35.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jml Makanan dan minuman rapat yang tersedia	Kab. Pasuruan	12 bln	16.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Pasuruan	12 bln	300.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Pasuruan		125.650.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml Kendaraan Dinas operasional yg diadakan	Kab. Pasuruan		-
Pengadaan Mebel	Jml Mebelair yg diadakan	Kab. Pasuruan	6 unit	25.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Kab. Pasuruan	11 unit	100.650.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Pasuruan		32.685.265.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	Kab. Pasuruan	12 bln	32.375.545.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jml Jasa administrasi keuangan yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	12 bln	309.720.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Pasuruan		694.875.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yg dipelihara	Kab. Pasuruan	10 unit	490.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jml Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	Kab. Pasuruan	-	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yg dipelihara	Kab. Pasuruan	1 bh	5.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yg dipelihara	Kab. Pasuruan	1 unit	165.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yg dipelihara	Kab. Pasuruan	4 bh	34.375.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Kab. Pasuruan		4.430.000.000
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Pasuruan		
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Kab. Pasuruan		4.430.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan	Panjang drainase / gorong - gorong yang dibangun	Kab. Pasuruan	4,5 km	4.430.000.000
Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pembangunan Saluran		Kab. Pasuruan		-



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Drainase/ Gorong-gorong)				
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Kab. Pasuruan	178,87	164.422.068.577
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Kab. Pasuruan		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Kab. Pasuruan		2.191.000.000
Penyusunan Perencanaan Umum dan Teknis	Jml dok perencanaan umum dan teknis yg dihasilkan	Kab. Pasuruan	285 dok/12keg	2.016.000.000
Penyelenggaraan Study Kelayakan Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen hasil Study Kelayakan Jaringan Jalan	Kab. Pasuruan	1 dok	100.000.000
Pengendalian Kondisi Jalan dengan SIMANJA	Jml lapaporan kerusakan jalan yang ditindaklanjuti	Kab. Pasuruan	1Keg	25.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jml Laporan pelaksanaan Monev Jalan	Kab. Pasuruan	12 lap	50.000.000
Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan		Kab. Pasuruan		-
Pengelolaan Leger Jalan		Kab. Pasuruan		110.000.000
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen kondisi jalan	Kab. Pasuruan	25 dok	55.000.000
Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jembatan	Kab. Pasuruan	25 dok	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Inspeksi Pendukung Jalan	Jumlah dokumen pendukung jalan	Kab. Pasuruan	25 dok	30.000.000
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jml Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium yg diadakan	Kab. Pasuruan	1 unit	50.000.000
Pembangunan Jalan	Prosentase jalan dalam kondisi mantap	Kab. Pasuruan	50%	28.190.000.000
Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten menuju kawasan wisata UPA	Panjang jalan yang dibangun	Kab. Pasuruan	0,65 km	20.000.000.000
Pembangunan / Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Kab. Pasuruan	1.019 titik	8.190.000.000
Rekonstruksi Jalan		Kab. Pasuruan	66,15	90.737.995.571
Peningkatan Jalan (DAU)	Panjang Jalan yang dilakukan peningkatan	Kab. Pasuruan	22 km	18.284.856.571
Peningkatan Jalan (DAK)		Kab. Pasuruan	32 km	47.941.139.000
Peningkatan Jalan (BK Propinsi)		Kab. Pasuruan	2,4 km	2.850.000.000
Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Peningkatan Jalan)		Kab. Pasuruan	9,72 km	21.662.000.000
Rehabilitasi Jalan		Kab. Pasuruan	20,5	5.241.000.000
Pembangunan Turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	Kab. Pasuruan	7,5 km	4.180.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Median Jalan	Panjang median yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Pasuruan	10 km	261.000.000
Pemeliharaan Trotoar Jalan	Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Pasuruan	3 km	100.000.000
Pemeliharaan Monumen dan Tugu Batas	Jumlah Monumen Tugu Batas yang dipelihara	Kab. Pasuruan	4 bh	700.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan		Kab. Pasuruan	18,75	8.298.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Skala Periodik (Berkala Jalan) (DAU)	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan skala periodik/berkala	Kab. Pasuruan	12 km	3.810.000.000
Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Pemeliharaan Skala Periodik/Berkala Jalan)		Kab. Pasuruan	6,75 km	4.488.000.000
Pemeliharaan Rutin Jalan		Kab. Pasuruan		15.564.073.006
Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (Rutin)	Panjang jalan yg dilakukan pemeliharaan	Kab. Pasuruan	62,5 km	11.276.073.006
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU yang dibangun/ditingkatkan	Kab. Pasuruan	4.150 titik	3.984.000.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jumlah alat - alat berat yang dipelihara	Kab. Pasuruan	1 pk	50.000.000
Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat alat Berat	Jumlah alat berat yang dipelihara	Kab. Pasuruan	2 unit	50.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Jml Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat yg dilakukan pemeliharaan	Kab. Pasuruan	2 unit	10.000.000
Pengelolaan Laboratorium	Jml permohonan pengujian yang ditindaklanjuti / diproses	Kab. Pasuruan	12 bulan	50.000.000
Monev dan Pelaporan LPJU	Lap. Monev dan Pelaporan LPJU	Kab. Pasuruan	12 bln/lap	144.000.000
Rehabilitasi Jembatan		Kab. Pasuruan		5.190.000.000
Pembangunan Jembatan	Jml Jembatan yang dibangun	Kab. Pasuruan	15 bh	5.190.000.000
Pemeliharaan Berkala Jembatan		Kab. Pasuruan	33	8.850.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAU)	Jumlah jembatan yang dipelihara	Kab. Pasuruan	11 bh	4.500.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (BK Propinsi)		Kab. Pasuruan	11 bh	-
Pemb/rehab/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan)		Kab. Pasuruan	11 bh	4.350.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Kab. Pasuruan		100.000.000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kab. Pasuruan		100.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jml masy yg mengikuti Bimtek Tenaga Terampil jasa Kontruksi	Kab. Pasuruan	100 org	100.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab Pasuruan	100%	19.336.946.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan	Kab Pasuruan	100%	65.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab Pasuruan	3 dokumen	65.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab Pasuruan	100%	16.510.046.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pasuruan	120 org / bln	12.565.946.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab Pasuruan	157 org / bln	3.944.100.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen adm brg milik daerah pada OPD yang dilaksanakan	Kab Pasuruan	100%	16.400.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kab Pasuruan	5 unit	16.400.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kab Pasuruan	100%	80.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis	Kab Pasuruan	50 orang	80.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan	Kab Pasuruan	100%	460.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan sebagai persediaan	Kab Pasuruan	3 jenis	100.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	Kab Pasuruan	4 jenis	85.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan mamin tamu	Kab Pasuruan	12 kali	11.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab Pasuruan	120 laporan	264.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan	Kab Pasuruan	100%	475.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan	Kab Pasuruan	1 unit	400.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kab Pasuruan	20 unit	75.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang OPD yang dilakukan	Kab Pasuruan	100%	514.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab Pasuruan	28 rekening	120.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Pasuruan	24 unit	58.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa layanan umum kantor yang dibayarkan	Kab Pasuruan	32 org / bln	336.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan	Kab Pasuruan	100%	1.216.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Pasuruan	2 unit	75.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Pasuruan	48 unit	207.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab Pasuruan	8 unit	730.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kab Pasuruan	2 unit	125.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan / rehabilitasi	Kab Pasuruan	20 unit	79.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku	Kab Pasuruan	56,30%	28.472.130.202
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku	Kab Pasuruan	2.127.877.107	7.000.400.000
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan dan identifikasi SDA yang dilakukan	Kab Pasuruan	4 dokumen	249.000.000
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Penyediaan Tanah yang dipakai untuk pembangunan embung	Kab Pasuruan	1 lokasi	1.288.600.000
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah panjang tanggul sungai yang dipasang Sandbag	Kab Pasuruan	10.000 m	683.000.000
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah panjang tebing sungai yang dipasang Bronjong	Kab Pasuruan	1.000 m	2.256.000.000
Normalisasi / Restorasi Sungai	Jumlah panjang pemeliharaan sungai yang dinormalisasi	Kab Pasuruan	5.000 m	2.019.800.000
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi saluran irigasi yang ditingkatkan kualitasnya	Kab Pasuruan	5 lokasi	195.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok yang dilakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	Kab Pasuruan	25 kelompok	209.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koordinasi dan pendampingan yang dilakukan	Kab Pasuruan	4 kali	100.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Kab Pasuruan	70,13%	21.471.730.202
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis jaringan irigasi yg dibuat	Kab Pasuruan	38 dokumen	848.365.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang jaringan irigasi permukaan yang direhab	Kab Pasuruan	15000 m	18.525.865.202
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah wilayah jaringan irigasi permukaan yang dipelihara secara rutin	Kab Pasuruan	4 wilayah	1.998.000.000
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi (RTTG) yang dilakukan	Kab Pasuruan	4 dokumen	99.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	Kab Pasuruan	70%	1.526.000.000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	Persentase penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan	Kab Pasuruan	65%	459.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah penyusunan Substansi Raperda/Raperda RDTR BWP / Perkotaan yang dilakukan	Kab Pasuruan	3 dokumen	429.000.000
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi terkait penataan ruang yang dilakukan	Kab Pasuruan	1 kali	30.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi terkait perencanaan tata ruang daerah	Kab Pasuruan	100%	436.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah koordinasi terkait penataan ruang yang dilakukan	Kab Pasuruan	12 kali	436.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terkait pemanfaatan tata ruang	Kab Pasuruan	50%	549.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi & sinkronisasi terkait rekomendasi yang dikeluarkan	Kab Pasuruan	12 kali	365.000.000
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi yang diupdate	Kab Pasuruan	1 sistem	184.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terkait pengendalian tata ruang	Kab Pasuruan	50%	82.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi terkait penataan ruang yang dilakukan	Kab Pasuruan	12 kali	82.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	Kab Pasuruan	100%	100.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase inventarisasi & pemanfaatan tanah kosong	Kab Pasuruan	95%	100.000.000
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah inventarisasi dan identifikasi tanah kosong yang dilakukan	Kab Pasuruan	4 dokumen	100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi pengelolaan izin membuka tanah	Kab Pasuruan	100%	220.000.000
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase izin membuka tanah yang dikeluarkan	Kab Pasuruan	100%	220.000.000
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah rekomendasi terkait pemanfaatan tanah yang dikeluarkan	Kab Pasuruan	100 dokumen	220.000.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penggunaan tanah dalam wilayah kabupaten	Kab Pasuruan	100%	416.000.000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah dalam wilayah kabupaten	Kab Pasuruan	100%	416.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah identifikasi perencanaan penggunaan tanah asset Pemkab dan TKD	Kab Pasuruan	4 dokumen	316.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah identifikasi perencanaan dan konsolidasi tanah	Kab Pasuruan	1 dokumen	100.000.000
SATPOL PP				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase pemenuhan layanan umum kantor	Kab. Pasuruan	100%	18.430.605.450
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun	Kab. Pasuruan	100%	8.086.350.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	14 bulan	8.086.350.001
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Pasuruan	100%	466.478.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Pasuruan	12 bulan 100%	38.168.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		kab. Pasuruan	100%	20.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		kab. Pasuruan	12 bulan 100%	64.347.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		kab. Pasuruan	12 bulan 100%	43.040.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		kab. Pasuruan	12 bulan 100%	18.360.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		kab. Pasuruan	12 bulan 100%	26.455.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kab. Pasuruan	12 bulan 100%	255.508.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan laporan akuntabilitas	kab. Pasuruan	100%	150.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	kab. Pasuruan	12 bulan 100%	60.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	kab. Pasuruan	12 bulan 100%	90.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	kab. Pasuruan	100%	5.722.036.600
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas anggota SatPol PP	kab. Pasuruan	100%	331.348.650
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi cukai rokok illegal	kab. Pasuruan	1 kegiatan 100%	5.257.488.000
Bimbingan teknis Implementasi Perundang- undangan	Jumlah kegiatan bimtek thd anggota SatPol PP dan Tantib Kecamatan	kab. Pasuruan	1 kegiatan 100%	73.240.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi	kab. Pasuruan	100%	2.729.320.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab. Pasuruan	1 buah 100%	29.320.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Damkar dan Rescue	kab. Pasuruan	2 unit 100%	2.700.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	kab. Pasuruan	100%	586.337.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Jasa Surat Menyurat	kab. Pasuruan	12 bulan 100%	222.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kab. Pasuruan	12 bulan 100%	188.007.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Jasa Pelayanan Umum	kab. Pasuruan	12 bulan 100%	175.380.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi	kab. Pasuruan	100%	690.083.600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Jasa, Pemeliharaan, Pajak kendaraan dinas	kab. Pasuruan	12 bulan 100%	502.113.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	kab. Pasuruan	100%	67.370.400
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab. Pasuruan	100%	120.000.000
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	kab. Pasuruan	100%	7.581.458.200



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten		kab. Pasuruan	100%	6.611.543.200
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	kab. Pasuruan	399 kegiatan	2.310.957.500
			100%	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	kab. Pasuruan	112 kegiatan	267.479.150,00
			100%	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	kab. Pasuruan	12 kegiatan	356.889.200,00
			100%	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kab. Pasuruan	42 kegiatan	2.895.460.000
			100%	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	kab. Pasuruan	43 kegiatan	760.757.350,00
			100%	
Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada	kab. Pasuruan	18 kegiatan	20.000.000,00
			100%	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	kab. Pasuruan	100%	713.115.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	kab. Pasuruan	24 kegiatan	319.885.000,00
			100%	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	kab. Pasuruan	60 kegiatan	118.460.000,00
			100%	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	kab. Pasuruan	105 kegiatan	274.770.000,00
			100%	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	kab. Pasuruan	100%	256.800.000
Pengembangan Kapasitas dan Karier	Jumlah kegiatan Pengembangan	kab. Pasuruan	105 kegiatan	256.800.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PPNS	Kapasitas dan Karier PPNS		100%	
Program Penanggulang Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran	kab. Pasuruan	100%	1.754.237.900
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian kebakaran	kab. Pasuruan	100%	1.620.755.100
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	kab. Pasuruan	18 bulan 100%	1.237.940.100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	kab. Pasuruan	52 unit 100%	216.150.000,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	jumlah kegiatan pembinaan aparaturn pemadam kebakaran	kab. Pasuruan	48 kegiatan 100%	60.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	kab. Pasuruan	100%	133.482.800
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulang kebakaran	kab. Pasuruan	12 kegiatan 100%	133.482.800,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor		100%	3.710.136.402
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	22.979.480
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	'Kab. Pasuruan	1 Laporan	22.979.480
Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	1.805.845.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	'Kab. Pasuruan	144 Orang-Bulan	1.489.945.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor tenaga kontrak/THL	Kab. Pasuruan	132 Orang-Bulan	252.600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	Kab. Pasuruan	121 Orang-Bulan	63.300.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100%	30.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pasuruan	6 orang	30.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	44.549.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	Kab. Pasuruan	50 Kali	7.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab. Pasuruan	60 rek-bulan	37.349.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor		100%	395.854.522
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian ATK	Kab. Pasuruan	50 Jenis	35.175.450
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	338 unit	13.168.190
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	20 Jenis-kali	24.250.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Pasuruan	800 Orang	46.970.882
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	60 Laporan	251.726.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pasuruan	55 Unit	6.339.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	Kab. Pasuruan	10 Jenis	18.225.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan		12 Unit	627.918.100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	2 Unit	72.740.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	1 Unit	455.140.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	4 Unit	26.640.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Pasuruan	9 Unit	73.398.100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		91 Unit	805.969.380



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	72 Unit	89.462.450
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung yang dapat pemeliharaan	Kab. Pasuruan	2 Gedung	60.140.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Kab. Pasuruan	17 Unit	656.366.930
Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,72	2.772.676.326
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi kebencanaan	Kab. Pasuruan	0,09%	441.073.140
Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian yang disusun	Kab. Pasuruan	1 Dokumen (IKD)	16.670.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Pasuruan	2400 Orang	424.403.140
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana	Kab. Pasuruan	16,25%	1.397.696.186
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jenis bencana yang dilaporkan	Kab. Pasuruan	5 Jenis	257.915.600
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa / kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Kab. Pasuruan	2 Desa/Kelurahan	259.164.966
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Kab. Pasuruan	72 Unit	265.220.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah relawan yang mengikuti pelatihan TRC	Kab. Pasuruan	50 Orang	22.659.120
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kab. Pasuruan	50 Orang	24.137.440



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan jitupasna	Kab. Pasuruan	50 Orang	152.107.980
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang di-review	Kab. Pasuruan	6 Dokumen (IKD)	300.140.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti apel siaga		450 Orang	116.351.080
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Pasuruan	100%	761.267.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah mamin tenaga operasional kebencanaan	Kab. Pasuruan	420 Orang-kali	18.900.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bantuan yang diberikan pada korban bencana	Kab. Pasuruan	8 Jenis	742.367.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait yang sukses dilaksanakan	Kab. Pasuruan	100%	172.640.000
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota unsur pengarah yang dilantik		9 orang	165.140.000
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah aplikasi yang dibuat	Kab. Pasuruan	1 Website resmi BPBD	7.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
DINAS SOSIAL KABUPATEN PASURUAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.983.000.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100%	120.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Pasuruan	6 Dokumen	40.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pasuruan	1 Laporan	40.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	Pasuruan	1 Laporan	40.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	750.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Pasuruan	30 Orang-Bulan	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Pasuruan	24 Orang-Bulan	750.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		100%	318.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasuruan	47 Unit	48.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Pasuruan	17 Jenis	25.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	Pasuruan	600 Orang	45.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Pasuruan	45 Laporan	200.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang		100%	372.500.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim Melalui Jasa Kurir	Pasuruan	150 Surat	5.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telpon, Air dan Internet Selama 12 bulan	Pasuruan	36 Rekening	158.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pasuruan	17 Jenis	110.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	Pasuruan	47 Jenis	99.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	350.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pasuruan	4 Unit	300.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pasuruan	2 Unit	50.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	72.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pasuruan	58 Orang	72.500.000,00
BIDANG FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SSOSIAL				1.083.500.000,00
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan PSKS		7%	981.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peremberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		7%	473.000.000,00
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Bantuan yang Disalurkan	Pasuruan	400 Orang	473.000.000,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Menindaklanjuti Pemberdayaan		7%	508.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	Pasuruan	48 Orang / 4 Laporan	550.620.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang Menerima Peningkatan Kemampuan	Pasuruan	100 Orang	25.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial yang Menerima Peningkatan Kemampuan	Pasuruan	20 Orang	5.000.000,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan TMP		7%	102.500.000,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara		7%	102.500.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Terpelihara dan Jumlah Honorarium Penjaga TMP	Pasuruan	12 Orang/11 TMP	102.500.000,00
BIDANG REHABILITASI SOSIAL				2.245.500.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani		86%	2.235.500.000,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial		86%	1.932.500.000,00
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Permakanan	Pasuruan	37 Lembaga	1.617.500.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	Pasuruan	37 Orang	72.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Bimbingan	Pasuruan	240 Jiwa	95.000.000,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Pasuruan	287 Jiwa	148.000.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial		86%	303.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Pasuruan	5 Orang	3.000.000,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapat Bimbingan	Pasuruan	225 Orang	220.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang Diberikan	Pasuruan	6 Kecamatan	80.000.000,00
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan		86%	10.000.000,00
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi		86%	10.000.000,00
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi Kabupaten ke Desa/Kelurahan Asal	Pasuruan	5 Orang	10.000.000,00
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				773.000.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dan Fakir Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Sosialnya		86%	503.000.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelayanan Dasar		86%	578.715.811,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terbaru	Pasuruan	4 Pengesahan (1 Data)	15.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Kesejahteraan Sosial	Pasuruan	337 SDM PKH dan 300 Orang	438.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	Pasuruan	2 Kube	50.000.000,00
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani		7%	270.000.000,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan		7%	70.000.000,00
Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penyediaan Makanan	Pasuruan	250 Orang	50.000.000,00
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan	Pasuruan	10 Orang	20.000.000,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan		7%	200.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pasuruan	55 Orang	50.000.000,00
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pasuruan	45 Orang	150.000.000,00
KBPP				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	5.940.315.300
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja perangkat daerah		5 dokumen	120.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasuruan	3 dokumen	20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	2 laporan	100.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yg dilaksanakan		100%	4.904.950.300
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	100%	3.304.594.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	100%	1.600.356.300
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		100%	10.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pasuruan	2 orang	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	175.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	62 unit	45.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	12 unit	25.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	72 laporan	105.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan		13 unit	120.615.000
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kab. Pasuruan	2 unit	30.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Pasuruan	1 unit	5.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pasuruan	9 unit	46.465.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	1 unit	39.150.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	165.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	Kab. Pasuruan	36 rekening	90.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	Kab. Pasuruan	12 bln	75.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		18 unit	444.750.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	15 unit	350.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	3 unit	82.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	2 unit	12.000.000
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase dokumen PPRG yang disampaikan		100%	247.000.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pelaksana kegiatan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		62 kelompok	207.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Pasuruan	55 PD	15.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti rakor PUG	Kab. Pasuruan	80 orang	42.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasuruan	55 PD	100.000.000
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasuruan	200 orang	50.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan		2 Kelompok	40.000.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		2 Kelompok	40.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan		100%	316.750.600
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		155 orang	109.741.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti rakor tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan		154 orang	109.741.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani		110 orang	207.009.600
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mengadu dan terlayani		110 orang	50.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan		24 Kecamatan	157.009.600
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan		100%	370.000.000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti rakor Pelebagaan PHA		120 orang	150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota gugus tugas yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak di kabupaten		120 orang	150.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		24 kecamatan	220.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		300 orang	220.000.000
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kekerasan terhadap anak yang terselesaikan		100%	438.325.200
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksana penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		24 kecamatan	438.325.200
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mengadu dan terlayani		55 orang	288.325.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota tim PPT-PPA Kabupaten dan pokja kecamatan melaksanakan rakor pendampingan anak		70 orang	150.000.000
Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru		100%	145.000.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		24 Kecamatan	45.000.000
Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	jumlah masyarakat/kader IMP yang mendapat sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Kependudukan	Kab. Pasuruan	120 orang	45.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten		24 kecamatan	100.000.000
Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah tim koalisi kependudukan tingkat kabupaten yang menyusun parameter kependudukan	Kab Pasuruan	1 Tim	30.000.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan dalap dan pelkon yang tervalidasi	Kab Pasuruan	24 Laporan	70.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru		100%	11.017.749.900
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang diberikan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB		24 Kecamatan	2.027.295.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan KIE Program KKBPK	Kab. Pasuruan	160 orang	60.000.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK		12 bln	271.385.400
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah kebutuhan pengelolaan operasional dan sarana balai kb	Kab. Pasuruan	12 bln	1695.909.600
Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		24 Kecamatan	2.829.320.000
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah kebutuhan penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB		2 jenis	100.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang mendukung pelaksanaan program KB		2753 orang	2.729.320.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan layanan KB		24 Kecamatan	4.822.543.300
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	Kab. Pasuruan	49 faskes	126.826.700
Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah masyarakat/calon akseptor yang diberikan sosialisasi penggunaan KB MKJP	Kab. Pasuruan	500 orang	2.204.222.600
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah penyediaan sarana penunjang untuk pelayanan kb		3 unit	2.301.500.000
Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah faskes yang mengikuti pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Kab. Pasuruan	44 faskes	40.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor/ peserta KB yang terlayani	Kab. Pasuruan	300 orang	150.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah pelaksana pemberdayaan dan peningkatan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB		24 Kecamatan	1.338.585.600
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang melaksanakan program bangga kencana		24 Kecamatan	1.338.585.600
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Dimensi Ketentraman		20%	1.126.140.000,00
	Persentase Dimensi Kemandirian		18%	550.000.000,00
	Persentase Dimensi Kebahagiaan		14%	105.000.000,00
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		500 orang	1.126.140.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		20 unit	308.000.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebutuhan operasional bagi poktan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		10 desa	668.140.000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasuruan	300 orang	150.000.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi masyarakat yang melakukan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga		24 Kecamatan	655.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg melakukan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Tribina,PIK-R dan UPPKS)		24 Kecamatan	550.000.000
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah orang yang mengikuti promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga		250 orang	105.000.000
DPMD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Pemerintahan Daerah yang terlayani	DPMD Kab. Pasuruan	100%	6.419.362.820,00
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	DPMD Kab. Pasuruan	100%	46.653.100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen - Dokumen Perencanaan yang disusun	DPMD Kab. Pasuruan	5 Dokumen	46.653.100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	DPMD Kab. Pasuruan	100%	5.005.976.850,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. Pasuruan	33 Orang/bulan	4.571.505.750,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kantor melalui perjanjian	DPMD Kab. Pasuruan	12 Orang/bulan	365.738.100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan. Kegiatan dan Pelaku Pengadaan Barang / Jasa	DPMD Kab. Pasuruan	11 Orang/bulan	68.733.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang kompeten dan disiplin	DPMD Kab. Pasuruan	100%	159.665.600,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPMD Kab. Pasuruan	42 Orang	159.665.600,00
Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	DPMD Kab. Pasuruan	100%	610.078.560,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	14 Jenis	212.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Logistik Kantor	DPMD Kab. Pasuruan	70 Jenis	85.324.960,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. Pasuruan	14 Jenis	74.924.600,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	DPMD Kab. Pasuruan	50 Kunjungan	55.840.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan Perjalanan dinas luar daerah	DPMD Kab. Pasuruan	24 Laporan	150.989.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	DPMD Kab. Pasuruan	1 Unit	6.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas / Operasional	DPMD Kab. Pasuruan	1 Unit	25.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD Kab. Pasuruan	100%	63.420.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 bulan	DPMD Kab. Pasuruan	12 Bulan	63.420.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	DPMD Kab. Pasuruan	100%	533.568.710,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. Pasuruan	17 unit	243.568.710,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD Kab. Pasuruan	2 Unit	50.000.000,00
PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang sarana prasarannya difasilitasi	24 Kec	42%	75.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Penataan Desa	Terpenuhinya sarana prasarana desa	24 Kec	70 Desa	75.000.000,00
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang sarpras terfasilitasi	24 Kec	70 Desa	75.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Desa yang membentuk kerjasama	24 Kec	4%	633.250.000,00
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	24 Kec	1 BUMDesma Kawasan	633.250.000,00
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah terbentuknya BUMDesa Bersama Kawasan Perdesaan	24 Kec	1 BUMDesma Kawasan	633.250.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang Adminstrasinya Baik	24 Kec	341 Desa	3.869.772.900,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib			3.869.772.900,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah SK yang terfasilitasi	24 Kec	24 SK	25.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	341 Desa	341 Desa	145.000.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangan Desa Tertib	24 Kec	341 Desa	167.591.900,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang tertib administrasi	24 Kec	341 Desa	1.055.000.000,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan melalui pembinaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat (BUMDesa)	24 Kec	50 BUMDes	1.051.750.000,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang dilantik	24 Kec	24 Desa	50.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa yang akurat	24 Kec	221 desa	20.000.000,00
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan SISKEUDES	24 Kec	341 Desa	233.207.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aset Desa yang terinventarisasi	24 Kec	341 Desa	681.793.000,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti bimtek	24 Kec	1023 Orang	150.000.000,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang hasil evaluasi perkembangan desa	24 Kec	2 Desa	290.431.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Kelembagaan Masyarakat Baik	24 Kec	75%	1.900.756.500,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	24 Kec	40 Lembaga	1.900.756.500,00
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berdaya	24 Kec	341 Desa	352.759.400,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa / Kelurahan yang aktif	24 Kec	73 LPM	91.997.100,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah lembaga yang usaha ekonominya berkembang (Pasar Desa)	25 Kec	61 Pasar Desa	656.000.000,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mengikuti pameran	24 Kec	24 Kec	300.000.000,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang berkualitas	24 Kec	341 Desa	500.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kabupaten Pasuruan		
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi	Kabupaten Pasuruan		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	3 Dokumen	13.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Pasuruan		35.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	15.000.000
koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	15.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah makanan dan minum rapat yang di adakan	Kabupaten Pasuruan	1 Laporan	35.000.000
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	86 orang/bulan	10.000.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan	Kabupaten Pasuruan	69 Orang/bulan	1.800.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Kabupaten Pasuruan	4 laporan	10.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Kabupaten Pasuruan	2 Dokumen	5.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Kabupaten Pasuruan	4 Dokumen	12.000.000
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	5.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan	Kabupaten Pasuruan	12 unit	55.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	10.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	10.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD	Kabupaten Pasuruan		-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	5.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kabupaten Pasuruan		
pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	150 unit	105.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Pasuruan	2 dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	5.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai	Kabupaten Pasuruan	4 laporan	10.000.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	Kabupaten Pasuruan	-	-
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah PNS yang dipindah tugaskan	Kabupaten Pasuruan		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Pasuruan	50 orang	250.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pasuruan	50 orang	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Kabupaten Pasuruan	50 orang	100.000.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasuruan	2 unit	20.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Pasuruan	35 unit	130.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Pasuruan	10 jenis	45.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Kabupaten Pasuruan	70 jenis	60.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pasuruan	2500 buku	80.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pasuruan	6.935 bacaan	120.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi	Kabupaten Pasuruan	1.400 orang	80.000.000
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Pasuruan	450 kali	450.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	3.200.000
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase barang milik daerah yang diadakan	Kabupaten Pasuruan		
Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Kabupaten Pasuruan	2 unit	550.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kabupaten Pasuruan	5 unit	3.100.000.000
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Pasuruan	1 unit	2.000.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kabupaten Pasuruan	15 Unit	150.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kabupaten Pasuruan	20 unit	100.000.000
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	prosentase penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintahan	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kabupaten Pasuruan	228 Rekening Bulanan	370.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di kirim melalui jasa	Kabupaten Pasuruan	100 Kali	2.000.000
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	Kabupaten Pasuruan	276 Orang Bulan	150.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara daerah	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau dinas yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kabupaten Pasuruan	45 Unit	450.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasuruan	45 Unit	350.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	200 unit	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Kabupaten Pasuruan	10 unit	24.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kabupaten Pasuruan	7 unit	350.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kabupaten Pasuruan	80 Unit	300.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	presentase wilayah yang terlayani angkutan umum di jaringan jalan kabupaten	Kabupaten Pasuruan		
	presentase wilayah yang tersedia jaringan jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan	Kabupaten Pasuruan		
PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ	Kabupaten Pasuruan		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	Kabupaten Pasuruan	20 dokumen	960.000.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan yang disosialisasikan	Kabupaten Pasuruan	3 kegiatan	60.000.000
Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk LLAJ	Kabupaten Pasuruan	5 kegiatan	1.270.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kabupaten Pasuruan	Pokir	210.000.000
		Kabupaten Pasuruan	pokir	1.190.000.000
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	Kabupaten Pasuruan		
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Terbangun	Kabupaten Pasuruan	20 unit	600.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	Kabupaten Pasuruan	1.201 unit 12 unit	2.456.000.000 150.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	Kabupaten Pasuruan		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	Kabupaten Pasuruan	120 titik 1270 m	2.325.240.600
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	presentase pengelolaan terminal	Kabupaten Pasuruan		
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c	jumlah dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	20.000.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang dibangun	Kabupaten Pasuruan	8 unit	561.250.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	6 unit	280.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	Kabupaten Pasuruan	50 orang	125.000.000
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	presentase terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kabupaten Pasuruan		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah laporan parkir yang dikelola	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	6.215.517.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanan Parkir	Kabupaten Pasuruan	10 kali	960.000.000
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	presentase pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kabupaten Pasuruan		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji yang di diadakan	Kabupaten Pasuruan	3 unit	365.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan PKB	Kabupaten Pasuruan	20 orang	250.000.000
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang melaksannakan Pengujian	Kabupaten Pasuruan	20.000 kendaraan	79.200.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang dikeluarkan	Kabupaten Pasuruan	18000 buah	504.000.000
Sosialisasi Standar Operaional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	4 kali	6.540.000
identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan hasil analisis Potensi Kendaraan Wajib Uji	Kabupaten Pasuruan	12 kali	4.320.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat ujin yang di pelihara	Kabupaten Pasuruan	3 unit	90.000.000
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan Penetapan Tarif Retribusi	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	3.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah monev yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	3.500.000
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten	Kabupaten Pasuruan		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa pada Jar Jalan Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	180.000.000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah perlengkapan jalan yang diadakan dan dipasang dalam rangka manajemen rekayasa lalin	Kabupaten Pasuruan	5 lokasi	150.000.000
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalin	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	30.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Kabupaten Pasuruan	240 kegiatan	2.585.003.800



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	Kabupaten Pasuruan	12 keg.bulan	600.000.000
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	presentase hasil persetujuan andalalin	Kabupaten Pasuruan		
		Kabupaten Pasuruan		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen andalalin yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	6 kegiatan	300.000.000
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	Kabupaten Pasuruan	2 orang	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Kabupaten Pasuruan	48 kegiatan	48.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	24.000.000
AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ	presentase pelaksanaan audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ	Kabupaten Pasuruan		
peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	jumlah SDM yang melaksanakan diklat/bimtek auditor dan inspektor LLAJ	Kabupaten Pasuruan	2 orang	40.000.000
pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	120.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	40.000.000
pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kab/kota	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	180.000.000
PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang dalam 1 daerah kabupaten	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum	Kabupaten Pasuruan	2 kegiatan	5.792.500.000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan yang melampaui batas 1 kabupaten dalam 1 kabupaten	Kabupaten Pasuruan		
Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sosialisasi dan Uji coba penetapan kawasan Perkotaan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	12.500.000
PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUAPTEN/KOTA	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Kabupaten Pasuruan		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	60.000.000
PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan	Kabupaten Pasuruan		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	190.000.000
Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		Kabupaten Pasuruan		
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	50.000.000
PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi	Kabupaten Pasuruan		
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	Kabupaten Pasuruan	2 dokumen	150.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	12.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi	Kabupaten Pasuruan	6 kegiatan	25.000.000
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dalam daerah kabupaten	Kabupaten Pasuruan		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	jumlah fasilitasi pemenuhan izin trayek	Kabupaten Pasuruan	4 fasilitasi	1.800.000
PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah	Kabupaten Pasuruan		
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi Angkutan umum	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	5.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kabupaten Pasuruan	100%	11.448.521.900



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen sakin	Kabupaten Pasuruan	100%	122.391.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai kaidah teknis dan Pertauran Peundangan yang Berlaku	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase jumlah dokumen RKA yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	100%	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase jumlah dokumen RKA yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	100%	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase jumlah dokumen DPA SKPD yang sesuai dengan ketentuan DPA yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	100%	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase jumlah dokumen Perubahan DPA yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	100%	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sesuai ketentuan	Kabupaten Pasuruan	100%	10.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun sesuai ketentuan	Kabupaten Pasuruan	100%	22.391.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kabupaten Pasuruan	100%	9.777.575.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	100%	8.088.675.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelaksanaan pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kabupaten Pasuruan	100%	1.678.900.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase tersusunnya laporan akuntansi SKPD	Kabupaten Pasuruan	100%	5.000.000
		Kabupaten Pasuruan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penyusunan laporan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kabupaten Pasuruan	100%	5.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pada barang milik daerah pada perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pelaksanaan diklat pada aparatur yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kabupaten Pasuruan	100%	399.535.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	Kabupaten Pasuruan	100%	41.074.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor sesuai dengan kebutuhan	Kabupaten Pasuruan	100%	45.318.050
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Pasuruan	100%	48.143.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Kabupaten Pasuruan	100%	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kabupaten Pasuruan	100%	250.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Pengadaan Mebel	Persentase pelaksanaan pengadaan mebel	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	499.020.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pasuruan	100%	276.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kabupaten Pasuruan	100%	224.420.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	510.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten Pasuruan	100%	300.000.000
Pemeliharaan Mebel	Persentase pelaksanaan pemeliharaan mebel	Kabupaten Pasuruan	100%	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Pasuruan	100%	35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Diimplementasikan	Kabupaten Pasuruan	100%	975.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ukuran- ukuran tujuan, sasaran, dan dampak yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.	Kabupaten Pasuruan	100%	875.000.000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen/instrumen tolok ukur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Rencana Pembangunan	Kabupaten Pasuruan	100%	750.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan dokumen/instrumen pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dalam rangka RPPLH Kabupaten yang tersusun sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku	Kabupaten Pasuruan	100%	160.000.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen rencana program kebijakan strategis yang dianalisa dampak dan resikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen validasi KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka penurunan beban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	5.266.300.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan yang LH yang terjadi di wilayah Kab.	Kabupaten Pasuruan	100%	4.221.300.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Kabupaten Pasuruan	100%	1.170.600
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan uji sampel kualitas lingkungan yang berkualitas dan terjamin mutunya	Kabupaten Pasuruan	100%	2.950.700



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan yang LH yang terjadi di wilayah Kab. Pasuruan.	Kabupaten Pasuruan	100%	500.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pemberian informasi kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diberikan kepada pelaku pencemar dan/atau masyarakat terdampak	Kabupaten Pasuruan	100%	300.000.000
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengisolasian terhadap area tercemar / dan atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penghentian terhadap aktifitas/kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan kaidah teknis dan peraturan yang berlaku.	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/	Kabupaten Pasuruan	100%	595.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Kabupaten/Kota	atau kerusakan LH dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang terjadi di wilayah Kab.			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Unsur Pencemar	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penghentian sumber pencemar	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembersihan unsur pencemar	Kabupaten Pasuruan	100%	25.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	Kabupaten Pasuruan	100%	80.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah lokasi tercemar dan/atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kabupaten Pasuruan	100%	350.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	Kabupaten Pasuruan	100%	100.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam rangka menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	7.338.500.500
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam rangka Peningkatan Kepedulian Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di wilayah Kab. Pasuruan.	Kabupaten Pasuruan	100%	7.338.500.500
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	250.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	7.088.500.500
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaksanaan pengendalian B3 dan Limbah B3 dalam rangka penurunan beban pencemaran LH	Kabupaten Pasuruan	100%	90.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah dalam hal penyimpanan limbah B3 dalam rangka pengendalian B3 dan limbah B3	Kabupaten Pasuruan	100%	90.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan/ atau pengawasan pada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terkait ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas LH	Kabupaten Pasuruan	100%	251.315.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan/ atau pengawasan pada usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemkab Pasuruan dalam rangka meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan	Kabupaten Pasuruan	100%	251.315.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pelaksanaan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Pasuruan	100%	60.000.000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan perusahaan dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemkab Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	80.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan serta langkah penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Kabupaten Pasuruan	100%	61.315.000
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupaten Pasuruan	100%	40.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	Kabupaten Pasuruan	100%	651.120.050
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat	Kabupaten Pasuruan	100%	651.120.050
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	100%	200.000.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kabupaten Pasuruan	100%	301.120.050
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kabupaten Pasuruan	100%	150.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan LH untuk masyarakat	Kabupaten Pasuruan	100%	150.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan LH tingkat kabupaten	Kabupaten Pasuruan	100%	150.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan yang nilai kinerjanya dalam pengelolaan LH	Kabupaten Pasuruan	100%	150.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelaksanaan penanganan pengaduan LH	Kabupaten Pasuruan	80%	169.182.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	80%	169.182.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat terkait PPLH di Kab.	Kabupaten Pasuruan	80%	95.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan LH di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagai tindak lanjut atas pengelolaan pengaduan masyarakat yang teregister di DLH Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	80%	74.182.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbunan sampah yang terkelola dengan baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas LH	Kabupaten Pasuruan	100%	39.991.626.800
Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah	Kabupaten Pasuruan	100%	38.985.626.800
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersedianya dok. rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan on- site berdasarkan potensi desa/kelurahan di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	250.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pelaksanaan pengurangan sampah dengan pembinaan gerakan 3R, utamanya peningkatan gerakan komposting berbasis masyarakat	Kabupaten Pasuruan	100%	1.162.000.00
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/ SPA di Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	7.752.317.700
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Pasuruan	100%	1.244.309.080
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarpras pengelolaan persampahan	Kabupaten Pasuruan	100%	50.000.000
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Kabupaten Pasuruan	100%	30.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	100%	28.497.000.000
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis kegiatan usaha/ industri yg bergerak di pendaaurulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Kabupaten Pasuruan	100%	6.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi teknis jenis usaha dan/atau kegiatan di bidang pendaaurulangan/ pengelolaan sampah	Kabupaten Pasuruan	100%	6.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah	Dispenduk dan Pencapil	100%	15.075.334.372



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	100%	126.794.940
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah peserta Pelaksanaan Forum OPD dan penyusunan renja	Dispenduk dan Pencapil	75 peserta	24.513.650
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan kinerja SAKIP dan asistensi penyusunan DAK non fisik	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	102.281.290
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan administrasi keuangan	Dispenduk dan Pencapil	100%	7.801.717.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	53 ASN	6.270.517.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga Harian lepas yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	78 THL	1.531.200.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah petugas pengelola keuangan, PPTK, panitia pengadaan yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil		123.090.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	pemenuhan kegiatan disiplin dan kapasitas SDA	Dispenduk dan Pencapil	100%	235.630.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biaya pendidikan pegawai yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	15 kali	235.630.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	970.686.167,00



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia			64.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan pembersih yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	32.798.623
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik pelayanan 24 kec	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	420.054.264
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	Jenis	64.762.060
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah penyediaan ATK dinas	Dispenduk dan Pencapil	Jenis	103.642.220
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah mamim tamu	Dispenduk dan Pencapil	Jenis	29.700.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	85 kali	255.729.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	5.131.781.130,00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Dispenduk dan Pencapil	1 R2 dan 1 R4	683.336.200
Pengadaan Mebel	Jumlah biaya pengadaan mebeleur yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	unit	174.250.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dispenduk dan Pencapil	unit	4.274.194.930



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	287.900.100,00
Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia (jasa pos)	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	40.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet dan surat kabar	Dispenduk dan Pencapil dan 24 kec	3 jenis rekening utk 25 lokasi	247.900.100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet dan surat kabar	Dispenduk dan Pencapil dan 24 kec	3 jenis rekening utk 25 lokasi	75.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	520.825.035,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM, jasa servis, suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan	Dispenduk dan Pencapil	20 Unit	255.872.605
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan BBM, jasa servis, suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan	Dispenduk dan Pencapil	20 Unit	87.100.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah lokasi gedung / kantor yang di pelihara	Dispenduk dan Pencapil	lokasi	177.852.430



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Dispenduk dan Pencapil		2.620.821.230
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil			284.820.000
Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan bagi WNI yang tidak beridentitas (OTI)	Dispenduk dan Pencapil	12 Kecamatan	103.320.000
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kepemilikan dokumen secara keliling	Dispenduk dan Pencapil		181.500.000
Penataan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</i>			2.280.096.750
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Penggandaan Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk, ribbon KTP	Dispenduk dan Pencapil		2.280.096.750
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</i>			10.920.000
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	pelayanan adminduk melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah (GOPTKI, IGRA, HIMPAUDI)	Dispenduk dan Pencapil		10.920.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>				44.984.480
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Monitoring dan evaluasi pelayanan berbasis daring di tingkat desa dan kecamatan	Dispenduk dan Pencapil		44.984.480
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil		1.115.843.850
Pelayanan Pencatatan Sipil		Dispenduk dan Pencapil		1.115.843.850
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil	24 kecamatan	958.093.850
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah formulir dan buku terkait pencatatan sipil yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil		157.750.000
<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>				250.408.720
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan pemanfaatan dan akses data dengan opd lain	Dispenduk dan Pencapil		50.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil melalui pelayanan keliling	Dispenduk dan Pencapil		99.316.500
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Pemahaman masyarakat akan pentingnya akta akta pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil		100.592.220
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dispenduk dan Pencapil		825.364.730
Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan		Dispenduk dan Pencapil		261.919.810
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	pengolahan data kependudukan	Dispenduk dan Pencapil		101.145.200
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan lintas sektoral	Dispenduk dan Pencapil	20 perjanjian kerjasama pemanfaatan data	160.774.610
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dispenduk dan Pencapil		396.432.920



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintahan dan non pemerintahan terkait inovasi dan peraturan terbaru	Dispenduk dan Pencapil		<u>54.600.000</u>
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyediaan fasilitas PIAK	Dispenduk dan Pencapil	5 lembaga pemerintah dan 2 non pemerintah	183.432.900
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyediaan informasi kondisi data kependudukan	Dispenduk dan Pencapil		210.954.140
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait penggunaan dan manfaat sistem informasi administrasi kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	24 Kecamatan	158.400.020
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dispenduk dan Pencapil		167.012.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	bimbingan teknis kepada pengguna aplikasi KIOS e-Pakladi dan SIAKpeningkatan profesionalisme SDM bagi pengguna aplikasi epakladi dan siak	Dispenduk dan Pencapil	100 peserta	167.012.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase pengelolaan profil kependudukan			432.824.140
Penyusunan Profil Kependudukan		Dispenduk dan Pencapil		432.824.140
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	jumlah data kependudukan yang bisa di akses	Dispenduk dan Pencapil		213.415.780
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Dispenduk dan Pencapil		219.408.360
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kabupaten Pasuruan	100%	10,893,316,568
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	262,205,880



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	3 dokumen	70,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	10,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	10,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	3,616,250
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	3,616,250
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Pasuruan	1 Laporan	79,970,100
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	1 Laporan	85,003,280
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	4,924,663,986
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan	Kabupaten Pasuruan	30 orang.bulan	4,687,113,986



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kabupaten Pasuruan	8 orang, bulan	237,550,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kabupaten Pasuruan	100%	34,100,000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kabupaten Pasuruan	30 orang	34,100,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	Kabupaten Pasuruan	22 unit	235,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pasuruan	5 unit	200,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kabupaten Pasuruan	20 unit	35,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	1,176,891,755
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Pasuruan	15 jenis/kali	30,000,000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kabupaten Pasuruan	12 rek-bln	974,991,755
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	Kabupaten Pasuruan	23 org-bulan	171,900,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	152 unit	405,380,360
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Pasuruan	34 unit	325,380,360
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kabupaten Pasuruan	20 unit	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	60 unit	20,000,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan / rehabilitasi	Kabupaten Pasuruan	58 unit	35,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	Kabupaten Pasuruan	100%	733,533,090



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pasuruan	9 unit	7,734,650
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten Pasuruan	49 unit	33,073,590
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan pengadaan	Kabupaten Pasuruan	10 unit	34,981,300
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kabupaten Pasuruan	750 orang	35,648,550
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kabupaten Pasuruan	50 laporan	622,095,000
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemanfaatan saluran media komunikasi publik	Kabupaten Pasuruan%	26.294.969.905
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten	Kabupaten Pasuruan%	26,294,969,905
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	80%	15,000,000
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang dihasilkan	Kabupaten Pasuruan	10 konten	844,304,760
	Jumlah luas baliho, spanduk	Kabupaten Pasuruan	3300 m2	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Terpenuhinya operasional Radio Suara Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	12 bulan	
	Jumlah talkshow yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	15 kegiatan	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang melalui media	Kabupaten Pasuruan	240 kali/jenis	2,442,800,000
	Jumlah informasi yang diliput pertahun	Kabupaten Pasuruan	300 jenis/kali	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media yang menginformasikan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang cukai	Kabupaten Pasuruan	65%	1,435,198,670
	persentase OPD yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik	Kabupaten Pasuruan	45%	
Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Persentase KIM yang berdaya	Kabupaten Pasuruan	70%	851,799,700
	Jumlah Pemberdayaan Seni Pertura	Kabupaten Pasuruan	10 Kegiatan	
Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika OPD yang terintegrasi	Kabupaten Pasuruan%	8,850,522,892
Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Informatika OPD yang terintegrasi	Kabupaten Pasuruan%	555,776,500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang Dikelola dan Dikembangkan	Kabupaten Pasuruan Sistem Aplikasi	320,776,500
Sub Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah SOP tentang Layanan E-Government (SPBE)	Kabupaten Pasuruan dokumen	85,000,000
Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah SDM bidang TIK yang telah dibina	Kabupaten Pasuruan orang	150,000,000
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain	Kabupaten Pasuruan%	5,311,149,859
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terlayani akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan%	5,311,149,859
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Kabupaten Pasuruan%	220,000,000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	Kabupaten Pasuruan%	220,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang mengumpulkan Data Statistik Sektoral	Kabupaten Pasuruan org	75,000,000
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statiatik Sektoral	Jumlah OPD yang mengumpulkan Data Statistik Sektoral	Kabupaten Pasuruan dokumen	95,000,000
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	jumlah peserta bintek yang memahami statistik sektoral	Kabupaten Pasuruan orang	25,000,000
Pengembangan Infrastruktur	jumlah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan	Kabupaten Pasuruanaplikasi	25,000,000
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks KAMI (keamanan Informasi)	Kabupaten Pasuruan%	286,538,750
Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya standart keamanan informasi	Kabupaten Pasuruan%	286,538,750



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	hardware & software pengamanan data	Kabupaten Pasuruan org	50,451,450
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya standart keamanan informasi	Kabupaten Pasuruan %	61,087,300
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya standar/sertifikasi keamanan informasi	Kabupaten Pasuruan	assesment ISO 27001	25,000,000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi keamanan informasi	Kabupaten Pasuruan orang	150,000,000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU				
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	6.427.778.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP		80%	22.500.000
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun		9 Dokumen	4.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		16 Dokumen	18.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100%	5.083.178.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		476 Org-bln	4.437.483.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/ perikatan		252 Org-bln	530.695.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Keuangan SKPD		140 Laporan	115.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi barang milik daerah		100%	75.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang sesuai		5 Laporan	75.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	ketentuan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	90.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		20 Orang	50.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		50 Orang	20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis		50 Orang	20.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum		100%	425.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		1 Unit	150.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		14 Unit	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bahan logistik		156 Jenis-Kali	85.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan		90 Jenis-Kali	65.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan		7 Eksemplar	10.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Konsumsi Tamu dan Rapat		540 Orang	20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah		180 Laporan	85.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100%	85.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		10 Unit	85.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang		100%	328.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirimkan melalui jasa kurir		10 Surat	3.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan		60 Rekening	300.000.000
Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Jumlah penyediaan layanan umum kantor		12 Kali-Bulan	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	318.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab		12 Unit-Bulan	74.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional		72 Unit-Bulan	118.850.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mebelair		100%	50.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	50.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		240 Unit	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal		100%	292.500.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peluang Potensi da Investasi Daerah		6 Bidang	292.500.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Legalitas Penanaman Modal		1 Dokumen	115.000.000
Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Jumlah Dokumen Peluang Investasi		3 Dokumen	177.500.000
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Penanaman Modal		100%	770.000.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan promosi daerah yang terlaksana		100%	770.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal		5 Kali	770.000.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal		100%	2.819.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang terlayani		80%	2.819.000.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan		3000 Pelaku Usaha	2.500.000.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pemenuhan komitmen yang dipantau		2000 Pelaku Usaha	230.000.000
Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Konsultasi dan Pengaduan		500 Pelaku Usaha	89.000.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal		100%	167.600.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana		3 Kegiatan	167.600.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal		12 Kali	35.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		6 Kali	97.600.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengawasan penanaman modal		12 Kali	35.000.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi yang dikelola		100%	150.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan		80%	150.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi penanaman modal		1 paket	150.000.000
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPORA KAB. PAS	100%	5.196.970.692
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan	DISPORA KAB. PAS	100%	82.845.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	DISPORA KAB. PAS	19 dokumen	59.850.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISPORA KAB. PAS	8 dokumen	4.095.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	DISPORA KAB. PAS	6 dokumen	18.900.200



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPORA KAB. PAS	100%	3.699.287.550
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	DISPORA KAB. PAS	14 bulan	2.872.129.050
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	699.615.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD	DISPORA KAB. PAS	95 dokumen	127.543.500
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPORA KAB. PAS	100%	31.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DISPORA KAB. PAS	5 orang	31.500.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	470.318.073
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISPORA KAB. PAS	47 jenis	49.126.428
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	DISPORA KAB. PAS	1 paket	58.059.645
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	74.382.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	288.750.000
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	43.335.600
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	43.335.600
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	371.455.841
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	269.573.711
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan layanan umum kantor	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	101.882.130
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	498.228.428
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	264.882.161



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	189.246.750
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPORA KAB. PAS	12 bulan	44.099.517
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	100%	1.760.000.000
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	<i>kab.pas, provinsi</i>		1.540.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	48 orang	120.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wira Usaha Pemula yang berdaya saing	<i>kab.pas</i>	48 orang	105.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing	<i>kab.pas</i>	48 orang	120.000.000
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah hak setiap pemuda yang Terpenuhi	<i>kab.pas</i>	100 orang	150.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan	<i>kab.pas</i>	4 kali	40.000.000
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana Kepemudaan	<i>kab.pas</i>	18 OKP	90.000.000
Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemberian penghargaan pada pemuda berprestasi	<i>kab.pas</i>	15 Pemuda	45.000.000
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	<i>kab.pas</i>	48 orang	120.000.000
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa terpilih seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	76 orang	750.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	<i>kab.pas</i>		220.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemberdayaan Pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha	<i>kab.pas</i>	48 orang	120.000.000
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	40 orang	100.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	Provinsi Jatim, Wilayah Provinsi Jatim, Luar Provinsi Jatim		20.491.075.530
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	<i>Provinsi Jatim, Wilayah Provinsi Jatim, Luar Provinsi Jatim</i>		700.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	<i>Provinsi Jatim, Wilayah Provinsi Jatim, Luar Provinsi Jatim</i>	3 kegiatan	700.000.000
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	<i>Wilayah Provinsi Jatim & Kab. Pasuruan</i>		14.957.485.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Wilayah Kab. Pasuruan	1 kegiatan	300.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	Wilayah Kab. Pasuruan	4 kegiatan	1.002.900.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Wilayah Jatim, Kab. Pasuruan	6 kegiatan, 2 hibah	13.654.585.000
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Wilayah Provinsi Jatim & Kab. Pasuruan</i>		3.123.055.000
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Kab. Pasuruan	3 kegiatan	447.145.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	Kab. Pasuruan	1 kegiatan	196.010.000
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi	Wilayah Provinsi Jatim & Kab. Pasuruan	6 kegiatan	1.454.900.000
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlit / Pelatih Berprestasi yang diberi Penghargaan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	1.000.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	25.000.000
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kabupaten Pasuruan		1.710.535.530
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan, 1 hibah	710.535.530
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Kabupaten Pasuruan	7 kegiatan	350.000.000
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	650.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif	<i>kab.pas</i>	100%	1.695.000.000
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>kab.pas</i>	25 organisasi pramuka	1.695.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan berbasis elektronik	<i>kab.pas</i>	5000 orang	100.000.000
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Tata Kelola Organisasi Kepramukaan	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	25 organisasi	125.000.000
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pramuka	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	50 orang	100.000.000
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota - rehab gedung lemcadika	Jumlah Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	<i>kab.pas, provinsi, nasional</i>	1 lokasi	400.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	<i>kab. Pas</i>	1 organisasi	500.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	<i>kab.pas,</i>	5 set	50.000.000
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Monitoring pemanfaatan sarana dan prasaranya kepramukaan	<i>kab.pas,</i>	12 kali	120.000.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	<i>kab.pas,prov,nasional</i>	300 orang	300.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN PASURUAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	6.473.382
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	165.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	40.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	5 Laporan	125.000.000
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan</i>		100%	4.337.096.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	360 Orang/bn	3.137.096.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	528 Orang-bln	1.200.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		100%	316.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bula	Kab. Pasuruan	396 Rekening-bln	316.200.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan kantor</i>		100%	610.817.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	Kab. Pasuruan	45 Jenis	73.100.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	250 Unit	85.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasuruan	20 Jenis	67.515.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Pasuruan	120 Orang	8.706.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	24 Laporan	268.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	100 Unit	4.512.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan Perundang-undang	Kab. Pasuruan	3 Jenis	103.584.000
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan</i>		32 Unit	342.868.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	32 Unit	337.868.500
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Kab. Pasuruan		5.000.000
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</i>		89 Unit	701.400.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Pasuruan	5 Unit	250.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	39 Unit	388.400.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	35 Unit	58.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Pasuruan	10 Unit	5.000.000
Urusan Perpustakaan				
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A		8%	1.293.199.300
<i>Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>persentase pengelolaan perpustakaan daerah</i>		100%	550.000.000
Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pembinaan Perpustakaan di wilayah Kab Pasuruan	Kab. Pasuruan	250 Orang	200.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	Kab. Pasuruan	3000 Eksemplar	350.000.000
<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>persentase pelaksanaan kegiatan pembudayaan gemar membaca</i>		100%	543.199.300
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan dan promosi/pengembangan minat baca	Kab. Pasuruan	400 Kegiatan	393.199.300
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Pasuruan	3 Kegiatan	150.000.000
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah Kuno yang dilestarikan		5%	200.000.000
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naska Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan Di dayagunakan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/dialih bahasa/dialih aksara/terdaftar di wilayah kab. Pas		10 Judul	100.000.000
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	JumlahKegiatan seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		2 Kegiatan	100.000.000
'Bidang Kearsipan				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pengelolaan Arsip	Kategori Pengelolaan Arsip Statis		65%	850.000.000
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan arsip statis daerah		6%	350.000.000
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip	Kab. Pasuruan	50 ML	350.000.000
<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan</i>		35%	150.000.000
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Kab. Pasuruan	14 Kegiatan	150.000.000
<i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan</i>		30%	350.000.000
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah penyediaan sarana layanan informasi arsip	Kab. Pasuruan	2 Unit	100.000.000
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/sosialisasi kearsipan baik laki-laki maupun perempuan	Kab. Pasuruan	250 Orang	250.000.000
DINAS PERIKANAN				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap			
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan umum			
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data statistik perikanan tangkap			
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Luas sumberdaya perikanan yang direhabilitasi			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana yang tersalurkan pada nelayan			
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan nelayan kecil			
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang terampil			
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah penumbuhan KUB baru			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan terfasilitasi program			
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah laporan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI			
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah ikan yang di daratkan di TPI			
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan usaha perikanan tangkap			
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi usaha perikanan tangkap			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi perikanan budidaya			
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah laporan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang terampil			
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB			
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah transfer teknologi yang tersampaikan			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan pengelolaan pembudidayaan			
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi pembudidayaan			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan budidaya yang terfasilitasi program			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang terfasilitasi program			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hama dan penyakit ikan yang terdeteksi			
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah laporan perencanaan dan pengembangan kawasan budidaya			
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah produksi benih ikan			
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok nelayan dan pembudidaya yang tertib aturan			
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan sumberdaya perikanan			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang taat peraturan			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru			
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi usaha perikanan (pengolah, pemasar dan non konsumsi) yang diterbitkan			
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi usaha perikanan pengolah, pemasar dan non konsumsi yang diterbitkan			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah laporan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah masyarakat dan pengolah perikanan yang di bina			
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk olahan hasil perikanan bersertifikat yang dipromosikan			
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang melakukan kerjasama/ kemitraan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil verifikasi keuangan SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang kompeten dan disiplin			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian ATK			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan			
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan dan alat kebersihan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			
Pengadaan mebel				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan layanan umum kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor			
DINAS PERTANIAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			9.520.387.408
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				151.674.120
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kab Pasuruan	2 Dokumen	151.674.120



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.082.871.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Pasuruan	44 orang - bulan	6.149.001.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab Pasuruan	501 orang - bulan	933.870.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				323.280.320
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Pasuruan	40 Unit	32.438.620
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	Kab Pasuruan	42 Jenis	29.366.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	Kab Pasuruan	36 Jenis-kali	39.095.700
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat		1426 kali	22.380.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah		24 Laporan	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				693.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Pasuruan	3 Unit	293.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Kab Pasuruan	1 Unit	400.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				464.168.328
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik / air / telepon	Kab Pasuruan	36 rekening	464.168.328
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				805.393.640
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Pasuruan	8 Unit	354.725.840
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab Pasuruan	73 Unit	50.667.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Pasuruan	1 Unit	200.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pengembangan Kebun Dinas	Kab Pasuruan	2 Dokumen	200.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5.015.092.385
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				5.015.092.385
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab Pasuruan	25 Ha	3.297.170.700
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok tani yang mengikuti bimtek on farm dan off farm	Kab Pasuruan	13 KT	1.717.921.685
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				15.695.221.019
Pengembangan Prasarana Pertanian				395.075.630
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen Pelaporan LP2B	Kab Pasuruan	1 Dokumen	199.122.230



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah KT yang memiliki ketrampilan menggunakan prasarana pendukung pertanian	Kab Pasuruan	2 KT	195.953.400
Pembangunan Prasarana Pertanian				15.300.145.389
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang irigasi tersier yang dibangun/direhab	Kab Pasuruan	2500 meter	3.554.888.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Kab Pasuruan	3000 meter	7.375.627.901
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah irigasi tanah dangkal yang dibangun/direhab	Kab Pasuruan	2 paket	4.369.629.488
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				736.242.710
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				736.242.710
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani peserta Sekolah Lapang Pengendalian OPT	Kab Pasuruan	7 KT	691.242.890



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kelompok tani peserta Sekolah Lapang Iklim	Kab Pasuruan	6 KT	44.999.820
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				58.316.800
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				58.316.800
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah KT yang mengikuti pelatihan usaha di bidang agribisnis	Kab Pasuruan	5 KT	58.316.800
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				104.435.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				104.435.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang terbina di bidang manajemen usaha kelompok	Kab Pasuruan	2 KT	104.435.000
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN				
Bidang Urusan SEKRETARIAT DAERAH				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Pasuruan	100%	28.253.861.710
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	100%	1.452.500.000
Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen LPPD	Kabupaten Pasuruan	70 dokumen	420.000.000
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Pasuruan	4 laporan	472.500.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dengan perangkat Daerah dan Forkopimda	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	560.000.000
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Pasuruan	100%	25.113.862.650
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan pembinaan mental spiritual	Kabupaten Pasuruan	35 laporan	4.449.868.010
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Pasuruan	745 laporan	20.632.182.640



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Pasuruan	15 laporan	31.812.000
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyebarluasan Informasi Hukum dan Bantuan Hukum	Kabupaten Pasuruan	100%	1.319.999.060
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang diterbitkan sesuai kewenangan daerah	Kabupaten Pasuruan	800 produk hukum	425.011.200
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan pendampingan kasus hukum	Kabupaten Pasuruan	28 laporan	421.837.660
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan di bidang hukum dan publikasi produk hukum daerah	Kabupaten Pasuruan	70 kegiatan	473.150.200
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	100%	36.750.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah laporan koordinasi kerjasama dalam negeri	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	198.187.500
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah laporan koordinasi kerjasama luar negeri	Kabupaten Pasuruan	2 laporan	40.162.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi kerjasama	Kabupaten Pasuruan	5 laporan	129.150.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kabupaten Pasuruan	100%	9.988.266.850
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%	2.786.335.880
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1. Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Pasuruan	10 laporan	320.000.000
	2. Jumlah laporan hasil kordinasi pengendalian inflasi daerah	Kabupaten Pasuruan	6 laporan	
Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta pemanfaatan DBHCHT	Kabupaten Pasuruan	14 laporan	2.202.335.880
Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan	264.000.000
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan fasilitasi promosi potensi daerah	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD di wilayah Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	80%	1.100.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Buku Fasilitasi dan Buku Program Pembangunan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	1.010 Buku	490.394.500
Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah paket proyek fisik yang dimonitoring	Kabupaten Pasuruan	750 Paket	414.530.800
Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Buku Pelaporan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	190 Buku	195.074.700
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Pasuruan	100%	1.450.000.000
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan	Kabupaten Pasuruan	300 paket	955.062.500
Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Pada LPSE	Kabupaten Pasuruan	7 jenis	203.500.000
Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi PBJ	Kabupaten Pasuruan	2 kegiatan	291.437.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Kabupaten Pasuruan	90%	4.651.930.970
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	32.000.000
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan evaluasi DBHCHT	Kabupaten Pasuruan	24 laporan	4.535.930.970
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA Energi dan Air	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	84.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				35.955.232.389
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Pasuruan	100%	838.653.050
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah administrasi kepegawaian ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pasuruan	146 orang	6.093.900
	Jumlah bimtek yang terlaksana	Kabupaten Pasuruan	10 kali	48.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan hasil sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	8 Laporan	784.559.150
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	RTK Bupati dan Wabup	100%	1.478.026.181
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	191.439.000
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas Bupati & Wabup	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	106.902.400
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan kesehatan KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	93.676.573
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	1.086.008.208
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	RTK Bupati dan Wabup	12 bulan	3.482.185.519



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml rek tlp, air, listrik dan internet yang terbayar	Sekretariat Daerah	90 rek-bln	1.052.564.259
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	6 kegiatan	137.095.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Sekretariat Daerah	12 bulan	2.292.526.260
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Sekretariat Daerah	100%	2.576.270.661
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Sekretariat Daerah	20 jenis	306.948.040
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	35 jenis	131.955.300
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Sekretariat Daerah	35 jenis	299.954.588
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Sekretariat Daerah	130 jenis	253.822.793
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	Sekretariat Daerah	3000 orang	1.080.585.940



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat Daerah	360 Laporan	503.004.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	100%	1.769.632.000
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan belanja modal kendaraan	Sekretariat Daerah	5 unit	1.088.399.400
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Setda	Sekretariat Daerah	20 unit	376.287.600
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan belanja modal mebelair setda	Sekretariat Daerah	5 unit	108.195.000
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	10 unit	196.750.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekretariat Daerah	100%	2.854.615.334



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor setda dan KDH/WKDH yang terpelihara	Sekretariat Daerah	6 gedung	536.497.734
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang terpelihara	Sekretariat Daerah	4 kendaraan	233.506.600
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional Setda yang dipelihara	Sekretariat Daerah	55 kend	1.849.391.200
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat Daerah	1200 unit	134.037.800
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH dan WKDH yang dipelihara	Sekretariat Daerah	50 unit	78.742.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebelair yang dipelihara	Sekretariat Daerah	120 unit	22.440.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Presentase pemenuhan fasilitasi kerumahtangaan sekretariat daerah	Sekretariat Daerah	100%	506.767.824
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	12 bulan	259.863.624
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	12 bulan	194.215.872
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah yang tersedia	Sekretariat Daerah	12 bulan	52.688.328
Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Kabupaten Pasuruan	100%	2.223.749.790
Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Kabupaten Pasuruan	56 Perangkat daerah	989.499.870
	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Kabupaten Pasuruan	56 Perangkat daerah	989.499.870
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah unit kerja yang dibina pelayanan publik dan tatalaksana	Kabupaten Pasuruan	65 unit kerja	767.399.940
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pembinaan SAKIP/RB dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Pasuruan	3 laporan	466.849.980



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase laporan kegiatan KDH dan WKDH	Kabupaten Pasuruan	100%	1.498.303.100
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH	Kabupaten Pasuruan	60 Kegiatan	950.434.300
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	Kabupaten Pasuruan	24 Kegiatan	377.332.800
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan dokumentasi pimpinan	Kabupaten Pasuruan	60 Kegiatan	170.536.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekretariat Daerah	100%	507.761.740
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	Sekretariat Daerah	12 dokumen perencanaan setda	238.590.720
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Sekretariat Daerah	11 dokumen pelaporan setda	269.171.020
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100%	18.219.267.190



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat Daerah	14 bulan	16.751.029.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	4 dokumen penatausahaan keuangan setda	1.468.238.190
SEKRETARIAT DPRD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	41.277.459.139
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	SEKWAN	28 orang bulan	3.966.859.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan melalui perjanjian /perikatan	SEKWAN	480 orang-bulan	921.200.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SEKWAN	288 unit	65.384.839
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	SEKWAN	168 jenis kali	1.140.602.980



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	SEKWAN	72 jenis kali	193.374.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembelian Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	SEKWAN	1800 eksemplar	162.432.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Konusmsi tamu dan rapat	SEKWAN	12.580 orang	514.800.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKWAN	2 unit	933.234.969
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui kurir	SEKWAN	1000 surat	8.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan	SEKWAN	276 rek-bulan	389.447.460
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEKWAN	672 unit	127.924.560
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Layanan Umum Kantor	SEKWAN	252 org-bln	90.960.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	SEKWAN	180 unit kali	337.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasioanl atau lapangan	SEKWAN	24 unit	60.150.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	SEKWAN	5 unit kali	2.529.204.631
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	SEKWAN	168 unit kali	116.920.000
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji Anggota DPRD	SEKWAN	50 orang bulan	29.373.529.400
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SEKWAN	150 stel	92.350.000
Pelaksanaan Medial Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD Mengikuti Medical Check Up	SEKWAN	50 orang	62.500.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah PAW/tahun	SEKWAN	2 kali PAW	199.085.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD		100%	31.898.744.200
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	SEKWAN	12 raperda	1.336.600.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembahasan APBD	Jumlah hasil notulen	SEKWAN	28 laporan	6.421.914.400
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah notulen hasil rapat Paripurna	SEKWAN	1 kali laporan	269.794.200
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD Mengikuti Bimtek	SEKWAN	4 laporam bimtek	771.664.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan masyarakat	SEKWAN	228 unit-kali	385.950.000
Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil reses	SEKWAN	3 kali reses	2.480.355.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi dan Koordinasi	SEKWAN	208 Laporan Kunjungan	20.232.467.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	7.321.120.290
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Pasuruan	100%	110.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkata Daerah	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	7.457.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	2 Dokumen	53.664.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	Kab. Pasuruan	4 Laporan	48.878.800



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	100%	5.085.672.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	134 Orang / Bulan	4.803.558.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kab. Pasuruan	134 Orang / Bulan	282.114.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	41.580.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	Kab. Pasuruan	7 Unit	41.580.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	360 Orang	122.400.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Pasuruan	360 Orang	122.400.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	668.449.840
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pasuruan	20 Unit	19.250.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Pasuruan	46 Jenis / Kali	58.409.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah [pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pasuruan	25 Jenis / Kali	94.280.340



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian bahan bacaan dan perundang-undang	Kab. Pasuruan	168 Eksemplar	13.090.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan untuk kunjungan tamu	Kab. Pasuruan	4700 Orang / Kali	45.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	Kab. Pasuruan	45 Laporan	383.220.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	Kab. Pasuruan	50 m "	55.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	1	365.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pasuruan	0 Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kab. Pasuruan	20 Unit	365.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	1	496.171.650
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	Kab. Pasuruan	96 Rekening	141.399.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	Kab. Pasuruan	408 Orang	354.772.650



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Pasuruan	100%	431.846.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	35 Unit	284.900.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	26 Unit	25.795.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	1 unit	42.611.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	83 Unit	78.540.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan dan Pedanaann yang disusun		2 dokumen	4.828.877.746
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	Kab. Pasuruan		1.442.169.800
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan hasil konsultasi publik	Kab. Pasuruan	1 Laporan	69.155.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah/peserta yang melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	Kab. Pasuruan	165 Peserta	565.897.900
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyiapan bahan musrenbang kecamatan	Kab. Pasuruan	12 Laporan	141.041.800
	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi		1440 peserta	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang sesuai	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	150.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Palaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD< RPJMD dan RKPD) yang baik.	Kab. Pasuruan	5 Dokumen	516.075.100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	1 dokumen	84.700.000
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	1 dokumen	84.700.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	8 dokumen	138.119.196



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	Kab. Pasuruan	8 dokumen	138.119.196
POGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah mempunyai dokumen perencanaan yang baik			
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang Baik	Kab. Pasuruan	90 Dokumen	818.216.400
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	150.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	12 laporan	161.264.800
	Jumlah Perangkat Daerah bidang pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	29 Dokumen	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	24 Laporan	257.162.200



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan	Kab. Pasuruan	8 Dokumen	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kab. Pasuruan	16 Laporan	249.789.400
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik		35 Laporan	923.087.850
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi perencanaan bidang perekonomian	Kab. Pasuruan	12 Laporan	17.300.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	5.760.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata	Kab. Pasuruan	4 Laporan	269.349.300



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah sektoral lingkup sub bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sesuai ketentuan kuantitatif.	Kab. Pasuruan	6 Laporan	167.774.550
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	101.679.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Monev	Kab. Pasuruan	6 Laporan	47.515.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Kab. Pasuruan	3 Laporan	8.710.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Agropolitan	Kab. Pasuruan	3 Dokumen	305.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	Kab Pasuruan	30 Laporan	1.422.584.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	24 Laporan	250.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	3 Laporan	55.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	4 Laporan	92.744.500
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang infrastruktur	Kab Pasuruan	2 Laporan	199.840.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	24 Laporan	125.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	3 Laporan	65.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	4 Laporan	85.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab Pasuruan	3 Laporan	550.000.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil kajian Kelitbanagan			2.537.150.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase peningkatan kelitbanagan		2 Laporan	763.400.000
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	Kab. Pasuruan	2 Laporan	763.400.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase peningkatan kelitbangan		4 Dokumen	674.497.120
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Kab. Pasuruan	4 Dokumne	674.497.120
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase peningkatan kelitbangan		4 Dokumen	708.336.200
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Pasuruan	6 Dokumen	708.336.200
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan kelitbangan		4 Dokumen	390.916.680
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Pasuruan	4 Dokumen	390.916.680
BADAN KEUANGAN DAERAH				
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAERAH				
Program Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	Kabupaten Pasuruan	90%	9.487.879.568



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	2 keg	20.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kabupaten Pasuruan	2 dok	8.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Kabupaten Pasuruan	6 dok	12.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	3 keg	7.773.302.128
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan untuk gaji dan tunjangan	Kabupaten Pasuruan	12 bulan	7.129.407.128
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTT dan THL	Kabupaten Pasuruan	26 org	548.435.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara, Pemb Bendahara, Pengurus SPM, verifikator, akutansi dan pengurus barang	Kabupaten Pasuruan	20 org	95.460.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Kabupaten Pasuruan	1 keg	12.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian	Kabupaten Pasuruan	1 kali	12.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Pasuruan	4 keg	669.011.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK	Kabupaten Pasuruan	57 Jenis	161.562.900



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Pasuruan	509976 lbr	182.932.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Kabupaten Pasuruan	12 kali	5.029.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Pasuruan	300 lap	319.487.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah	Kabupaten Pasuruan	2 keg	293.616.000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair	Kabupaten Pasuruan	2 unit	27.805.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan perkantoran	Kabupaten Pasuruan	26 unit	265.811.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan jasa penunjang	Kabupaten Pasuruan	2 keg	429.475.300
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	Kabupaten Pasuruan	13 rek	230.002.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Pasuruan	49 unit	199.473.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Kabupaten Pasuruan	3 keg	290.475.040



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	33 unit	152.475.040
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	40 unit	75.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	1 unit	63.000.000
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan kepegawaian daerah	Kabupaten Pasuruan	90%	5.390.410.682
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan dan pemberhentian	Kabupaten Pasuruan	7 keg	2.481.678.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah penyusun bezzetting	Kabupaten Pasuruan	68 OPD	56.043.500
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah seleksi pegawai ASN	Kabupaten Pasuruan	1 kali	1.994.653.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen usulan pensiun	Kabupaten Pasuruan	350 SK	76.384.000
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah peserta pembekalan	Kabupaten Pasuruan	80 org	212.925.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi koordinasi ASN	Kabupaten Pasuruan	4 kali	25.300.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website/server yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	1 sistem	50.000.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah berkas administrasi kepegawaian	Kabupaten Pasuruan	11100 dok	66.372.500
Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi, pangkat dan promosi	Kabupaten Pasuruan	3 keg	1.152.125.300
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi dan promosi jabatan	Kabupaten Pasuruan	4 kali	541.750.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan SK kepangkatan	Kabupaten Pasuruan	8500 SK	201.855.300
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pengembangan karier jabatan	Kabupaten Pasuruan	4 kali	408.520.000
Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Kabupaten Pasuruan	5 keg	1.435.019.400
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta bimtek peningkatan kompetensi ASN	Kabupaten Pasuruan	80 org	313.019.400
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah peserta diklat	Kabupaten Pasuruan	30 org	290.000.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang diberi beasiswa	Kabupaten Pasuruan	140 org	200.000.000
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah peserta ujian dinas	Kabupaten Pasuruan	100 org	12.000.000
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta diklat	Kabupaten Pasuruan	200 org	620.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja	Kabupaten Pasuruan	5 keg	321.587.982
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD koordinasi penilaian kinerja aparatur	Kabupaten Pasuruan	68 OPD	58.959.982
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya evaluasi kinerja aparatur	Kabupaten Pasuruan	68 OPD	65.000.000
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD yg dibina	Kabupaten Pasuruan	68 OPD	20.000.000
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah laporan LHKPN dan penghargaan	Kabupaten Pasuruan	3 lap	39.550.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah dokumen proses kasus disiplin	Kabupaten Pasuruan	25 SK	138.078.000
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	persentase pemenuhan standar kompetensi ASN	Kabupaten Pasuruan	44%	2.009.839.750
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kabupaten Pasuruan	2 keg	2.009.839.750
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta uji kompetensi	Kabupaten Pasuruan	40 org	350.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	2 diklat	1.659.839.750
KECAMATAN GEMPOL				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Gempol	15 Desa	158.200.000
koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Gempol	6 Laporan	158.200.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Gempol	2 Laporan	132.800.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Gempol	4 Laporan	25.400.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Gempol	1 Organisasi	164.300.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Gempol	24 Laporan	112.200.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Gempol	36 Laporan	112.200.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gempol	4 Laporan	52.100.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gempol	4 Laporan	52.100.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina	Kecamatan Gempol	100%	53.600.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Gempol	5 Keg	53.600.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Gempol	4 Keg	40.200.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Toga dan Tomas	Kecamatan Gempol	1 Keg	13.400.000
INSPEKTORAT				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%	7.175.300.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase terlaksananya perencanaan		100%	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Kinerja	Inspektorat	1 laporan	100.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan		100%	4.916.161.100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	14 bulan	4.636.161.100
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Honorer Non PNS	Inspektorat	13 bulan	210.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium pengelolaan keuangan daerah	Inspektorat	12 bulan	70.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase terlaksananya</i>		100%	746.313.400
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat	Kabupaten Pasuruan	41 stel	35.000.000
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Meningkatnya sumber daya aparatur pengawasan	Kabupaten Pasuruan	75 orang	564.792.000
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek, PKS Penjurangan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD	Kabupaten Pasuruan	5 orang	146.521.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan</i>		100%	644.360.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Pasuruan	3 Paket	25.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Pasuruan	56 jenis	225.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Pasuruan	2 Paket	100.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Kabupaten Pasuruan	200 Org/kali	9.360.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan	Kabupaten Pasuruan	12 bulan	285.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				193.465.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan kipas angin, PC komputer, Laptop dan Printer	Kabupaten Pasuruan	10 unit	118.465.500
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan papan nama inspektorat dan rak bunga	Kabupaten Pasuruan	2 unit	75.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang</i>		100%	120.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim melalui jasa pengiriman	Kabupaten Pasuruan	1000 pucuk	2.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Tersedianya dan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	Kabupaten Pasuruan	6 rekening	118.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan		100%	455.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan Jumlah pembayaran pajak dan STNK Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Inspektorat	9 unit	300.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	terpeliharanya peralatan gedung/kantor	Inspektorat	12 bulan	55.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat	1 unit	100.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.284.700.000
Penyelenggaraan Pegawai Internal	<i>Prosentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi</i>		76%	4.179.700.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)	Kabupaten Pasuruan	75 Obrik	2.977.950.000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan LPPD yang terbit Reviu implementasi SAKIP	Kabupaten Pasuruan	1 laporan	160.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR LKD yang terbit Jumlah Reviu RKA Perubahan Reviu OPD yang mengelola dana DAK fisik	Kabupaten Pasuruan	1 laporan	84.750.000
Kerjasama Pengawasan internal	Terlaksananya sosialisasi Saber Pungli	Kabupaten Pasuruan	2 kali	936.000.000
Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut	Terlaksananya Frekuensi Koordinasi Pengawasan yang lebih komperhensif	Kabupaten Pasuruan	3 kali	21.000.000
Persentase Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan	Presentase Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan		76%	105.000.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya sosialisasi penanganan pengaduan Masyarakat Terlaksananya sosialisasi PUG	Kabupaten Pasuruan	4 kali	105.000.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI				240.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya pendampingan dan Asistensi		100%	240.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB kabupaten dan Reviu PMRB OPD	Kabupaten Pasuruan	34 Laporan	45.000.000
Pendampingan, asistensi 4 dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Hasil Survey BPS Laporan ZI kabupaten	Kabupaten Pasuruan	1 laporan	195.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN BANGIL				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	Kecamatan Bangil	88,5	3.857.531.234
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bangil	100%	3.780.188.947
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Kecamatan Bangil	2 Kali	32.538.385
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bedomungal	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil	12 Kali	323.833.469
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil	12 Kali	333.073.326
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil	12 Kali	353.539.285



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalianyar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil	12 Kali	339.019.575
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil	12 Kali	332.419.945
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kauman Kecamatan Bangil	12 Kali	330.414.590
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kersikan Kecamatan Bangil	12 Kali	339.018.646
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Bangil	12 Kali	366.739.740
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil	12 Kali	346.279.233
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Latek Kecamatan Bangil	12 Kali	332.418.874



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil	12 Kali	350.892.878
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Kecamatan Bangil	12 Kali	77.342.287
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	Kecamatan Bangil	12 Kali	77.342.287
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IKM Kecamatan	Kecamatan Bangil	88,5	14.408.412.273
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bangil	100%	262.762.795
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bangil	12 Kali	262.762.795
Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Bangil	100%	14.145.629.478
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bedomungal	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KIDULDALEM	1 Paket	860.689.123



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dermo	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN LATEK	1 Paket	892.206.810
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gempeng	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN DERMO	1 Paket	883.465.561
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalianyar	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALIREJO	1 Paket	883.340.250
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalirejo	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KAUMAN	1 Paket	905.102.880
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN POGAR	1 Paket	798.361.127
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kersikan	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALIANYAR	1 Paket	883.428.866
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KERSIKAN	1 Paket	883.418.580



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kolursari	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KOLURSARI	1 Paket	883.207.285
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latek	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN LATEK	1 Paket	766.033.391
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN POGAR	1 Paket	977.517.473
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN BENDOMUNGAL	1 Paket	425.287.028
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Dermo	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN DERMO	1 Paket	393.794.911
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Gempeng	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN GEMPENG	1 Paket	402.598.158
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kalianyar	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN KALIANYAR	1 Paket	402.476.319



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kalirejo	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN KALIREJO	1 Paket	380.915.832
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kauman	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN KAUMAN	1 Paket	487.618.987
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kersikan	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN KERSIKAN	1 Paket	402.594.704
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN KIDULDALEM	1 Paket	402.599.780
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kolursari	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN KOLURSARI	1 Paket	402.506.940
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Latek	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN LATEK	1 Paket	520.022.085
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Pogar	Jumlah Pembinaan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan	KELURAHAN POGAR	1 Paket	308.443.388



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	Kecamatan Bangil	100%	116.984.725
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah koordinasi	Kecamatan Bangil	100%	10.000.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro	Kecamatan Bangil	1 Paket	10.000.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase jumlah koordinasi	Kecamatan Bangil	100%	106.984.725
Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan Koordinasi	Kecamatan Bangil	12 Kali	106.984.725
KECAMATAN REMBANG				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kecamatan Rembang		71.860.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Rembang	100%	71.860.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya Musrenbang dan rapat koordinasi	Kecamatan Rembang	12 bulan	25.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya giat-giat rutin kecamatan	Kecamatan Rembang	12 bulan	46.860.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Kecamatan Rembang		83.600.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kecamatan Rembang	100%	83.600.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya giat pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rembang	12 bulan	83.600.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Rembang		18.810.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Rembang	100%	18.810.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya giat pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Rembang	12 bulan	18.810.000
KECAMATAN PRIGEN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	87,39	576.344.440
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	1	576.344.440
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	1 Kali	9.147.700
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	12 Bulan	567.196.740
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai SKM Kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	88,5	3.541.649.376
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	KECAMATAN PRIGEN	1	34.399.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	KECAMATAN PRIGEN	2 Kali	34.399.500
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN PRIGEN	1	3.507.249.876
Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	2.412.070.726
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	KECAMATAN PRIGEN	1 Tahun	1.095.179.150
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	KECAMATAN PRIGEN	1	14.444.950
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	1	14.444.950
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN PRIGEN	12 Bulan	14.444.950
KECAMATAN POHJENTREK				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	86,98	37.450.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	2 Sub Kegiatan	37.450.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum	Kecamatan Pohjentrek	1 Laporan	9.950.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektifitas Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	5 Laporan	27.500.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	Kecamatan Pohjentrek	1 Organisasi	3.300.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pohjentrek	1 Laporan	3.300.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	Kecamatan Pohjentrek	1 Laporan	3.300.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	100%	40.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Kecamatan Pohjentrek	2 Sub Kegiatan	40.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan operasi lapangan dengan aparat TNI, POLRI	Kecamatan Pohjentrek	4 Laporan	12.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pohjentrek	6 Laporan	28.000.000
KECAMATAN GONDANGWETAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan	KECAMATAN GONDANGWETAN	88, 5	296.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GONDANGWETAN	100%	225.000.000
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN GONDANGWETAN	1 Laporan	20.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bedomungal	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi di Tingkat Kelurahan	KECAMATAN GONDANGWETAN	5 Kegiatan	205.000.000
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN GONDANGWETAN	12 Kali	71.500.000
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi	KECAMATAN GONDANGWETAN	5 Kegiatan	71.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan	KECAMATAN GONDANGWETAN	88, 5	1.178.402.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Porsentase jumlah lembaga masyarakat yang dibina	KECAMATAN GONDANGWETAN	100%	9.250.000
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pemberdayaan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GONDANGWETAN	1 Laporan	9.250.000
Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Porsentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN GONDANGWETAN	100%	1.169.152.000
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gondangwetan	Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GONDANGWETAN	1 Paket	1.094.862.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GONDANGWETAN	1 Paket	74.290.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan	KECAMATAN GONDANGWETAN	100%	18.800.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Koordinasi	KECAMATAN GONDANGWETAN	100%	10.000.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Porsentase Jumlah Koordinasi	KECAMATAN GONDANGWETAN	2 kali	8.800.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan Koordinasi dalam rangka penunjang kegiatan PPKM Mikro	KECAMATAN GONDANGWETAN	2 kali	10.000.000
KECAMATAN WINONGAN				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terlaksana	Kecamatan Winongan	100%	119.139.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pemerintahan dengan Desa yang Terlaksana	Kecamatan Winongan	4 Kali	119.139.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Winongan	4 Laporan	119.139.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan pemberdayaan Desa	Kecamatan Winongan	100%	139.160.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Kecamatan Winongan	12 Kali	139.160.000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Winongan	12 Dokumen	139.160.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Winongan	100%	35.042.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaporan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum	Kecamatan Winongan	4 Kali	35.042.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pantau Wilayah (Patroli)	Kecamatan Winongan	24 Kegiatan	35.042.000
KECAMATAN REJOSO				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Rejoso	69 nilai	78.150.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	Kecamatan Rejoso	3 kgt	78.150.000
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kecamatan Rejoso	100%	78.150.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Rejoso	69 nilai	132.400.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	Kecamatan Rejoso	100%	132.400.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan		Kecamatan Rejoso	100%	132.400.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Rejoso	69 nilai	14.500.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	Kecamatan Rejoso	100%	4.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koord FORKOMPIMKA	Kecamatan Rejoso	4 kgt	4.500.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	Kecamatan Rejoso	100%	10.000.000
Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersosialisasinya tatanan baru / new normal	Kecamatan Rejoso	1 kgt	10.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Kecamatan Rejoso	69 nilai	29.310.600
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Rejoso	100%	29.310.600
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunya Perdes yang baik dan benar	Kecamatan Rejoso	16 desa	9.770.200
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar	Kecamatan Rejoso	16 desa	9.770.200



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan	Kecamatan Rejoso	16 dok	9.770.200
KECAMATAN GRATI				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	Kecamatan Grati	69 Nilai	480.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	Kecamatan Grati	100%	477.500.000
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kecamatan Grati	5 Keg	477.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan target penulisan PBB-2	Kecamatan Grati	6 bln	3.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	Kecamatan Grati	100%	119.017.450
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Grati	8 keg	119.017.450



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Grati		119.017.450
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Grati		1.100.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya sarana dan prasarana umum	Kecamatan Grati	1 keg	750.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Grati	1 keg	350.000.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	Kecamatan Grati	100%	52.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	Kecamatan Grati	2 Keg	12.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi FORKOMPIMKA	Kecamatan Grati	1 Keg	12.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kecamatan Grati	1 Keg	7.500.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	Kecamatan Grati	100%	40.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersosialisasinya new normal dan terwujudnya koordinasi penanganan gangguan keamanan lingkungan	Kecamatan Grati	2 keg	40.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	Kecamatan Grati	69 nilai	40.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Grati	100%	40.000.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Perdes yang baik dan benar	Kecamatan Grati	1 keg	12.500.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/Benar	Kecamatan Grati	1 keg	7.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya sinergitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Grati	1 keg	12.500.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan	Kecamatan Grati	1 Keg	7.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN LEKOK				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Lekok	81,67 Skor	22.885.600
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	Kecamatan Lekok	100%	22.885.600
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan (Musrenbang)	Kecamatan Lekok	11 Desa	22.885.600
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Lekok	81,67 Skor	110.998.400
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Lekok	100%	110.998.400
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Lekok	10 Dokumen	110.998.400
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Lekok	81,67 Skor	68.964.400



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lekok	100%	68.964.400
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lekok	2 Kegiatan	68.964.400
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Lekok	81,67 Skor	11.493.300
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kantrantibmas Yang Ditangani	Kecamatan Lekok	100%	11.493.300
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Vertikal di Wilayah Kecamatan Indonesia dan Instansi	Terlaksananya Koordinasi FORKOPIKA	Kecamatan Lekok	1 Kegiatan	11.493.300
KECAMATAN NGULING				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	Kecamatan Nguling	100%	60.500.000
<i>KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</i>				



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Forum Tingkat Kecamatan Musrenbang, HUT-RI & Hari-hari Jadi Kabupaten Pasuruan	Kecamatan Nguling	100%	60.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keagamaan Di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nguling	100%	145.200.000
<i>KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA</i>				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Manaqib	Kecamatan Nguling	100%	145.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KECAMATAN	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Desa	Kecamatan Nguling	100%	12.100.000
<i>FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</i>				
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Kantrantibmas Di wilayah Kecamatan	Kecamatan Nguling	100%	12.100.000
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan	Tersedianya Koordinasi & Pembinaan Antara Kecamatan & desa	Kecamatan Nguling	100%	24.200.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN SUKOREJO				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kecamatan Sukorejo	100%	54.569.790
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Sukorejo	41 Laporan	54.569.790
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	Kecamatan Sukorejo	2 Laporan	36.769.810
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukorejo	39 Laporan	17.799.980
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	Kecamatan Sukorejo	100%	91.596.780
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Sukorejo	6 Laporan	91.596.780
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Sukorejo	6 Laporan	91.596.780



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kecamatan Sukorejo	83%	5.395.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	Kecamatan Sukorejo	70%	5.395.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Sukorejo	4 Laporan	5.395.500
KECAMATAN PASREPAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Pasrepan	15 Desa	31.856.600
koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Pasrepan	3 Laporan	31.856.600



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Pasrepan	1 Laporan	9.215.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Pasrepan	2 Laporan	22.641.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Pasrepan	100%	77.091.500
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Pasrepan	12 Laporan	77.091.500
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Pasrepan	12 Laporan	77.091.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina	Kecamatan Pasrepan	100%	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pasrepan	2 Kegiatan	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pasrepan	4 Kegiatan	
KECAMATAN KEJAYAN				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya nilai SKM Masyarakat	Kecamatan Kejayan	86,60%	145.875.904
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Kecamatan Kejayan	86,60%	145.875.904
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi Sosial Budaya (Hari Jadi Kabupaten Pasuruan)	Kecamatan Kejayan	2 Kegiatan	19.999.800
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelayanan Pemerintahan Kel. Kejayan	Kecamatan Kejayan	12 Bulan	125.876.104
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kejayan	100%	1.263.899.880
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kejayan	83,75%	94.749.800



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan Kejayan	2 Kegiatan	9.999.800
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kec. Kejayan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Kejayan	12 Bulan	84.750.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kejayan	83,75%	1.169.150.080
Pemberdayaan masyarakat di Kel. Kejayan	Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan masyarakat Kel. Kejayan	Kecamatan Kejayan	12 Bulan	279.650.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian Terfasilitasi Yang Sesuai Dengan Kewenangan Kecamatan	Kecamatan Kejayan	100%	9.050.000
Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai SKM Masyarakat	Kecamatan Kejayan	83,75%	9.050.000
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Terlaksanannya Koordinasi Dengan Muspika	Kecamatan Kejayan	1 Kegiatan	9.050.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya Nilai SKM Masyarakat	Kecamatan Kejayan	83,52%	9.050.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kejayan	83,75%	9.050.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kejayan	1 Kegiatan	9.050.000
KECAMATAN WONOREJO				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Wonorejo	100%	34.100.000
koordinansi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Wonorejo		34.100.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Wonorejo	1 Laporan	24.000.000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	1 Laporan	10.100.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Wonorejo	4 Kelompok	40.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan			40.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Wonorejo	12 Laporan	40.000.000
PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	70%	10.112.500
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Wonorejo	1 Laporan	10.112.500
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonorejo	1 Laporan	10.112.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina	Kecamatan Wonorejo	100%	39.930.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonorejo	4 Laporan	39.930.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur Desa yang Dibina (Peserta)	Kecamatan Wonorejo	15 Desa	39.930.000
KECAMATAN PANDAAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan	Kec. Pandaan	100%	417.149.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Kec. Pandaan	100%	396.288.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan forum perencanaan pembangunan yang terlaksana	Kec. Pandaan	1 kali	3.982.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan dan pembinaan yang dilaksanakan	Kec. Pandaan	7 kali	75.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	Kel. Jogosari Kec. Pandaan	5 kali	75.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	Kel. Pandaan Kec. Pandaan	5 kali	75.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	Kel. Kutorejo Kec. Pandaan	5 kali	75.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	Jumlah NPD yang dibuat oleh Kelurahan	Kel. Petungasri Kec. Pandaan	5 kali	75.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi	Kec. Pandaan	100%	20.861.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Manaqib yang terlaksana	Kec. Pandaan	5 kali	20.861.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	Kec. Pandaan	18 Lembaga	1.781.174.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	Kec. Pandaan	100%	27.351.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Kec. Pandaan	6 kali	27.351.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	Kec. Pandaan	100%	1.753.823.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah sarana prasarana yang dibangun kelurahan	Kel. Jogosari Kec. Pandaan	5	340.372.250
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandaan	Jumlah sarana prasarana yang dibangun kelurahan	Kel. Pandaan Kec. Pandaan	5 unit	340.372.250
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah sarana prasarana yang dibangun kelurahan	Kel. Kutorejo Kec. Pandaan	5 unit	340.372.250
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Petungasri	Jumlah sarana prasarana yang dibangun kelurahan	Kel. Petungasri Kec. Pandaan	5 unit	340.372.250
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Kel. Jogosari Kec. Pandaan	5 kali	98.083.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Kel. Pandaan Kec. Pandaan	5 kali	98.083.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Kel. Kutorejo Kec. Pandaan	5 kali	98.083.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Petungasri	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	Kel. Petungasri Kec. Pandaan	5 kali	98.083.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kec. Pandaan	90%	14.868.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kec. Pandaan	100%	2.048.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat evaluasi permasalahan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	Kec. Pandaan	4 kali	2.048.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rasio jumlah kasus penegakan perda yang terfasilitasi sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kec. Pandaan	100%	12.820.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kec. Pandaan	2 kali	2.820.000
KECAMATAN TOSARI				
KECAMATAN PURWOSARI				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Kecamatan Purwosari	85,78	83.424.931
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Purwosari	2 kegiatan	83.424.931
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum	Kecamatan Purwosari	2 Kegiatan	74.324.996
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan	Kecamatan Purwosari	2 Laporan	9.099.935



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	Kecamatan Purwosari	1 organisasi	1.437.187.462
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Purwosari	1	170.269.428
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	170.269.428
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Purwosari	100%	1.266.918.034
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	499.955.320
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	669.150.705
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	97.812.009
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Kecamatan Purwosari	100%	25.591.164



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Kecamatan Purwosari	100%	25.591.164
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	25.591.164
KECAMATAN PURWODADI				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan	Kecamatan Purwodadi	100%	77.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat dalam rangka koordinasi	Kecamatan Purwodadi		77.500.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase penunjang nilai IKM	Kecamatan Purwodadi	9 Kali	47.500.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase penunjang nilai IKM	Kecamatan Purwodadi	2 Kali	30.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	Kecamatan Purwodadi	100%	150.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				150.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase usulan pemb di desa yang disetujui	Kecamatan Purwodadi	1 Kali	30.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase SDM lembaga yang di bina	Kecamatan Purwodadi	13 Lembaga	120.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kecamatan Purwodadi	100%	27.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi yang lakukan bersama Polsek & koramil			27.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan (Penunjang Nilai IKM)	Kecamatan Purwodadi	4 Kali	27.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio jumlah koordinasi yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kecamatan Purwodadi	100%	10.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi sesuai tugas pimpinan di kecamatan			10.500.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase sinergitas pelaksanaan tugas pimpinan di kecamatan	Kecamatan Purwodadi	4 Kali	10.500.000
KECAMATAN LUMBANG				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Lumbang	87,50 Skor	38.500.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		2Sub Kegiatan	38.500.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kecamatan Lumbang	1 Laporan	6.500.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan jumlah peserta Aparatur Desa yang dibina	Kecamatan Lumbang	2 Laporan 85 Peserta	32.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Lumbang	1 Kegiatan	150.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dibina	Kecamatan Lumbang	4 Lembaga	150.000.000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Lumbang	6 Laporan	150.000.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Lumbang	1 Kegiatan	8.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kecamatan Lumbang	100%	8.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kegiatan bersama Muspika dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	Kecamatan Lumbang	4 Laporan	8.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN KRATON				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kecamatan Kraton		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Kraton		51.392.000
Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Kraton	2 Keg	44.269.500
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan yang terlaksana	Kecamatan Kraton	1 Keg	7.122.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Kecamatan Kraton		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kecamatan Kraton		63.503.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Kraton	2 Keg	26.136.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Kraton	1 Keg	37.367.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Kraton		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Kraton		98.780.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi terhadap jumlah Kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	Kecamatan Kraton	4 keg	16.500.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi terhadap jumlah Kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	Kecamatan Kraton	12 keg	82.280.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Kraton		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan Kraton		37.020.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peserta Aparatur Desa yang Dibina	Kecamatan Kraton	1 Keg	8.591.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur Desa yang Dibina	Kecamatan Kraton	3 Keg	28.429.500
KECAMATAN TUTUR				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Tutur	88 Skor	218.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kecamatan Tutur	100%	218.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Tutur	2 Keg	218.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Tutur	100%	137.450.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Tutur	100%	137.450.000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Tutur	4 Keg	137.450.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	Kecamatan Tukur	100%	15.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kantrantibmas Yang Ditangani	Kecamatan Tukur	100%	15.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pantau Wilayah (Patroli)	Kecamatan Tukur	4 Keg	15.000.000
KECAMATAN BEJI				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Beji	15 Desa	525.000.000
koordinansi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Beji	3 Laporan	525.000.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Beji	1 Laporan	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Beji	2 Laporan	500.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Organisasi yang dibina	Kecamatan Beji	100%	2.372.684.577
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Beji	12 Laporan	35.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kecamatan Beji	12 Laporan	35.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Beji	2 Laporan	2.337.684.577
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Beji	2 Laporan	2.015.537.473
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Kecamatan Beji	2 Laporan	322.147.104
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina	Kecamatan Beji	100%	25.000.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Beji	2 Keg	25.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Beji	4 Keg	Rp 25.000.000
KECAMATAN PUSPO				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Usulan Musrenbang dan Kegiatan Pemerintahan Lainnya Yang Terasilitasi	Kecamatan Puspo	100%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				
Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan Puspo	4 Laporan	52.635.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan yang terlaksana	Kecamatan Puspo	1 Laporan	8.415.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan Puspo	100%	
Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Perda Dan Perkada		Kecamatan Puspo		
Koordinasi / Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi terhadap jumlah Kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	Kecamatan Puspo	2 Kegiatan	9.350.000
PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Prosentase Aparatur Desa yang dibina	Kecamatan Puspo	100%	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Jumlah Peserta Aparatur Desa yang Dibina	Kecamatan Puspo	35 Peserts	15.015.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
BAKESBANGPOL				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	5.639.146
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen SAKIP</i>		100%	43.008.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	1 dok	14.128.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kabupaten Pasuruan	52 dok	28.880.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	4.627.443.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Pasuruan	434 org/bln	4.177.443.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kabupaten Pasuruan	192 org/bln	356.400.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan	Kabupaten Pasuruan	192 org/bln	93.600.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	248.356.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Pasuruan	5 Jenis/kali	4.144.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pembelian peralatan rumah tangga	Kabupaten Pasuruan	273 unit	6.766.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian Alat Tulis Kator	Kabupaten Pasuruan	34 jenis/kali	56.586.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Pasuruan	9 jenis/kali	18.039.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian surat kabar	Kabupaten Pasuruan	2.190 eks	8.030.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Kabupaten Pasuruan	480 org	17.640.000
Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Konsultasi	Kab. Pasuruan, Prov. Jatim dan luar Prov. Jatim	180 org/kali	137.151.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100%	362.689.900
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kabupaten Pasuruan		362.689.900



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Kabupaten Pasuruan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	141.399.900
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, internet, air dan listrik	Kabupaten Pasuruan	84 rek/bln	141.399.900
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		100%	216.248.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/ Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	Kabupaten Pasuruan	15 unit	196.104.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Pasuruan	32 unit	20.144.300
Pemeliharaan/Rehabilitai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Kabupaten Pasuruan	1 unit	75.258.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	295.475.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		100%	295.475.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kabupaten Pasuruan	500 org	295.475.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang terfasilitasi		100%	2.823.145.500



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pemantauan situasi politik		100%	2.823.145.500
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik , etika budaya politik dan peningkatan demokrasi	Kabupaten Pasuruan	3000 org	2.823.145.500
	2. Jumlah partai politik yang terfasilitasi		16 parpol	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terfasilitasi		100%	6.237.267.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	6.237.267.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan ormas	Kabupaten Pasuruan	300 org	6.225.517.000
	2. Jumlah Ormas yang terfasilitasi		22 lemb	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Pasuruan yang dimonitor	Kabupaten Pasuruan	116 lemb	11.750.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang terfasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		80%	87.092.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan teknis pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100%	87.092.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	400 org	87.092.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial		100%	4.910.245.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kebijakan teknis pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100%	4.910.245.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat	Kabupaten Pasuruan	800 org	4.888.305.000
	2. Jumlah instansi vertikal yang terfasilitasi		4 lembar	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing dan keamanan wilayah yang dimonitor	Kabupaten Pasuruan		21.940.000
JUMLAH				3,173,221,955,384.34



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah merupakan suatu kondisi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atas penyelenggaraan pemerintahan yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban penyelenggara pemerintahan. Ukuran-ukuran keberhasilan ini selanjutnya didefinisikan menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan ketercapaian suatu kinerja yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menetapkan suatu indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan secara utuh capaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi perangkat daerah serta program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Pencapaian kinerja indikator yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kabupaten Pasuruan tidak dapat lepas dari Indiktor Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi faktor penting dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang tepat sasaran dan berkualitas. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 dan 6.2 berikut ini :

Tabel 6.1.
Capaian IKU Tahun 2019 s/d 2020 dan
Target IKU Tahun 2021 s/d 2022

No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Proyeksi Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Angka pertumbuhan ekonomi	%	5,83	(-2,03)	4,5 – 5,5	5,73 – 6
2	Angka kemiskinan	%	8,68	9,26	9,40	9,25
3	Indeks kesalehan sosial	-	62,40	76,6	62,50	62,60
4	Indeks kesenjangan wilayah (Williamson)	-	0,2583	0,277	0,250	0,245
5	Indeks reformasi birokrasi	-	68 (B)	N/A	66,00	68,00
6	Indeks pembangunan manusia	-	68,29	68,6	69,61	70,30

Sumber : RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2020

Tabel 6.2.
Capaian IKD Tahun 2019 s/d 2020 dan
Target IKU Tahun 2021 s/d 2022

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Prediksi Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
PDRB (Rp)	147.977,000 M	145.592,02 M	147.592,669 M	295.185,338 M
Persentase PMKS	6,11	6,0 %	5,7%	5,2%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,42	6,24%	5,04%	5,01%
Persentase Desa Mandiri	0,59	1,17%	2,05%	3,23%
Aspek Pelayanan Umum				
Nilai SAKIP	75,02 (BB)	76,30 (BB)	81,00 (A)	85,00 (A)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
IKM	84,50 (Baik)	85,75 (Baik0)	83,50 (Baik)	84,0 0 (Baik)
Indeks Profesionalitas ASN	70,2	70,09	72	73
Indeks Kesehatan	76,85	77,27	76,94	76,98
Indeks Pendidikan	57,89	59,42	60,05	61,01
Indeks Daya Beli	70,94	70,63	72,99	73,97
Indeks Pemberdayaan Gender	90,68	90,68	91,07	91,22
Persentase Penegakan Perda	91,24%	92,13%	93%	94%
Indeks Permukiman Layak Huni	71,46	78,70	85,60	92,50
Indeks Ketahanan Pangan	69,38	69,38%	68	68,5



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Prediksi Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022
Indeks Ketahanan Air	77,66	77,68	77,68	77,68
Aspek Daya Saing				
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	2.687.987	1.431.668	2.900.400	3.007.700
Jumlah Omset Usaha Mikro Dan Koperasi (Rp. 000)	1.697.507.779	1.718.018.068,38	1.348.471.000	1.366.621.000
Jumlah Konflik Sara	0	0	0	0
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,38	62,547	61,34	62,65
Indeks Resiko Bencana	179,39	155,85	208	206
Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,20	1,30	1,35	1,41
Persentase Aksesibilitas Transportasi	7,18%	7,91%	12,1%	13,04%
Rasio Pemuda Berprestasi	11,64	1,17	30	35

Sumber : RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2020



Tabel 6.3.
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2018 s/d 2020

Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.1 DINAS PENDIDIKAN				
Indeks Pendidikan	Nilai	56,93	57,89	59,42
Nilai Sakip OPD	Nilai	N/A	74,35	80,05
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,83	8,02	8,02
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,30	12,31	12,41
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
2.1 DINAS KESEHATAN				
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,01	70,17	70,23
Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KH	5,37	5,33	4,40
Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	111,32	83,61	76,34
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,029
Persentase Rumah Tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	47,37	51,24	51,50
Persentase Desa Siaga	%	100	100	100
Persentase Akreditasi Puskesmas dan RSUD Starata Madya	%	90	94	94
Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	82,08	82,73	82,75



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
2.2. RSUD BANGIL				
Nilai Akreditasi RS	Nilai	80	83,62	87,56
IKM terhadap Layanan RS	Nilai	78,34	91,52	85,19
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1 DINAS SUMBER PU SDA DAN TATA RUANG				
3.1.1 SUB URUSAN PEKERJAAN UMUM				
Indeks Ketahanan Air	%	77,68	77,68	77,65
Persentase Ketersediaan dan Pemenuhan Air Baku	%	52,20	52,37	52,58
3.1.2 SUB URUSAN PENATAAN RUANG				
Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	%	55	55	60
4.2 DINAS PU BINA MARGA				
4.2.1 SUB URUSAN PEKERJAAN UMUM				
Indeks Aksesibilitas Wilayah	N/A	1,19	1,20	1,30
Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	76	79,50	81,23
Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik	%	90,00	91,15	91,60
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
4.1 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Persentase Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	N/A	71,46	78.70
Persentase Ketersediaan Sarana	%	N/A	72.46	78.39



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Prasarana Dasar Permukiman				
Persentase Rumah Layak Huni	%	26,71	28.11	32.38
Persentase Bangunan Gedung yang terstandarisasi SLF	%	N/A	0.002	0.005
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
Persentase Palanggaran Perda	%	N/A	80,19	73,82
Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	90,39	91,24	92,13
Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100
5.2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
Indeks Resiko Bencana	N/A	214	180.34	156.26
Persentase Desa Tangguh Bencana berkategori Utama	%	6,25	7.50%	12.50%
Persentase Korban Bencana tertangani	%	100	100	100
Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana akibat Dampak Bencana	%	100	100	100
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
6.1 DINAS SOSIAL				
Persentase PMKS	%	6,18	6,18	5,41
Persentase Penanganan PMKS	%	99,99	99,93	100



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1.1 DINAS TENAGA KERJA				
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,11	5,42	6,24
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	70,03	70,05	43,4
Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi	%	95,83	68,75	75
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.1 DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	90,41	90,68	90,68
Persentase Anggaran yang Responsif Gender	%	0,0087	3,16	18,31
Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak	%	N/A	0,0067	0,0063
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
3.1 DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN				
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	N/A	69,38	68,78
Rasio Ketersediaan Pangan	Rasio	2,52	2,53	2,58
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
Persentase Pengelolaan Administrasi	%	100	100	100



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Pertanahan sesuai Ketentuan yang berlaku				
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
5.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,10	57,38	62,547
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	50,00	50,00	52,14
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	82,25	78,83	82,22
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	43,57	43,89	44,04
Nilai TPA (Program Adipura)	Poin	-	78	79
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
6.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,78	85,97	N/A
Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	93,08	93,09	93,11
Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KK	%	98,05	98,05	98,10
Prosentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	%	69,38	72	72
Prosentase Penerbitan Akte Perkawinan	%	100	100	100
Prosentase Penerbitan Akte Kematian	%	100	100	100
7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
7.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
Prosentase Desa Mandiri	%	N/A	0,59	1,17
Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) mandiri	%	N/A	10,43	29,76
Prosentase Kelembagaan Masyarakat Desa (LPM) yang Aktif	%	N/A	10,85	17,89
Prosentase Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	N/A	14,63	18,75
8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
8.1 DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	%	73,12	75,14	74,91
Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	%	40,11	39,72	39,72
9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
9.1 DINAS PERHUBUNGAN				
Prosentase (%) Wilayah yang terkoneksi Angkutan Umum	%	N/A	7,18	7,91
Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan	%	N/A	11,16	-19,44
10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
IKM Terhadap Pelayanan dan	Point	N/A	10	20



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Penyebarluasan Informasi				
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (Penilaian KemenPAN-RB)	Point	2,48	2,73	3,13
Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	%	N/A	83,77	84,74
Persentase OPD yang menerapkan e-Gov	%	35	40	45
11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
11.1 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi (Rp.)	Rp. (000)	1.295.048.000	1.697.507.779.000	1.718.018.068.385
Jumlah Koperasi yang berkualitas	Unit	49	179	150
Persentase Masyarakat yang berkoperasi	%	9,29	12,87	13,53
Jumlah Peningkatan Omset Usaha Mikro dan Koperasi (Rp.)	Rp. (000)	17.453.000	392.578.779.000	20.510.289.389
12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,73	84,93	83,05
Jumlah Nilai Investasi yang terealisasi	T	9,66	18,94	10,03
13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
13.1 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Rasio Pemuda berprestasi	Perbandingan	N/A	N/A	1;1,2
Persentase Kualitas Organisasi Pemuda	%	N/A	82	82
Persentase Pemuda Mandiri	%	13	13	5
Jumlah Atlit berprestasi	Atlit	36	42	0
Persentase Olahraga Pemasalan	%	N/A	42	0
14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
14.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Persentase Pemenuhan data Statistik Daerah	%	N/A	80	80
15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
15.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Persentase Pemenuhan Standar Keamanan Informasi	%	N/A	100	40
16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
16.1 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi	Jenis	14	15	16
Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi	Kelompok	N/A	420	422
17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
17.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Nilai	83 (Baik)	82.75 (Baik)	83.33 (Baik)



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	329.800	351.450	317432
Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	N/A	62.15	79.67
18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
18.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				
Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	62,15 (Cukup)	70 (Cukup)	79,67 (Sangat Baik)
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.1 DINAS PERIKANAN				
PDRB Sub Sector Perikanan	Milyar Rupiah	729,38	782,31	802,11
Persentase Produksi Perikanan Persentase Produksi Usaha	%	3% (40.800,34 ton)	5,59% (43.084,52 ton)	3,43
Perikanan yang Mandiri	%	0,80	3,35	4,43
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
2.1 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.533.447	2.687.987	1.431.668
Jumlah ODTW yang terstandarisasi	ODTW	N/A	7	4
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	N/A	100	N/A
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.1 DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN				
Peningkatan Produksi Peternakan				
- Daging	%	- 0,5	2,14	0,18
- Telur	%	- 3,06	3,15	0,18



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
- Susu	%	- 3,09	2,15	0,02
3.2 DINAS PERTANIAN				
PDRB Subsektor Pertanian				
ADHB	Rp. Juta	4.270.836,7	4.325.856,18	2.990.292,1
ADHK	Rp. Juta	2.766.939,5	2.740.506,41	1.888.370,4
PDRB Sub Sector Perkebunan				
ADHB	Rp. Juta	1.460.384,1	1.518.458,15	1.553.596,7
ADHK	Rp. Juta	1.032.851,6	1.067.208,43	1.075.300,4
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	N/A	4,19	2,096%
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	N/A	17,59	8,09%
Peningkatan Produksi Tanaman Buah Tahunan	%	N/A	0,62	0,48%
Peningkatan Produksi Tanaman Sayur	%	N/A	1,16	0,56%
Peningkatan Produksi Tanaman Hias	%	N/A	1,16	0,36%
Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	N/A	0,82	0,99%
Persentase Produk Hasil Pertanian/Agribisnis yang terstandarisasi	%	28,23%	28,57%	28,57%
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
4.1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Indeks Daya Beli				
Nilai Transaksi Perdagangan	Rp.	1.938.102.000	1.964.493.500	4.192.630.500
Persentase Alat Ukur yang terstandarisasi	%	80,25	90,55	75,31
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
5.1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
PDRB Sektor Industri	%	6,72	6,46	6,19
Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. Juta	77.472.236,7	84.142.842,2	67.961.329,96
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
6.1 DINAS TENAGA KERJA				
Jumlah Calon Transmigran yang diberangkatkan	Orang	4	4	0
Jumlah Calon Transmigran yang di berikan Penyuluhan	Orang	480	480	255
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1. UNSUR SEKRETARIAT DAERAH				
1.1 SEKRETARIAT DAERAH				
Nilai SAKIP	Nilai	72,7 (BB)	80,54 (A)	83,70 (A)
Hasil Evaluasi atas LPPD	Nilai	3,4589 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A
Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja Sangat Baik/Nilai SAKIP Minimal BB	%	23,21	35,71	58,92
Persentase OPD yang ber-IKM Minimal Baik	%	44,64	100	83,97



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Pesentase Produk Kebijakan Daerah yang diterbitkan sesuai dengan Kebutuhan Daerah	%	85,84	97,58	98
Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah	%	100	98,24	92,19
2. UNSUR SEKRETARIAN DPRD				
2.1 SEKRETARIAT DPRD				
IKM / SKM Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	88,51	88,75	92,19
Prosentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang Berhasil difasilitasi	%	100	100	100
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1. UNSUR PERENCANAAN				
1.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Nilai SAKIP Perencanaan	Nilai	22,75	23,62	26,63
Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik	%	N/A	85	89
2. UNSUR KEUANGAN				
2.1 BADAN KEUANGAN DAERAH				



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	5,37	5,96	7,56
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100
3. UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
3.1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai	N/A	70.2	70.09
Persentase pelanggaran Disiplin	%	0.18	0.18	0.16
Persentase Peningkatan Kinerja ASN dalam Penilaian SKP	%	99	99	99
4. UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
4.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	%	80	100	100
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1. INSPEKTORAT				
Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	N/A	3,52	3,62
Nilai Sakip OPD (Inspektorat)	Skor	70,54	72,34	81,11
G. UNSUR KEWILAYAHAN				
1. PURWODADI				
Nilai SKM	Nilai	80 (Baik)	80 (Baik)	87 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	60,62	60,78	68,03
2. TUTUR				
Nilai SKM	Nilai	77,56 (Baik)	80,60 (Baik)	80,60 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,91	62,1	67,06
3. PUSPO				
Nilai SKM	Nilai	82 (Baik)	83 (Baik)	84,12 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	62	65,35	69,70
4. TOSARI				
Nilai SKM	Nilai	87,36 (Baik)	87,36 (Baik)	88,97 (Sangat Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	60,21	60,53	67,68
5. LUMBANG				
Nilai SKM	Nilai	83 (Baik)	86,8 (Baik)	86,89 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	63,31	63,57	70,63
6. PASREPAN				
Nilai SKM	Nilai	85 (Baik)	86,05 (Baik)	86,5 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	60,04	61,77	66,44
7. KEJAYAN				
Nilai SKM	Nilai	82,36 (Baik)	83,25 (Baik)	83 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,58	61,77	66,03
8. WONOREJO				
Nilai SKM	Nilai	73,25	81,91	80,31



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
		(Baik)	(Baik)	(Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	60,2	61,16	63,82
9. PURWOSARI				
Nilai SKM	Nilai	80,79 (Baik)	87 (Baik)	81,42 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,64	62,33	62,68
10. PRIGEN				
Nilai SKM	Nilai	84,16 (Baik)	87,16 (Baik)	87,39 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	60,02	60,02	64,89
11. SUKOREJO				
Nilai SKM	Nilai	86,93 (Baik)	88,03 (Baik)	89,34 (Sangat Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	63,70	68,14	70,94
12. PANDAAN				
Nilai SKM	Nilai	85,14 (Baik)	86,54 (Baik)	86,76 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	64,18	60,34	70,66
13. GEMPOL				
Nilai SKM	Nilai	84,16 (Baik)	85,09 (Baik)	84,25 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,88	63,98	64,77
14. BEJI				
Nilai SKM	Nilai	85,81 (Baik)	85,81 (Baik)	87,50 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,36	62,18	62,55
15. BANGIL				
Nilai SKM	Nilai	75 (Baik)	87 (Baik)	87,28 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,93	63,36	68,88
16. REMBANG				
Nilai SKM	Nilai	85,97 (Baik)	85,97 (Baik)	80,06 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,69	60,17	60,44
17. KRATON				
Nilai SKM	Nilai	87,61	91,37	82,70



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
		(Baik)	(Sangat Baik)	(Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	62,72	63,16	67,43
18. POHJENTREK				
Nilai SKM	Nilai	86,8 (Baik)	86,97 (Baik)	86,94 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	60,2	63,44	64
19. GONDANGWETAN				
Nilai SKM	Nilai	82 (Baik)	85 (Baik)	88,55 (Sangat Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	67,97	68,2	72,48
20. REJOSO				
Nilai SKM	Nilai	78,57 (Baik)	81,58 (Baik)	83,31 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	65,17	63,61	67,41
21. WINONGAN				
Nilai SKM	Nilai	85 (Baik)	86,67 (Baik)	86,91 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	69	61,24	70,85
22. GRATI				
Nilai SKM	Nilai	79,47 (Baik)	90,22 (Sangat Baik)	90,47 (Sangat Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	63,02	63,28	67,04
23. LEKOK				
Nilai SKM	Nilai	85 (Baik)	82,71 (Baik)	81,67 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	61,00	61,33	64,52
24. NGULING				
Nilai SKM	Nilai	84,75 (Baik)	84,97 (Baik)	84 (Baik)
Nilai SAKIP	Nilai	62,06	64,83	70,73
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Jumlah Konflik SARA	Kali	0	0	0
Persentase Potensi	%	N/A	100	100



Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020
Konflik yang Dapat dicegah				
Persentase Konflik yang Dapat diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat	%	N/A	100	100

Sumber : LKPJ Tahun 2019 dan LKPJ Tahun 2020

Adanya pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2019 berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global maupun nasional dan regional. Kondisi ini berpengaruh capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2020, beberapa indikator utama yang berkaitan dengan ekonomi tidak mencapai target, dan ada beberapa indikator yang mencapai target. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2021 dan juga perencanaan pembangunan serta target kinerja tahun 2022.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Pasuruan masih dirasakan dampak dari pandemi Covid-19 karena masih adanya pembatasan aktifitas masyarakat, ditutupnya tempat-tempat tujuan wisata yang berdampak juga terhadap sektor hotel dan restoran, serta omset usaha kecil dan ekonomi kreatif. Di samping itu, pembatasan aktifitas dan pemberlakuan PSBB maupun lock down di beberapa wilayah dan Negara, berdampak pada melambatnya perdagangan antar wilayah/Negara dan menurunnya permintaan, yang mengakibatkan terjadinya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan, penurunan jam kerja karyawan, serta banyak industri / usaha yang gulung tikar.



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

BAB VII

PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tahun keempat. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2022, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022;
2. Terhadap program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan sepanjang merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat *specific grant* atau dengan peruntukan khusus atau merupakan instruksi/permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang, merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah



- Pusat/Provinsi, dapat diproses dalam penyusunan Rancangan APBD;
3. Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD 2022 merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan sebagai pedoman penghitungan pagu indikatif belanja tahun 2022;
 4. Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2022 merupakan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 5. Kepastian sumber dana tiap-tiap usulan program/kegiatan yang bersifat *block grant* mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 6. Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022, Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten pasuruan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;
 7. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, masyarakat maupun sumber-sumber pembiayaannlainnya perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022.

7.2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:



1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang hasilnya dibahas lebih lanjut bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan guna mendapatkan kesepakatan bersama; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 agar ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dijadikan pedoman perumusan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.

7.3. Lain-lain

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini, beberapa urusan hendaknya menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pada perencanaan kerja dan anggaran pada Perangkat Daerah terkait. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah :

1. Urusan Pendidikan
 - a. Peningkatan IPM melalui peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
 - b. Peningkatan APK PAUD, APM SD dan SMP melalui pemenuhan SPM pendidikan, peningkatan kualiatas guru dan tenaga kependidikan.
 - c. Pemerataan dan penyebaran guru.
2. Urusan Kesehatan
 - a. Memperkuat sistem kesehatan dengan menetapkan 8 (delapan) area reformasi sistem kesehatan.



- b. Agar diperhatikan terkait program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
 - c. Percepatan penurunan angka kematian ibu.
 - d. Meningkatkan gerakan hidup sehat.
 - e. Percepatan penurunan stunting.
 - f. Percepatan peningkatan akses sanitasi dasar yang aman dan layak.
3. Urusan Perindustrian
- Pemerintah Kabupaten agar menyusun Rencana Pembangunan Industri, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.
4. Perencanaan Penganggaran tahun 2022 agar memperhatikan dan memprioritaskan :
- a. Penanganan pandemi covid sesuai dengan kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi Covid.
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan pelayanan dasar wajib.
 - c. Pengalokasian anggaran urusan bidang pendidikan minimal 20%.
 - d. Pengalokasian anggaran urusan kesehatan minimal 5%.
 - e. Anggaran untuk desa yang bersumber dari dana APBN sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H.M. IRSYAD YUSUF



Pemerintah
Kabupaten Pasuruan